SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

(2) RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. Program Strategis Nasional; dan
   e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026.

(3) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAH DAERAH;

BAB III

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA DAN PPAS

Pasal 4

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 7

Uraian RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2027 disusun dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Dengan demikian

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Substansi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun dengan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi: (1) pendekatan teknokratik, dimana penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) pendekatan partisipatif, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah; (3) pendekatan politis, dimana dalam penyusunan RKPD memiliki keselarasan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD; serta (4) pendekatan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Selain hal di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 juga berorientasi kepada substansi dengan menggunakan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 mengacu pada pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan beberapa tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, serta penetapan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perumusan RKPD yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) masing-masing. Seluruh tahapan yang dilaksanakan pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2027 juga berpedoman pada arah kebijakan nasional/program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Dalam konstelasi regional Provinsi Sumatera Utara, isu strategis pemantapan sistem logistik dan interkoneksi konektivitas antardaerah menjadi faktor determinan yang berdampak langsung

terhadap stabilitas ekonomi Kabupaten Dairi. Sebagai salah satu lumbung pertanian provinsi, Kabupaten Dairi kerap menghadapi tantangan struktural berupa tingginya biaya logistik dan kerentanan rantai pasok akibat belum optimalnya integrasi infrastruktur jalan penghubung menuju pusat perpindahan komoditas utama dan pasar regional di Medan maupun wilayah pesisir. Ketimpangan aksesibilitas ini tidak hanya memicu fluktuasi harga pascapanen yang merugikan petani lokal, tetapi juga menghambat efisiensi distribusi input pertanian. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pembangunan koridor logistik Sumatera Utara sangat krusial bagi Dairi untuk mempercepat arus distribusi hasil pertanian, memangkas biaya transportasi, dan memperkuat posisi tawar daerah dalam rantai nilai (*value chain*) agribisnis regional.

Posisi strategis Kabupaten Dairi sebagai salah satu daerah pilar penyangga utama Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba maupun sebagai generator koridor logistik pertanian regional yang menopang ketahanan pangan. Guna mengoptimalkan potensi interkoneksi tersebut di tengah kompleksitas dinamika pembangunan modern, integrasi teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan yang mutlak diterapkan. Melalui implementasi sistem berbasis digital yang adaptif dan terintegrasi, proses pemantauan capaian kinerja daerah tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan diotomatisasi untuk menghasilkan evaluasi berbasis data aktual (real-time) guna menjamin ketepatan pengambilan keputusan, transparansi kebijakan, serta akselerasi pencapaian target strategis daerah secara berkelanjutan.

Penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai amanat undang–undang. Dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, integratif, realisitis, akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dengan *leading sectornya* Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah menyusun dan menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang mana RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Rencana Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025 - 2029 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diselaraskan dengan landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah yaitu Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

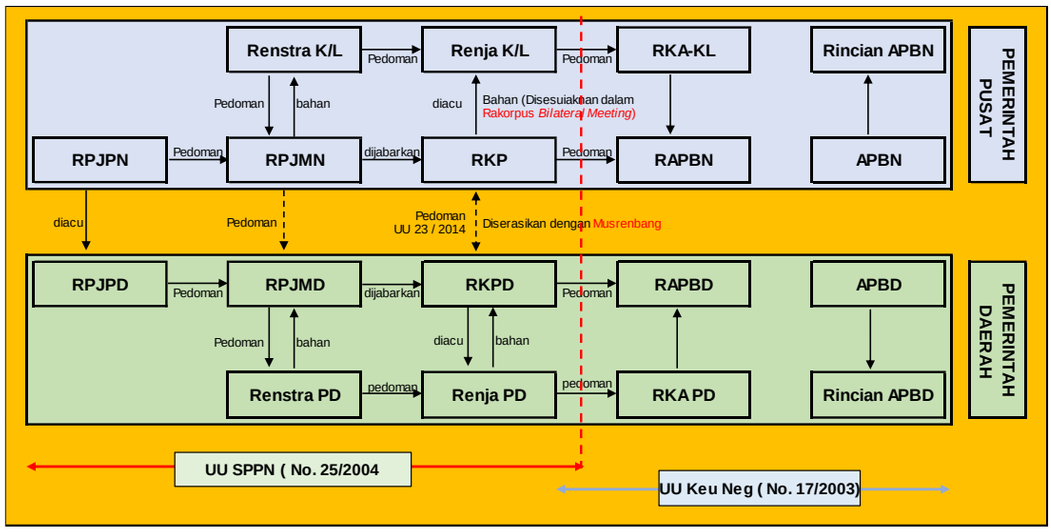

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Hubungan dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027

RKPD Kabupaten Dairi 2027 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027 yang meliputi : sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program priorita, program hasil terbaik cepat (PHTC) pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

b. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target indikator kinerja tahun 2027.

c. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang digunakan dalam penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Keselarasan

dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2027.

d. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2027

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi (R-APBD) Tahun 2027. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBD Kabupaten Dairi Tahun 2027 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027.

e. Hubungan dengan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Dairi sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

f. Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

g. Hubungan dengan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2027;
2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027;
3. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;
8. Menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027;
9. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun dengan mempedomani sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahunan.

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km^2 atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/ kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2/ sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			**169**	**1.927,80**	**100,00**

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2025

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2. 1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak yang cukup strategis, yakni dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksessibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter diatas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

Topografi tersebut memengaruhi daya dukung untuk pertanian dan perkebunan, namun membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim terhadap risiko bencana longsor dan banjir.

Kabupaten Dairi didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran.

Tabel 2.2
Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROM BAK	BERGELOM BANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo[1)]	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu[1)]	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan[1)]	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan[2)]	-	-	-	-	-	-	956
7.	SilimaPunggapungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira[3)]	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu[4)]	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir[4)]	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember[5)]	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir[5)]	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025.

Keterangan:[1)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; [2)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; [3)] Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Punggapungga; [4)] Masih bergabung dengan

2.1.1.3. Geologi

Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan

berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Diatas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmppt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

2.1.1.4. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

   Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

   - WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
   - WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2.3 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan diatas permukaan tanah *(surface run off).* Di antara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km^2.

3. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M^3 /Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025.

2.1.1.5. Klimatologi

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979),* pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

   Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.
2. Iklim C1

   Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.
3. Iklim D1

   Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha. Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91

persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(Persen)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		**192.789,45**	**100**

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersedian lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam memengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Dairi 2014-2034 terdapat banyak potensi sumber daya alam yaitu :

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
2. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.

3. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Prospek hortikultura akan semakin baik, tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

2. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, kakao dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
   a. Subsistem Hulu *(up stream):* sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
   b. Subsistem Usaha Tani *(on farm):* produksi pertanian primer (budidaya).
   c. Subsistem Hilir *(down stream):* pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
   d. Subsistem Kelembagaan *(supporting institution):* perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

3. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt). Sedangkan pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

Program yang dikembangkan untuk perwujudan energi peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu di beberapa kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Siempat Nempu Hulu. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau.

2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian lokal.

4. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan.

Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	**Budidaya**		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	**Perairan**		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		**1.824**	**1.426,8**

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi: Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

5. Pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga, Tanah Pinem, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng		Tereka	
3.	Perak		Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M^3
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	• Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2.8
Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitan, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

6. Pariwisata

Jenis Pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari Pariwisata Alam dan Pariwisata Budaya:

➢ Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata,

taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

- Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2.9
Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/ Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pondom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Adapun program yang diperlukan untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
   b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
   c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek–obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
   b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
   c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Potensi bencana di Kabupaten Dairi terdiri dari Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuefaksi dan Tanah Longsor (KRB Kab. Dairi, 2025-2029)

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi

dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2015 – 2024, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tanah Longsor. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015-2024

NO	JENIS BENCANA	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan Rumah		
			Meniggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Berat	Sedang	Ringan
1	Banjir	6	6	1	4	392	95	18	2	67
2	Cuaca Ekstrem	3	0	0	7	5	0	5	0	28
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kekeringan	3	0	0	0	645	0	5	12	129
5	Tanah Longsor	5	9	3	12	42	0	4	0	4
Jumlah		20	15	4	23	1.034	95	32	14	228

Sumber: KRB Kabupaten Dairi 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kejadian yang tercacat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Dairi serta DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) terdapat bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Terlihat bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2015-2024 yaitu sebanyak 5 kali, yang mana kejadian tersebut berdampak terhadap Masyarakat dan pemukiman Masyarakat.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				
			KELOMPOK RENTAN				KELAS
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS	
1	Banjir	8.818	105	1.886	5.124	11	Tinggi
2	Banjir Bandang	7.307	105	1.625	4.322	9	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	216.402	111	46.590	128.255	576	Tinggi
4	Gempa Bumi	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
7	Likuefaksi	494	103	114	298	4	Tinggi
8	Tanah longsor	24.904	120	5.645	17.785	96	Sedang
MULTI BAHAYA		329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan per jenis bahaya berada pada kelas tinggi untuk semua jenis bencana yang berpotensi di Kabupaten Dairi, terkecuali bencana likuefakasi yang berada pada kelas sedang. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan hanya terjadi di kawasan non-pemukiman warga.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA	KERUGIAN (JUTA RUPIAH)						KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KELAS FISIK	KERUGIAN EKONOMI	KELAS EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS KERUGIAN	LUAS	KELAS
Banjir	20.719,60	Tinggi	11.603,33	Tinggi	32.322,93	Tinggi	340	Sedang
Banjir Bandang	38.277,53	Tinggi	50.778,60	Tinggi	89.056,10	Tinggi	1.079	Tinggi
Cuaca ekstrim	1.247.948,26	Tinggi	554.326,35	Tinggi	1.802.274,62	Tinggi	-	-
Gempa Bumi	3.955.337,03	Tinggi	1.563.014,91	Tinggi	5.518.351,94	Tinggi	-	-
Kebakaran hutan dan lahan	-	-	737.601,94	Tinggi	737.601,94	Sedang	18.696	Tinggi
Kekeringan	-	-	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah
Likuefaksi	18.114,82	Tinggi	333,34	Tinggi	18.448,17	Tinggi	12	Rendah
Tanah longsor	205.142,10	Tinggi	375.521,35	Tinggi	580.663,45	Tinggi	52.854	Tinggi
Multi	3.958.134,78	Tinggi	1.571.584,45	Tinggi	5.529.719,23	Tinggi	75.766	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kabupaten Dairi berada pada kelas kerugian rendah, sedang dan tinggi. Total perkiraan jumlah kerugian terbanyak adalah bencana gempabumi sedangkan kerugian terkecil untuk jenis bencana likuefaksi. Jika dilihat dari kelas kerusakan lingkungan tergolong pada kelas rendah, sedanf dan tinggi dimana potensi kerusakan lingkungan terbesar untuk jenis bencana longsor.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerentanan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Multi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kelas kerentanan sedang dan tinggi. Untuk potensi bahaya yang tergolong kelas kerentanan sedang yaitu bencana banjir, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Sedangkan potensi bahaya tergolong kelas kerentanan tinggi adalah bencana banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan gempa bumi.

2.1.5. Kondisi Umum Demografi

Demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Demografi atau kependudukan memiliki urgensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dengan mengetahui kondisi demografi suatu daerah, dapat membantu merumuskan yang berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri, pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah 336.574 jiwa, terdiri dari 167.808 jiwa penduduk laki-laki (49,86%) dan 168.766 jiwa penduduk perempuan (50,14%).

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 99,43 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 hingga 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2025, terdapat sembilan kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Parbuluan, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara enam kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen,yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.14
Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio JK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	28.690	29.191	57.881	98,28
2	Sumbul	24.785	24.672	49.457	100,46
3	Tigalingga	12.745	13.221	25.966	96,40
4	Siempat Nempu	10.717	10.862	21.579	98,67
5	Silima Punggapungga	7.831	8.113	15.944	96,52
6	Tanah Pinem	12.251	12.166	24.417	100,70
7	Siempat Nempu Hulu	10.969	10.922	21.891	100,43
8	Siempat Nempu Hilir	6.373	6.293	12.666	101,27
9	Pegagan Hilir	9.541	9.459	19.000	100,87
10	Parbuluan	14.406	14.313	28.719	100,65
11	Lae Parira	7.885	8.163	16.048	96,59
12	Gunung Sitember	5.709	5.681	11.390	100,49
13	Berampu	5.002	4.841	9.843	103,33
14	Silahisabungan	3.107	3.138	6.245	99,01
15	Sitinjo	7.797	7.731	15.528	100,85
Jumlah		167.808	168.766	336.574	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri 2025, Semester II

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 815,23 jiwa/km^2. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari

Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dairi Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km²)	%	
1	Sidikalang	57.881	70,67	17,43	819,03
2	Sumbul	49.457	88,35	14,47	559,78
3	Tigalingga	25.966	77	7,76	337,22
4	Siempat Nempu	21.579	155,33	6,47	138,92
5	Silima Punggapungga	15.944	93,93	4,73	169,74
6	Tanah Pinem	24.417	53,15	7,43	459,40
7	Siempat Nempu Hulu	21.891	235,4	6,44	92,99
8	Siempat Nempu Hilir	12.666	42,75	3,8	296,28
9	Pegagan Hilir	19.000	75,62	5,56	251,26
10	Parbuluan	28.719	60,15	8,45	477,46
11	Lae Parira	16.048	105,62	4,77	151,94
12	Gunung Sitember	11.390	40,85	3,39	278,82
13	Berampu	9.843	192,58	2,88	51,11
14	Silahisabungan	6.245	439,4	1,82	14,21
15	Sitinjo	15.528	197	4,69	78,82
Jumlah		**336.574**	**1.927,80**	**100**	**174,59**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri 2025, Semester II, diolah

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Tabel 2.16
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
1	75 ke atas	2.819	6.094	8.913	46,26%
2	70-74	2.710	4.483	7.193	60,45%
3	65-69	4.532	6.598	11.130	68,69%
4	60-64	5.528	7.096	12.624	77,90%
5	55-59	7.073	8.028	15.101	88,10%
6	50-54	8.381	8.546	16.927	98,07%
7	45-49	10.523	10.021	20.544	105,01%
8	40-44	11.313	10.621	21.934	106,52%
9	35-39	12.016	10.811	22.827	111,15%
10	30-34	12.088	10.829	22.917	111,63%
11	25-29	14.114	13.247	27.361	106,54%
12	20-24	16.140	15.724	31.864	102,65%
13	15-19	17.778	17.054	34.832	104,25%
14	Okt-14	17.938	16.568	34.506	108,27%
15	05-Sep	15.279	14.143	29.422	108,03%
16	0-4	9.576	8.903	18.479	107,56%
	Jumlah	**167.808**	**168.766**	**336.574**	**99,43%**

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri 2025, Semester II

Tabel 2.16 di atas menunjukkan bahwa puncak tertinggi berada pada kelompok usia 15–19 tahun dengan jumlah mencapai 34.832 jiwa. Kondisi ini mencerminkan sedang atau akan memasuki era bonus demografi yang sangat melimpah, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh melampaui kelompok usia non-produktif. Fenomena ini merupakan modalitas ekonomi yang luar biasa sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja yang luas, perluasan investasi, dan peningkatan kualitas pendidikan agar lonjakan angkatan kerja muda ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan tidak menjadi beban sosial (pengangguran).

Terdapat indikasi perlambatan pertumbuhan penduduk baru yang terlihat sangat jelas pada kelompok usia terbawah. Jumlah balita usia 0–4 tahun tercatat hanya sebesar 18.479 jiwa, menyusut tajam jika dibandingkan dengan kelompok usia di atasnya seperti usia 5–9 tahun yang mencapai 29.422 jiwa, serta usia 10–14 tahun yang menyentuh 34.506 jiwa. Penurunan ini umumnya dipengaruhi oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), meningkatnya kesadaran pasangan muda terhadap perencanaan keluarga, serta pergeseran gaya hidup urban. Tren penurunan ini akan menjadi beban penyediaan fasilitas dasar bagi anak-anak (seperti posyandu

dan sekolah dasar) yang cenderung melandai dalam beberapa tahun ke depan, namun menuntut pergeseran fokus ke arah peningkatan kualitas hidup anak (human capital development).

Rasio Jenis Kelamin (Rasio JK) menunjukkan pola transisi yang sangat unik dan berbanding terbalik seiring bertambahnya usia penduduk. Pada usia anak-anak hingga dewasa muda (0 hingga 49 tahun), Rasio JK secara konsisten berada di atas 100% (tertinggi pada usia 30–34 tahun sebesar 111,63%), yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan akibat dari hukum alam biologis di mana angka kelahiran bayi laki-laki cenderung sedikit lebih tinggi. Namun, kondisi ini berbalik secara ekstrem mulai usia 50 tahun ke atas, di mana Rasio JK merosot pada kelompok usia 75 tahun ke atas yang hanya sebesar 46,26% yakni 2.819 laki-laki berbanding 6.094 perempuan. Rasio usia ini disebabkan oleh tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan serta kecenderungan tingkat mortalitas (kematian) usia dewasa yang lebih cepat pada laki-laki akibat faktor risiko pekerjaan, gaya hidup, maupun penyakit degeneratif.

Meskipun jumlah total lansia saat ini relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia produktif, tren ketimpangan gender pada populasi lansia menuntut strategi perencanaan jaminan sosial yang spesifik. Dominasi jumlah perempuan yang masif pada kelompok lansia terutama di atas 60 tahun memerlukan perhatian khusus terkait program perlindungan sosial ramah lansia, layanan kesehatan geriatri yang inklusif, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas untuk lansia perempuan.

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Jenis Kelamin

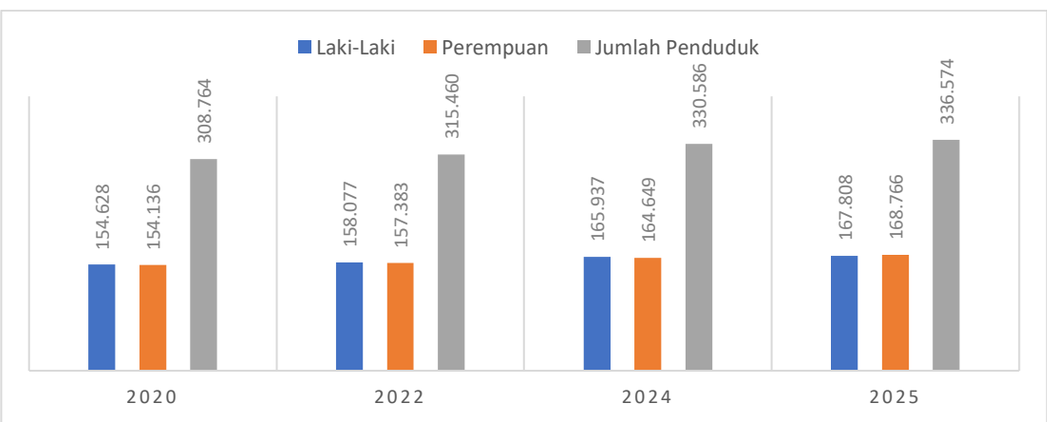

Sumber: BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Dari tahun 2020 hingga 2025, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami penambahan setiap periode. Rata-rata penambahan jumlah penduduk pertahun sebesar 2,92 persen dengan komposisi penambahan penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan. Komposisi penduduk pada tahun 2020 hingga 2025 penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda dengan rentang 100,44-100,78 persen dari tahun 2020 hingga 2025.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju PDRB antara Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola pergerakan yang sangat beriringan dengan fluktuasi periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, Kabupaten Dairi mencatatkan laju PDRB sebesar 5,04%, sedikit unggul di atas performa rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 5,01%. Namun, pada tahun 2024 posisi ini berbalik di mana pertumbuhan Kabupaten Dairi melandai ke tingkat 4,97%, sementara Sumatera Utara sedikit menguat ke posisi 5,03%. Memasuki tahun 2025, kedua wilayah secara kompak mengalami perlambatan ekonomi makro yang cukup signifikan, di mana laju PDRB Dairi turun ke level 4,52% dan Sumatera Utara berada pada angka 4,53%. Secara keseluruhan, kedekatan angka-angka pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Dairi memiliki keterikatan yang sangat kuat terhadap dinamika serta kebijakan ekonomi makro regional di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2023-2025
(Persen)

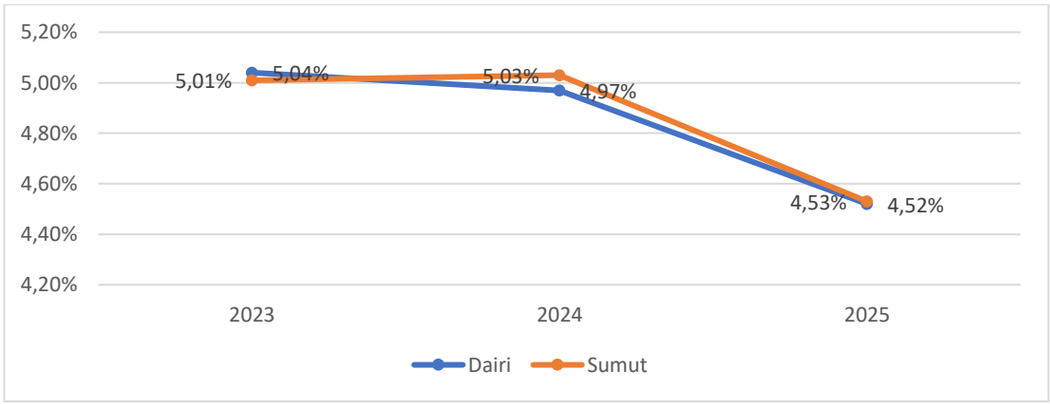

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi adalah dengan melakukan hilirisasi sektor pertanian berbasis komoditas unggulan daerah (seperti kopi Sidikalang, jagung, dan hortikultura) melalui penyediaan insentif investasi bagi industri pengolahan (manufaktur skala kecil-menengah) serta pemanfaatan teknologi pertanian modern (smart farming). Langkah ini diintegrasikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan guna memangkas biaya logistik ke pasar regional Sumatera Utara, optimalisasi pembiayaan pelaku UMKM melalui penguatan peran Bank Daerah, serta peningkatan kapasitas angkatan kerja muda yang melimpah (bonus demografi) melalui pelatihan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja dan digitalisasi ekonomi. Dengan mentransformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder yang bernilai tambah tinggi, Kabupaten Dairi akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif baru, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membangun kemandirian fiskal yang kokoh serta tidak rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro regional.

2.2.3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimun non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2024 hingga mencapai 7,10%.

Gambar 2.4
Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2023–2025 (%)

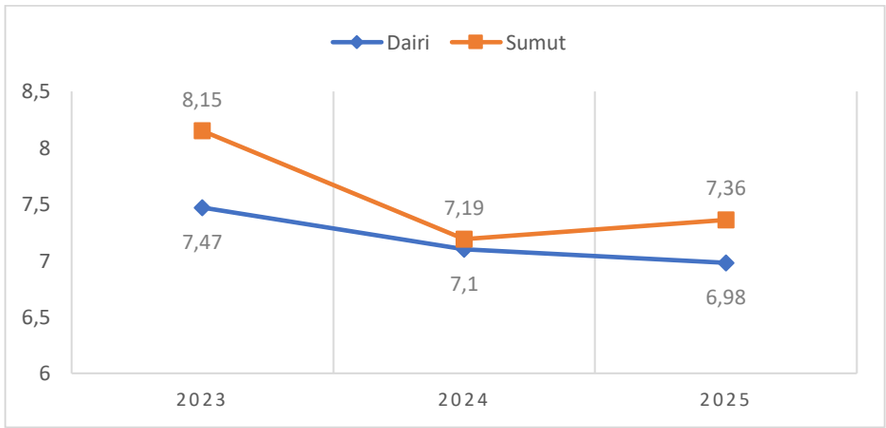

Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2025.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Dairi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Dairi berada di level 7,47 lebih baik daripada Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan angka 8,15. Memasuki tahun 2024, kedua wilayah mencatatkan penurunan beban kemiskinan yang cukup signifikan, di mana Dairi menyusut ke angka 7,1 dan Sumatera Utara berhasil menekan hingga posisi 7,19. Pada tahun 2025, performa perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dairi terus menunjukkan tren positif yang berkelanjutan dengan turun ke level 6,98, sementara Provinsi Sumatera Utara justru mengalami sedikit tren pembalikan atau peningkatan menjadi 7,36. Keberhasilan Kabupaten Dairi dalam mempertahankan tren penurunan di bawah rata-rata provinsi ini mencerminkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan secara presisi di tingkat kabupaten.

2.2.4. PDRB Kabupaten Dairi

2.2.4.1. Nilai PDRB Kabupaten Dairi

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.17
PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023-2025 (Rupiah)

Tahun	2023	2024	2025
Atas Dasar Harga Berlaku	35.877.624	38.398.103	108.510.000
Atas Dasar Harga Konstan	22.387.473	23.084.189	53.320.000

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

PDRB per kapita Kabupaten Dairi selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan adanya tren peningkatan kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk yang berjalan linear dan mengalami lonjakan drastis pada tahun terakhir pengamatan. Ditinjau Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB per kapita Dairi merangkak naik secara bertahap dari Rp 35.877.624 pada tahun 2023 menjadi Rp 38.398.103 pada tahun 2024, sebelum akhirnya naik tajam hingga menyentuh angka Rp 108.510.000 pada tahun 2025. Tren

pertumbuhan yang seirama juga tercermin pada PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan yang mengabaikan faktor inflasi, di mana nilainya tumbuh konsisten dari Rp 22.387.473 di tahun 2023 menjadi Rp 23.084.189 di tahun 2024, lalu melonjak signifikan menjadi Rp 53.320.000 pada tahun 2025. Secara analitis, pertumbuhan riil yang stabil di awal periode serta lonjakan masif pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perluasan nilai tambah ekonomi daerah, baik yang dipicu oleh produktivitas sektor-sektor unggulan maupun implikasi dari penyesuaian perhitungan statistik kewilayahan yang berdampak langsung pada peningkatkan output ekonomi per jiwa di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.5
PDRB per kapita Kabupaten Dairi berdasarkan ADHB dan ADHK
Tahun 2023-2025 (Rupiah)

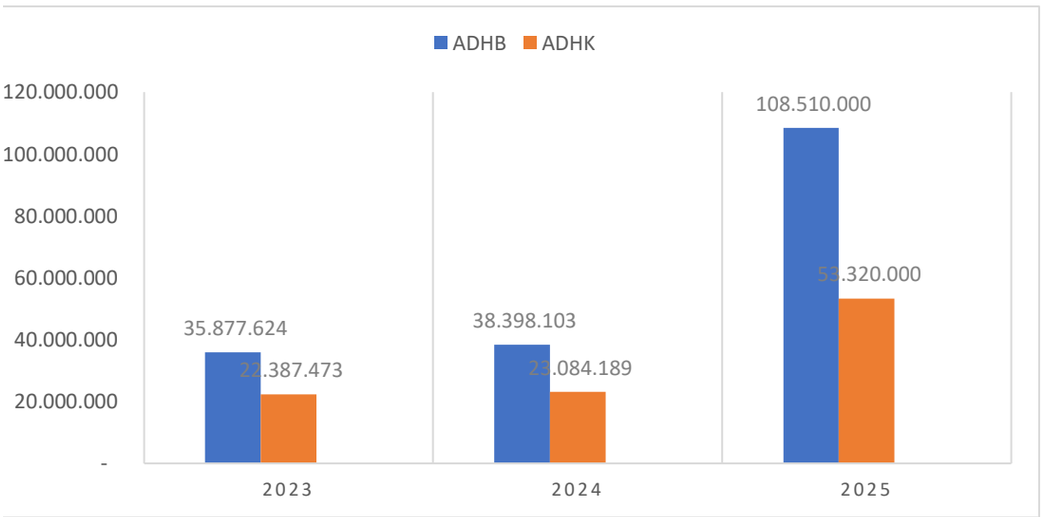

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

2.2.4.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.6
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2023 -2025 (ribu rupiah)

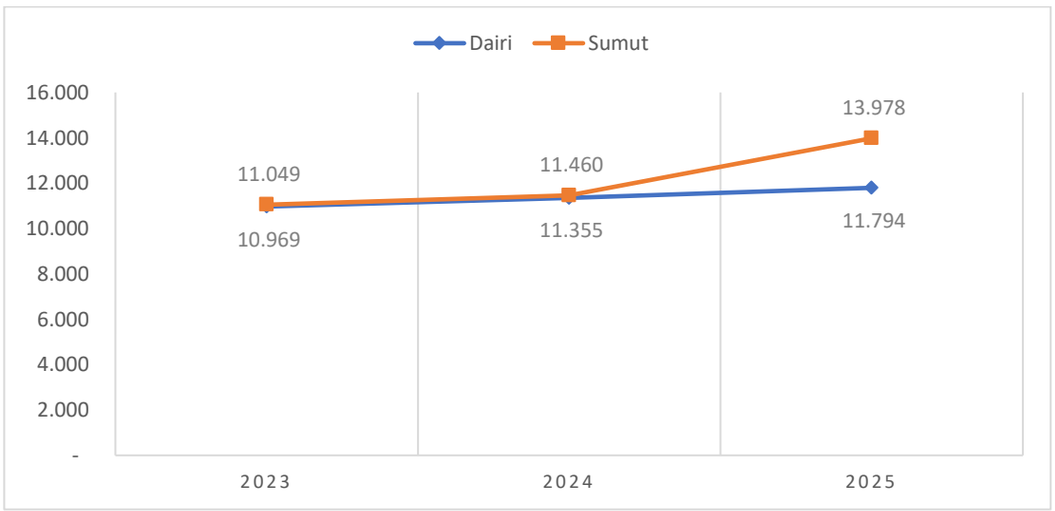

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk pada Tahun 2023 sebesar 10.969 ribu rupiah per kapita per tahun, lalu meningkat pada Tahun 2024 menjadi 11.355 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali Tahun 2025 menjadi 11.794 ribu rupiah per kapita. Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 3 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan.

2.2.4.3. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, G=0, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0<G<0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3<G<0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5<G<1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio, G=1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan

cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.7
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2023 -2025

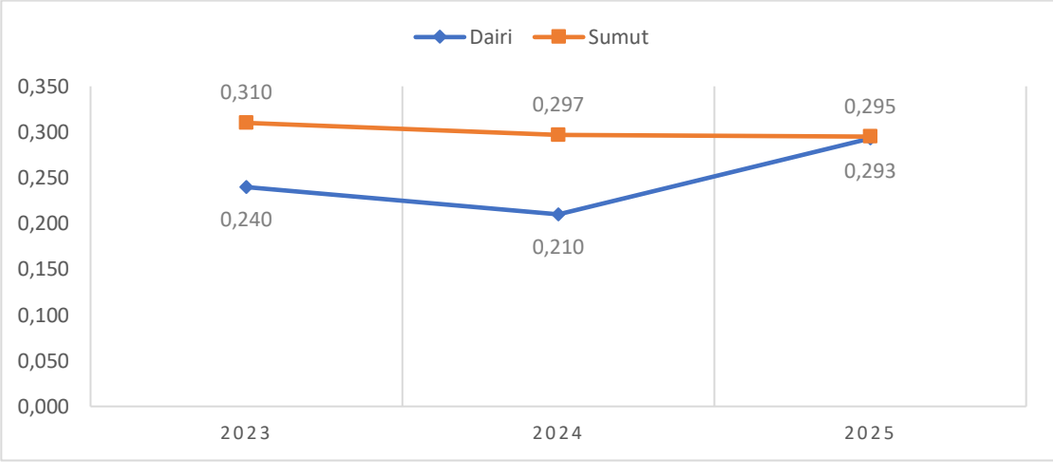

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2025.

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kabupaten Dairi secara umum berhasil menjaga tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah dan merata dibandingkan rata-rata provinsi, meskipun mengalami lonjakan signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Dairi berada di level sangat rendah sebesar 0,240, jauh lebih baik dibanding Provinsi Sumatera Utara yang mencatatkan ketimpangan di angka 0,310. Kinerja pemerataan pendapatan di Dairi semakin optimal pada tahun 2024 dengan penurunan Indeks Gini ke level 0,210, sejalan dengan penurunan tingkat provinsi ke level 0,297. Namun, pada tahun 2025, terjadi pembalikan tren (rebound) ketimpangan yang cukup tajam di Kabupaten Dairi di mana indeksnya melesat naik menjadi 0,293, sehingga posisinya kini hampir mendekati rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang bertengger di angka 0,295. Peningkatan drastis Indeks Gini Dairi di tahun 2025 mengindikasikan bahwa lonjakan masif PDRB per kapita yang terjadi pada tahun yang sama belum terdistribusi secara inklusif, sehingga memerlukan intervensi program jaring pengaman sosial dan pemerataan akses ekonomi yang lebih kuat agar pertumbuhan daerah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

2.2.5. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.5.1. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Identifikasi masyarakat rentan miskin di Kabupaten Dairi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 67 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin. Masyarakat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun.

Pemerintah Kabupaten Dairi harus bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 35/000.7.6/II/2026 tanggal 3 Februari 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwasanya Strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada strategi kebijakan nasional penanggulangan

kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 – 2025

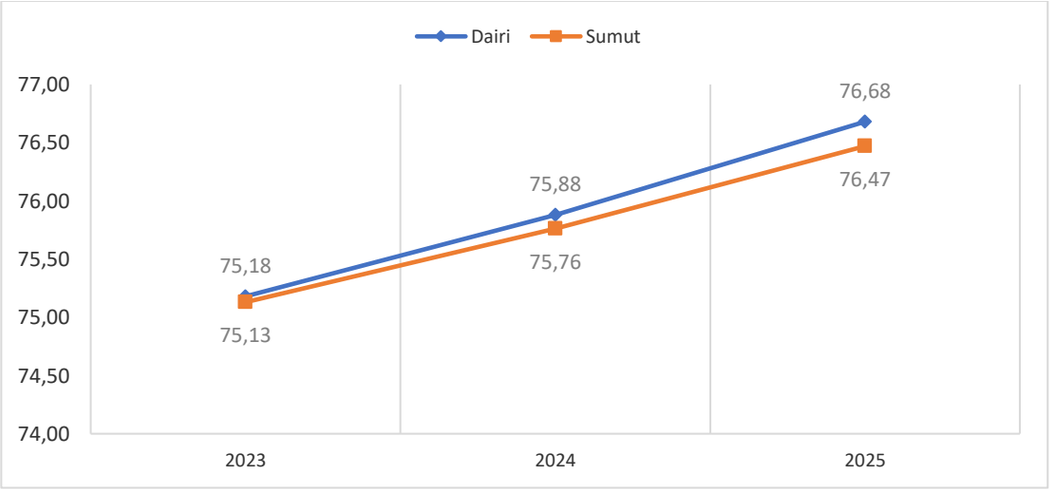

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren kemajuan yang sangat positif, di mana Kabupaten Dairi secara konsisten berhasil mengungguli capaian rata-rata provinsi dengan kesenjangan keunggulan yang kian melebar. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Dairi tercatat sebesar 75,18, sedikit berada di atas tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 75,13. Memasuki tahun 2024, efektivitas peningkatan akses pendidikan, pemenuhan standar kesehatan, serta perbaikan daya beli masyarakat mendorong nilai IPM Dairi naik signifikan menjadi 75,88, melampaui rata-rata provinsi yang bertengger di posisi 75,76. Tren akselerasi mutu sumber daya manusia ini mencapai puncaknya pada tahun 2025, di mana Kabupaten Dairi sukses menyentuh angka 76,68, memantapkan posisinya di atas capaian Provinsi Sumatera Utara yang berada pada level 76,47. Dari perspektif perencanaan pembangunan keuangan dan sosial, konsistensi keunggulan IPM

Dairi ini mencerminkan keberhasilan alokasi belanja daerah yang berskala prioritas dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas hidup serta kapasitas dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.18
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Pada Tahun 2025 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 76,68 dan berada pada status “tinggi”.

Tabel 2.19
IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2025

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,71
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,54
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,09
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/Tahun)	Rp. 11.790
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	76,68

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

2.2.5.3. Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut

Gambar 2.9
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2023 – 2025

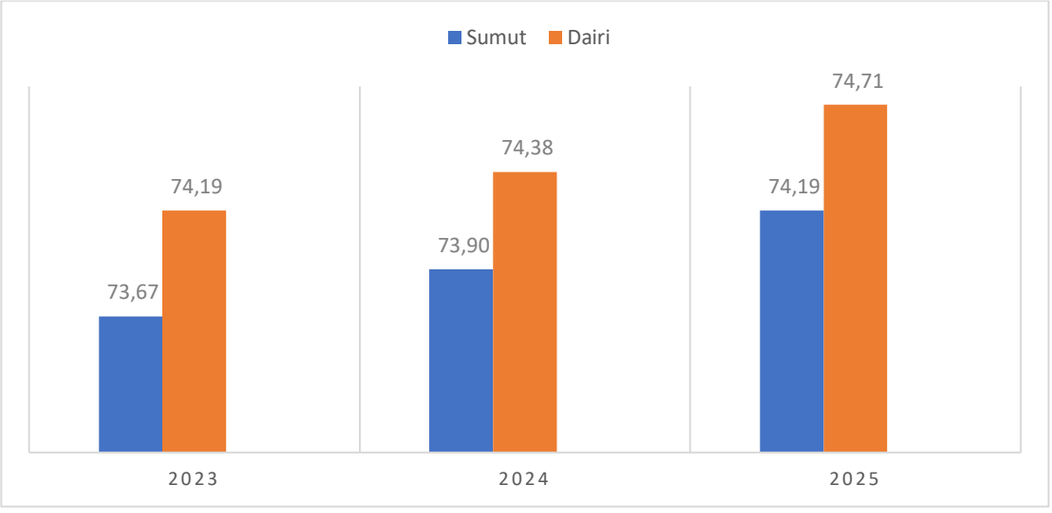

Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Usia Harapan Hidup kabupaten Dairi pada Tahun 2025 adalah 74,71 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 74,19. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2023-2025 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

B. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap

tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.

Selama periode lima tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi terjadi peningkatan prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 28,06 persen. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan stunting adalah yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus stunting. Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting. Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskemas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitembar 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 10
Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

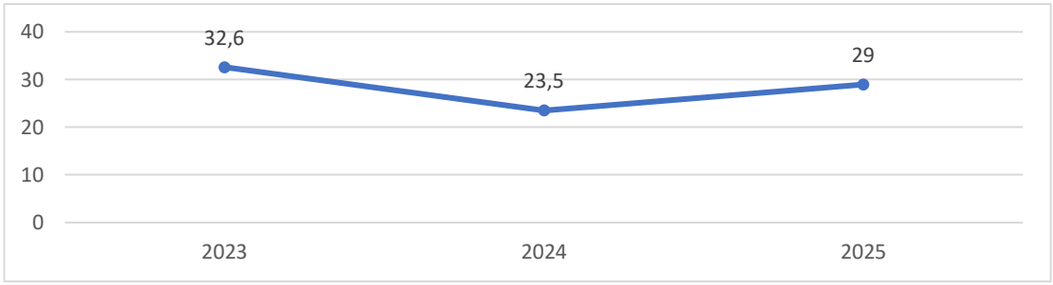

Sumber: SSGI, 2025

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 11
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

Sumber : LPPD, Kabupaten Dairi

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 10 kasus dan pada Tahun 2025 menjadi 11 kasus.

E. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 12
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

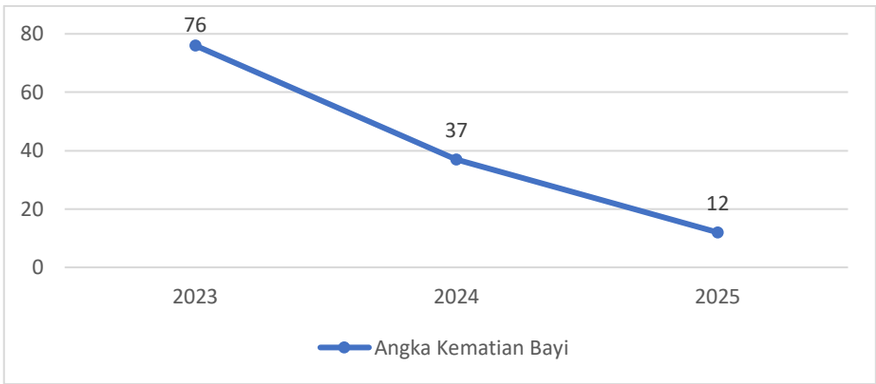

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025 menunjukkan tren menurun. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2024 sebanyak 37 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2025 sebanyak 12 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 13
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

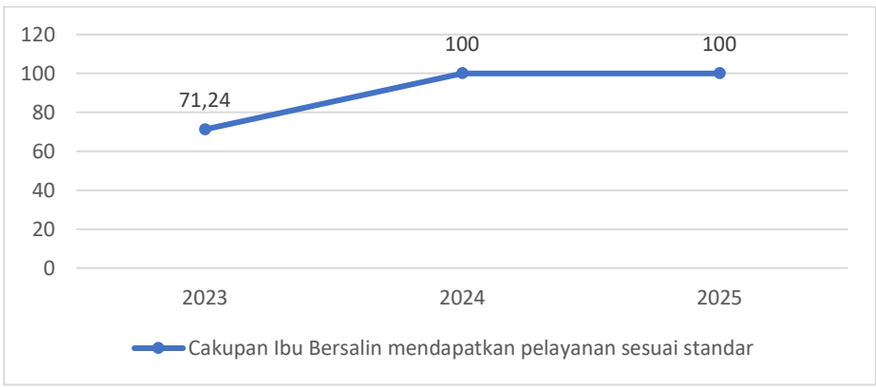

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2023 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 71,24 persen, meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2024 dan konsisten pada tahun 2025 sebesar 100 persen. Namun demikian, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

G. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025, menunjukkan kinerja baik konsisten 100 persen.

Gambar 2.14
Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

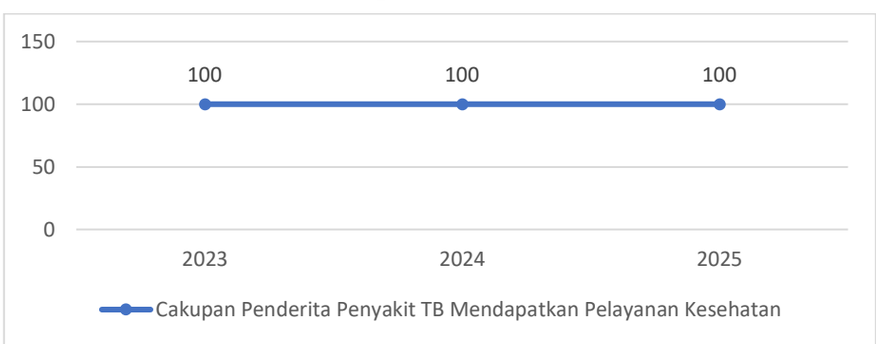

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

H. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 15
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

I. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.16
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

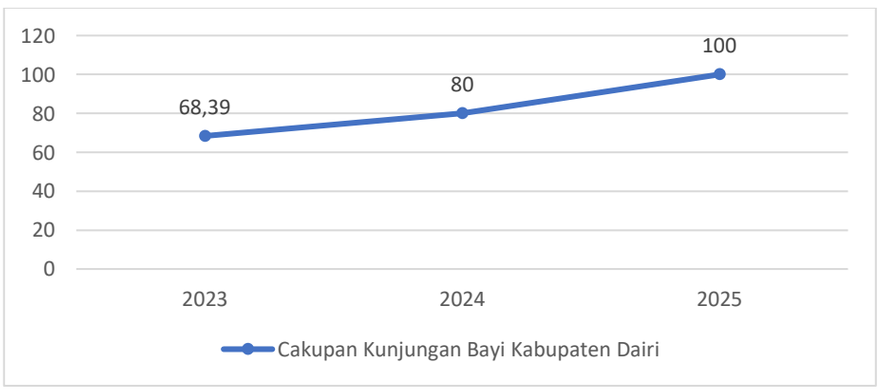

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

J. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita sebesar 68,39% pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 sebesar 80,00% dan pada Tahun 2025 meningkat sebesar 100%.

Gambar 2.17
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

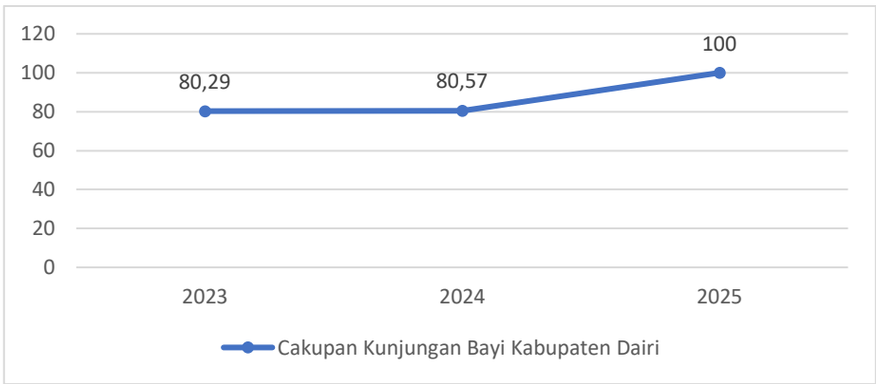

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

K. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus.

Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.18
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2023-2025 (%)

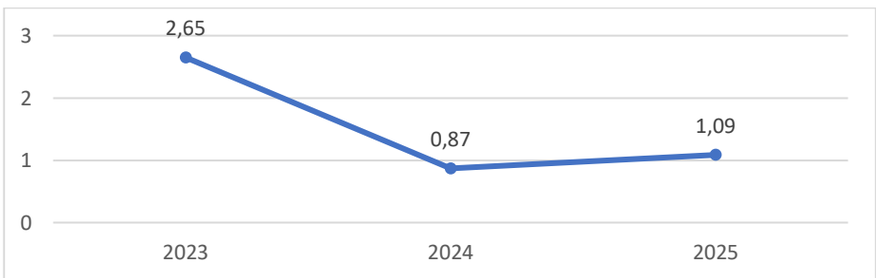

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2023 tercatat sebesar 2,65%, ditahun 2024 sebesar 0,87% namun kemudian naik menjadi sebesar 1,09% pada Tahun 2025.

L. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan

risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk.

Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 19
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025 (%)

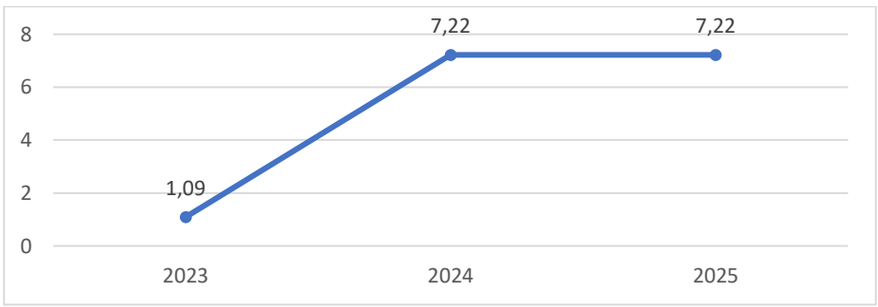

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

M. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebgai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan public dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

2.2.5.4. Kondisi Pendidikan

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut:

Gambar 2. 20
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2023-2025 (Tahun)

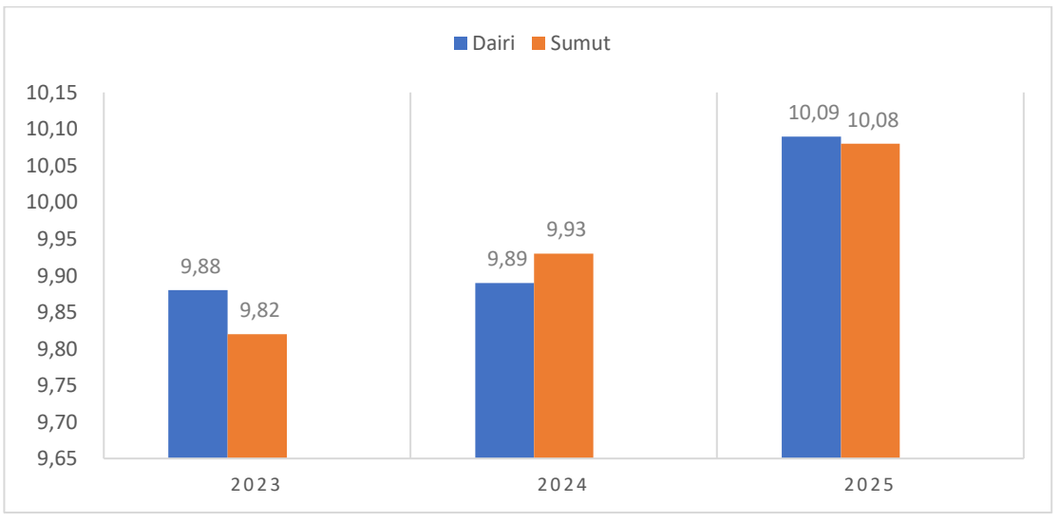

Sumber : BPS Sumatera Utara, Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 tercatat diangka 9,88 dan pada Tahun 2024 tercatat di angka 9,89 berada dibawah Provinsi Sumatera Utara, capaian ini meningkat ke angka 10,09 pada Tahun 2025. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 10,09 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 2.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut : Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024

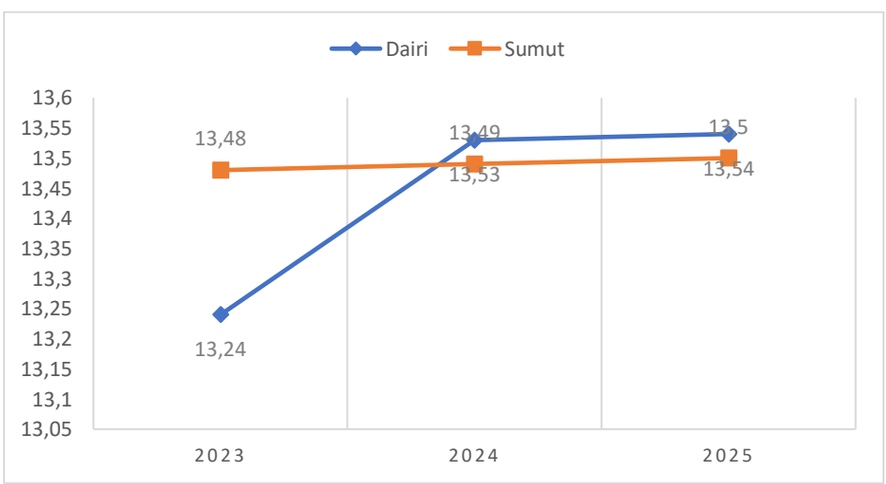

Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,24, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,48. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 13,49 sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,53 dan pada Tahun 2025 meningkat kembali menjadi 13,54 dan provinsi menjadi 13,5. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2025 harapan tersebut meningkat ke jenjang sarjana yaitu 13,54.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat petumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan, dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah. Keenam indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di Kabupaten Dairi.

1. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025

Jenjang Pendidikan	2023	2024	2025
SD	111.34	101,66	100
SMP	89,12	94,41	97,30

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata 100%, dimana pada Tahun 2023 sebesar 111,34, pada Tahun 2024 sebesar 101,66 dan pada Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian APK ini menunjukkan bahwa tren penduduk yang telah menempuh sekolah sudah sesuai dengan umur yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2023 sebesar 98,12 dan pada Tahun 2024 sebesar 94,41% dan pada Tahun 2025 naik menjadi 97,30%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. 21
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025

Jenjang Pendidikan	2023	2024	2025
SD	99,28	98,95	99,85
SMP	77,47	78,14	95,30

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2023 sebesar 99,28 pada Tahun 2021 naik menjadi 98,95 dan turun pada Tahun 2025 menjadi 99,85. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2023-2025 dimana pada Tahun 2023 sebesar 77,47, pada tahun 2024 naik menjadi 78,14 dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 95,30.

3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023-2025

Jenjang Pendidikan	2023	2024	2025
SD	0,02	0,11	0,15
SMP	0,03	0,05	0,55

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

Angka Putus Sekolah SD pada Tahun 2023 sebesar 0,02 dan pada Tahun 2023 sebesar 0,11 dan meningkat pada Tahun 2025 menjadi sebesar 0,15. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2023 sebesar 0,03 dan pada Tahun 2024 sebesar 0,05 dan pada Tahun 2025 sebesar 0,55.

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2023-2025 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023-2025

Jenjang Pendidikan	2023	2024	2025
SD	100	100	100
SMP	100	100	100

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

5. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025

Jenjang Pendidikan	2023	2024	2025
SD ke SMP	99,81	98,82	98,82
SMP ke SMA	96,59	105,37	105,37

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada, Tahun 2023 sebesar 99,81, Tahun 2023 dan 2025 sebesar 98,82. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2023 sebesar 96,59, pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 menjadi 105,37.

6. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tahun 2024 untuk SD/MI adalah 69,10 dan SMP/MTs adalah 29,94.

Gambar 2.21
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024 (%)

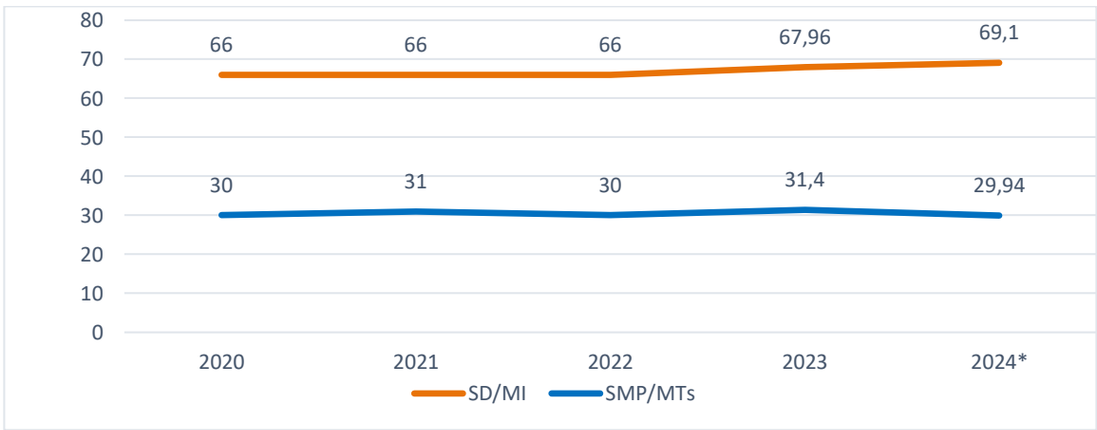

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

7. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi peserta didik di Kabupaten Dairi masih kurang dan masih harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya

yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan tersebut. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi kurang dapat berkembang. Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP.

Gambar 2.22
Literasi dan Numerasi SD

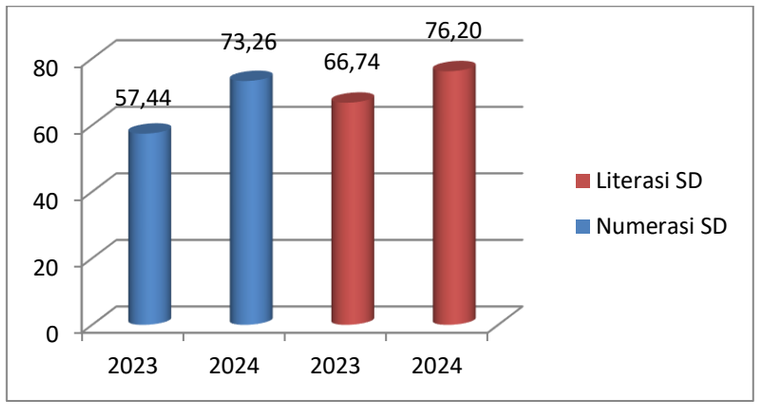

Gambar 2.23
Literasi dan Numerasi SMP

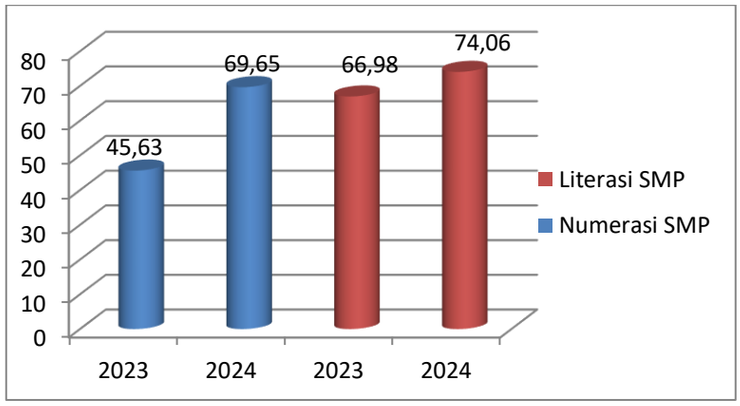

2.3.1.2. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.24
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

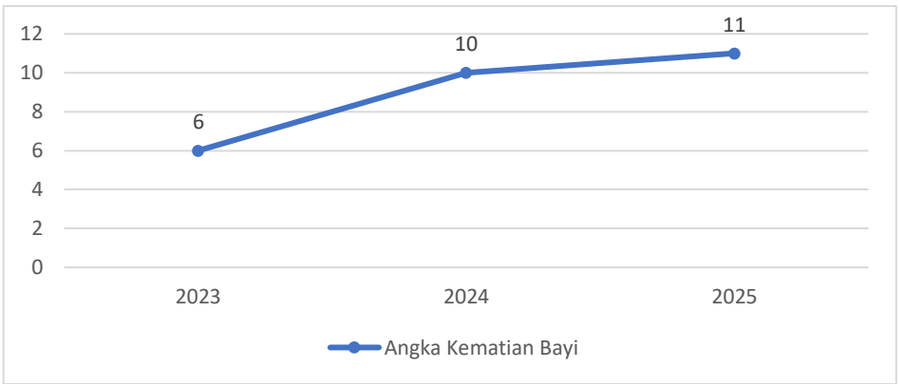

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2025

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus pada Tahun 2025 menjadi 11 kasus.

2. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.25
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

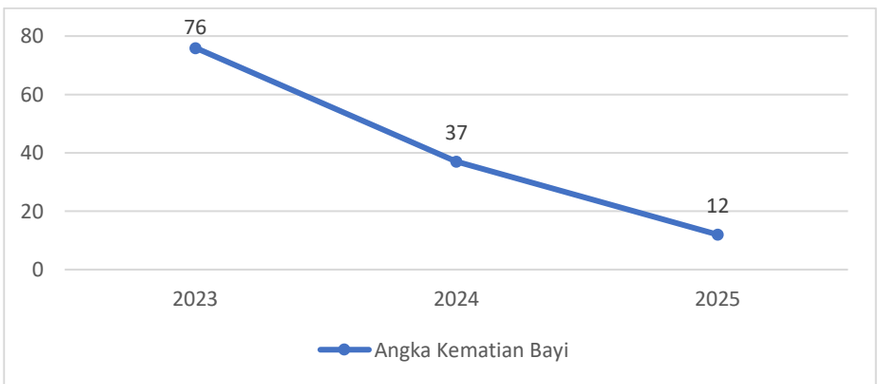

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2024 sebanyak 37 per 100.000 kelahiran hidup, dan Tahun 2025 sebanyak 12 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut cukup

baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (Antenatal Care), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (Postnatal Care).

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.26
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

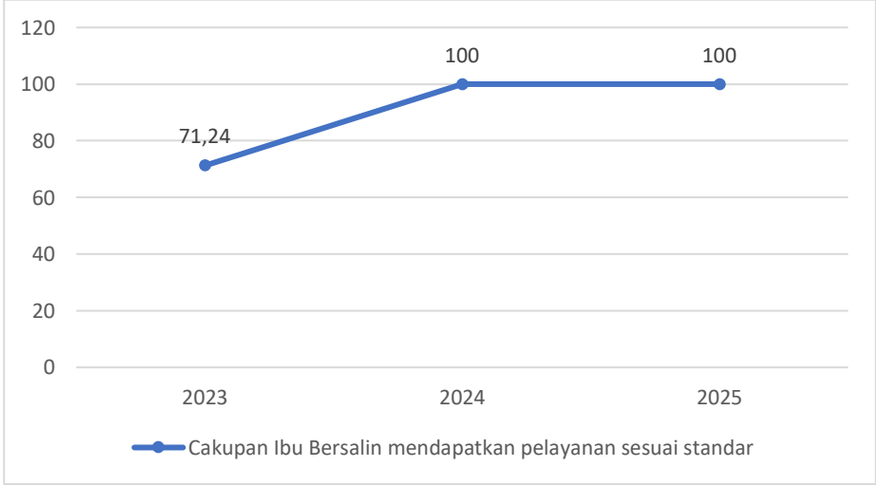

Sumber : LPPD Kab.*Dairi 2024*

4. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen,menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 2. 27 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

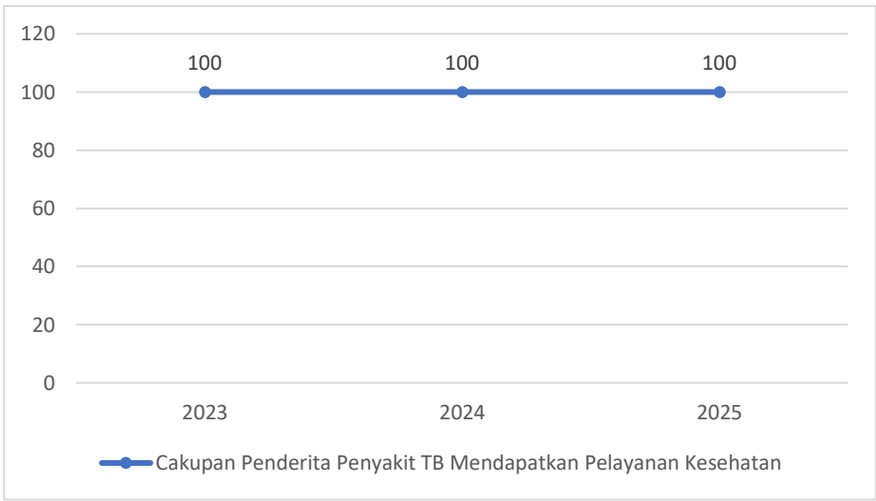

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2025

6. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.29
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

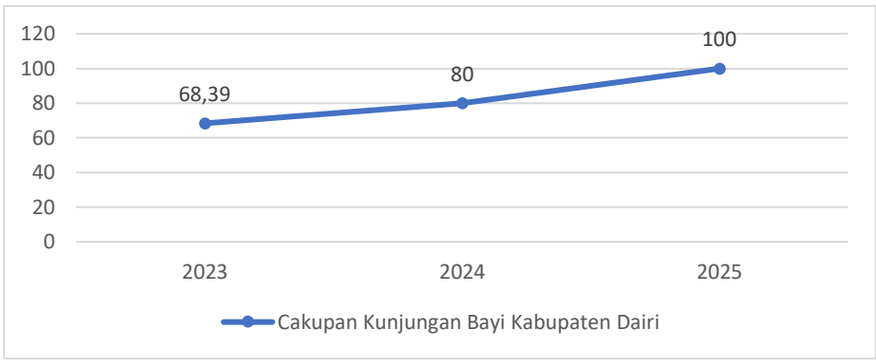

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2025

Jika dilihat dari gambar diatas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2023 sebesar 68,39 persen, pada Tahun 2024 sebesar 80 persen dan pada Tahun 2025 naik menjadi 100 persen.

7. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada Tahun 2019 sebesar 71%, sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07% dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29% dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 95,86%.

Gambar 2.30
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

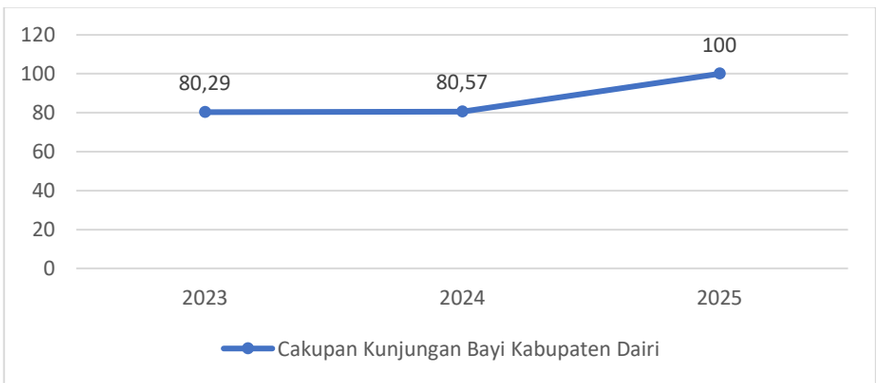

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih

jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.31
Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

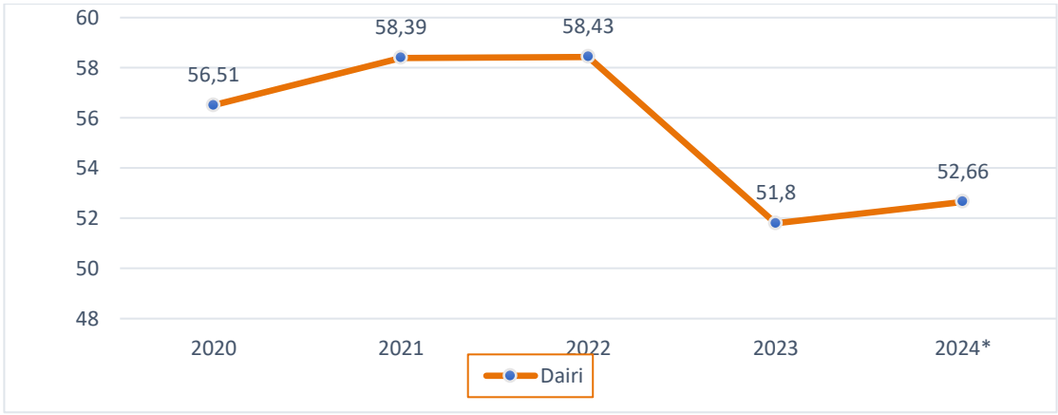

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Gambar 2.32 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

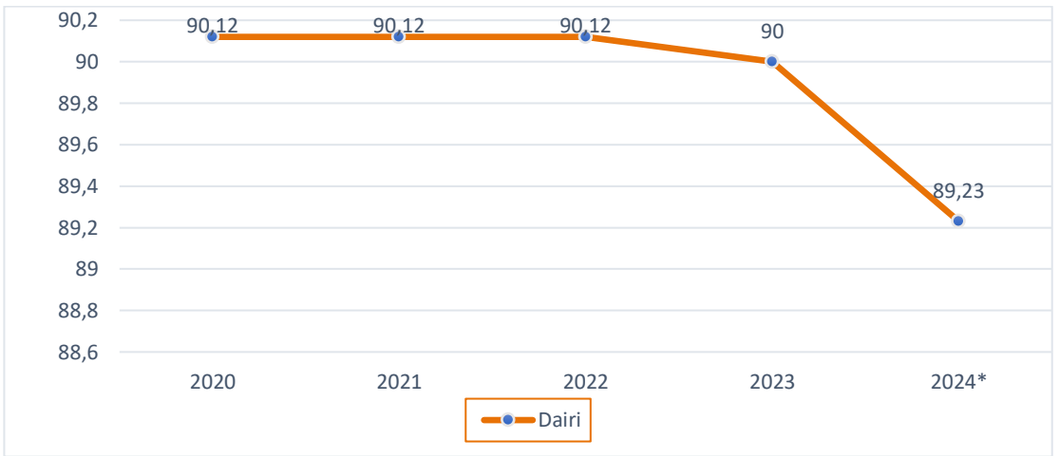

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2020 sebesar 90,12%, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebesar 90,12%. Pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 90 dan 89,23 persen.

2. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan

persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.33
Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

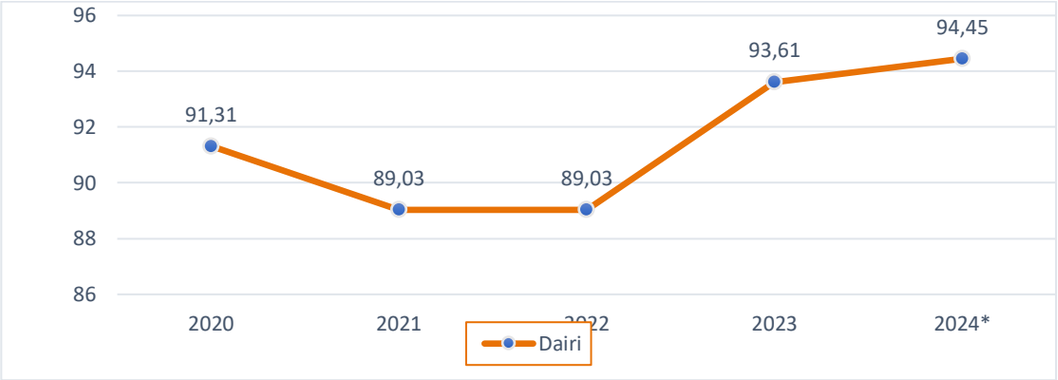

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 adalah 91,37% dengan luasan 10.211 Ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03% dengan luasan 9.949 Ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41%, dengan luasan 9.992 Ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61% dengan luasan sebesar 10.461 Ha. Pada Tahun 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 94,45% dengan luasan 10.554 Ha.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

3. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dana aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2. 34 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2020-2024

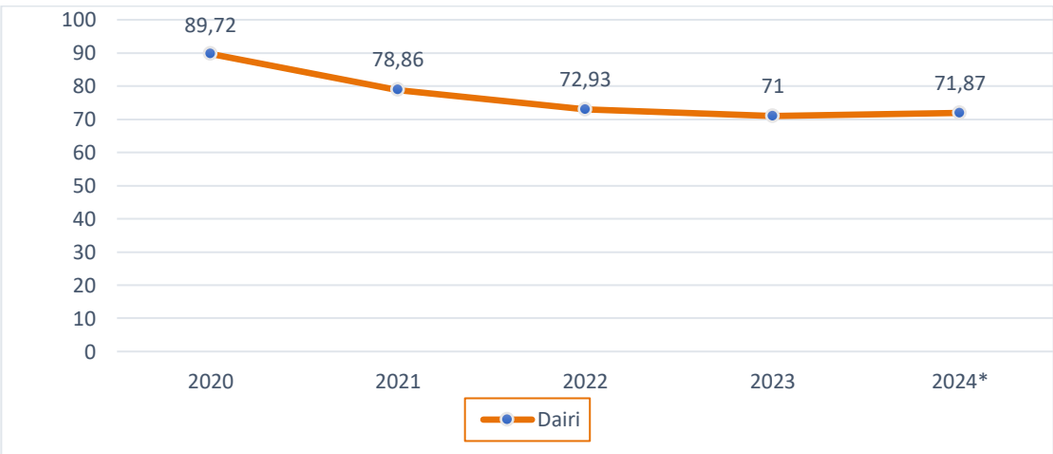

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau sebesar 72,93%, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00%. Pada Tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan

berkelanjutan semakin bertambah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87%

4. Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2 35
Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2020-2024

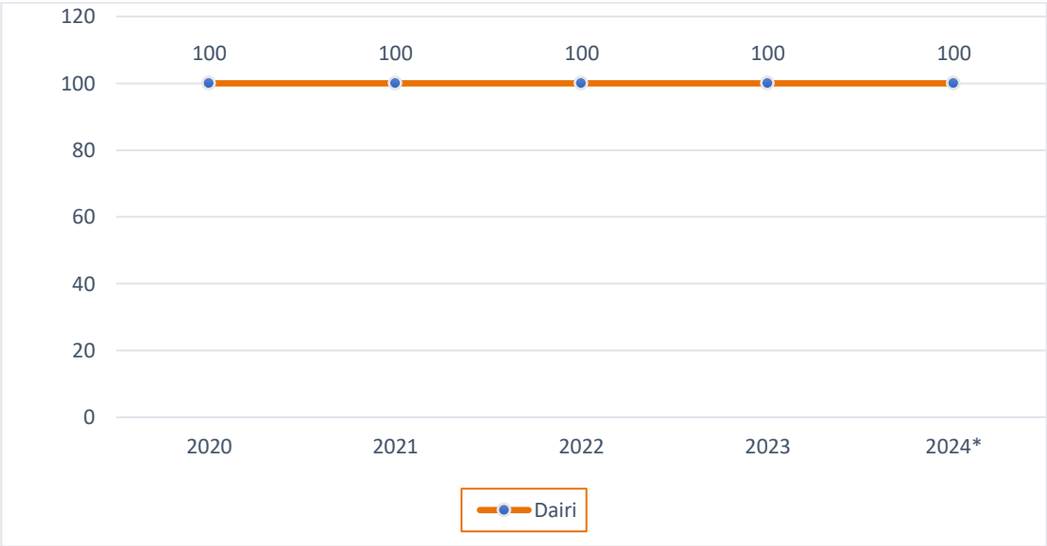

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar diatas dapat dijelasakan bahwa capaian terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB dari Tahun 2020-2024 tercapai 100%.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum,

pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 36 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2020-2024

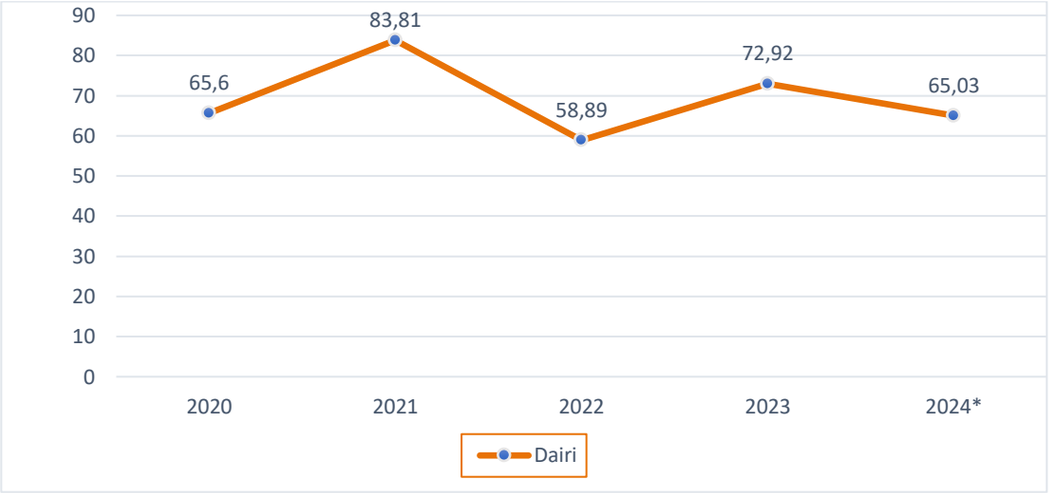

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2020 sebesar 65,6%, sebesar 83,81% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89%. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92% sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 65,03%.

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersedian Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2. 37 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

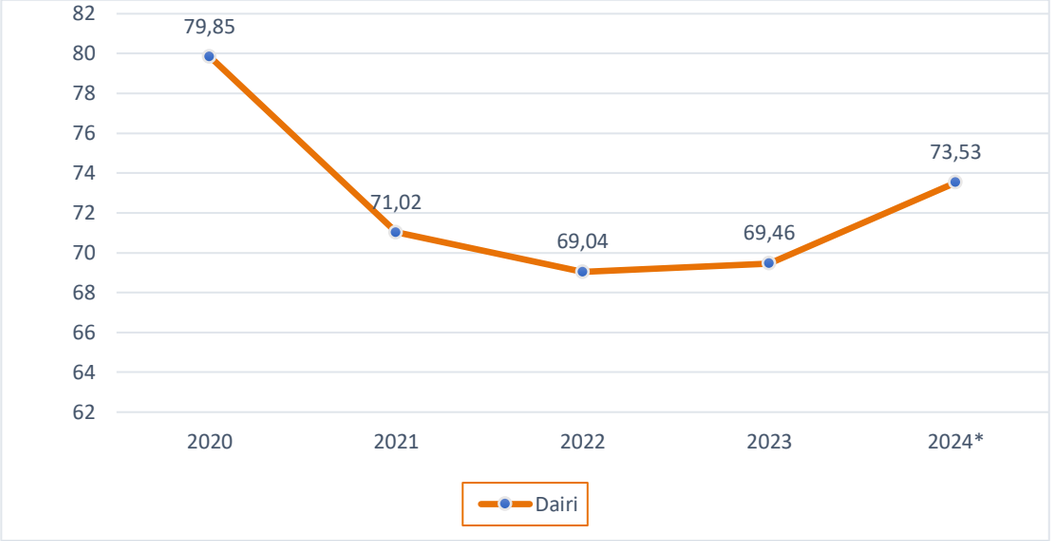

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar 79,85% dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02% dan sebesar 69,04% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 % dan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,53%.

3. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97%, sebesar 58,42% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51%. Pada Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 Ha atau sebesar 23,54% dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 Ha dari total kawasan kumuh 684,41 Ha atau sebesar 25,04%.

Gambar 2. 38 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024

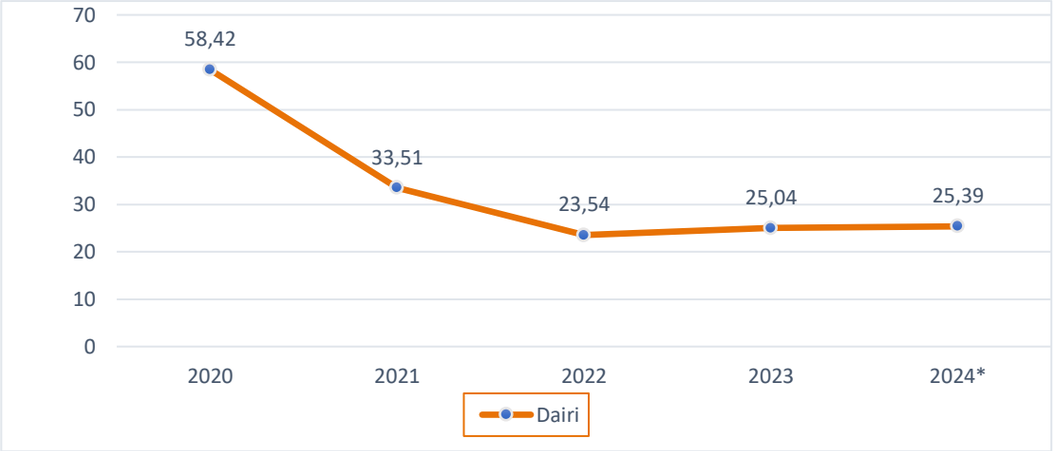

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas

tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada Tahun pada Tahun 2020 69,80%, pada Tahun 2021 23,27% dan pada Tahun 2022 menjadi 6,68%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 23,96%. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 24,05.

2. Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 136.537 orang, pada Tahun 2021 menjadi 168.261 orang, pada Tahun 2022 menjadi 168.291 orang, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197.395. Pada Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 199.085.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tahun 2020 TPAK Kabupaten Dairi sebesar 87,01% dan Sumatera Utara sebesar 66,58% dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 85,73% sedangkan Sumatera Utara juga mengalami peningkatan menjadi 69,10%, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke angka 82,01% dan Sumatera Utara di angka 69,53% dan pada Tahun 2023 juga mengalami penurunan ke angka 84,81% sedangkan Sumatera Utara di angka 71,06%, pada Tahun 2024 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Dairi menurun menjadi 83,80 sedangkan Sumatera Utara di angka 71,36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dairi secara keseluruhan masih diatas Provinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,75% pada Tahun 2020 sedangkan Sumatera Utara dengan nilai 6,91 pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,49% dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88% dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23% sedangkan Provinsi 5,89%. Pada Tahun 2024 TPT di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43 sedangkan Provinsi Sumatera Utara menurun menjadi 5,60. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Dairi lebih baik dari TPT Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2.2. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data Tahun 2022 tidak tersedia, sedangkan pada Tahun 2024 ketersediaan Energi per kapita sebesar 93,16% dan jumlah ketersediaan protein per kapita adalah sebesar 97,34%.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Dairi, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang komplek, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2. 39
Penurunan Lahan Kritis Tahun 2020-2024

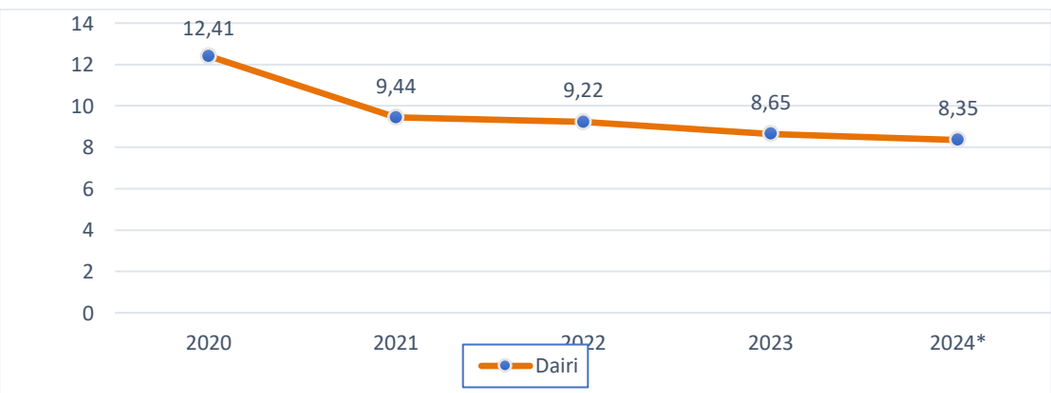

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 60,09%, pada Tahun 2021 sebesar 64,75%, pada Tahun 2022 sebesar 69,65%, pada Tahun 2023 sebesar 75,68% dan pada Tahun 2024 sebesar 76,55%

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

1. Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar di bawah ini dapat dijelasakan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Tahun 2020 sebanyak 17 desa, pada Tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa. Tahun 2023 tidak didapati data tentang fasiltasi dan pembentukan BUM Desa. Tahun 2024 terdapat 25 BUM Desa yang ditargetkan terfasilitasi dan terbentuk.

Gambar 2.40
Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2020 – 2024

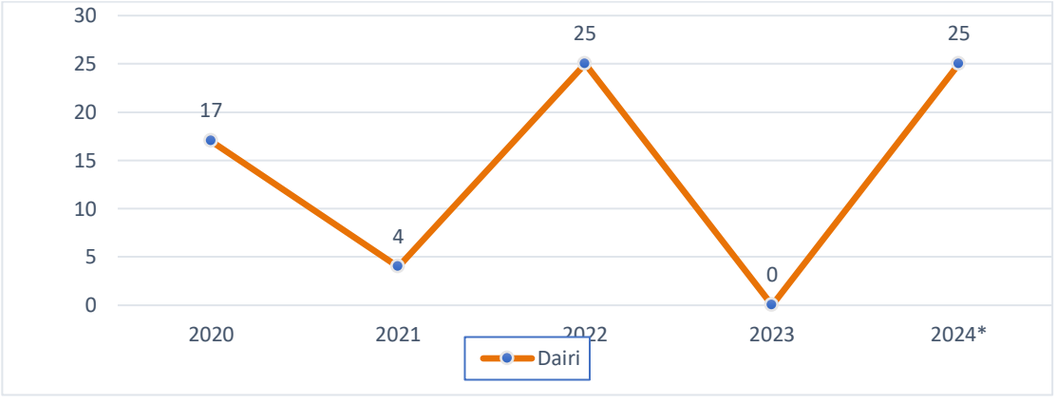

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejk dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

4. LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan

di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

5. Desa mandiri

Desa Mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat beberapa pilar utama yang menopang konsep desa mandiri, di antaranya:

- Kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan menciptakan lapangan kerja.
- Ketahanan sosial yang terwujud dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan gotong royong.
- Kemandirian pangan dan energi yang memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka.
- Lingkungan hidup yang lestari sebagai penopang kehidupan dan sumber daya bagi masyarakat desa.
- Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan, memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa mendorong terwujudnya desa mandiri demi mewujudkn ekonomi kerakyatan, dimana desa mandiri memiliki kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi berkelanjutan.

2.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelengggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

a) Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100%. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan

IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

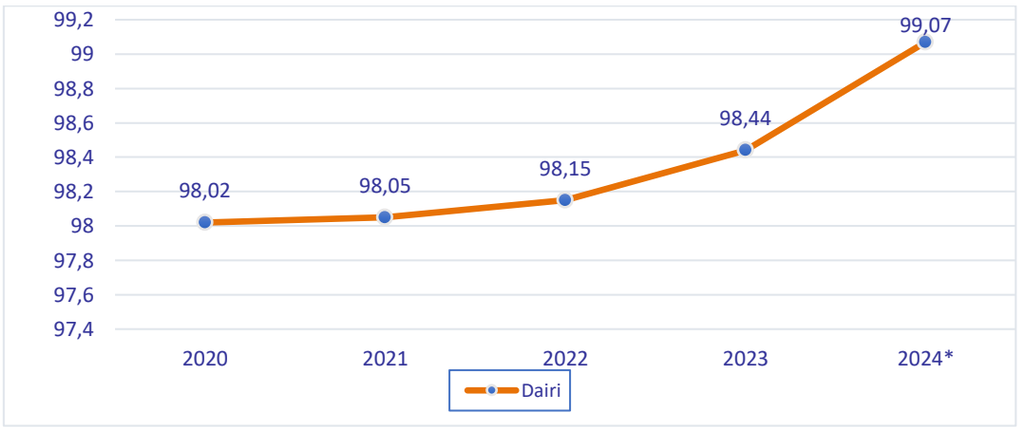

Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

c) Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100%.

Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelengaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

2.3.2.6. Perhubungan

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

1. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2. 42 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

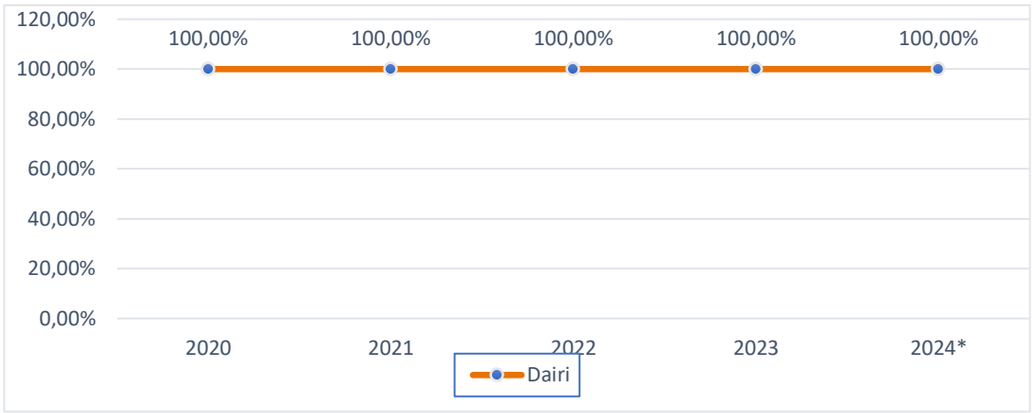

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

2.3.2.7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

1. Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif, jumlah tertinggi adalah pada kelompok koperasi serba usaha sebanyak 101 unit. Pada Tahun 2024 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi adalah 96 unit, dengan kelompok serba usaha 37 unit.

Gambar 2.43
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024

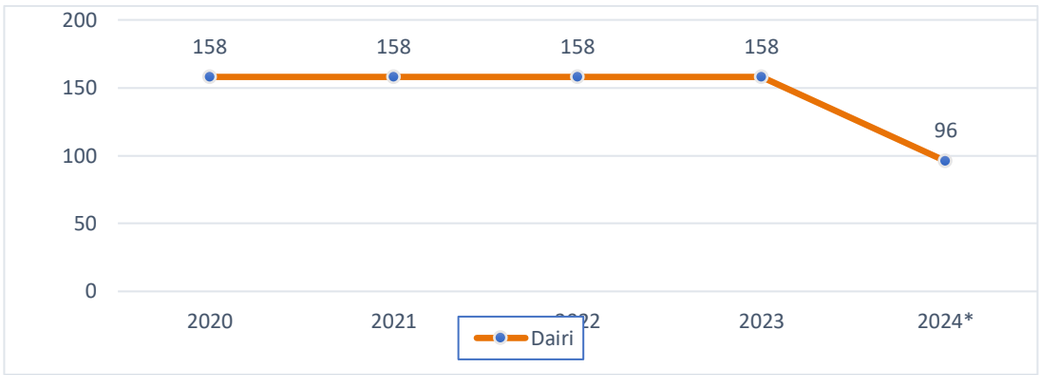

Sumber BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

2. Jumlah Usaha Mikro

Dari gambar di dibawah dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2020 sebanyak 13.682 unit pada tahun 2020 dan menjadi 21.038 unit pada tahun 2024.

Gambar 2. 44
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020-2024

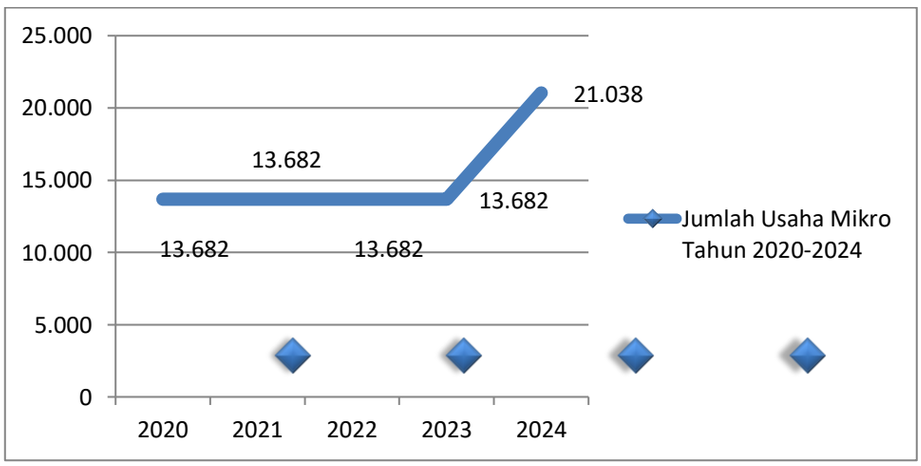

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.3.2.8. Penanaman Modal dan Perizinan

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, Persentase Izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan ijin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

1. Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.45
Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2020 – 2024

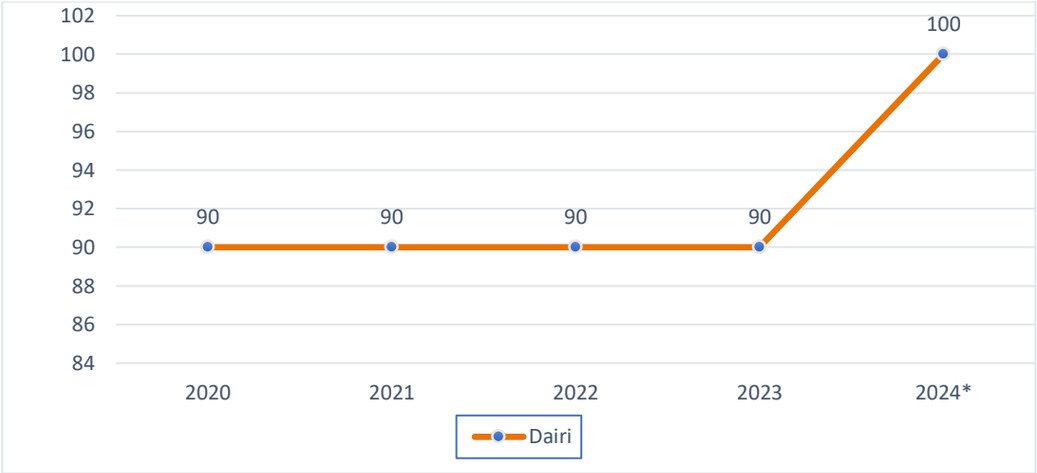

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 90% pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tetap 90%. Pada Tahun 2024 Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 100%.

2. Persentase Peningkatan Investasi

Salah satu motor penggerak bagi pembangunan daerah adalah investasi daerah. Investasi daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Dairi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan mitra terbaik bagi investor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Indikator realisasi investasi umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan investasi daerah. Berikut adalah data mengenai Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2020 – 2024.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase kondisi investasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2022-2024 pada Tahun 2022 sebesar 12,86%, terjadi peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 13,01%, dan pada tahun 2024 menjasi 14,88%.

Gambar 2.46
Persentase Peningkatan Investasi Kab Dairi 2022-2024

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun berada pada angka 12,20 pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2022, demikian juga untuk tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 14,88% dari Tahun 2023. Nilai realisasi investasi Kabupaten Dairi masih didominasi oleh investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi juga saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, dan persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang diterima.

Upaya untuk meningkatkan investasi daerah Dairi juga perlu didukung dengan adanya pelayanan investasi yang baik, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Bentuk dukungan tersebut sudah diwujudkan pemerintah Kabupaten Dairi.

2.3.3. URUSAN PILIHAN

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

2.3.3.1. Pariwisata

Sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Dairi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Dairi meliputi didominasi oleh wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Untuk menunjang aktivitas wisata dan menarik wisatawan asing maupun domestik, keberadaan akomodasi sebagai sarana pendukung kepariwisataan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bisa terwujud dengan tersedianya fasilitas dukungan yang memadai seperti hotel. Wisatawan yang datang dari luar daerah tentu membutuhkan tempat untuk menginap dan alternatif yang paling diminati wisatawan adalah menginap di hotel.

1. Kunjungan Wisata

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi sebesar 57.927 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 133.676 orang, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 205.335 orang dan pada Tahun 2023 kunjungan wisata ke Dairi sebanyak 265.542 orang. Sedangkan Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 252.215 orang.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 70 orang, Tahun 2021 dan 2022 tidak ada data. Sedangkan untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 677 0rang dan Tahun 2024 sebanyak 593 orang.

Gambar 2.47

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi (Orang) Tahun 2020–2024

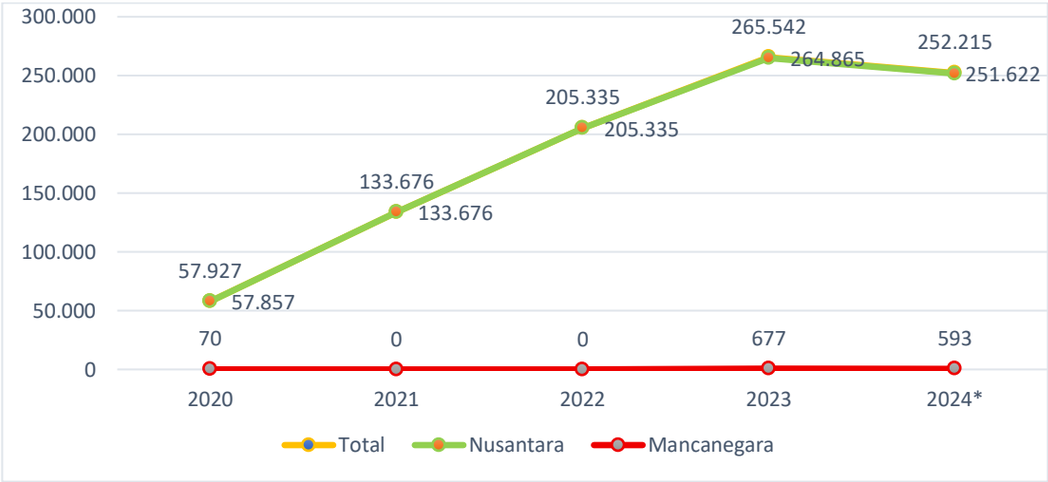

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

2. Objek Wisata di Kabupaten Dairi

Tabel 2.25
Objek Wisata di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Dan Jarak Dari Sidikalang Tahun 2024

Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (Km)
(1)	(2)	(3)
Gedung Djauli Manik (Pusat Aktifitas Seni Budaya)	Sidikalang	0,0
Taman Kota Sidikalang (Stadion Lama)	Sidikalang	0,5
Panorama Indah Puncak Sidiangkat	Sidikalang	5,0
Taman Wisata Iman (TWI)	Sitinjo	10,0
Taman Tugu TB Simatupang Dan Liberty Manik	Sitinjo	10,0
Air Terjun Lae Pandaroh, Air Terjun Sampendabah	Sitinjo	12,0
Simergatep	Parbuluan	12,0
Leter Z	Siempat Nempu Hulu	12,0
Parhonasan	Lae Parira	21,0
Pemandian Lau Bagot	Tigalingga	30,0
Gua Kendet Liang	Gunung Sitember	42,0
Pantai Danau Toba/Tao Silalahi	Silahisabungan	44,0
Air Terjun Sampuren Desa Gundaling	Gunung Sitember	45,0
Situs Budaya Marga Silahisabungan (Aek Sipaulak Hosa, Batu Sigadap, Pagar Parorot, Pansur Napitu, Tugu Silahisabungan)	Silahisabungan	46,0
Pemadian Lau Timah	Tanah Pinem	80,0

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

Dari table di atas dapat kita ketahui bahwa total objek wisata potensial di Kabupaten Dairi berjumlah 15 objek wisata. Dan dari tabel tersebut kita juga mengetahui nama objek wisata, letak serta jarak objek wisata dari kota Sidikalang, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo memilik sebanyak 3 objek wisata, Silahisabungan dan Gunung Sitember 2 objek wisata, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga dan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 objek wisata.

2.3.3.2. Pertanian

1. Tanaman Pangan dan Holtikultura

1) Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/Ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadei 56,33 kw/Ha dan tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56.38 kw/Ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 Kw/Ha, pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 KW/Ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 KW/Ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 Kw/Ha dan pada tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 Kw/Ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 Kw/Ha. Peningkatan Produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensfikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

Gambar 2.48
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

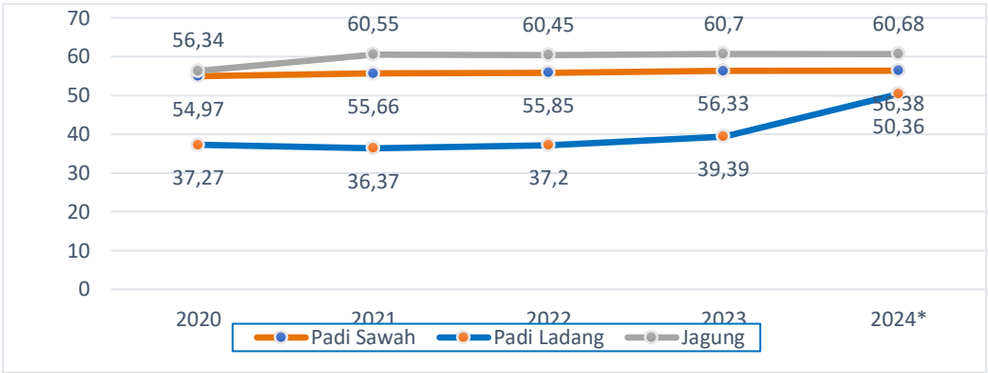

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

2) Hortikultura

Gambar 2. 49 Luas panen sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman Tahun 2021-2024 (Ha

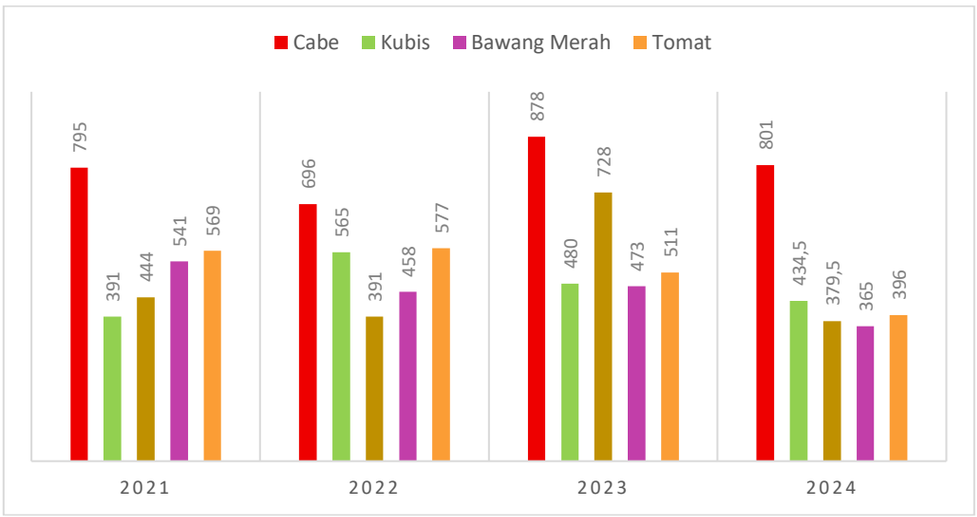

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang beluk teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum

berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

2. Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.50
Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2020-2024 (ton)

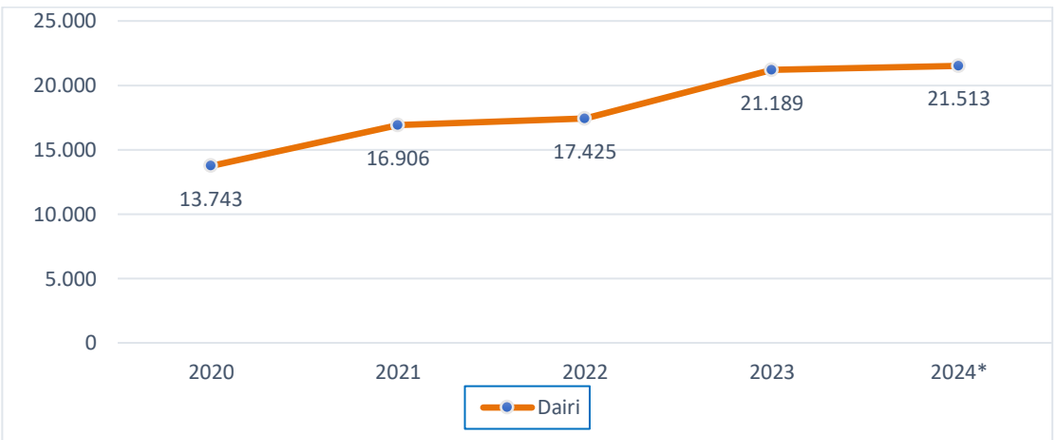

Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 produksi kopi di Dairi sebesar 13.743 ton kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.189 ton. Kemudian Tahun 2024 produksi kopi Kabupaten Dairi kembali mengalami peningkatan menjadi 21.513 Ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.975,1 ton dan kopi robusta sebesar 2.537,5 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh program pemerintah kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi sidikalang dengan penanaman kopi 1 juta batang. Kemudian peningkatan harga biji kopi semenjak lima tahun yang lalu, sehingga meningkatkan minat petani bertanam kopi.

Disamping Tanama kopi terdapat beberapa tanaman Perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Berikut ini data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.51
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

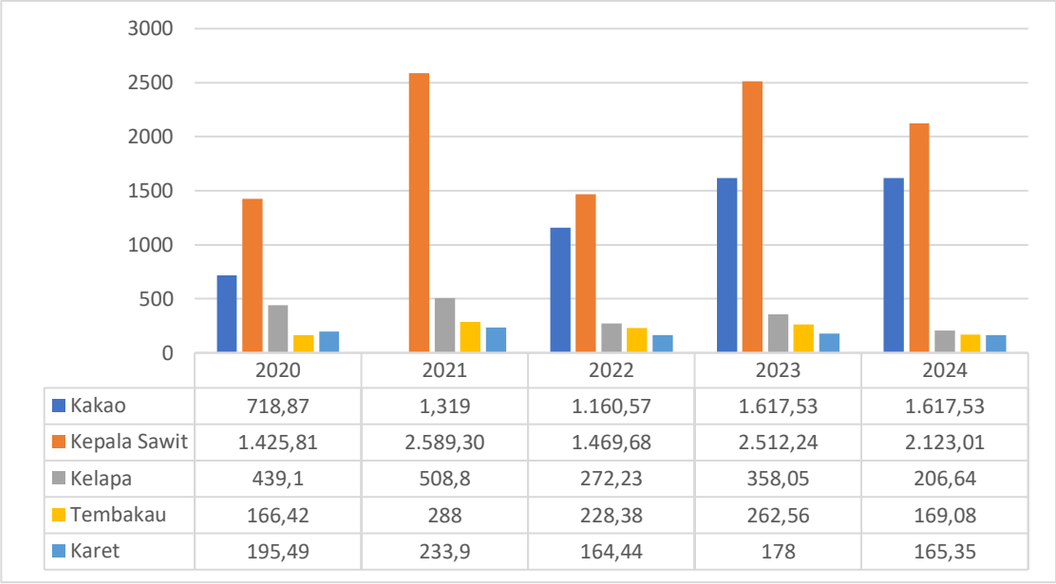

	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	718,87	1,319	1.160,57	1.617,53	1.617,53
Kepala Sawit	1.425,81	2.589,30	1.469,68	2.512,24	2.123,01
Kelapa	439,1	508,8	272,23	358,05	206,64
Tembakau	166,42	288	228,38	262,56	169,08
Karet	195,49	233,9	164,44	178	165,35

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

3. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

Gambar 2.52
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024

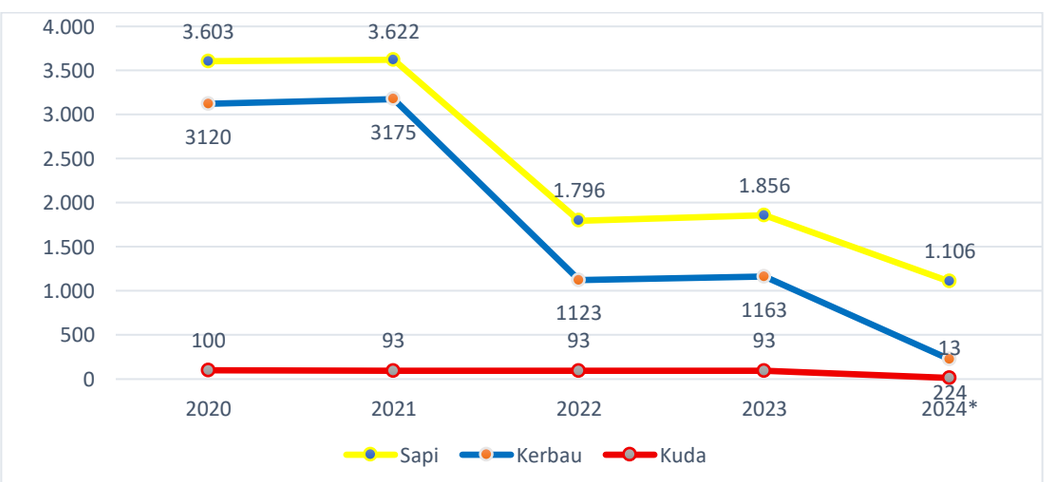

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

Gambar 2.53
Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024

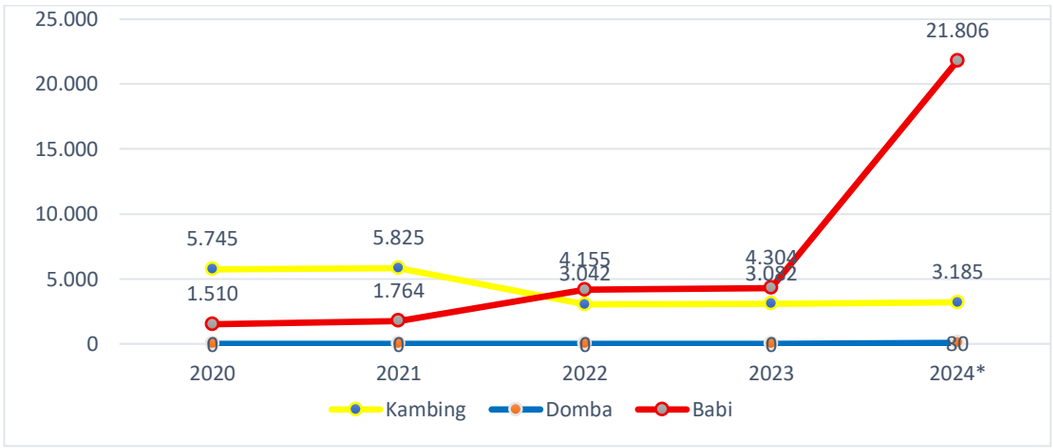

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit ASF pada babi sudah berkurang.

Gambar 2.54
Populasi Ternak Unggas diKabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024

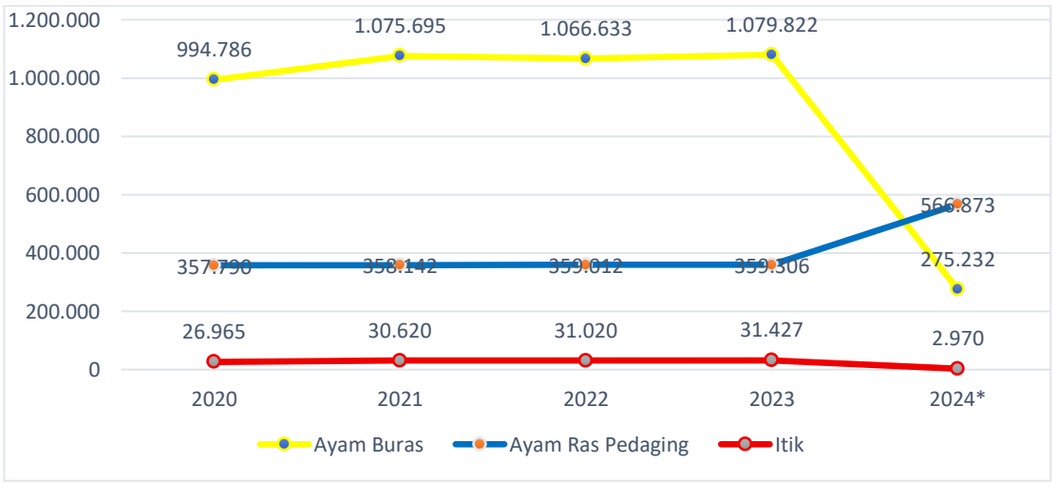

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak ungags di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Populasi ayam buras tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis.

2.3.3.3. Perindustrian dan Perdagangan

1. Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 stagnan yaitu sebesar 0% tiap tahunnya, artinya tidak ada penambahan industri yang bergerak dibidang agribisnis kurun waktu 2020-2024.

Gambar 2.55
Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2020–2024

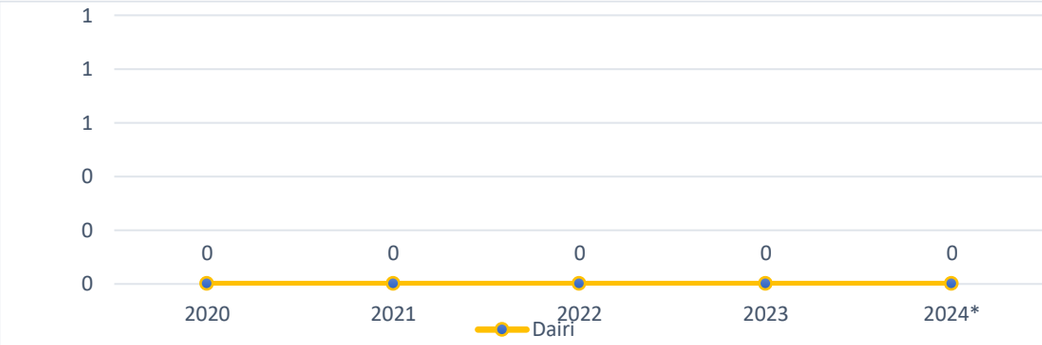

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 60 produk, data Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia dan pada 2023 sebanyak 16 dan Tahun 2024 sebanyak 18 Produk.

Gambar 2.56
Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2020 – 20224

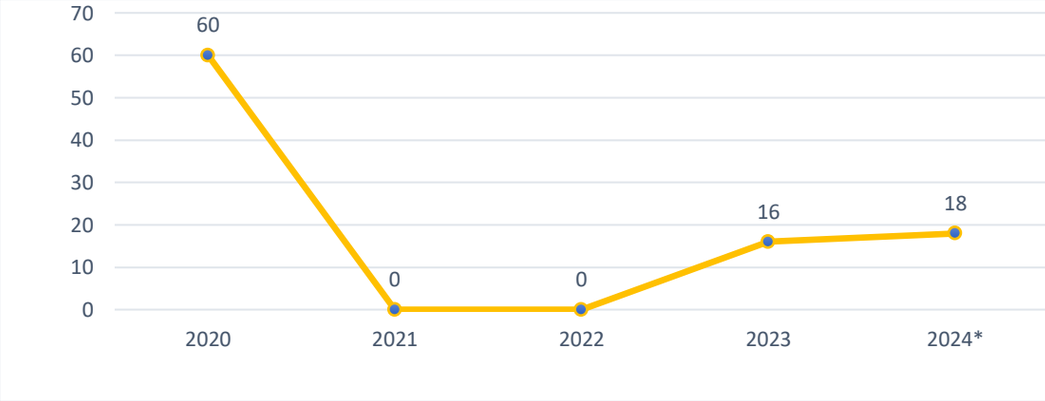

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.57
Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2020 – 2024

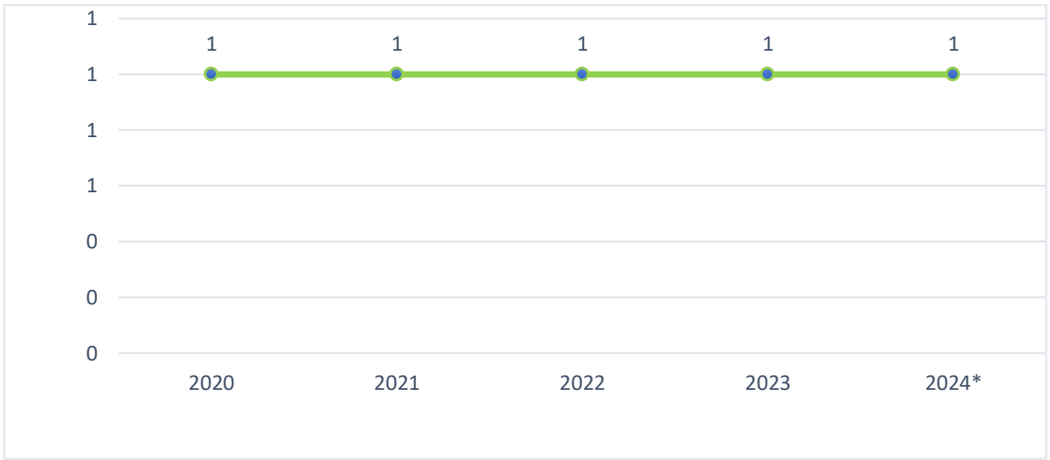

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah 1 dokumen setiap tahunnya.

4. Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.58
Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2020-2024

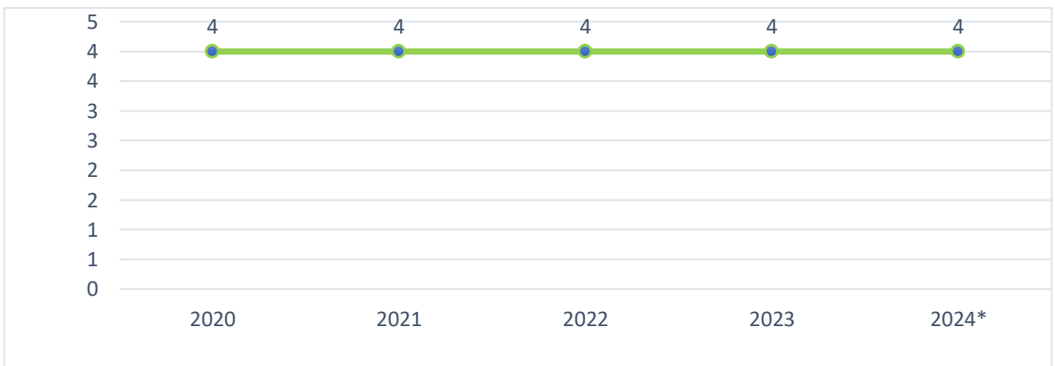

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya.

5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.59
Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2020-2024

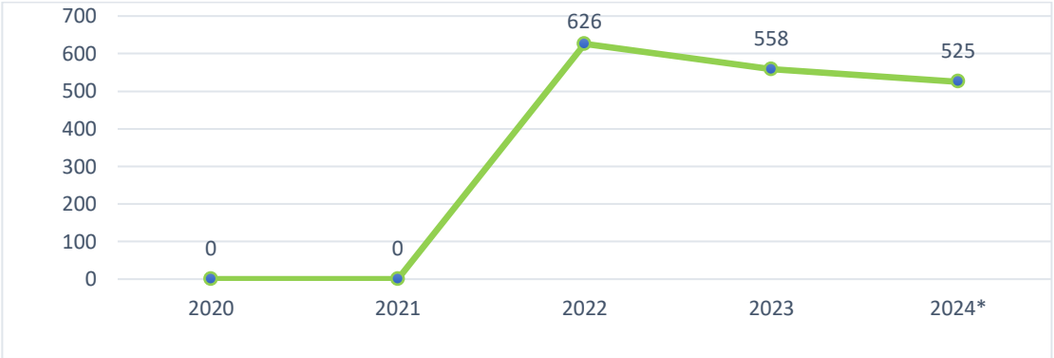

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 data tidak tersedia sementara untuk Tahun 2022 ada sebanyak 626 unit, pada Tahun 2023 sebanyak 558 unit dan tahun 2024 ada sebanyak 525 unit.

2.3.3.4. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi Perikanan Tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunun yang cukup signifikan dari 52 Ton/tahun menjadi 38,75 Ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung danau toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 2.60
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024

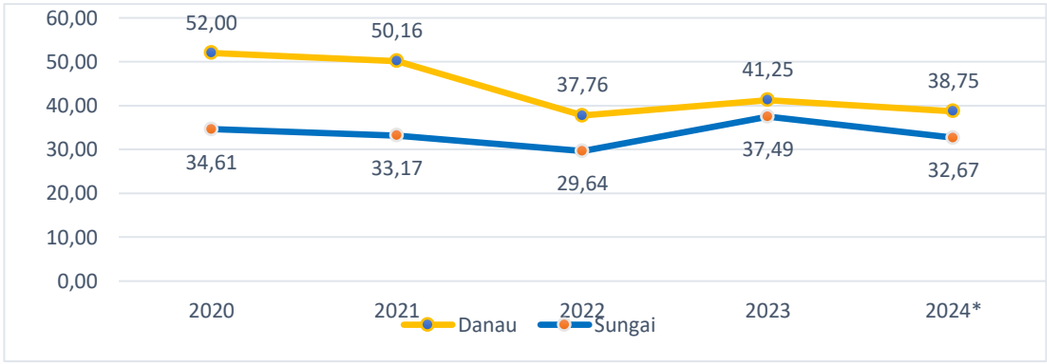

Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2. Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: Perikanan Budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari danau toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem bioflok. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 2.61
Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024

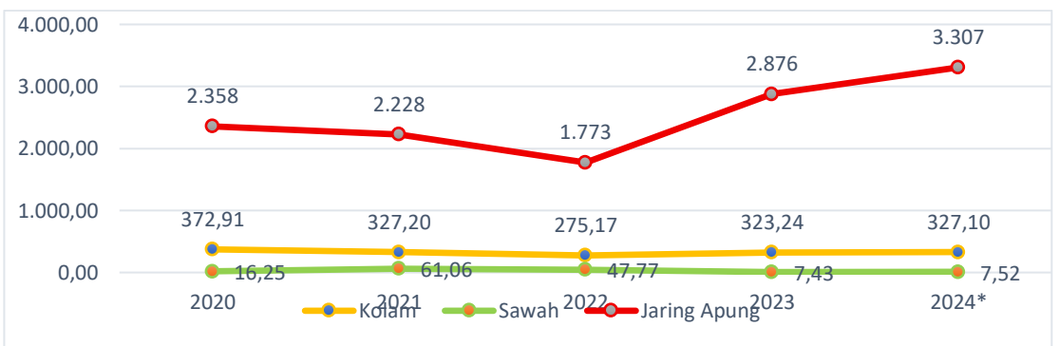

Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan unggulan daerah. Suatu Daya Saing (competitiveness) merupakan salah satu faKtor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, Jika pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 10,350 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2024 mencapai 11,355 juta rupiah per tahun. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Dairi masih dibawah Sumatera Utara dan Nasional.

2.4.2. Fokus Wilayah Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus di kebut Pemerintah. Pembangunan Infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur dikawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi dan wilayah.

2.4.3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65

tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang fluktuaksi namun cenderung menurun pada tahun 2029. Pada Tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 53,98 persen meningkat menjadi 55,71 pada Tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada Tahun 2029, penduduk usia produktif menanggung bebas 55-56 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

2.4.4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

2.4.4.1. Daya Dukung Teknologi Spasial

Analisis daya dukung wilayah tidak lagi dapat dipisahkan dari integrasi teknologi spasial, terutama dalam merespons karakteristik fisik lingkungan yang ekstrem. Kabupaten Dairi, yang didominasi oleh bentang alam perbukitan bergelombang hingga pegunungan terjal dengan kelerengan di atas 40%, memiliki kerentanan inheren yang sangat tinggi terhadap bencana gerakan tanah (longsor). Karakteristik topografi makro ini secara langsung menekan keandalan konektivitas darat daerah.

Berdasarkan data wilayah, kerentanan spasial ini berkorelasi kuat dengan rendahnya angka kemantapan jalan kabupaten yang baru mencapai 52,66% pada tahun 2024. Angka kemantapan yang berada sedikit di atas paruh total panjang jalan ini menunjukkan bahwa hampir separuh jaringan logistik dan mobilitas penduduk berada dalam kondisi rentan (rusak ringan hingga rusak berat). Kerentanan ini kian tereskalasi pada titik-titik koridor jalan yang memotong lereng curam, di mana kejadian longsor mikro sering kali memutus total aksesibilitas dan melumpuhkan rantai pasok agribisnis hampir di semua kecamatan serta akses pariwisata di Kecamatan Silahisabungan menuju DPSP Danau Toba.

Oleh karena itu, intervensi sektoral tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan pemeliharaan infrastruktur konvensional yang bersifat reaktif. Kabupaten Dairi memerlukan transformasi ke arah manajemen aset jalan preventif-spasial. Hal ini diwujudkan melalui konsep integrasi Sistem Pemantauan Otomatisasi Daerah Rawan Longsor (SPODRL) pada koridor jalan kabupaten berkategori tidak mantap dan berisiko tinggi.

Sistem dengan memadukan data makro spasial (seperti tata guna lahan, curah hujan harian dari satelit, dan peta kerentanan gerakan tanah PVMBG) dengan sensor IoT (*Internet of Things*) mikro sektoral di lapangan. Mekanisme kerjanya dapat dirancang melalui tiga pilar utama berikut:

1. Sensor Nirkabel Geoteknik Pasif (*Edge Computing*)
   Pemasangan sensor ekstensometer (pengukur pergeseran tanah) dan inklinometer digital secara nirkabel pada lereng-lereng kritis di tepi jalan kabupaten. Sensor ini memantau deformasi lateral tanah dan kejenuhan air tanah secara *real-time*.
2. Platform Prediktif berbasis SIG (*Geographic Information System*)
   Data dari sensor dikirimkan ke pusat data spasial kabupaten untuk diolah menggunakan algoritma ambang batas (*threshold*). Jika pergerakan tanah atau akumulasi curah hujan melampaui batas aman, sistem secara otomatis menetapkan status siaga.
3. Sistem Peringatan Dini Dinamis (*Early Warning System* - EWS): Integrasi sistem dengan papan informasi digital (VMS/ *Variable Message Sign*) di pintu masuk jalur rawan, serta notifikasi otomatis

ke dinas terkait (PUTR dan BPBD) guna mempercepat pengerahan alat berat ke lokasi sebelum atau sesaat setelah terjadi runtuhan material.

Penerapan teknologi spasial ini dimaksudkan akan menggeser paradigma pembangunan infrastruktur dari *repair and rebuild* (perbaikan pascabencana) menjadi *predict and prevent* (prediksi dan mitigasi). Penghematan anggaran daerah dari berkurangnya biaya rekonstruksi darurat akibat longsor dapat dialokasikan kembali untuk mengejar ketertinggalan jalan yang belum mantap. Dengan demikian, peningkatan kemantapan jalan tidak hanya diukur dari aspek struktural (ketebalan aspal), melainkan juga dari aspek fungsional dan ketangguhan (*resilience*) jaringan transportasi terhadap dinamika spasial wilayah Kabupaten Dairi.

2.4.4.2. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dimana besaran pada Tahun 2020 adalah Rp. 9.317.91 kemudian pada Tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 dan menjadi 10.716,94 pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11.651,15 dan tahun 2024 juga meningkat menjadi 12.693,88 Milyar Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.257,91

Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 Milyar.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.508,05, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 dan pada Tahun 2022 menjadi 6.921,48, kemudian pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan 7,270,26 dan Tahun 2024 kembali meningkat sebesar Rp. 7.631,31 Pada Tahun 2024 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.422,75 disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11, Konstruksi sebesar Rp. 938,80, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 661,94 dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 304,75.

Distribusi persentase PDRB pada Tahun 2020-2024 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Tahun 2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,79%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 %.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2020-2024 yang paling berkontribusi di Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,24% sektor disusul Pertambangan dan Galian sebesar 6,19% kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,16%, sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,96%, sektor Industri Pengolahan sebesar 5,86% dan sektor Konstruksi sebesar 5,61%.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha

dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dengan lapangan usaha sebagai berikut:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya.

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2025, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap

berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan.

3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatika kententuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan
    b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
    c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

2.6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.6.1. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah menyajikan pandangan komprehensif tentang urgensi perencanaan dan evaluasi yang berbasis pada indikator terukur. Melalui penetapan indikator yang tepat dan dapat diukur, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan efektivitas dalam mengarahkan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Merujuk pada Tabel 2.26 tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi dalam RKPD Tahun 2025, terlihat bahwa prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD tersebut akan dievaluasi melalui pencapaian berbagai indikator yang akan menunjukkan sejauh mana dampak program kegiatan terhadap pergerakan indikator yang dimaksud.

Sistem evaluasi berbasis indikator memungkinkan dilakukannya penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap efektivitas program pembangunan. Keberadaan indikator yang terperinci dan konkret memberikan parameter yang jelas dalam mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih baik, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan tersedianya indikator yang sesuai, pemerintah daerah memiliki landasan kuat dalam menentukan skala prioritas, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat guna. Indikator juga berfungsi sebagai instrumen dalam mengidentifikasi praktik- praktik sukses yang layak

direplikasi serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Implementasi indikator dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada data akurat dan kajian mendalam, sehingga dapat menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel yang memuat rincian pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah:

Tabel 2.26
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
1	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**75,88**	**76,58**	**75,88**	**99,09**	**Sangat Tinggi**	
1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,74	13,74	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,90	9,89	99,90	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,68	74,38	99,60	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	N/A	0,82	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.3	Terwujudnya Berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	54,28	54,30	54,28	99,96	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	56,83	57,33	56,83	99,13	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.5	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	70,23	71,63	70,23	98,05	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.6	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	97,96	98,54	97,96	99,41	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,32	0,27	0,32	84,95	Tinggi	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	58,90	59,23	58,90	99,44	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.7	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,43	58,90	57,43	97,50	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Angka**	**4,95**	**5,00**	**4,95**	**99,00**	**Sangat Tinggi**	
2.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	82,50	83,00	82,50	99,40	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Angka	100,275	100,280	100,275	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	136,23	137,50	136,23	99,08	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.4	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan	Angka	17,79	17,80	17,79	99,94	Sangat Tinggi	Dinas Perindagkop dan UKM

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
		terhadap PDRB							
2.5	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum	Angka	2,56	2,60	2,56	98,46	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2.6	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Saya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,38	3,40	3,38	99,41	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
2.7	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persentase	7,79	7,99	7,79	97,50	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
2.8	Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	38.886.845	43.080.524	38.886.845	90,27	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,43	1,22	1,43	85,31	Tinggi	
2.9	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Angka	14,88	13,10	14,88	113,59	Melebihi Target	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.10	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Angka	N/A	65,87	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
3	**Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim**	**Penurunan intensitas emisi gas ruang kaca**	**Angka**	**120,342**	**133,286**	**120,342**	**90,29**	**Sangat Tinggi**	
3.1	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	77,90	78,07	77,90	99,78	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
4	**Terwujudnya Birokrasi yang profesional, transparan,**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Angka**	**70,12**	**70,50**	**70,12**	**99,46**	**Sangat Tinggi**	

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
	akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas								
4.1	Terwujudnya tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien	SAKIP	Angka	61,06	62,10	61,06	98,33	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4.2	Meningkatnya tata Kelola arsip	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	Angka	64,34	65,00	64,34	98,98	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Aet dan Daerah
4.4	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	2,79	2,85	2,79	97,89	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,00	3,10	3,00	96,77	Sangat Tinggi	Inspektorat
4.5	Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN	Indeks NSPK manajemen ASN	Indeks	B	B	B	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	Angka	3,83	3,84	3,83	99,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah, Kecamatan,Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
									dan Ketenagakerjaan, RSU, Sekretariat Dewan
4.7	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai indeks tranformasi digital pilar pemerintah	Angka	N/A	40,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.8	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,13	2,13	2,13	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.9	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE	Angka	2,69	2,80	2,69	96,07	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.10	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	N/A	76,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	**Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan dasar**	**Indeks Infrastruktur (Jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi)**	**Angka**	**60,07**	**64,00**	**60,07**	**93,86**	**Sangat Tinggi**	
5.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	60,07	64,00	60,07	93,86	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.2	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau	Persentase	80,09	81,00	80,09	98,88	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.3	Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan	Indeks tertib administrasi pertanahan	Angka	63,60	66,24	63,60	96,01	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	2025				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target Kinerja 2025	Realisasi	Capaian	Skala Nilai	
	tanah								
5.4	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas	Angka	45,61	45,61	45,61	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
6	**Meningkatnya Ketangguhan Daerah**	**Tingkat Kemiskinan**	**Angka**	**7,10**	**7,05**	**6,98**	**101,003**	**Melebihi Target**	
6.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	N/A	57,21	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
		Indeks Kerukunan antar umat beragama	**Angka**	**76,47**	**78,00**	**76,47**	**98,04**	**Sangat Tinggi**	
6.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Angka	60,00	65,00	60,00	92,31	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks Resiko Bencana	Angka	116,00	115,50	116,00	99,57	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	N/A	75,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Harmonisasi Indonesia (IHaI)	Angka	N/A	N/A	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan

   Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Realisasi dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 75,88 dari target 76,58 maka capaian indikator tersebut sebesar 99,09 dengan kriteria Sangat Tinggi

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

   Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

   Realisasi dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah 4,95 dari target 5,00 maka capaian indikator tersebut sebesar 99,00 dengan kriteria Sangat Tinggi

3. Meningkatnya resiliensi terhadap perubahan iklim

   Indikator : Penurunan Intensitas Emisi Gas Ruang Kaca

   Realisasi dari indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Ruang Kaca adalah 120,342 dari target 133,286 maka capaian indikator tersebut sebesar 90,29 dengan kriteria Sangat Tinggi

4. Terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

   Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

   Realiasasi dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah 70,12 dari target 70,50 maka capaian indikator tersebut sebesar 99,46 dengan kriteria Sangat Tinggi

5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan percepatan layanan dasar

   Indikator : Indeks Infrastruktur (Jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi)

Realisasi dari indikator Indeks Infrastruktur adalah 60,07 dari target 64,00 maka capaian indikator tersebut sebesar 93,86 dengan kriteria Sangat Tinggi

6. Meningkatnya ketangguhan daerah

Indikator : 1. Tingkat Kemiskinan

Realisasi dari indikator Tingkat Kemiskinan adalah 6,98 dari target 7,05 maka capaian indikat0r tersebut sebesar 101,003 dengan kriteria Melebihi Target

2. Indeks kerukunan antar umat beragama

Realisasi dari indikator Indeks kerukunan antar umat beragama adalah 76,47 dari target 78,00 maka capaian indikator tersebut sebesar 98,04 dengan kriteria Sangat Tinggi

2.6.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Capaian kinerja makro mencerminkan hasil pencapaian yang mendeskripsikan tingkat kesuksesan implementasi pemerintahan daerah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja makro merupakan hasil kolaborasi berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam konteks pembangunan nasional. Indikator makro merepresentasikan indikator terintegrasi (komposit) dari beragam aktivitas pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.

Mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, terdapat 9 (sembilan) indikator makro pembangunan terdiri dari beberapa parameter utama. Berdasarkan data terkini saat laporan ini dipublikasikan, hanya beberapa indikator makro yang telah dirilis oleh BPS Kabupaten Dairi sebagai sumber data rujukan resmi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini disajikan tabel yang memuat capaian kinerja indikator makro Kabupaten Dairi Tahun 2025.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Dairi

No.	Indikaor Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)	Skala Nilai Kinerja	Ket
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,97	5,000	4,970	99,400	Sangat Tinggi	
2	PDRB Per Kapita	Juta (Rupiah)	38,39	42,000	38,390	91,405	Sangat Tinggi	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,11	1,112	1,110	99,820	Sangat Tinggi	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,10	7,050	6,980	101,003	Melebihi Target	
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	0,21	0,221	0,215	102,791	Melebihi Target	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,88	76,580	75,880	99,086	Sangat Tinggi	
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 - ekuivalen	120,342	133,286	120,342	90,289	Sangat Tinggi	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	77,90	78,070	80,480	103,087	Melebihi Target	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,43	1,220	1,210	100,826	Melebihi Target	

2.6.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator kinerja daerah meliputi berbagai aspek seperti aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, indikator sistem pelayanan minimal dan indikator-indikator lainnya yang relevan dengan fungsi dan tugas masing-masing perangkat daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian pemerintah daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi taggungjawab kepala perangkat daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan target tersebut bersumber dari RKPD tahun 2025.

Berikut capaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci yang dikutip berdasarkan laporan evaluasi renja perangkat daerah yang telah diterima, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,500	83,000	82,500	99,398	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	NA	7,540	0,000	0,000	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Konsumsi Listrik per kapita	kwh/kapita	275,750	281,000	275,750	98,132	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca	(TonCo2eq)	120,342	133,286	120,342	90,289	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,540	77,070	76,540	99,312	Dinas PekerjaanUmum dan TataRuang
Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	60,090	60,100	60,090	99,983	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	N/A	0,562	0,000	0,000	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	77,900	78,070	80,480	103,087	Dinas Lingkungan Hidup
Rumah Tangga dengan aksessanitasi aman	Persen	5,300	5,300	5,300	100,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Indeks Resiko Bencana	Angka	116,000	115,500	116,000	99,569	Badan Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,730	0,540	0,730	135,185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,970	5,000	4,970	99,400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,100	7,050	6,980	101,003	Dinas Sosial
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/ Orang	38,390	42,000	38,390	91,405	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,430	1,220	1,210	100,826	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Indeks Gini	Angka	0,210	0,221	0,215	102,791	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,880	76,580	75,880	99,086	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,380	74,680	74,710	100,040	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,820	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29,000	27,120	29,000	93,517	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	90,000	90,000	90,000	100,000	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,580	90,000	76,580	85,089	Dinas Kesehatan
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,890	95,000	93,890	98,832	Dinas Kesehatan
Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD)	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,400	86,600	86,400	99,769	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,890	9,900	9,890	99,899	Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,530	13,740	13,530	98,472	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Literasi SDBerdasarkan Assesmen Nasional	Angka	62,670	65,170	77,780	119,349	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPBerdasarkan Assesmen Nasional	Angka	69,050	70,150	73,900	105,346	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	58,320	61,220	78,960	128,977	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	63,210	64,710	72,590	112,177	Dinas Pendidikan
Indeks Pembangunan LiterasiMasyarakat	Angka	70,230	71,630	66,610	92,992	Dinas Perpustakaandan Kearsipan
Indeks Literasi Digital	Angka	41,350	42,180	41,350	98,032	Dinas Komunikasidan Informatika
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	51,350	52,000	1,180	2,269	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,470	78,000	76,470	98,038	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,280	54,300	54,300	100,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,070	59,230	58,070	98,042	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,430	58,900	57,430	97,504	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,319	0,271	0,319	84,953	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,960	98,540	97,960	99,411	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,830	57,330	56,340	98,273	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
ASPEK DAYA SAING						
Kontribusi PDRB IndustriPengolahan	Persen	0,380	0,400	2,500	625,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio PDRB Penyediaan AkomodasiMakan dan Minum	Persen	2,560	2,600	2,580	99,231	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	70,750	0,000	0,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,110	1,112	1,110	99,820	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Orang	38,390	42,000	38,390	91,405	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	4,500	0,000	0,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pertumbuhan kunjunganwisatawan	Persen	2,000	4,000	2,000	50,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Proporsi Jumlah UMKM	Persen	1,200	1,210	1,200	99,174	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,500	2,600	2,500	96,154	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,980	44,000	43,980	99,955	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan TeknologiInformasi dan komunikasi	Angka	N/A	6,000	0,000	0,000	Dinas Komunikasidan Informatika
Tingkat Inflasi	Persen	2,780	2,640	2,780	105,303	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PRDB Kabupaten	Persen	1,110	1,112	1,110	99,820	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,980	24,990	24,980	99,960	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	Persen	52,660	53,880	52,660	97,736	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	1,240	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	79,860	79,880	79,860	99,975	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A*	43,00-48,00	0,000	0,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Return on Asset (ROA) BUMD	Perse	N/A	0,000	0,000	0,000	Sekretariat Daerah
IKAD	Angka	N/A	4,220	0,000	0,000	Sekretariat Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,002	0,002	0,002	90,000	Badan Pendapatan Daerah
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	N/A	75,000	0,000	0,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,830	3,840	3,830	99,740	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,120	70,500	70,120	99,461	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	92,360	92,400	92,360	99,957	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap layanan perijinan	Angka	81,197	81,500	81,197	99,628	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Angka	96,060	98,000	96,060	98,020	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik	Angka	2,690	2,770	2,690	97,112	Dinas Komunikasidan Informatika
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,200	97,210	97,200	99,990	Sekretariat Daerah
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	96,100	97,100	96,100	98,970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Proporsi Penduduk yang merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Satuan PolisiPamong Praja
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	62,670	65,170	62,670	96,164	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	69,050	70,150	69,050	98,432	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	58,320	61,220	58,320	95,263	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	63,210	64,710	63,210	97,682	Dinas Pendidikan
Persentase anak usia 5-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	0,130	0,180	0,130	72,222	Dinas Pendidikan
Indeks Pemerataan Guru	Angka	N/A	100,000	0,000	0,000	Dinas Pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	N/A	N/A	0,000	0,000	Dinas Pendidikan
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Diterbitkan/Diperbarui	Persen	44,830	54,830	44,830	81,762	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	59,690	62,870	59,690	94,942	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	99,060	99,200	99,060	99,859	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	4,340	5,020	4,340	86,454	Dinas Pendidikan
Persentase jumlah satuan PAUD teraktreditasi minimal B	Persen	29,410	31,630	29,410	92,981	Dinas Pendidikan
Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	54,620	48,237	54,620	113,233	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SD	Persen	63,070	65,570	63,070	96,187	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SMP	Persen	57,980	60,380	57,980	96,025	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SD	Persen	77,610	78,510	77,610	98,854	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SMP	Persen	70,230	71,730	70,230	97,909	Dinas Pendidikan
Iklim kebhinekaan SD	Persen	72,720	73,720	72,720	98,644	Dinas Pendidikan
Iklim kebhinekaan SMP	Persen	72,340	73,340	72,340	98,636	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kesehatan						
Insidensi TBC per 100.000 penduduk	Kasus per 100.000 Penduduk	379,300	441,430	379,300	85,925	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29,000	27,120	29,000	93,517	Dinas Kesehatan
Jumlah Kematian Balita	Angka	40,000	40,000	40,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Pemeriksaaan Kesehatan Gratis	Persen	0,000	45,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	76,500	77,000	76,500	99,351	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,580	90,000	76,580	85,089	Dinas Kesehatan
Persentase Hipertensi Dalam Pengendalian	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase Balita gizi buruk yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase desa/kelurahan mencapai target STBM	Persen	36,090	78,000	36,090	46,269	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	77,000	81,000	77,000	95,062	Dinas Kesehatan
Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	N/A	93,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	83,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	72,000	75,000	72,000	96,000	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan jenistenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	61,000	66,000	61,000	92,424	Dinas Kesehatan
Persentase Rumah	Persen	79,660	77,000	79,660	103,455	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas deng ansarana sesuai dengan standar	Persen	44,000	50,000	44,000	88,000	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas deng anprasarana sesuai dengan standar	Persen	66,000	72,000	66,000	91,667	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan alatkesehatan sesuai standar	Persen	72,000	77,000	72,000	93,506	Dinas Kesehatan
Persentase Pasyankes Pemerintah dengan	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ketersediaan obat sesuai standar						
Jumlah Pasyankes Pemerintahdengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP sesuai standar)	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,260	100,000	87,260	87,260	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahirmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,320	100,000	97,320	97,320	Dinas Kesehatan
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar	Persen	94,470	100,000	94,470	94,470	Dinas Kesehatan
Persentase usia 15-59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	83,580	100,000	83,580	83,580	Dinas Kesehatan
Persentase usia warga negara 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,680	100,000	96,680	96,680	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,550	100,000	72,550	72,550	Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,030	100,000	93,030	93,030	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,060	100,000	87,060	87,060	Dinas Kesehatan
Persentase kasus berpotensi wabah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
yang ditangani sesuai standar						
Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif	Persen	32,020	35,000	32,020	91,486	Dinas Kesehatan
Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	94,000	95,000	94,000	98,947	Dinas Kesehatan
Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Angka insidence rate DemamBerdarah Dengue (DBD)	Per 1000 penduduk	50,000	48,000	50,000	104,167	Dinas Kesehatan
Persentase balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase keberhasilan pengobatan TB (TSR)	Persen	76,580	90,000	76,580	85,089	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	50,000	61,000	50,000	81,967	Dinas Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi	Persen	N/A	50,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Kesehatan
Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perijinan	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	N/A	81,000	0,000	0,000	Dinas Kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	77,000	77,000	77,000	100,000	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Persen	96,060	98,000	96,060	98,020	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	113,330	100,000	113,330	113,330	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemeliharaan sarana prasasara dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Cost Recovery Rate (CRR)	Persen	83,810	85,000	83,810	98,600	Rumah Sakit Umum Daerah
Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM-RS	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit	Persen	89,580	100,000	89,580	89,580	Rumah Sakit Umum Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	55,290	55,550	55,290	99,532	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektare	500,000	550,000	500,000	90,909	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	52,660	53,880	52,660	97,736	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,540	77,070	76,540	99,312	Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,300	5,300	5,300	100,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung	Persen	57,140	80,000	57,140	71,425	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	25,000	30,000	25,000	83,333	Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang
Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	220,000	250,000	220,000	88,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Indeks Penyelenggaraan Penataanruang	Angka	N/A	60,000	0,000	0,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan perumahan air limbah domestik	Persen	4,299	4,329	4,299	99,307	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	20,000	25,000	20,000	80,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase luas layanan irigasi multi komoditas	Persen	94,420	94,720	94,420	99,683	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat						
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 hektare di kabupaten/kota ditangani	Persen	1,660	3,100	1,660	53,548	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	80,090	81,000	80,090	98,877	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	14,000	14,500	14,000	96,552	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Berkurangnya unit RTLH	Persen	70,120	70,200	70,120	99,886	Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang
Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani permukiman kumuh	Persen	1,660	3,100	1,660	53,548	Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Satuan PolisiPamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantiburm	Angka	N/A	65,000	47,970	73,800	Satuan PolisiPamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Angka	N/A	50,000	0,000	0,000	Satuan PolisiPamong Praja
Persentase gangguan Trantibum yang	Persen	97,000	98,000	97,000	98,980	Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
dapat diselesaikan						
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	41,200	41,200	41,200	100,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	N/A	N/A	0,000	0,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80,000	82,000	80,000	97,561	Satuan PolisiPamong Praja
Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	N/A	80,000	0,000	0,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	70,000	0,000	0,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	N/A	70,000	0,000	0,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,540	0,730	135,185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial						
Cakupan PPKS yang menerima layanan kesejahteraan sosial	Persen	49,900	43,950	49,900	113,538	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang ditangani sesuai standart	Persen	55,000	55,000	55,000	100,000	Dinas Sosial
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial
Cakupan layanan taman makam pahlawan	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	N/A	55,000	0,000	0,000	Dinas Sosial
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	N/A	1,000	0,000	0,000	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	51,350	52,000	51,350	98,750	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,180	0,190	0,180	94,737	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja kabupaten/kota dalam satu (daerah provinsi)	Persen	90,170	90,180	90,170	99,989	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	83,800	83,810	83,800	99,988	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Jumlah LPK yang terakreditasi	LPK	2,000	2,000	2,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312,000	312,000	312,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7,000	10,000	7,000	70,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja di sektor	Persen	NA	100,000	0,000	0,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
prioritas yang meningkat produktivitasnya						Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	8,090	8,290	8,090	97,587	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32,000	32100,000	32,000	0,100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	32,000	32100,000	32,000	0,100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	N/A	54,980	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	N/A	50,000	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Angka	N/A	75,350	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	59,140	59,190	59,140	99,916	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	52,360	60,000	52,360	87,267	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Persen	55,000	57,000	55,000	96,491	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pangan						
Prevalensi ketidakcukupan konsumsipangan (*Pravelence of Undermourishment*)	Persen	N.A	7,540	0,000	0,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagungsesuai kebutuhan	Persen	130,380	131,300	130,380	99,299	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangandan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,400	86,800	86,400	99,539	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase daerah rentan rawanpangan	Persen	21,300	19,000	21,300	112,105	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1,000	1,000	1,000	100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pertanahan						
Persentase pengadaan tanah untukkepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	64,910	64,050	64,910	101,343	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	0,025	0,500	0,025	5,000	Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang
Lingkungan Hidup						
Indeks kualitas Air	Angka	69,500	74,610	69,500	93,151	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas Udara	Angka	94,300	83,790	94,300	112,543	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lahan	Angka	62,010	62,080	62,010	99,887	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas LingkunganHidup
Persentase RTH	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Lingkungan Hidup
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas LingkunganHidup
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	17,700	0,000	0,000	0,000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	4,120	8,000	4,120	51,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	63,410	70,000	63,410	90,586	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persen	98,000	98,200	98,000	99,796	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	58,830	60,000	58,830	98,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	43,560	45,000	43,560	96,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi Yang melaporkan	Persen	56,160	58,000	56,160	96,828	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,790	99,800	99,790	99,990	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Persentase desa mandiri	Persen	N/A	1,240	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	0,620	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase peningkatan status desamandiri	Persen	N/A	1,240	0,000	0,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	80,000	80,000	80,000	100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	N/A	0,000	0,000	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	2,330	2,330	2,330	100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Indeks Pembangunan Keluarga(iBangga)	Angka	57,430	58,900	57,430	97,504	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	3,010	2,990	3,010	100,669	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase pemakaian kontrasepsiModern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/*mCPR)	Persen	51,810	55,810	51,810	92,833	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun *(Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiranper 1000 US 15-19 thn	7,900	7,300	7,900	108,219	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase kebutuhan ber- KB yangtidak terpenuhi (*Unmet Need)*	Persen	18,980	16,980	18,980	111,779	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KBmodern	Persen	70,000	71,100	70,000	98,453	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	13,700	13,000	13,700	105,385	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	70,400	78,000	70,400	90,256	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan						
Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70,000	70,100	70,000	99,857	Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan bermotor yang layak jalan	Unit	616,000	2010,000	616,000	30,647	Dinas Perhubungan
Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota	Persen	50,000	50,100	50,000	99,800	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika						
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	N/A	65,000	0,000	0,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul E-walidata SIPD	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Angka	N/A	200,000	0,000	0,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Indeks SPBE terkait keamanan	Angka	N/A	200,000	0,000	0,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%	Persen	55,700	55,900	55,700	99,642	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Persentase koperasi aktif	Persen	41,230	46,390	41,230	88,877	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
		22,000	22,000	22,000	100,000	
Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	1,7500	2,760	1,7500	63,406	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Usaha Kecildan Menengah
Penanaman Modal dan Perijinan						
Pembentukan Modal Tetap Bruto(PMTB)	Persen	24,980	24,990	24,980	99,960	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Nilai Investasi	(Rp. Milyard)	8.718,07	9860,140	8.718,07	88,417	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMDN	Persen	72,050	72,050	72,050	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMA	Persen	27,950	27,950	27,950	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah proyek investasi	perusahaan	170,000	175,000	170,000	97,143	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Realisasi total terhadap Target Investasi (IP)	Persen	N/A	13,100	0,000	0,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	N/A	1,180	0,000	0,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian permasalahandan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase pemanfaatan data daninformasi penanaman modal	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Persentase ijin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Ketenagakerjaan
Kepemudaan dan Olahraga						
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasisosial kemasyarakatan	Persen	10,630	12,000	10,630	88,583	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga	Persen	14,100	15,000	14,100	94,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kebudayaan						
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	100,000	100,000	100,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	12,5	25,000	12,500	50,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan						
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	63,120	64,000	63,120	98,625	Dinas Perputakaandan Kearsipan
Kearsipan						
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,670	66,800	66,670	99,805	Dinas Perputakaandan Kearsipan
Urusan Pilihan						
Pertanian						
Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	N/A	0,000	0,000	0,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	N/A	100,000	0,000	0,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produktivitas pertanianper hektare per tahun	Persen	1,000	1,150	1,000	86,957	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangandan Perikanan
Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1,000	1,000	1,000	100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangandan Perikanan
Peningkatan produksi hortikultura	Persen	0,880	0,880	0,880	100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektare	6.000,000	6.000,000	6.000,000	100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	22,370	23,000	22,370	97,261	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Perikanan						
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	3713,441	3713,951	3713,441	99,986	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peternakan						
Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	0,000	5,000	0,000	0,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangandan Perikanan
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	Persen	N/A	50,000	0,000	0,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
(PHMS)						
Pariwisata						
Persentase pertumbuhan kunjunganwisatawan	Persen	N/A	2,000	0,000	0,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	N/A	2,000	0,000	0,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	N/A	2,000	0,000	0,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	N/A	2,000	0,000	0,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perdagangan						
Persentase alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	69,000	90,000	69,000	76,667	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	Persen	4,170	4,030	4,170	103,474	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	35,000	41,000	35,000	85,366	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian						
Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM)	Persen	5,000	5,000	5,000	100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	38,000	48,000	38,000	79,167	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
SAKIP	Nilai	61,06	62,100	61,060	98,325	Sekretariat Daerah
Nilai EPPD	Nilai	2,2	2,700	2,200	81,481	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,20	97,210	97,200	99,990	Sekretariat Daerah
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	40,39	45,000	40,390	89,756	Sekretariat Daerah
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,830	3,840	3,830	99,740	Sekretariat Daerah
Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	N/A	63,000	0,000	0,000	Sekretariat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,97	76,610	89,970	117,439	Sekretariat Daerah
Indeks Zakat Daerah	Angka	N/A	0,200	0,000	0,000	Sekretariat Daerah
Persentase pelayanan kedinasanpimpinan dan tamu utama pemerintah daerah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah
Indeks Kematangan Organisasi	Angka	N/A	N/A	0,000	0,000	Sekretariat Daerah
Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Unit	7,000	7,000	7,000	100,000	Sekretariat Daerah
Nilai komponen pelaporan kinerja	Angka	10,580	10,830	10,580	97,692	Sekretariat Daerah
Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	13,330	20,000	13,330	66,650	Sekretariat Daerah
Efektivitas kerjasama daerah	Angka	0,000	0,000	0,000	0,000	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD						
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan terhadap DPRD sesuai dengan SOP	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat DPRD
Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat DPRD
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah						
Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	N/A	76,000	76,000	100,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,980	44,000	43,980	99,955	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase fasilitasi,pembinaan, bimbingan teknisdan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	90,000	90,000	90,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepatwaktu	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase penambahan nilai asettetap	Persen	10,000	10,000	10,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Rasio Belanja urusan pmerintahanumum dikurangi *transfer expenditures*	Persen	50,190	50,300	50,190	99,781	Badan Keuangandan Aset Daerah
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,78	89,000	88,780	99,753	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Ketepatan penetapan perda APBDTahun N	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,780	89,000	88,780	99,753	Badan Keuangandan Aset Daerah
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	82,720	83,000	82,720	99,663	Badan Keuangandan Aset Daerah
*Assets managemen*t	Kategori	4,000	4,000	4,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Cash Management: Rasio anggaransisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,089	0,081	0,089	109,998	Badan Keuangandan Aset Daerah
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information)*	Laporan	1,000	1,000	1,000	100,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	NA	22,000	0,000	0,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	NA	33,000	0,000	0,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	NA	90,000	0,000	0,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase penurunan SILPA	Persen	NA	1,000	0,000	0,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepatwaktu	Persen	NA	100,000	0,000	0,000	Badan Keuangandan Aset Daerah
Indeks Pengelolaan KeuanganDaerah (IPKD)	Indeks	76,890	77,000	76,890	99,857	Badan Keuangandan Aset Daerah
Badan Pendapatan Darah						

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rasio PAD	Persen	8,390	8,410	8,390	99,762	Badan Pendapatatan Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,002	0,002	0,002	90,000	Badan Pendapatatan Daerah
Kepegawaian						
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75,210	76,000	75,210	98,961	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Inspektorat						
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,790	2,850	2,730	95,789	Inspektorat
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,000	3,100	3,000	96,774	Inspektorat
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100,000	100,000	100,000	100,000	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	85,420	86,000	85,420	99,326	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Persen	98,720	98,000	98,720	100,735	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Kabupaten Dairi	Persen	73,230	85,000	73,230	86,153	Inspektorat
Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang pengawasan	Persen	80,000	80,000	80,000	100,000	Inspektorat
Kecamatan						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Nilai	93,690	93,700	93,690	99,989	KecamatanSidikalang
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Sumbul
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Siempat Nempu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	KecamatanTigalingga

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
layanan Kecamatan Tigalingga						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan TanahPinem
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan PegaganHilir
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	KecamatanParbuluan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Nilai	80,000	80,200	80,000	99,751	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Nilai	80,200	80,400	80,200	99,751	Kecamatan LaeParira
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Nilai	80,200	80,400	80,200	99,751	Kecamatan Gunung Sitember
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	KecamatanBerampu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Silahisabungan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Nilai	80,200	80,250	80,200	99,938	Kecamatan Sitinjo
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	80,000	82,000	80,000	97,561	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	90,000	91,000	90,000	98,901	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	90,000	91,000	90,000	98,901	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang	Persen	86,000	88,000	86,000	97,727	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

INDIKATOR	SATUAN	2024	2025			PD PENANGGUNG JAWAB
			Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
diselesaikan						

Sumber : Bappeda Kabupaten Dairi, Laporan Evaluasi Renja Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci perangkat daerah kabupaten dairi tahun 2025, diperoleh dari realisasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah yang didukung oleh keberhasilan kinerja program dimasing-masing perangkat daerah. Melalui hasil pelaporan evaluasi renja perangkat daerah dapat dilihat keberhasilan kinerja program dan capaian penyerapan anggaran perangkat daerah. Secara rekapitulasi hasil klasifikasi skala nilai kinerja dan keuangan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Rekapitulasi Skala Nilai Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	NILAI CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Pendidikan	460.711.731.262	438.371.210.948	95,15	Sangat Tinggi	80,30	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	180.386.277.859	161.207.420.418	89,37	Tinggi	96,46	Sangat Tinggi
3	RSUD	88.342.164.782	38.814.508.878	43,94	Sangat Rendah	67,39	Sedang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40.771.556.820	35.793.349.119	87,79	Tinggi	75,02	Tinggi
5	Satpol PP	5.267.336.579	4.777.998.710	90,71	Sangat Tinggi	83,35	Tinggi
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.639.527.198	6.042.071.646	91,00	Sangat Tinggi	99,00	Sangat Tinggi
7	Dinas Sosial	4.577.687.401	2.909.614.059	63,56	Rendah	92,72	Sangat Tinggi
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	4.256.348.037	3.827.170.616	89,92	Tinggi	97,34	Sangat Tinggi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.312.507.216	7.789.361.419	68,86	Sedang	88,77	Tinggi
10	Dinas Pertanian	23.700.021.685	15.482.406.608	65,33	Sedang	95,00	Sangat Tinggi
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.068.720.944	6.053.252.716	85,63	Tinggi	99,97	Sangat Tinggi
12	Dinas Kependudukan dan	5.788.539.391	5.183.348.983	89,55	Tinggi	93,49	Sangat Tinggi

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	NILAI CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pencatatan Sipil						
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.217.899.383	5.809.403.263	93,43	Sangat Tinggi	93,06	Sangat Tinggi
14	Dinas Perhubungan	4.123.029.013	3.830.752.149	92,91	Sangat Tinggi	92,70	Sangat Tinggi
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.296.741.839	5.533.107.867	87,87	Tinggi	99,40	Sangat Tinggi
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.762.477.197	4.189.936.044	87,98	Tinggi	51,84	Rendah
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kependudukan dan Olahraga	12.061.480.475	7.801.579.571	64,68	Rendah	62,30	Rendah
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.087.887.690	2.838.797.744	91,93	Sangat Tinggi	85,57	Tinggi
19	Sekretariat Daerah	51.782.246.821	39.365.973.399	76,02	Tinggi	79,20	Tinggi
20	Sekretariat DPRD	35.391.307.407	33.883.885.316	95,74	Sangat Tinggi	85,12	Tinggi
21	Bappeda	6.328.024.634	5.662.474.593	89,48	Tinggi	98,91	Sangat Tinggi
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	210.037.834.342	175.170.249.815	83,40	Tinggi	95,62	Sangat Tinggi
23	Badan Pendapatan Daerah	5.002.356.368	4.606.068.493	92,08	Sangat Tinggi	83,89	Tinggi
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.689.841.085	3.894.928.508	83,05	Tinggi	77,80	Tinggi
25	Inspektorat	10.545.774.067	9.384.460.034	88,99	Tinggi	86,65	Tinggi
26	Kec. Sidikalang	6.591.869.461	6.216.676.111	94,31	Sangat Tinggi	61,11	Rendah
27	Kec. Sumbul	2.849.995.194	2.543.313.965	89,24	Tinggi	99,38	Sangat Tinggi
28	Kec. Silima Punggpungga	2.752.302.513	2.337.106.539	84,91	Tinggi	87,81	Tinggi
29	Kec. Siempat Nempu	1.833.957.539	1.559.551.561	85,04	Tinggi	71,67	Sedang
30	Kec. Tigalingga	1.639.282.612	1.378.054.627	84,06	Tinggi	79,17	Tinggi
31	Kec. Tanah Pinem	2.520.445.512	1.356.107.389	53,80	Rendah	77,78	Tinggi
32	Kec. Pegagan Hilir	1.609.810.168	1.344.162.235	83,50	Tinggi	75,38	Tinggi
33	Kec. Parbuluan	1.764.383.412	1.585.203.662	89,84	Tinggi	93,75	Sangat Tinggi
34	Kec. Siempat Nempu Hilir	1.263.964.346	991.141.184	78,42	Tinggi	87,50	Tinggi
35	Kec. Siempat Nempu Hulu	1.750.834.148	1.476.369.733	84,32	Tinggi	91,67	Sangat Tinggi
36	Kec. Lae Parira	1.722.780.549	1.529.379.881	88,77	Tinggi	80,21	Tinggi
37	Kec. Gunung Sitember	1.501.022.291	1.276.494.577	85,04	Tinggi	98,75	Sangat Tinggi
38	Kec. Berampu	1.529.015.590	1.317.186.151	86,15	Tinggi	66,67	Sedang
39	Kec. Silahisabungan	1.326.453.190	981.530.456	74,00	Sedang	86,72	Tinggi
40	Kec. Sitinjo	2.407.131.863	2.118.166.002	88,00	Tinggi	95,31	Sangat

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	NILAI CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							Tinggi
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.348.342.437	4.125.211.940	94,87	Sangat Tinggi	99,73	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				**83,72**	**Tinggi**	**85,69**	**Tinggi**

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi.

Dari data persentase rata-rata capaian kinerja keseluruhan perangkat daerah tahun 2025 sebagaimana tersaji di atas, dapat simpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sebesar 85,69 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 83,72 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, berikut disajikan peringkat persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:

Tabel 2.30
Peringkat Persentase Rata-rata Kinerja Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Lingkungan Hidup	99,97	Sangat Tinggi
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99,73	Sangat Tinggi
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	99,40	Sangat Tinggi
4	Kec. Sumbul	99,38	Sangat Tinggi
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99,00	Sangat Tinggi
6	Bappeda	98,91	Sangat Tinggi
7	Kec. Gunung Sitember	98,75	Sangat Tinggi
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	97,34	Sangat Tinggi
9	Dinas Kesehatan	96,46	Sangat Tinggi
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	95,62	Sangat Tinggi
11	Kec. Sitinjo	95,31	Sangat Tinggi
12	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	95,00	Sangat Tinggi
13	Kec. Parbuluan	93,75	Sangat Tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,49	Sangat Tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93,06	Sangat Tinggi
16	Dinas Sosial	92,72	Sangat Tinggi
17	Dinas Perhubungan	92,70	Sangat Tinggi
18	Kec. Siempat Nempu Hulu	91,67	Sangat Tinggi
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,77	Tinggi
20	Kec. Silima Punggpungga	87,81	Tinggi

NO.	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*
21	Kec. Siempat Nempu Hilir	87,50	Tinggi
22	Kec. Silahisabungan	86,72	Tinggi
23	Inspektorat	86,65	Tinggi
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,57	Tinggi
25	Sekretariat DPRD	85,12	Tinggi
26	Badan Pendapatan Daerah	83,89	Tinggi
27	Satpol PP	83,35	Tinggi
28	Dinas Pendidikan	80,30	Tinggi
29	Kec. Lae Parira	80,21	Tinggi
30	Sekretariat Daerah	79,20	Tinggi
31	Kec. Tigalingga	79,17	Tinggi
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77,80	Tinggi
33	Kec. Tanah Pinem	77,78	Tinggi
34	Kec. Pegagan Hilir	75,38	Tinggi
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75,02	Tinggi
36	Kec. Siempat Nempu	71,67	Sedang
37	RSUD	67,39	Sedang
38	Kec. Berampu	66,67	Sedang
39	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kependudukan dan Olahraga	62,30	Rendah
40	Kec. Sidikalang	61,11	Rendah
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51,84	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		**83,43**	**Tinggi**

Berdasarkan tabel di atas, persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebesar 83,43 persen dari 100 persen target pada masing- masing rencana kerja. Predikat rata-rata kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 adalah “Tinggi”. Berdasarkan tingkat kinerja perangkat daerah, 3 (tiga) perangkat daerah yang memiliki kinerja tertinggi adalah:

1. Dinas Lingungan Hidup; Kinerja 99,97 dengan predikat “Sangat Tinggi”
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; kinerja 99,73 dengan predikat “Sangat Tinggi”
3. Dinas Komunikasi dan Informatika; kinerja 99,40 dengan predikat “Sangat Tinggi”

Sedangkan untuk peringkat persentase rata-rata capaian realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan capaian realisasi keuangan tertinggi hingga terendah, sebagai berikut:

Tabel 2.31
Persentase Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	NILAI CAPAIAN KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Sekretariat DPRD	35.391.307.407	33.883.885.316	95,74	Sangat Tinggi
2	Dinas Pendidikan	460.711.731.262	438.371.210.948	95,15	Sangat Tinggi
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.348.342.437	4.125.211.940	94,87	Sangat Tinggi
4	Kec. Sidikalang	6.591.869.461	6.216.676.111	94,31	Sangat Tinggi
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.217.899.383	5.809.403.263	93,43	Sangat Tinggi
6	Dinas Perhubungan	4.123.029.013	3.830.752.149	92,91	Sangat Tinggi
7	Badan Pendapatan Daerah	5.002.356.368	4.606.068.493	92,08	Sangat Tinggi
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.087.887.690	2.838.797.744	91,93	Sangat Tinggi
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.639.527.198	6.042.071.646	91,00	Sangat Tinggi
10	Satpol PP	5.267.336.579	4.777.998.710	90,71	Sangat Tinggi
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	4.256.348.037	3.827.170.616	89,92	Tinggi
12	Kec. Parbuluan	1.764.383.412	1.585.203.662	89,84	Tinggi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.788.539.391	5.183.348.983	89,55	Tinggi
14	Bappeda	6.328.024.634	5.662.474.593	89,48	Tinggi
15	Dinas Kesehatan	180.386.277.859	161.207.420.418	89,37	Tinggi
16	Kec. Sumbul	2.849.995.194	2.543.313.965	89,24	Tinggi
17	Inspektorat	10.545.774.067	9.384.460.034	88,99	Tinggi
18	Kec. Lae Parira	1.722.780.549	1.529.379.881	88,77	Tinggi
19	Kec. Sitinjo	2.407.131.863	2.118.166.002	88,00	Tinggi
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.762.477.197	4.189.936.044	87,98	Tinggi
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.296.741.839	5.533.107.867	87,87	Tinggi
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40.771.556.820	35.793.349.119	87,79	Tinggi
23	Kec. Berampu	1.529.015.590	1.317.186.151	86,15	Tinggi
24	Dinas Lingkungan Hidup	7.068.720.944	6.053.252.716	85,63	Tinggi
25	Kec. Gunung Sitember	1.501.022.291	1.276.494.577	85,04	Tinggi
26	Kec. Siempat Nempu	1.833.957.539	1.559.551.561	85,04	Tinggi
27	Kec. Silima Punggpungga	2.752.302.513	2.337.106.539	84,91	Tinggi
28	Kec. Siempat Nempu Hulu	1.750.834.148	1.476.369.733	84,32	Tinggi
29	Kec. Tigalingga	1.639.282.612	1.378.054.627	84,06	Tinggi
30	Kec. Pegagan Hilir	1.609.810.168	1.344.162.235	83,50	Tinggi
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	210.037.834.342	175.170.249.815	83,40	Tinggi
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.689.841.085	3.894.928.508	83,05	Tinggi

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	NILAI CAPAIAN KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
33	Kec. Siempat Nempu Hilir	1.263.964.346	991.141.184	78,42	Tinggi
34	Sekretariat Daerah	51.782.246.821	39.365.973.399	76,02	Tinggi
35	Kec. Silahisabungan	1.326.453.190	981.530.456	74,00	Sedang
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.312.507.216	7.789.361.419	68,86	Sedang
37	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	23.700.021.685	15.482.406.608	65,33	Sedang
38	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kependudukan dan Olahraga	12.061.480.475	7.801.579.571	64,68	Rendah
39	Dinas Sosial	4.577.687.401	2.909.614.059	63,56	Rendah
40	Kec. Tanah Pinem	2.520.445.512	1.356.107.389	53,80	Rendah
41	RSUD	88.342.164.782	38.814.508.878	43,94	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				**81,51**	**Tinggi**

Persentase rata–rata capaian realisasi keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebesar 81,51 persen pada masing–masing rencana kerja. Berdasarkan realisasi anggaran perangkat daerah, 3 (tiga) perangkat daerah dengan realisasi tertinggi adalah:

1. Sekretariat DPRD; capaian anggaran 95,74 dengan predikat “Sangat Tinggi”
2. Dinas Pendidikan; capaian anggaran 95,15 dengan predikat “Sangat Tinggi”
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; capaian anggaran 94,87 dengan predikat “Sangat Tinggi”.

2.7. Penelaahan Pokok Pikiran DPRD

Pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil reses DPRD yang disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dijadikan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program daerah yang merupakan bagian dari perumusan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027.

Dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan, pasti ada Permasalahan–permasalahan yang timbul dalam penerapan pelaksanaannya untuk itu sangat perlu dengan segera ditangani atau dicari solusi penyelesaiannya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Beberapa permasalahan-permasalahan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

1. Hingga saat ini Pemerintah Daerah belum dapat secara jelasnya dan tepat pembagian status ataupun Kriteria mana jalan desa dan jalan kabupaten. Hal ini telah menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
2. Belum ada pemetaan atau penetapan tapal batas administrasi antar desa secara tepat, sehingga masih ditemukan polemik di tengah-tengah masyarakat terkait status kepemilikan tanah..
3. Salah Satu Tujuan Pengelolaan ADD adalah peningkatan ekonomi lokal untuk itu pemerintah Daerah diminta untuk dapat melakukan pembinaan terhadap kepala desa agar dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Desa baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
4. Masih ada usaha Galian C yang belum memiliki izin, namun dapat secara terus menerus beroperasi.
5. Masih ada desa yang belum memiliki kantor, hal ini sudah pasti akan menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer khususnya yang diangkat oleh komite, kami berharap agar

pemerintah Kabupaten Dairi dapat mencari solusi dalam peningkatan penerimaan upah/gaji tenaga guru honorer dimaksud tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik, maka proses belajar mengajar harus berkualitas, sehingga untuk mendukung hal ini pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan penyediaan mobiler di tingkat SD dan SLTP dengan baik.
3. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang handal khususnya masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar kiranya pemerintah Kabupaten Dairi dapat memperhatikan dan memberikan bantuan biaya kepada anak-anak yang berprestasi mulai tingkat SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, terutama bagi anak-anak yang ekonomi orang tuanya tidak mampu.
4. Penempatan tenaga guru yang belum merata mengakibatkan kekurangan tenaga guru pada hampir disetiap SD di desa-desa sedangkan pada SD perkotaan tenaga guru malah berlebih.

C. BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka pemberian pelayanan bidang kesehatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah, hal ini karena masih banyak kita jumpai dilapangan bangunan pustu yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak adanya tenaga medis dan kurangnya persediaan obat untuk masyarakat. Serta terjadinya pengalih fungsian Pustu menjadi tempat Tinggal yang dihuni masyarakat.
2. Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Dairi yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan baik melalui program nasional maupun daerah, hal ini karena masih belum adanya data base.
3. Belum maksimalnya pelayanan dari RSU Sidikalang yang berdampak masih banyaknya dijumpai masyarakat atau pasien yang dirujuk ke RSU di Luar Kabupaten Dairi dan ketersedian obat-obatan sering tidak ada yang barang tentu akan menyulitkan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu.

D. BIDANG PERTANIAN

1. Penyaluran pupuk yang belum merata dengan baik telah menimbulkan kelangkaan pupuk kepada masyarakat.

2. Banyaknya lahan persawahan beralih fungsi menjadi tanaman keras (non padi) sebagai kurang terpeliharanya saluran irigasi, karena masih banyaknya saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik.
3. Dampak terjadinya kematian pada ternak babi di wilayah Provinsi Sumatera Utara Khususnya Kabupaten Dairi, telah menimbulkan rasa khawatir masyarakat untuk memelihara babi, untuk itu pemerintah kabupaten dairi diminta untuk dapat kiranya mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendorong minat masyarakat untuk kembali memelihara ternak babi.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Masih perlu dilakukan pembukaan jalan, peningkatan dan pengaspalan jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian, di wilayah Kabupaten Dairi.
2. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi perlu dikelola dengan baik dan maksimal melalui pengelolaan destinasi obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Dairi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dairi jangan hanya fokus pada satu obyek wisata saja namun juga memberikan perhatian dan sentuhan pada objek wisata lainnya seperti danau toba (silalahi sabungan) dan cagar budaya alam sicike-cike sehingga sektor pariwisata nantinya menjadi salah satu penyumbang PAD.
3. Pemerintah Kabupaten Dairi diminta serius untuk pengadaan Rest Area di Kecamatan Sumbul.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2027 hendaknya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial masyarakat Kabupaten Dairi.dan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat semaksimal mungkin menekan ketimpangan pembangunan disetiap daerah khususnya daerah terpencil.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Dalam rangka penyusunan Ranperdes tentang Penggunaan ADD Desa agar benar-benar cermat dan teliti sebagai tindakan untuk menghindari terjadinya penganganggaran pembangunan

infrastruktur terhadap kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah desa.

2. Dalam rangka peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah perlu dibentuk tim khusus untuk mengkaji peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha khususnya tangkahan / galian yang melakukan pengrusakan lingkungan, jalan dan bahkan irigasi.
3. Untuk menghindarkan maraknya peredaran Judi dan Narkoba di wilayah Kabupaten Dairi Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan pengawasan serta penertiban ijin tempat – tempat hiburan malam.
4. Untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan sosial agar Pemerintah Kabupaten Dairi maupun Pemerintah Desa melakukan pendataan dengan riil, sehingga data penerima benar-benar masyarakat yang layak menerimanya.
5. Untuk mendukung program pemberian sertifikat tanah, kami sangat mendukung bilamana Pemerintah Kabupaten Dairi dapat melakukan langkah tidak hanya menunggu program secara nasional, namun ikut serta terlibat secara aktif dalam upaya penerbitan sertifikat tanah masyarakat Kabupaten Dairi yang akan sekaligus sebagai upaya pencapaian progres peningkatan kepemilikan PBB oleh masyarakat.
6. Dalam upaya penguasaan Asset-asset milik Pemerintah Daerah perlu untuk membuat sebuah regulasi atau aturan yang jelas terhadap asset-asset yang menjadi kewenangan desa dan kabupaten dan juga terhadap tapal batas antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik, maka proses belajar mengajar harus berkualitas, sehingga untuk mendukung hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan Penyediaan sarana dan Prasana yang baik di tingkat SD dan SLTP dengan baik
2. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer khususnya yang diangkat oleh Komite, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Dairi dapat mencari solusi dalam

peningkatan penerimaan upah/gajinya tenaga guru honorer dimaksud tanpa harus melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang handal khususnya masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar kiranya Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memperhatikan dan memberikan bantuan biaya kepada anak-anak yang berprestasi mulai tingkat SD sampai ke Tingkat Perguruan Tinggi, terutama bagi anak-anak yang ekonomi orang tuanya tidak mampu.

C. BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan penempatan tenaga kesehatan pada setiap poskesdes yang telah ada serta melakukan pengawasan penggunaan sarana kesehatan ini, demi terwujudnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.
2. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum memiliki Kartu BPJS, KIS maupun Program lainnya. Untuk itu diharapkan kepada OPD terkait dan Pemerintah Desa untuk dapat proaktif melakukan evaluasi khususnya masyarakat yang sudah dilakukan pendataan namun belum diterbitkannya kartu BPJS maupun KIS dari masyarakat dimaksud.
3. Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil langkah-langkah yang konkret terhadap perbaikan-perbaikan manajerial RSU Sidikalang, termasuk dalam rangka penyediaan tenaga Medis (Dokter Spesialis); Obatan-obatan serta upaya peningkatan status Akreditasi RSU Sidikalang.

D. BIDANG PERTANIAN

1. Terkait dengan ketersedian atau kelangkaan pupuk bagi masyarakat petani yang selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat mendorong OPD maupun Tim Pengawas Pupuk untuk berkerja lebih optimal dalam melakukan pengawasan peredaran

pupuk sehingga penyalurannya sampai ke masyarakat petani dengan baik.

2. Untuk peningkatan pengolahan lahan pertanian diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat memberikan bantuan Pengadaan Traktor kepada kelompok tani secara merata, serta
   melakukan pengawasan penggunaannya.
3. Dalam mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai swasembada beras diminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi kiranya dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi bagi masyarakat agar tidak mengkonfersi tanaman padi menjadi tanaman lain di lahan persawahan dan sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap saluran irigasi yang dapat dilakukan melalui penganggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Dana Desa.
4. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat meningkatkan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian yang telah tersebar di setiap desa untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat petani.
5. Dalam upaya peningkatan produksi kopi yang telah menjadi produk unggulan masyarakat Kabupaten Dairi, maka pemberian bantuan bibit kopi varietas unggul dan cocok dengan iklim Kabupaten Dairi dapat dilakukan secara berkesinambungan.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Mengingat rest area sangat penting (skala perioritas) karena menyangkut nyawa manusia agar Pemkab Dairi dapat untuk lebih serius dalam penyediaan dan atau merealisasikannya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar dalam melakukan perencanaan pembangunan benar-benar memperhatikan asas pemerataan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi dengan selalu mengutamakan skala perioritas sehingga dengan demikian diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan juga tantangan kedepan;

3. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terutama kegiatan fisik agar benar-benar matang dan mengkaji dampak dari kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Tabel 2.32
Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PERANGKA DAERAH TUJUAN/ USULAN	JUMLAH USULAN
1	**Dinas Kesehatan**	**3**
2	Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	1
3	Pengadaan alat kesehatan	1
4	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	1
5	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**138**
6	Optimalisasi Saluran Drainase	3
7	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	8
8	Pembangunan Jalan	46
9	Pembangunan Jembatan	1
10	Pembangunan SPALD-S Permukiman	2
11	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	1
12	Pemeliharaan Jalan	68
13	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	2
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1
16	Rehabilitasi Saluran Drainase	3
17	**Dinas Pendidikan**	**11**
18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1
19	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	7
20	Pembangunan Sekolah	1
21	Pengadaan mobilier sekolah	1
22	Rehabilitasi toilet sekolah	1
23	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**3**
24	Fasilitasi akses permodalan/pembiayaan	1
25	Pelatihan dan Pendampingan UMKM	1
26	Pengembangan Sentra Industri	1
27	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**27**
28	Pembangunan Dam Parit	3
29	Pembangunan Embung Pertanian	1
30	Pembangunan Jalan Pertanian	12
31	Pengadaan alat dan mesin pertanian	2
32	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	2
33	Pengadaan Calon Induk Ternak	1
34	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	6
	TOTAL USULAN	**182**

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id

2.8. Telaahan Usulan Aspirasi Masyarakat

Usulan aspirasi masyarakat yang ditampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat atau usulan dari bawah (*button up*) sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Usulan aspirasi masyarakat diajukan desa/kelurahan melalui aplikasi SIPD-RI yang merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pada aplikasi SIPD-RI diperoleh total usulan aspirasi masyarakat sebanyak 355 usulan. Usulan tersebut selanjutnya divalidasi dan verifikasi oleh mitra Bappeda, perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh usulan aspirasi yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2.33
Rekapitulasi Usulan Masyarakat

No	Kecamatan/ PD Tujuan Awal/ Usulan	Jumlah
1	***Berampu***	**6**
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**6**
3	Pembangunan Jalan	2
4	Pemeliharaan Jalan	4
5	***Gunung Sitember***	**14**
6	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**11**
7	Pembangunan Jembatan	1
8	Pemeliharaan Jalan	10
9	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**3**
10	Pembangunan Dam Parit	3
11	***Lae Parira***	**8**
12	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**5**
13	Pemeliharaan Jalan	4
14	Rehabilitasi Saluran Drainase	1
15	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**3**
16	Pembangunan Jalan Pertanian	1
17	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	1
18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	1
19	***Parbuluan***	**22**
20	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**18**
21	Optimalisasi Saluran Drainase	3
22	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	1
23	Pembangunan Jalan	6
24	Pembangunan Jembatan	1
25	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	1

No	Kecamatan/ PD Tujuan Awal/ Usulan	Jumlah
26	Pemeliharaan Jalan	5
27	Pemeliharaan Jembatan	1
28	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**4**
29	Pembangunan Jalan Pertanian	3
30	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	1
31	***Pegagan Hilir***	**34**
32	**Dinas Kesehatan**	**5**
33	Jaminan kesehatan masyarakat	2
34	Pengadaan alat kesehatan	2
35	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	1
36	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**21**
37	Pembangunan Jalan	3
38	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	3
39	Pemeliharaan Jalan	11
40	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	1
41	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1
42	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	2
43	**Dinas Pendidikan**	**2**
44	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	1
45	Pengadaan mobilier sekolah	1
46	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**6**
47	Pembangunan Dam Parit	1
48	Pembangunan Jalan Pertanian	1
49	Pengadaan alat dan mesin pertanian	2
50	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	2
51	***Sidikalang***	**46**
52	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**38**
53	Optimalisasi Saluran Drainase	2
54	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	1
55	Pembangunan Jalan	22
56	Pemeliharaan Jalan	6
57	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1
58	Rehabilitasi Saluran Drainase	6
59	**Dinas Pendidikan**	**2**
60	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	2
61	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**6**
62	Pembangunan Dam Parit	2
63	Pembangunan Jalan Pertanian	2
64	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	2
65	***Siempat Nempu***	**14**
66	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**13**
67	Optimalisasi Saluran Drainase	1
68	Pembangunan Jalan	6
69	Pemeliharaan Jalan	3
70	Rehabilitasi Saluran Drainase	3
71	**Dinas Pendidikan**	**1**
72	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	1
73	***Siempat Nempu Hilir***	**20**
74	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**16**
75	Pembangunan Jalan	10
76	Pembangunan Jembatan	3
77	Pemeliharaan Jembatan	1
78	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1
79	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1
80	**Dinas Pendidikan**	**1**
81	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	1
82	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**3**
83	Pembangunan Dam Parit	1
84	Pembangunan Jalan Pertanian	1
85	Pengadaan alat dan mesin pertanian	1
86	***Siempat Nempu Hulu***	**16**
87	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**14**

No	Kecamatan/ PD Tujuan Awal/ Usulan	Jumlah
88	Pembangunan Jalan	6
89	Pemeliharaan Jalan	7
90	Pemeliharaan Jembatan	1
91	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**2**
92	Pembangunan Dam Parit	1
93	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	1
94	***Silahisabungan***	**8**
95	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**7**
96	Pembangunan Jembatan	1
97	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	1
98	Pemeliharaan Jalan	5
99	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1**
100	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	1
101	***Silima Pungga Pungga***	**16**
102	**Dinas Kesehatan**	**1**
103	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	1
104	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**13**
105	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	1
106	Pembangunan Jalan	4
107	Pemeliharaan Jalan	7
108	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1
109	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**2**
110	Pembangunan Dam Parit	1
111	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	1
112	***Sitinjo***	**4**
113	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**3**
114	Pemeliharaan Jalan	3
115	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1**
116	Pembangunan Dam Parit	1
117	***Sumbul***	**41**
118	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**35**
119	Optimalisasi Saluran Drainase	2
120	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	1
121	Pembangunan Jalan	27
122	Pemeliharaan Jalan	5
123	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**6**
124	Pembangunan Dam Parit	4
125	Pembangunan Jalan Pertanian	2
126	***Tanah Pinem***	**31**
127	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**27**
128	Optimalisasi Saluran Drainase	2
129	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	1
130	Pembangunan Jalan	5
131	Pembangunan Jembatan	2
132	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	1
133	Pemeliharaan Jalan	14
134	Rehabilitasi Saluran Drainase	2
135	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**4**
136	Pembangunan Dam Parit	1
137	Pembangunan Jalan Pertanian	2
138	Pengadaan Pupuk	1
139	***Tigalingga***	**9**
140	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**7**
141	Optimalisasi Saluran Drainase	1
142	Pembangunan Jalan	1
143	Pemeliharaan Jalan	3
144	Pemeliharaan Jembatan	1
145	Rehabilitasi Saluran Drainase	1
146	**Dinas Pendidikan**	**2**
147	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	2
	Total	**289**

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran Keuangan Daerah berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Data bab ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025.

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan.

Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makroekonomi Kabupaten Dairi yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio tahun 2023–2025, kondisi perekonomian daerah menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi riil, dan kualitas sumber daya manusia, meskipun masih terdapat tantangan berupa peningkatan ketimpangan pendapatan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan

pembangunan yang lebih inklusif. Dengan menggunakan pendekatan Model Pertumbuhan Berimbang (Balanced Growth Model) yang mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, kondisi pemerataan pendapatan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah, proyeksi target pendapatan dan kapasitas keuangan daerah Tahun 2027 sebesar Rp1.195.583.379.000, meningkat sebesar Rp21.187.843.548 atau 1,80 persen dibandingkan target Tahun 2026 sebesar Rp1.174.395.535.452, dinilai realistis dan sejalan dengan kapasitas fiskal daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dairi secara faktual didominasi secara mutlak oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang kontribusi sebesar 44,36 persen. Ketergantungan yang sangat masif pada sektor primer ini menempatkan perekonomian makro daerah pada posisi yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, dinamika iklim, dan gangguan lapangan operasional.

Sesuai kajian risiko bencana, wilayah Kabupaten Dairi memiliki indeks bahaya tinggi dengan parameter kerentanan bencana banjir

bandang, cuaca ekstrem, serta tanah longsor berada pada kategori Kelas Kerentanan Tinggi. Kondisi geomorfologi wilayah yang dipenuhi perbukitan curam dan fluktuasi intensitas hidrologi memperbesar magnitudo ancaman fisik ini di berbagai kantong produksi pertanian utama.

Pada tahun 2024 menunjukkan kerugian ekonomi riil akibat bencana hidrometeorologi menjadi salah satu penyebab penurunan luasan panen komoditas hortikultura di sejumlah kecamatan penopang logistik. Dalam kerangka perencanaan teknokratik, kerugian moneter dan penurunan output fisik dari sektor dominan ini dihitung sebagai variabel pengurang.

Dengan memperhitungkan nilai depresiasi ekonomi akibat potensi gangguan kebencanaan ini, proyeksi target Pertumbuhan Ekonomi periode tahun 2027 lebih terukur, kredibel, dan tangguh (resilient), guna memastikan kesinambungan anggaran daerah tetap terjaga di tengah ancaman eksternal lingkungan.

3.1.1. **Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Secara umum komponen APBD Kabupaten Dairi terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan dan Belanja Transfer; dan 3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kabupaten Dairi pada 2023 hingga 2025 untuk pendapatan relatif stabil berada diatas 94 persen sementara untuk belanja sangat fluktuatif berada dikisaran 88 persen sampai dengan 92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 relatif stabil tercatat di angka 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah semakin membaik.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persen	Bertambah/ Berkurang (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pendapatan Daerah				
2023	1.213.130.927.798,00	1.192.110.051.572,23	98,27%	-21.020.876.225,77
2024	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89%	-64.382.172.709,43
2025	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39%	-54.718.645.823,78
Belanja Daerah				
2023	1.352.203.918.299,00	1.236.286.270.150,50	91,43%	-115.917.648.148,50
2024	1.351.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,42%	-102.387.142.577,92
2025	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48%	-141.241.656.884,95
Penerimaan Pembiayaan				
2023	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100%	-0,08
2024	94.964.692.403,00	94.964.692.402,65	100%	-0,35
2025	39.004.969.868,00	39.004.969.868,14	100%	0,14
Pengeluaran Pembiayaan				
2023	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	0,00
2024	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100%	0,00
2025	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%	0,00

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025 Audited)

Gambar 3. 1
PROYEKSI DAN EVALUASI KAPASITAS FISKAL RIIL KABUPATEN DAIRI
Integrasi Data Makroekonomi Terhadap Keseimbangan Anggaran Daerah

1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Dana Perimbangan – Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pertumbuhan ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2023–2025

No	Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.133.210.254.085,22**	**-0,63**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**85.084.763.844,23**	**100.411.235.107,57**	**111.446.383.682,22**	**-0,87**
4.1.01	Pajak Daerah	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	29.222.793.230,80	-0,95
4.1.02	Retribusi Daerah	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	58.815.503.229,00	-11,81
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	12.539.756.694,00	-0,73
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	10.868.330.528,42	-0,15
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.094.557.567.445,00**	**1.083.304.010.242,00**	**1.007.913.212.733,00**	**-0,61**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	614.827.177.235,00	1.045.825.056.797,00	946.993.394.298,00	-1,03
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.766.001.163,00	37.478.953.445,00	60.919.818.435,00	-0,15
4.2.03	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	168.896.352.200,00			
4.2.04	Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	43.068.036.847,00			
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.468.384.568,00**	**12.109.442.915,00**	**13.850.657.670,00**	**-0,74**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.109.442.915,00	13.850.657.670,00	
	Jumlah Pendapatan	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.133.210.254.085,22**	

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Tahun 2023 – 2025 Audited)

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan nominal yang sangat positif dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 85.084.763.844,23, kemudian melonjak naik menjadi Rp 100.411.235.107,57 pada tahun 2024, hingga mencapai angka Rp 111.446.383.682,22 pada tahun 2025. kenaikan dari pertumbuhan nominal yang konsisten naik secara visual di setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan yang tercatat dalam sistem formula tabel menunjukkan nilai negatif sebesar -0,87%. Di dalam pos ini, peningkatan paling signifikan ditopang oleh sektor Pajak Daerah yang melesat dari Rp 20.491.410.869,13 pada tahun 2023 menjadi Rp 29.222.793.230,80 pada tahun 2025, serta peningkatan drastis pada Retribusi Daerah di tahun 2024 yang mencapai Rp 60.628.636.118,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp 3.320.064.213,00. Sebaliknya, komponen Lain-lain PAD yang Sah sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi Rp 6.197.612.435,27 sebelum akhirnya perlahan pulih ke angka Rp 10.868.330.528,42 pada tahun 2025.

b. Transfer Pendapatan

Transfer Pendapatan berperan sebagai penyumbang proporsi terbesar dalam struktur anggaran, namun secara agregat mengalami tren penurunan nominal yang konsisten dari tahun ke tahun. Sumber pendapatan ini bermula di angka Rp 1.094.557.567.445,00 pada tahun 2023, lalu menyusut menjadi Rp 1.083.304.010.242,00 pada tahun 2024, dan kembali turun ke level Rp 1.007.913.212.733,00 pada tahun 2025, dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar -0,61%. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh dinamika Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang sempat melonjak tajam dari Rp 614.827.177.235,00 pada tahun 2023 menjadi Rp 1.045.825.056.797,00 pada tahun 2024 sebelum turun kembali ke Rp 946.993.394.298,00 pada tahun 2025. Di sisi lain, Pendapatan

Transfer Antar Daerah justru mengalami kemerosotan ekstrem dari Rp267,76 miliar pada tahun 2023 akhirnya menjadi hanya Rp37,47 miliar pada tahun 2024, meskipun menunjukkan pemulihan yang cukup baik pada tahun 2025 dengan kecepatan naik ke posisi Rp60,91 miliar.

c. Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan kinerja keuangan yang fluktuatif namun berhasil mencatatkan pemulihan yang kuat pada pengamatan tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan di sektor ini dibuka sebesar Rp 12.468.384.568,00, kemudian sempat terkontraksi tipis menjadi Rp 12.109.442.915,00 pada tahun 2024, tetapi berhasil bangkit dan melonjak cukup signifikan hingga menyentuh Rp 13.850.657.670,00 pada tahun 2025. kadang-kadang terjadi peningkatan yang signifikan seperti pada periode akhir di tahun 2025, secara kalkulasi rata-rata pertumbuhan yang tertuang di dalam tabel mencatatkan angka persentase sebesar -0,74%. Seluruh realisasi pendapatan pada tahun 2024 dan 2025 di dalam pos ini sepenuhnya bersumber dan ditopang oleh sub-komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode Tahun

Anggaran 2023 – 2025 yang digunakan sebagagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024-2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**844.293.304.487,73**	**909.963.663.123,20**	**847.276.653.677,05**	**-0,67**
5.1.01	Belanja Pegawai	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	571.190.650.093,00	-0,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	265.355.005.034,05	-0,50
5.1.05	Belanja Hibah	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	10.730.998.550,00	-0,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**187.745.257.267,77**	**130.216.588.940,88**	**70.911.580.445,00**	**-0,25**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.247.679.146,00	17.448.098.019,00	19.796.252.358,00	-0,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.398.764.060,35	22.220.323.063,00	26.870.518.152,00	-0,42
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.191.838.531,42	82.813.149.768,88	13.686.114.885,00	-0,09
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.906.975.530,00	7.733.870.580,00	10.558.695.050,00	-0,89
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.147.510,00	0,00	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.700.424.800,00**	**3.581.937.735,00**	**695.309.766,00**	**-0,10**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.700.424.800,00	3.581.937.735,00	695.309.766,00	-0,10
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**199.480.027.400,00**	**204.997.221.000,00**	**165.808.669.004,00**	**-0,55**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	2.381.148.000,00	-0,81
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00	163.427.521.004,00	-0,55
	Jumlah Belanja	**1.236.219.013.955,50**	**1.248.759.410.799,08**	**1.084.692.212.892,05**	

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Kab.Dairi Tahun 2023 – 2025 Audited)

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen pengeluaran terbesar yang menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun secara rata-rata pertumbuhan sebesar -0,67 %. Pada tahun 2023, realisasi pos ini tercatat sebesar Rp 844.293.044.487,73 kemudian sempat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp 909.963.663.123,20 sebelum akhirnya terkontraksi cukup dalam pada tahun 2025 ke angka Rp 847.266.653.677,05. Kenaikan di tahun 2024 didorong oleh pertumbuhan Belanja Pegawai yang terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh Rp 571.190.650.093,00 di tahun 2025 serta peningkatan Belanja Hibah di tahun 2024 sebesar Rp 45.256.974.282,00. Namun, penurunan total Belanja Operasi di tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh efisiensi atau penurunan pada Belanja Barang dan Jasa yang menurun dari Rp356.743.301.652,73 pada tahun 2023 menjadi Rp 265.355.005.034,05 miliar pada tahun 2025, pemangkasan tajam pada Belanja Hibah menjadi hanya Rp 10.730.998.550,00, serta nihilnya alokasi Belanja Bantuan Sosial sejak tahun 2024.

b. Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal mencerminkan penurunan investasi infrastruktur dan aset tetap daerah yang sangat signifikan selama tiga tahun berturut-turut, dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar -0,25%. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 dibuka sebesar Rp187.745.257.267,77 lalu menyusut menjadi Rp 130.216.588.940,88 pada tahun 2024, dan kembali menurun tajam menyisakan Rp 70.911.580.445,00 pada tahun 2025. Penurunan drastis ini paling sering terjadi pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang anjlok dari Rp 104.191.838.531,42 di tahun 2023 menjadi hanya Rp 13.686.114.885,00 di tahun 2025. Di sisi lain, meskipun sub-komponen seperti Belanja Modal Peralatan dan serta Belanja Modal Gedung dan Mesin sempat sedikit pulih di tahun 2025 masing-masing ke angka Rp 19.796.252.358,00 dan Rp 26.870.518.152,00 setelah sempat turun di tahun 2024, pemulihan tersebut tidak mampu menahan laju total Belanja Modal secara keseluruhan.

c. Belanja Tidak Terduga

Alokasi fiskal untuk Belanja Tidak Terduga mencatatkan tren penurunan yang konsisten dan sangat tajam dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan berada di angka -0,10%. Pada tahun 2023, realisasi pengeluaran darurat ini tercatat sebesar Rp 4.700.424.800,00 kemudian menyusut menjadi Rp 3.581.337.735,00 pada tahun 2024, dan tersisa hanya sebesar Rp 695.309.766,00 pada akhir tahun 2025. Penurunan yang konsisten hingga mencapai angka di bawah satu miliar rupiah ini membantu semakin menstabilkan kondisi daerah dari kedaruratan atau bencana, misalnya pola perencanaan anggaran mitigasi yang semakin efisien dan terukur dengan mengalihkan fokus pendanaan langsung pada program-program kerja sektoral.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer menunjukkan pergerakan yang fluktuatif di mana sempat mengalami ekspansi tipis sebelum akhirnya menurun signifikan di akhir periode, dengan mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,55%. Pos ini mendokumentasikan realisasi sebesar Rp 199.480.027.400,00 pada tahun 2023, kemudian naik menjadi Rp 204.997.221.000,00 pada tahun 2024, dan turun ke level Rp 165.808.669.004,00 pada tahun 2025. Dinamika ini dicampur oleh nilai bantuan pada Belanja Bantuan Keuangan yang menjadi penyumbang pos terbesar ini, yang sempat menyentuh angka Rp 202.827.221.000,00 pada tahun 2024 sebelum akhirnya turun drastis menjadi Rp 163.427.521.004,00 pada tahun 2025. Sebaliknya, sub-komponen Belanja Bagi Hasil justru konsisten menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, mulai naik bertahap dari Rp 1.961.800.000,00 di tahun 2023 hingga mencapai Rp 2.381.148.000,00 pada tahun 2025.

Tabel 3.4 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN KOMPONEN KEUANGAN DAERAH	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.133.210.229.085,22**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**85.084.763.844,23**	**100.411.235.107,57**	**111.446.358.682,22**
4.1.01	Pajak Daerah	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	29.222.793.230,80
4.1.02	Retribusi Daerah	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	58.815.503.229,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	12.539.756.694,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	10.868.305.528,42
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.094.557.567.445,00**	**1.083.304.010.242,00**	**1.007.913.212.733,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.468.384.568,00**	**12.109.442.915,00**	**13.850.657.670,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.236.219.013.955,50**	**1.248.759.410.799,08**	**1.084.692.212.892,05**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**844.293.304.487,73**	**909.963.663.123,20**	**847.276.653.677,05**
5.1.01	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	571.190.650.093,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	265.355.005.034,05
5.1.05	Belanja Hibah	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	10.730.998.550,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**187.745.257.267,77**	**130.216.588.940,88**	**70.911.580.445,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.700.424.800,00**	**3.581.937.735,00**	**695.309.766,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**199.480.027.400,00**	**204.997.221.000,00**	**165.808.669.004,00**
Kemampuan Keuangan Daerah				
Kapasitas Fiskal Riil (Total Pendapatan - Belanja Pegawai)		736.196.656.322,23	669.207.505.528,57	562.019.578.992,22
Ruang Fiskal Bebas (Total Pendapatan - Belanja Wajib, Operasi dan Transfer)		148.337.383.969,50	80.863.804.141,37	120.124.906.404,17
Rasio Kemandirian Fiskal (PAD / Pendapatan Transfer) %		7,77%	9,27%	11,06%

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Kab.Dairi Tahun 2023– 2025 Audited)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan tersebut dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Sedangkan, belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pada regulasi tersebut pengelompokan kemampuan keuangan daerah kabupaten dibagi kepada 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. di atas Rp 550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b. Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c. di bawah Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Dairi sejak tahun 2023-2025 tercatat masuk kepada kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi periode 2023-2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Periode 2023-2025

No.	Uraian	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023 (RP)	2024 (RP)	2025 (RP)	
	Surplus/Defisit	-44.108.296.098,27	-52.934.722.534,51	48.518.041.193,17	
06.01	Penerimaan Pembiayaan	**142.072.990.500,92**	**94.964.692.402,65**	**39.004.969.868,00**	-47,56%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	142.072.990.500,92	94.964.692.402,65	39.004.969.868,00	-47,56%
	Koreksi				—
06.01.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir				—
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	-42,26%
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank	3.000.000.000,00	3.025.000.000,00	1.000.000.000,00	-42,26%
	Pembiayaan Netto	139.072.990.500,92	91.939.692.402,65	38.004.969.868,00	-47,71%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		**94.964.694.402,65**	**39.004.969.868,14**	**86.523.011.061,17**	**-4,55%**

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Tahun 2023 – 2025 Audited)

Kondisi fiskal daerah menunjukkan dinamika pembalikan yang sangat positif pada tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami tekanan defisit anggaran yang cukup dalam. Pada tahun 2023, daerah mencatatkan defisit sebesar Rp 44.108.296.098,27, yang kemudian membengkak lebih lanjut menjadi Rp 52.934.722.534,51 pada tahun 2024 akibat tingginya belanja daerah dibanding pendapatan. Namun, pada tahun 2025, terjadi penyeimbangan anggaran yang signifikan sehingga daerah berhasil membalikkan keadaan menjadi surplus sebesar Rp 48.518.041.193,17. Kondisi defisit menjadi surplus ini merupakan keberhasilan dalam melakukan restrukturisasi belanja atau optimalisasi pendapatan.

Pos Penerimaan Pembiayaan secara keseluruhan didominasi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang menunjukkan tren penurunan tahunan yang sangat drastis. Nominal penerimaan ini bermula di angka Rp 142.072.990.500,92 pada tahun 2023, kemudian menyusut ke Rp 94.964.692.402,65 pada tahun 2024, hingga akhirnya merosot tajam menjadi hanya Rp 39.004.969.868,00 pada tahun 2025, dengan persentase rata-rata pertumbuhan tahunan yang terkontraksi dalam sebesar -47,56%. Penurunan SILPA upaya penganggaran yang semakin efisien dan akurat pada tahun-tahun berjalan, bertujuan agar anggaran terserap secara presisi tanpa meninggalkan tumpukan dana mengendap yang besar untuk tahun berikutnya.

Sektor Pengeluaran Pembiayaan diarahkan sepenuhnya untuk investasi jangka panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank. Komponen ini bergerak stabil pada kisaran Rp 3.000.000.000,00 di tahun 2023 dan naik menjadi Rp 3.025.000.000,00 pada tahun 2024, sebelum akhirnya turun menjadi Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2025, sehingga menghasilkan rata-rata pertumbuhan sebesar -42,26%. Kebijakan penurunan alokasi penyertaan modal di tahun 2025 ini adalah upaya rasionalisasi pengeluaran non-riil oleh pemerintah daerah guna mempertahankan likuiditas dan memprioritaskan kecukupan kas terhadap belanja modal publik lainnya.

Komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun mencerminkan kas yang sehat. Kondisi menurun dari Rp94.964.694.402,65 pada tahun 2023 menjadi

Rp39.004.969.868,14 pada tahun 2024 merupakan akibat penutupan defisit yang tinggi, akumulasi SILPA melonjak kembali menjadi Rp 86.523.011.061,17 pada tahun 2025, rata-rata pertumbuhan sebesar -4,55%. Kenaikan SILPA di tahun 2025 didorong kuat oleh kontribusi surplus anggaran tahun berkenaan ditambah pembiayaan netto yang tersedia, hal ini memastikan posisi kas daerah kembali kuat untuk mendanai awal tahun anggaran berikutnya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makroekonomi Kabupaten Dairi, yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio periode 2023–2025, kondisi perekonomian daerah menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi riil, dan kualitas sumber daya manusia, meskipun masih terdapat tantangan berupa peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari

kenaikan Gini Ratio pada tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan Model Pertumbuhan Berimbang yang mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, kondisi pemerataan pendapatan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah, proyeksi target keuangan Kabupaten Dairi Tahun 2027 sebesar Rp 1.193.083.379.301 dari target Tahun 2026 sebesar Rp 1.174.395.535.452 atau meningkat sebesar Rp 18.687.843.849 (1,59%). Nilai ini realistis, terukur, dan sejalan dengan kapasitas fiskal daerah. Kenaikan tersebut berada pada tingkat yang konservatif apabila dibandingkan dengan perkembangan indikator makroekonomi daerah, sehingga mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang yang memadai bagi pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Proyeksi peningkatan kapasitas keuangan daerah tersebut akan diarahkan secara spesifik untuk mendukung pendanaan sub-kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas dan kemantapan jalan kabupaten guna memperkuat konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta penguatan transformasi digital pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Dengan demikian, arah kebijakan pendapatan daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (result-oriented budgeting) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Dairi harus menyesuaikan dengan kondisi nasional dan global dirasakan ditengah masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi

pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing perangkat daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari mayarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri *(self financing)* akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan;
b. Menyusun regulasi terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Kabupaten Dairi baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit;
c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
d. Mendorong peningkatan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak dan retribusi;

f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kaupaten.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebaga berikut:

1) Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   - Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   - Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   - Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   - Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
   - Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama;
   - Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit;

- Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

2) Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer. Pemerintah Kabupaten Dairi memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Dairi mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan public dan mendukung program prioritas nasional. Selain itu, pencapaian target Pendapatan Transfer dilakukan melalui:

- Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari deviden atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Peningkatan fiskal daerah salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD pada Pendapatan Daerah. Strategi yang dilakukan :

- Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;

- Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;

Seluruh Kebijakan Pendapatan Daerah diformulasikan ke dalam target Pendapatan Daerah sehingga diperoleh proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2027

No	Uraian	APBD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**110.400.200.000**	**112.394.200.000**
4.1.01	Pajak Daerah	34.012.200.000	34.012.200.000
4.1.02	Retribusi Daerah	59.638.000.000	64.870.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000	11.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.750.000.000	2.012.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.018.509.148.000**	**1.059.374.179.301**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	987.974.212.000	1.023.586.140.301
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.534.936.000	35.788.039.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**14.315.000.000**	**15.315.000.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.315.000.000	15.315.000.000
	Jumlah Pendapatan	**1.143.224.348.000**	**1.187.083.379.301**

Sesuai dengan proyeksi pada tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat dari target APBD Tahun 2026 sebesar Rp110.400.200.000 menjadi Rp112.394.200.000 pada Tahun 2027 atau tumbuh sekitar 1,81 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Retribusi Daerah dari Rp59.638.000.000 menjadi Rp64.870.000.000, yang menjadi kontributor terbesar terhadap peningkatan PAD. Sementara itu, Pajak Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp34.012.200.000, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penyesuaian dari Rp14.000.000.000 menjadi Rp11.500.000.000, demikian pula Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp2.012.000.000 dari sebelumnya Rp2.750.000.000. Komposisi tersebut mencerminkan kebijakan yang mengedepankan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi riil, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan dan intensifikasi penerimaan retribusi daerah.

Pendapatan Transfer masih menjadi pilar utama penyokong struktur pendapatan daerah dengan proyeksi meningkat dari Rp1.018.509.148.000 pada Tahun 2026 menjadi Rp1.059.374.179.301 pada Tahun 2027 atau tumbuh sekitar 4,01 persen. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diproyeksikan meningkat dari Rp987.974.212.000 menjadi Rp1.023.586.140.301, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat dari Rp30.534.936.000 menjadi Rp35.788.039.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan pembangunan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, sehingga sinergi fiskal antartingkat pemerintahan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kapasitas keuangan daerah.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat dari Rp14.315.000.000 pada APBD Tahun 2026 menjadi Rp15.315.000.000 pada Tahun 2027 atau tumbuh sekitar 6,99 persen. Dengan perkembangan tersebut, total Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.143.224.348.000 pada Tahun 2026 menjadi Rp1.187.083.379.301 pada Tahun 2027 atau bertambah sebesar Rp43.859.031.301 (3,84 persen). Proyeksi ini mencerminkan kebijakan pendapatan daerah yang realistis dan terukur dengan tetap mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, memperkuat dukungan pendanaan melalui transfer pemerintah, serta menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2027.

2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2027, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Mendukung Program Strategis Nasional Tahun 2027, Program Tematik Nasional yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi, dan Astacita Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
6. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
      Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan
   b. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Proyeksi peningkatan kapasitas keuangan daerah diarahkan secara spesifik untuk mendukung pendanaan sub-kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah,

khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas dan kemantapan jalan kabupaten guna memperkuat konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta penguatan transformasi digital pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Dengan demikian, arah kebijakan pendapatan daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented budgeting*) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Tabel 3.7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**870.798.646.547**	**948.286.349.501**
5.1.01	Belanja Pegawai	630.096.571.361	606.817.556.405
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.623.275.686	337.449.993.096
5.1.05	Belanja Hibah	4.078.799.500	4.018.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**116.217.044.473**	**46.505.923.800**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	380.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.967.705.238	28.269.308.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.552.157.717	4.500.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.483.626.478	8.236.615.800
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.833.555.040	5.500.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.791.392.432**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.791.392.432	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	184.088.452.000	187.291.106.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.606.368.800	2.520.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	181.482.083.200	184.771.106.000
	Jumlah Belanja	**1.173.895.535.452**	**1.187.083.379.301**

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Operasi diproyeksikan meningkat dari Rp870.798.646.547 pada APBD Tahun 2026 menjadi Rp948.286.349.501 pada Tahun 2027 atau tumbuh sekitar 8,90 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan alokasi Belanja Barang dan Jasa yang meningkat dari Rp236.623.275.686 menjadi Rp337.449.993.096 guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan program prioritas daerah, serta penguatan layanan pemerintahan. Di sisi lain, Belanja Pegawai diproyeksikan menurun dari Rp630.096.571.361 menjadi Rp606.817.556.405 sebagai bentuk efisiensi belanja aparatur sehingga ruang fiskal dapat dialihkan pada belanja yang lebih produktif, sedangkan Belanja Hibah relatif stabil dengan penyesuaian dari Rp4.078.799.500 menjadi Rp4.018.800.000. Pergeseran komposisi belanja tersebut mencerminkan arah kebijakan fiskal yang semakin berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian hasil pembangunan.

Belanja Modal diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp116.217.044.473 pada Tahun 2026 menjadi Rp46.505.923.800 pada Tahun 2027. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Rp66.483.626.478 menjadi Rp8.236.615.800, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Rp18.552.157.717 menjadi Rp4.500.000.000, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Rp9.833.555.040 menjadi Rp5.500.000.000. Sementara itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat dari Rp20.967.705.238 menjadi Rp28.269.308.000 sebagai upaya mendukung modernisasi sarana dan prasarana pemerintahan, sedangkan Belanja Modal Tanah tidak dialokasikan pada Tahun 2027 dan Belanja Modal Aset Lainnya tetap nihil. Kebijakan ini menunjukkan adanya penajaman prioritas belanja modal pada kebutuhan yang lebih strategis dan memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan meningkat dari Rp2.791.392.432 pada APBD Tahun 2026 menjadi Rp5.000.000.000 pada Tahun 2027. Penguatan alokasi ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi keadaan darurat, bencana alam, gejolak ekonomi, inflasi, maupun kebutuhan mendesak lainnya, sehingga stabilitas fiskal daerah tetap terjaga tanpa mengganggu pelaksanaan program

pembangunan prioritas.

Selanjutnya, Belanja Transfer diproyeksikan meningkat dari Rp184.088.452.000 pada Tahun 2026 menjadi Rp187.291.106.000 pada Tahun 2027 atau meningkat sekitar 1,74 persen. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan Belanja Bantuan Keuangan dari Rp181.482.083.200 menjadi Rp184.771.106.000, sementara Belanja Bagi Hasil mengalami penyesuaian dari Rp2.606.368.800 menjadi Rp2.520.000.000. Secara keseluruhan, Jumlah Belanja Daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.173.895.535.452 pada APBD Tahun 2026 menjadi Rp1.187.083.379.301 pada Tahun 2027 atau bertambah sebesar Rp13.187.843.849 (1,12 persen). Struktur belanja tersebut mencerminkan kebijakan fiskal yang lebih efisien, dengan penekanan pada peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan belanja operasional yang produktif, efisiensi belanja aparatur, serta pengalokasian anggaran yang lebih terarah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2027.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman dan Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan

surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan yang direncanakan terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan terdiri atas:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penyertaan modal daerah;
   c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. Pemberian pinjaman daerah; dan
   e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027

KODE	URAIAN	APBD Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**31.171.187.452**	**6.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.171.187.452	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000**	**6.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	6.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**500.000.000**	**6.000.000.000**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Dairi. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 juga harus disinergikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2027 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yang memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Tujuan pembangunan nasional tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional yang didukung oleh stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran pembangunan nasional Tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan, penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan dan penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Selain itu, pembangunan nasional juga diarahkan pada penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas lingkungan

hidup dan ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2027, tujuan dan sasaran pembangunan nasional tersebut menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah, memastikan keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor, serta menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras, terukur, dan berbasis kinerja.

RPJMN menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan kemiskinan dan Sumber daya manusia Berkualitas dengan Pencapaian visi yang diwujudkan dengan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yaitu :

Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.1

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5) Pemberantasan kemiskinan 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
internasional yang kondusif 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya. 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	6) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2027. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Sasaran makro pembangunan nasional, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.3
Target Sasaran Utama Pembangunan/Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027

No.	Sasaran Pembangunan	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,40-6,80
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	96,9
3	Kontribusi PRDB Provinsi (%)	5,2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,89-5,64
5	Rasio Gini (poin)	0,300-0,302
6	Indeks Modal Manusia (poin)	0,549-0,560
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01-5,38
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	4,14
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,54

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Utara

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.4
Program Strategis asional (ProSN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 merupakan bagian dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan RPJMD.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 adalah pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan ini menekankan pada keterpaduan perencanaan pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan sektor atau tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, tetapi berorientasi pada kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh.

Dalam pendekatan THIS, tema pembangunan menjadi titik awal atau dasar penyusunan rencana pembangunan daerah. Tema tersebut ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan oleh kepala daerah. Tema inilah yang menjadi inti dari keseluruhan proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, pendekatan integratif berarti melibatkan berbagai perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dan peran dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tersebut. Sementara itu, pendekatan holistik menggambarkan keterpaduan program dan kegiatan yang dirancang oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tema pembangunan secara menyeluruh.

Adapun pendekatan spasial berfungsi untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, pembangunan tematik dapat dilaksanakan secara efektif melalui sinergi antarperangkat daerah (integratif), dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang saling melengkapi (holistik), serta diarahkan berdasarkan potensi dan permasalahan kewilayahan (spasial).

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Utara, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu: **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.**

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan

yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetikdan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Pencapaian Visi Misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang strategis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Selanjutnya mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah yang lebih operasional dan terukur.

Dengan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, diharapkan seluruh proses perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sinergis, serta mampu mendorong pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian Visi Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mendukung Trisula Program Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu: Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilakukan dengan strategi pengembangan wilayah, pertumbuhan dan pemerataan, serta kolaborasi pembangunan daerah. Pada selanjutnya disajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada tahun 2027.

Tabel 4.5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

"KOLABORASI SUMUT BERKAH MENUJU SUMATERA UTARA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia		**Indeks Modal Manusia**	**Poin**	**N/A**	**0,54**	**0,54**	**0,549 - 0,560**	**Seluruh OPD**
		1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia HarapanHidup	Tahun	73,9	74,01	74,18	74,36	Dinas Kesehatan
		2. Meratanya Pendidikan Berkualitas	Rata-Rata LamaSekolah	Tahun	9,93	10,3 - 10,33	10,43- 10,46	10,56- 10,59	Dinas Pendidikan
			Harapan LamaSekolah	Tahun	13,49	13,61 - 13,63	13,67- 13,69	13,73- 13,75	Dinas Pendidikan
	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**7,19**	**6,96- 7,46**	**5,93- 6,55**	**4,89- 5,64**	**Seluruh OPD**
		3. Meningkatny a Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	56,09	56,09	56,59	57,09	Dinas Sosial
			Indeks ZakatNasional	Poin	0,44	0,46	0,48	0,5	Biro Kesra
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	3. Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan		**Kontribusi PDRB Provinsi**	**Persen**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**Seluruh OPD**
			PDRB per Kapita	**Rp. Juta**	**73,57**	**78,4**	**87,6**	**85,5- 90,8**	**Seluruh OPD**
			Indeks EkonomiHijau	**Poin/Sk**	**N/A**	**51,12**	**51,14**	**51,15**	**Seluruh OPD**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
				or					
		4. Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRBIndustri Pengolahan	Persen	18,36	18,66	18,96	19,26	Disperindag ESDM
			Rasio Volume Usaha koperasiterhadap PDRB	Persen	N/A	0,79	0,79	0,8	Dinas Koperasi danUKM
			Indeks InovasiDaerah	Poin/Skor	59,93	57,50-60,01	58,69-60,76	59,88-61,51	Bappelitbang
		5. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalamBauran Energi	Persen	42,04	43	44	44	Dinas Perindag danESDM
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	N/A	0,562	0,567	0,572	Dinas LH dan Kehutanan
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, danMakan Minum	Persen	N/A	2,42	2,5	2,58	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif		**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**5,6**	**5,27-5,56**	**5,14-5,47**	**5,38-5,01**	**Seluruh OPD**
			PertumbuhanEkonomi	**Persen**	**5,03**	**5,20-5,60**	**5,80-6,20**	**5,0-5,6**	**Seluruh OPD**
			Gini Rasio	**Poin**	**0,306**	**0,303-0,305**	**0,301-0,303**	**0,283-0,300**	**Seluruh OPD**
		6. Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien VariasiHarga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	N/A	10,1	9,95	9,8	Disperindag ESDM
			Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Disperindag ESDM, Biro Perekonomian,

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
									TPH, Dishub, Disbunak, Diskanla
		7. Meningkatnya Pemerataan Pembanguna n Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,7	29,75	29,8	DPMPTSP
			NTP TanamanPangan	Poin	100,25	100,26	100,27	100,28	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	101,32	101,35	102,54	103,32	Dinas Kelautan danPerikanan
			NTP Tanaman Hortikultura	Poin	92,81	92,82	92,83	92,84	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
			Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	Poin	182,87	183,05	183,24	183,42	Dinas Perkebunandan Peternakan
			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Poin	95,4	95,5	95,59	95,69	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Indeks Desa	Poin	0,6437	0,6671	0,6799	0,685	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependuduka n dan Capil
			Inklusi Keuangan	Persen	N/A	97,52	97,61	97,7	Biro Perekonomian
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional,		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin/Skor**	**80,87 (A)**	**81,12 (A)**	**81,14 (A)**	**81,16(A)**	**Seluruh OPD**
		8. Menguatnya	Indeks PelayananPublik	Poin/Sk	3,9	3,92	3,93	3,94	Biro Organisasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
Kelola Pemerintahan	Adaptif dan Berintegritas	Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas		or					
			Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	85,9	86	86	87	Biro Hukum
			Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	N/A	66,78	67,46	68,15	Inspektorat
			Nilai Capaian Pelaporan Kinerja(SAKIP)	Poin/Skor	N/A	72,00(BB)	72,5	73	Biro Organisasi
			Nilai Indeks Transformasi	Poin	N/A	50	51	51,5	Dinas Kominfo
			Digital PilarPemerintah						
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79,44	79,94	80,15	80,25	Badan Kepegawaian
		9. Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
	6. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembanguna n		**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiriandi Area Tempat Tinggalnya**	**Persen**	**N/A**	**58,5**	**59,38**	**60,25**	**Seluruh OPD**
		10. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	N/A	100	100	100	Satpol PP
Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas,	7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas,		**Persentase Penurunan EmisiGRK**						**Seluruh OPD**
			a. Kumulatif	**Persen**	**N/A**	**10,06**	**10,78**	**11,49**	
			b. tahunan	**Persen**	**N/A**	**19,04**	**20,63**	**22,21**	
		11. Meningkatnya	Indeks Kualitas	Poin	73,96	77,2	77,37	77,54	Dinas LH dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
Estetik dan Ramah Lingkungan	Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Lingkungan Hidup						Kehutanan
		12. Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,2	6,87	6,56	Dinas Ketahanan Pangan TPH
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,16	90,05	90,95	91,85	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
			Intensitas energiprimer	SBM/Rp. Milyar	81	79,4	77,64	75,88	Dinas Peerindag danESDM
			Luas Zona Konservasi AirTanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	ha	0	50000	50000	50000	Dinas Perindag danESDM
Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		**Indeks Demokrasi Indonesia**	**Poin/Skor**	**80,19**	**80,5 - 82,46**	**83,08 - 84,08**	**84,70 - 85.70**	**Seluruh OPD**
		13. Menguatnya Peran Keluarga, Kesetaraan Gender, Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin/skor	0,399	0,395	0,39	0,386	Dinas P3AKB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/IPKK	Poin	69,79	69,79	71,04	71,96	Dinas P3AKB
			Indeks KerukunanUmat Beragama	Poin	80,88	81,2	81,5	82	Badan Kesbangpol

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET			Keterangan
						2025	2026	2027	
		dalam Kehidupan Sosial							
		14. Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	N/A	55,44 - 55,48	55,98-56,05	56,52-56,59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi Kreatif

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah RKPD tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2027.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2027 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

Sama halnya dengan dengan RKPD Kabupaten Dairi disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2027 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan Masyarakat Dairi Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

Misi 2 Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

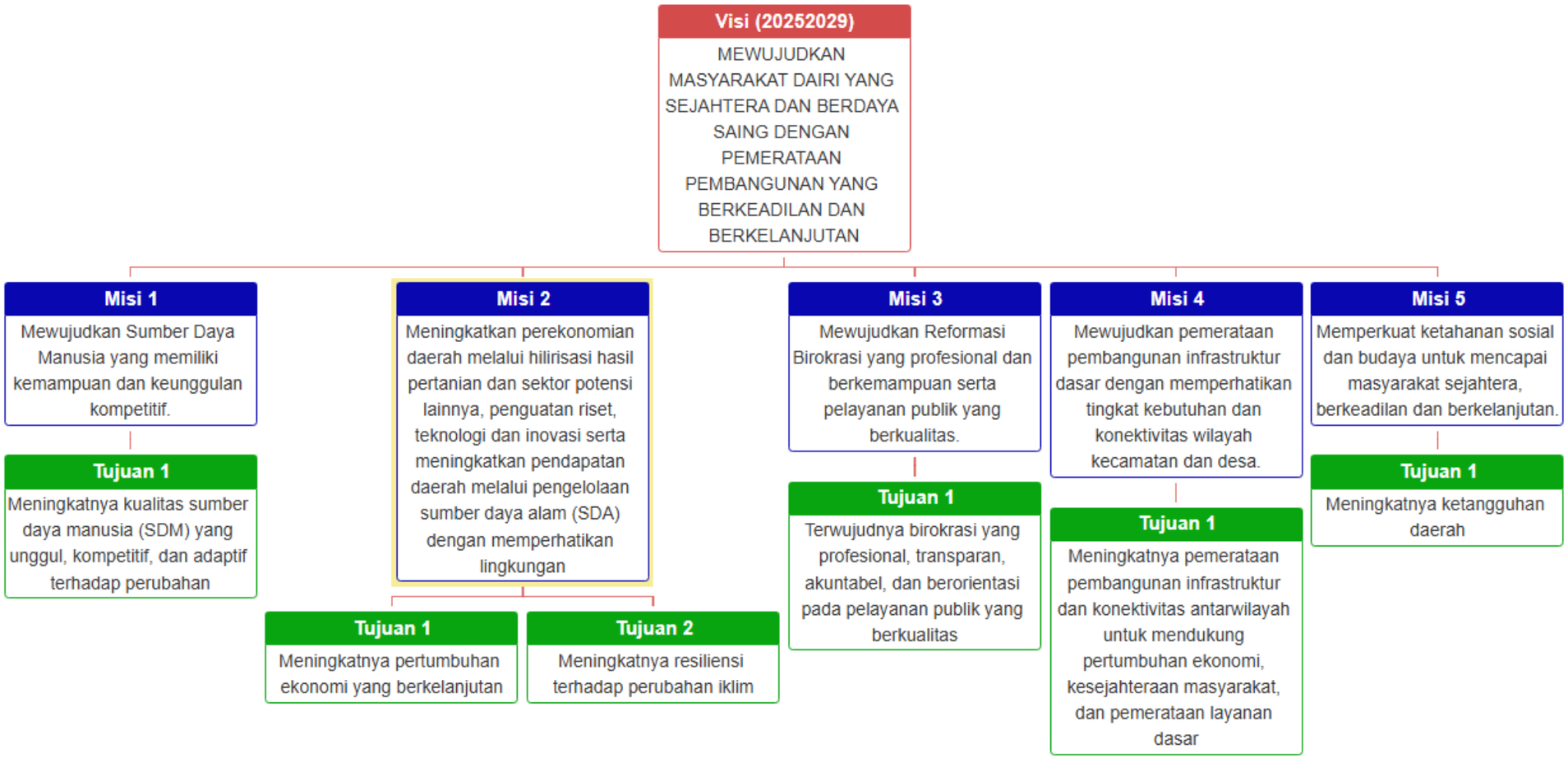

Tabel 4.6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2027 pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan	IPM				78	
				1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	14,16	Dinas Pendidikan
						Rata-rata Lama Sekolah	9,92	Dinas Pendidikan
				2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,3	Dinas Kesehatan
						Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,84	Dinas Kesehatan
				3	Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,34	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				4	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,33	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				5	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				6	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,241	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				7	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				5,20-5,50	
				8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	84	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				9	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100,29	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	138,7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				11	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,03	Dinas Perindagkop dan UKM
				12	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	2,7	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				13	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				14	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	8	Badan Pendapatan Daerah
				15	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	51.014.295	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
						Tingkat Pengangguran Terbuka	1,2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				16	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	13,2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	65,89	Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
		Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim	Penuru nan Intensitas Emisi GRK				175.192	Dinas Lingkungan Hidup
				18	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,41	Dinas Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)				74	Sekretariat Daerah
				19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	SAKIP	66,18	Sekretariat Daerah
				20	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				21	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Badan Keuangan Aet dan Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					yang transparan dan akuntabel			
				22	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
						Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,2	Inspektorat
				23	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks NSPK managemen ASN	B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				24	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,86	Sekretariat Daerah, Kecamatan,Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, RSU, Sekretariat Dewan
				25	Terwujudnya transpormasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Tranformasi Digital Pilar Pemerintah	41	Dinas Komunikasi dan Informatika
				26	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
				27	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE	2,9	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				28	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan dasar	Indeks Infrastruktur (Jalan, irigasi, air bersih dan Sanitasi)				65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				29	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				30	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				31	Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	68,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				32	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	46	Dinas Perhubungan
5	Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan	Meningkatnya ketangguhan daerah	Tingkat Kemiskinan				6,95	Dinas Sosial
				33	Meningkatnya Kesjahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,5	Dinas Sosial
			Indeks Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama				81,15	Badan Keatuan Bangsa dan Politik
				34	Meningkatnya ketenteraman dan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	68	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	dan berkelanjutan				ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Resiko Bencana (IRB)	114,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				35	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	60,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode Tahun 2025-2029, selain hal tersebut juga penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan terhadap program Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) pada tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Dairi berperan aktif dalam mendukung Program Strategis Nasional yang merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2025-2029 dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa **10 (Sepuluh) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar (**Dairi Tangguh**)
   a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan,irigasi, drainase dan trotoar;
   b) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
   c) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa.
2. Program hilirisasi produksi pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)
   a) Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan

pertanian (jagung dan kopi);

b) Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;

c) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

d) Pengembangan industri rumah tangga.

3. Program penguatan riset, teknologi dan inovasi. (**Dairi Inovatif**)

a) Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global;

b) Pengembangan Teknologi Informatika.

4. Program peningkatan pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)

a) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi;

b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;

c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)

a) Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%);

b) Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular;

c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;

d) Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;

e) Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat;

f) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;

g) Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.

6. Program peningkatan Pariwisata (**Dairi Wisata Maju**)

a) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata;

b) Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni, olahraga danekonomi kreatif lainnya.

7. Program layanan sosial (**Dairi Peduli**)
   a) Pemberdayaan para penyandang difabel;
   b) Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.
8. Tata Kelola Pemerintahan (**Dairi Clean Governance**)
   a) Percepatandigitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
   b) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala;
   c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,akuntabel dan professional;
   d) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
9. Program pengembangan Sumber Daya Alam (**Dairi Ekonomi Bangkit**)
   a) Pembangunan Ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik berbasis potensi lokal terhadap daerah yang belum terjangkau jaringan listriknya;
   b) Mengembangkan akses dan daya tarik Pariwisata.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (**Dairi Hijau**)
    a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    b) Optimalisasi pengolahan sampah;
    c) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
    d) Penghijauan pada lahan – lahan kritis.

Sesuai RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, pada tahun 2027 merupakan tahap **Penguatan dan Ekspansi** dengan prioritas pembangunan pada:

1. Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Kabupaten

2. Akselerasi sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah
3. Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi
4. Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak.

Dalam mencapai Visi, Misi, Sasaran Daerah, Strategi Pembangunan yang telah ditetapkan tahun 2027 diperlukan inovasi dan tematik pembangunan agar lebih cepat terwujud. Tema Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2027 yaitu: ***"Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar serta Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah"***, dengan fokus pembangunan antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar

   Fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan secara lebih merata ke seluruh wilayah kecamatan dan desa.

2. Daya Saing Ekonomi

   Fokus pada penguatan sektor-sektor potensial pasca-inisiasi hilirisasi pertanian di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencakup penguatan riset, teknologi, dan inovasi (Dairi Inovatif) untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

3. Konektivitas Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan dan desa untuk mendukung distribusi ekonomi dan akses layanan publik (Dairi Tangguh).

4. Transformasi Digital

   Mempercepat digitalisasi layanan publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif (Dairi Clean Governance).

4.2.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM memuat standar teknis dan indikator yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan. Dengan implementasi yang tepat, SPM menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sehingga

mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Pemenuhan SPM dapat dilihat dari terakomodirnya Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027.

4.2.3 Dukungan terhadap Pro-SN dan Tematik Pembangunan

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pro-SN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, Pro-SN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Pro-SN bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Pro-SN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN), Tematik dan Astacita.

Tabel 4.7
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Kabupaten/Kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	285.257.000	Dinas Sosial
									1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	151.905.974	Dinas Sosial
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.097.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	151.905.974	Dinas Sosial
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	371.285.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
										Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	374.110.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	59.015.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.084.549.000	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	119.256.800	Dinas Kesehatan
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	67.293.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)	648.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50.121.832.800	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	60.000.000	Dinas Kesehatan

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
			Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit					KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	150.000.000	Dinas Kesehatan
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50.121.832.800	Dinas Kesehatan
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	151.905.974	Dinas Sosial
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan	Cakupan Penemuan Kasus TBC	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.654.200.000	Dinas Kesehatan
									1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	50.000.000	Dinas Kesehatan

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
			Pengobatan TBC Sampai Tuntas				Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	285.257.000	Dinas Sosial
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.	%	Pendidikan	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	63.200.000	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita			Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.375.864.550	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68.095.000	Dinas Pendidikan

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)	(13)
		Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran		Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus								
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Perdagangan	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	34.812.700	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	149.989.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	1.490.988.500	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.8
Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Kabupaten Dairi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator *Outcome*	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)	(12)
1	Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial.	105.040.000	Dinas Sosial
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks		Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	99.549.000	Dinas Pendidikan
						Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	119.256.800	Dinas Kesehatan
						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.256.800	Dinas Kesehatan

No.	Tematik Pembangunan	**Outcome** Tematik Pembangunan	**Indikator** *Outcome*	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)	(12)
		Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan	Peringkat dalam KLA				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	105.040.000	Dinas Sosial
						Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	110.318.900	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
3	Masyarakat Adat	Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	198.823.500	Dinas Sosial
					Perindustrian	Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	10.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator *Outcome*	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)	(12)
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	Kesbangpol	Pendidikan					
6	Penanggulangan Bencana	Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana	Nilai	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim	%				1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.9
Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	99.549.000	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%					
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%					
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	100.000.000	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.850.000.000	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.495.685.888	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Berkinerja Baik	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENATAAN RUANG		Persentase kondisi mantap jalan	%					
				Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%					
				Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	50.554.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	70.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Penetapan RDTR	Perda/Perkada					
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas	525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4.466.116.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana	Nilai	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	230.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat SubUrusan Trantibum	Nilai		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	155.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	968.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota Kewenangan	70.000.000	Dinas Sosial
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	10.000.000	Dinas Sosial

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi		
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	285.257.000	Dinas Sosial
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	151.905.974	Dinas Sosial
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan/atau OPD	Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	165.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan	10.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02.0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	19.120.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan	%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0016	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan	58.175.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Layanan Komprehensif				Tingkat Daerah Kab/Kota		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	67.293.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap	%		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	34.812.700	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.097.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	26.632.300	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga					
				Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi	Bidang Tanah					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin					
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	5.000.000	Dinas Kependudukan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		dan Pencatatan Sipil
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.			Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%					
				Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%					
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi.			Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio					
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.990.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.			Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	2.734.996.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi,dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi.	9.999.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal	Rasio Kewirausahaan	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KOPERASI PERLINDUNGAN	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	149.989.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahn, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	30.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	110.060.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	20.002.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	110.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
19	Memperkuat pembangunan sumber	URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Kualitas Pemuda,	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan	225.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga			KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%					
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin					
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, danpenyelundupan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan Seni	%					
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni	%					
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	8.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							dan Pendaftaran Naskah Kuno		
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	17.150.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	9.974.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton					
				Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%					
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah					
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton					
				Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Hektar	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	550.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari	-	-	-	-	-	--	--
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Swasembada Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%					
				Rasio Elektrifikasi	%					
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	SBM/ Milyar Rupiah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	35.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi	Rp. Juta Per Tahun					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nilai tambah di dalam negeri.							Sistem Informasi Perdagangan		
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	199.451.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	149.895.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%					
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%					
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya,	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks					
				Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU RKPD 2027	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		serta kewaspadaan nasional							

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yang disusun sebagai instrumen operasional untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada periode pembangunan jangka menengah. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah diarahkan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan pendanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya mengoptimalkan fungsi anggaran daerah sebagai instrumen stabilisasi, distribusi, dan alokasi, sehingga belanja daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Sesuai tema pembanguan tahun 2027 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar serta Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah, RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 berfokus pada peningkatan pelayanan dasar, daya saing ekonomi, konektivitas infrastruktur, dan transformasi digital. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah dilakukan secara selektif dan terukur dengan mengedepankan prinsip *money follows program*, serta mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja daerah.

Dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan, Pemerintah Kabupaten Dairi terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diperoleh melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD,

hasil forum perangkat daerah, serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Seluruh masukan tersebut diselaraskan dengan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga diarahkan untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain yang sah, antara lain dana transfer pemerintah pusat dan provinsi, kerja sama dengan pihak ketiga, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan daerah dalam RKPDKabupaten Dairi Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman yang komprehensif dan realistis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, sekaligus memastikan kesinambungan pencapaian target RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 secara bertahap dan terukur.

Rencana program Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5.1
Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.018.851.675	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.618.284.289	Dinas Pendidikan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	354.947.777.181	Dinas Pendidikan
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.405.104.000	Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.853.702.352	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.585.587.000	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.035.356.648	Dinas Kesehatan
11	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	158.000.000	Dinas Kesehatan
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.004.292.000	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.995.685.888	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.635.613.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.611.251.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	179.034.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.347.237.728	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.557.635.050	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	930.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
27	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	421.285.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.563.801.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
32	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	793.290.000	Satuan Polisi Pamong Praja
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.772.561.740	Satuan Polisi Pamong Praja
34	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
35	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.300.938.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	1.007.258.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	KEBAKARAN		
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.730.903.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	144.212.000	Dinas Sosial
40	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	49.660.100	Dinas Sosial
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.161.991.291	Dinas Sosial
42	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	645.986.474	Dinas Sosial
43	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	405.863.900	Dinas Sosial
44	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	94.559.235	Dinas Sosial
45	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
46	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		
47	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
50	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	240.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
51	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
52	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	444.743.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
53	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	24.645.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
54	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
55	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	60.669.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
56	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	165.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.609.999.255	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
58	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
59	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PERLINDUNGAN ANAK		
60	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
63	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	21.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.829.106.517	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
65	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	323.630.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
66	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	216.450.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
67	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.879.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
69	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.864.338.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.162.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Penduduk dan Keluarga Berencana
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
72	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		
73	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	152.271.450	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
74	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	175.206.700	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.934.760.823	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
76	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
77	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
78	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		
79	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	380.862.000	Dinas Lingkungan Hidup
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.490.988.500	Dinas Lingkungan Hidup
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	120.174.100	Dinas Lingkungan Hidup
82	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	282.063.000	Dinas Lingkungan Hidup
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.020.823.678	Dinas Lingkungan Hidup
84	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0	Dinas Lingkungan Hidup
85	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
86	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
87	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	13.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
88	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	298.280.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
89	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.284.771.548	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
93	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	3.713.258.980	Dinas Pemberdayaan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	DESA		Masyarakat dan Desa
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	340.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.133.395.963	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
96	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
97	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.562.865.526	Dinas Perhubungan
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	770.109.000	Dinas Perhubungan
100	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
101	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.377.887.475	Dinas Komunikasi dan Informatika
102	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.224.990.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.523.808.008	Dinas Komunikasi dan Informatika
104	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	45.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
106	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
108	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
109	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	229.989.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
110	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	190.062.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
111	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	30.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah Kabupaten Dairi Tahun 2027 secara rinci tercantum dalam Lampiran II RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD ini.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing pada akhir periode masa jabatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menujukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintahan sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Dairi merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapanan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi, pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten Dairi.

Bab ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran pembangunan daerah, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bab ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Melalui penetapan target kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas publik, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing guna mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2027 dan periode pembangunan jangka panjang daerah.

6.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dengan mengacu pada target pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi, serta sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045. Indikator yang digunakan mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja dilakukan melalui berbagai indikator makro pembangunan seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Emisi GRK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka.

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Dairi pada RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi pada RKPD Tahun 2027

No.	Sasaran Pembangunan	Target 2027	
		Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Dairi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,40-6,80	5,20-5,50
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	96,9	50
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	1,116
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,89-5,64	6,95
5	Rasio Gini (poin)	0,300-0,302	0,29 - 0,21
6	Indeks Modal Manusia (poin)	0,55	78 (Proxy IPM)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,01-5,38	1,2
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	4,14	175.192
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,54	78,41

6.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. IKU berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja tahunan agar selaras dengan arah pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Melalui IKU yang spesifik, terukur, relevan, dan memiliki target waktu yang jelas, RKPD dapat disusun secara lebih efektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan memberikan

hasil yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Target indikator kinerja utama yang termuat pada RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua yang termuat rancangan RPJMD 2025-2029.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	2027	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,00	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,16	
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,92	
4	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.30	
5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,84	
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	54,34	
7	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	58,33	
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	74,53	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,64	
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,241	
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	61,62	
12	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	61,50	
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Juta Rupiah	5,20-5,50	
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	84,00	
15	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persen	100,29	
16	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	138,70	
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,03	
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Persen	2,70	
19	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,50	
20	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	51.014.295	
21	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	13,20	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	1,20	
23	Indeks Desa	Nilai	65,89	
24	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Nilai	175.192	
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	78,41	
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	74	

No	Indikator	Satuan	2027	Keterangan
27	SAKIP	Persen	66,18	
28	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	Nilai	67	
29	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	
30	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	8,00	
31	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	
32	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,2	
33	Indeks NSPK Manajemen ASN	Predikat	B	
34	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,86	
35	Nilai Indeks Tranformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	41	
36	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,18	
37	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,90	
38	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80,00	
39	Indeks Infrastruktur	Nilai	65,00	
40	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	65,00	
41	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	Persen	83	
42	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Nilai	68,26	
43	Rasio Konektivitas Kabupaten	Nilai	46	
44	Tingkat Kemiskinan	Nilai	6,95	
45	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	58,5	
46	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	81,15	
47	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	68	
48	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	114,50	
49	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	77	
50	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	60,5	

6.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Indikator ini disusun berdasarkan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta mencerminkan capaian pada berbagai aspek pembangunan, meliputi kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan publik, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan kelestarian lingkungan hidup. Melalui Indikator Kinerja Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi dapat melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara terukur, sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan mewujudkan visi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dairi
pada RKPD Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,14	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Konsumsi Listrik per kapita	kwh/kapita	306	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca	(TonCo2eq)	175.192	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	79,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	60,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,57	Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,41	Dinas Lingkungan Hidup
9	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	114,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20-5,50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,95	Dinas Sosial
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/	50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	01.20	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
5	Indeks Gini	Angka	0,217	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	78	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,3	Dinas Kesehatan
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,84	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi Stunting	Persen	23,8	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	90	Dinas Kesehatan
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	90	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97	Dinas Kesehatan
13	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,3	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,92	Dinas Pendidikan
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,16	Dinas Pendidikan
17	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	70,17	Dinas Pendidikan
18	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	72,35	Dinas Pendidikan
19	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	67,02	Dinas Pendidikan
20	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	67,71	Dinas Pendidikan
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	74,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Indeks Literasi Digital	Angka	43,88	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	54	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	81,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,34	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	61,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,241	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Indeks Pembangunan Gender	Angka	98,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,33	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
III	**ASPEK DAYA SAING**			
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,41	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	72,77	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,116	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah/Orang	50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	4,3*	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
7	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
8	Proporsi Jumlah UMKM	Persen	1,23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Angka	6,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Tingkat Inflasi	Persen	2,38	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
13	Kontribusi PRDB Kabupaten	Persen	1,116	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	25,01	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
15	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	Persen	58,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	2,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	79,9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	*44,00-49,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
19	*Return on Asset* (ROA) *BUMD*	Perse	1,25	Sekretariat Daerah
20	IKAD	Angka	4,26	Sekretariat Daerah
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,0024	Badan Pendapatan Daerah
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,86	Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74	Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	92,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Angka	81,9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah SakitUmum Daerah	Angka	98,5	Rumah Sakit Umum Daerah
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,94	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,23	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
1	***Pendidikan***			
1.1	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	70,17	Dinas Pendidikan
1.2	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	72,35	Dinas Pendidikan
1.3	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	67,02	Dinas Pendidikan
1.4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	67,71	Dinas Pendidikan
1.5	Persentase anak usia 5-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	0,28	Dinas Pendidikan
1.6	Indeks Pemerataan Guru	Angka	100	Dinas Pendidikan
1.7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	100	Dinas Pendidikan
1.8	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	74,83	Dinas Pendidikan
1.9	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	69,23	Dinas Pendidikan
1.10	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang			
1.11	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	99,49	Dinas Pendidikan
1.12	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	6,39	Dinas Pendidikan
1.13	Persentase jumlah satuan PAUD teraktreditasi minimal B	Persen	37,37	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	50,27	Dinas Pendidikan
1.15	Iklim inklusivitas SD	Persen	70,57	Dinas Pendidikan
1.16	Iklim inklusivitas SMP	Persen	65,18	Dinas Pendidikan
1.17	Iklim keamanan SD	Persen	80,31	Dinas Pendidikan
1.18	Iklim keamanan SMP	Persen	74,73	Dinas Pendidikan
1.19	Iklim kebhinekaan SD	Persen	75,72	Dinas Pendidikan
1.20	Iklim kebhinekaan SMP	Persen	75,34	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
2	**Kesehatan**			
2.1	Insidensi TBC per 100.000 penduduk	Kasus per 100.000 Penduduk	320,68	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi Stunting	Persen	23,8	Dinas Kesehatan
2.3	Jumlah Kematian Balita	Angka	38	Dinas Kesehatan
2.4	Persentase Cakupan Pemeriksaaan Kesehatan			
2.5	Gratis	Persen	55	Dinas Kesehatan
2.6	Cakupan Imunisasi Bayi	Persen	79	Dinas Kesehatan
2.7	Lengkap			
2.8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	90	Dinas Kesehatan
2.9	Peesentase Hipertensi Dalam Pengendalian	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.10	Persentase Balita gizi buruk yang mendapat tata			
2.11	laksana sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.12	Persentase desa/kelurahan mencapai target STBM	Persen	82	Dinas Kesehatan
2.13	Persentase fasilitas			
2.14	pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	85	Dinas Kesehatan
2.15	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	96	Dinas Kesehatan
2.16	Persentase fasilitas			
2.17	pelayanan kesehatan	Persen	85	Dinas Kesehatan
2.18	dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			
2.19	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	75	Dinas Kesehatan
2.20	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan			
2.21	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	77	Dinas Kesehatan
2.22	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	78	Dinas Kesehatan
2.23	Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar	Persen	61	Dinas Kesehatan
2.24	Persentase Puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar	Persen	83	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
2.25	Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	Persen	88	Dinas Kesehatan
2.26	Persentase Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.27	Jumlah Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP sesuai standar)	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.31	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.32	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.33	Persentase usia 15-59 Tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.34	Persentase usia warga negara 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.35	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.36	Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.37	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	Persen	100	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	kesehatan sesuai standar			
2.40	Persentase kasus berpotensi wabah yang ditangani sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.41	Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.42	Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	45	Dinas Kesehatan
2.43	Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	97	Dinas Kesehatan
2.44	Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan			
2.45	pelayanan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.46	Angka insidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 1000 penduduk	42	Dinas Kesehatan
2.47	Persentase balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.48	Persentase keberhasilan pengobatan TB (TSR)	Persen	90	Dinas Kesehatan
2.49	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	72	Dinas Kesehatan
2.50	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi	Persen	70	Dinas Kesehatan
2.51	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.52	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	56	Dinas Kesehatan
2.53	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Persen	61	Dinas Kesehatan
2.54	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perijinan	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.55	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	84	Dinas Kesehatan
2.56	Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	78	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
2.57	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
2.58	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
2.59	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
2.60	prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit			
2.61	Cakupan pemeliharaan sarana prasasara dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
2.62	*Cost Recovery Rate* (CRR)	Persen	90	Rumah Sakit Umum Daerah
2.63	Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM-RS	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
2.64	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit	Persen	100	Rumah Sakit Umum Daerah
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.2	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektare	650	
3.3	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	58,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	79,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.5	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.6	Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung	Persen	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.7	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	310	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.9	Rasio proyek yang	Persen	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			
3.10	Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang	Angka	76,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.11	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan perumahan air limbah domestik	Persen	4,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.12	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.13	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.14	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	96,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	**Perumahan Rakyat**			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 hektare di kabupaten/kota ditangani	Persen	5,99	
4.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	15,5	
4.4	Berkurangnya unit RTLH	Persen	70,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.5	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani permukiman kumuh	Persen	5,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantiburm	Angka	68	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Angka	60	Satuan Polisi Pamong Praja
5.4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.6	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
5.7	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	45	Satuan Polisi Pamong Praja
5.8	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5.9	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	86	Satuan Polisi Pamong Praja
5.10	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	90-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.11	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.12	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.13	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	80	
5.14	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	
5.15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**Sosial**			
6.1	Cakupan PPKS yang menerima layanan kesejahteraan sosial	Persen	44,19	Dinas Sosial
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Persen	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standart	Persen	57	Dinas Sosial
6.4	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Persen	100	Dinas Sosial
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100	Dinas Sosial
6.6	Cakupan layanan taman makam pahlawan	Persen	100	Dinas Sosial
6.7	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	57	Dinas Sosial
6.8	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	3	Dinas Sosial
6.9	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan	Persen	100	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	setelah tanggap darurat bencana			
6.10	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100	Dinas Sosial
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**			
1	**Tenaga Kerja**			
1.1	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	54	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,21	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja kabupaten/kota dalam satu (daerah provinsi)	Persen	90,2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	83,83	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.5	Jumlah LPK yang terakreditasi	LPK	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.6	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.7	Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.8	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.9	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	8,57	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.10	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32.350	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.11	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya			Dinas Penanaman Modal Pelayanan
1.12		Orang	32.350	Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.1	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	55,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Angka	80,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4	Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan	Persen	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	59,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.7	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Persen	62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	**Pangan**			
3.1	*Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Pravelence of Undermourishment*)	Persen	7,14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.2	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Persen	132,1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.4	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.5	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1,7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	**Pertanahan**			
4.1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	73,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	**Lingkungan Hidup**			
5.1	Indeks kualitas Air	Angka	75,01	Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
5.2	Indeks kualitas Udara	Angka	84,19	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Lahan	Angka	68,22	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.5	Persentase RTH	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	5	Dinas Lingkungan Hidup
5.7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	0,759027778	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
6.1	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase anak berusia 0- 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persen	98,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi Yang melaporkan	Persen	62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
7.1	Persentase desa mandiri	Persen	2,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.4	Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.5	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.6	persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	4,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.7	Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
7.8	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3	(*modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	63,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19)	Kelahiran per 1000 US 15-19 thn	6,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.5	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	12,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.6	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.7	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Persen	72,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.8	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	11,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	85,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	**Perhubungan**			
9.1	Persentase kelengkapan jalan yang terpasang			
9.2	terhadap kondisi ideal	Persen	70,3	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah Kendaraan bermotor yang layak jalan	Unit	2.030	Dinas Perhubungan
9.4	Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota	Persen	50,3	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**			
10.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	72	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
10.2	Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul E- walidata SIPD	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Angka	240	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.4	Indeks SPBE terkait keamanan	Angka	240	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
11.1	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%	Persen	56,3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.2	Persentase koperasi aktif	Persen	56,7	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
11.3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	2,86	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	**Penanaman Modal dan Perijinan**			
12.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	25,01	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.2	Nilai Investasi	(Rp. Milyard)	12,629,44	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.3	PMDN	Persen	74	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.4	PMA	Persen	26	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.5	Jumlah proyek investasi	perusahaan	185	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.6	Realisasi total terhadap Target Investasi (IP)	Persen	13,2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.7	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	2,29	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.8	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.10	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.11	Persentase ijin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
13	**Kepemudaan dan Olahraga**			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
13.2	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14	**Kebudayaan**			
14.1	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14.2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	35	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
15	**Perpustakaan**			
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
16	**Kearsipan**			
	Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan	Persen	68	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
C	**Urusan Pilihan**			
1	**Pertanian**			
1.1	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	45	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.2	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.3	Peningkatan produktivitas pertanian per hektare per tahun	Persen	1,45	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.4	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1,7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.5	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	1,88	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.6	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektare	6.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.7	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	25	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**Perikanan**			
	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan	Ton	3.714,99	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	budidaya)			
3	**Peternakan**			
3.1	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.2	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	60	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	**Pariwisata**			
4.1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
4.4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
5	**Perdagangan**			
5.1	Persentase alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	Persen	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	92	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.3	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	Persen	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.4	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	53	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.5	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	**Perindustrian**			
6,1	Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM)	Persen	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	68	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
D	**Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**			
1	**Sekretariat Daerah**			
1.1	SAKIP	Nilai	66,18	Sekretariat Daerah
1.2	Nilai EPPD	Nilai	3	Sekretariat Daerah
1.3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,23	Sekretariat Daerah
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	55	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
1.5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,86	Sekretariat Daerah
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	70	Sekretariat Daerah
1.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	Sekretariat Daerah
1.8	Indeks Zakat Daerah	Angka	0,24	Sekretariat Daerah
1.9	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama pemerintah daerah	Persen	100	Sekretariat Daerah
1.10	Indeks Kematangan Organisasi	Angka	3	Sekretariat Daerah
1.11	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Unit	7	Sekretariat Daerah
1.12	Nilai komponen pelaporan kinerja	Angka	11,33	Sekretariat Daerah
1.13	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	25	Sekretariat Daerah
1.14	Efektivitas kerjasama daerah	Angka	4,26	Sekretariat Daerah
2	**Sekretariat DPRD**			
2.1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100	Sekretariat DPRD
2.2	Persentase pelayanan terhadap DPRD sesuai dengan SOP	Persen	100	Sekretariat DPRD
2.3	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	Sekretariat DPRD
2.4	Persentase penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	Sekretariat DPRD
E	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**			
1	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**			
1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.3	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.4	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.6	Persentase fasilitasi,pembinaan,bim bing an teknis dan supervisiterkait penelitian,	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah			
2	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**			
2.1	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	92	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.2	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.3	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	12	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.4	*Rasio Belanja urusan pmerintahan umum dikurangi transfer expenditures*	Persen	50,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.6	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.7	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N	Persen	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.8	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	90	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.9	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PADdalam APBD	Persen	84	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.10	*Assets managemen*t	Kategori	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.11	*Cash Management*: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,06744	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.12	*Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)*	Laporan	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.13	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	23	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.14	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	38	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.15	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	92	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.16	Persentase penurunan SILPA	Persen	0,8	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.17	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	78	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
3	**Badan Pendapatan Darah**			
3.1	Rasio PAD	Persen	8,45	Badan Pendapatatan Daerah
3.2	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,0024	Badan Pendapatatan Daerah
4	**Kepegawaian**			
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**Inspektorat**			
5.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Inspektorat
5.1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,2	Inspektorat
5.1	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	Inspektorat
5.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	88	Inspektorat
5.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Persen	98	Inspektorat
5.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Kabupaten Dairi	Persen	86	Inspektorat
5.1	Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang pengawasan	Persen	95	Inspektorat
6	**Kecamatan**			
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Nilai	93,9	Kecamatan Sidikalang
6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Nilai	80,35	Kecamatan Sumbul
6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Nilai	80,35	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Nilai	80,35	Kecamatan Siempat Nempu
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Nilai	80,35	Kecamatan Tigalingga
6.6	Indeks Kepuasan	Nilai	80,35	Kecamatan Tanah Pinem

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem			
6.7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Nilai	80,35	Kecamatan Pegagan Hilir
6.8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Nilai	80,35	Kecamatan Parbuluan
6.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Nilai	80,6	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
6.10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Nilai	80,35	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
6.11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Nilai	80,8	Kecamatan Lae Parira
6.12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Nilai	80,8	Kecamatan Gunung Sitember
6.13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Nilai	80,35	Kecamatan Berampu
6.14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Nilai	80,35	Kecamatan Silahisabungan
6.15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Nilai	80,35	Kecamatan Sitinjo
7	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**			
7.1	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	86	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.2	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.3	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.4	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD sebagai bahagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2027 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 menjadi acuan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027.

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, serta memperkuat keterpaduan dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 tidak hanya memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah, tetapi juga mencerminkan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pendanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 disusun sampai dengan rincian subkegiatan untuk memastikan belanja tepat sasaran, efektif dan efisien.

3. RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 telah mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hasil forum perangkat daerah, serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.

4. Seluruh Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan pembangunan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban mendukung dan melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 secara sinergis, efektif, dan bertanggung jawab.

5. Dalam rangka optimalisasi pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Dairi mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengimplementasikan rencana pembangunan secara konsisten. Dengan semangat kebersamaan, disiplin, dan akuntabilitas, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab

berbagai permasalahan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja RPJMD secara bertahap dan terukur, sekaligus memperkuat kesinambungan pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029.

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Pendidikan						**440.584.913.145,00**								**437.019.671.393,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**440.584.913.145,00**								**437.019.671.393,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**440.584.913.145,00**								**437.019.671.393,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**354.947.777.181,00**								**372.568.471.393,00**	
			-	-		-	-	354.947.777.181,00							-	372.508.471.393,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						352.038.542.325,00						-		365.838.471.393,00	
		-						352.038.542.325,00						-		365.838.471.393,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	352.038.542.325,00							-	365.838.471.393,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						352.038.542.325,00			-	-	Dairi Cerdas			365.838.471.393,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	61011 Orang/bulan	352.038.542.325,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)					-	365.838.471.393,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.718.500,00						-		420.000.000,00	
		-						104.718.500,00						-		420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	51.800.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	12.918.500,00							-	60.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.918.500,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.918.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						51.800.000,00			-	-	-			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	51.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.802.156.856,00						-		6.240.000.000,00	
		-						2.802.156.856,00						-		6.240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	30.200.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.771.956.856,00							-	6.200.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.200.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	30.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.771.956.856,00			-	-	-			6.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	2.771.956.856,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.359.500,00						-		70.000.000,00	
		-						2.359.500,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	2.359.500,00							-	70.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.359.500,00			-	-	-			70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	2.359.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	70.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**80.618.284.289,00**								**61.888.000.000,00**	
			-	-		-	-	80.055.540.289,00							-	61.668.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						45.167.035.715,00						-		34.128.000.000,00	
		-						45.167.035.715,00						-		34.128.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	64.999.000,00							-	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	99.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	691.156.500,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	3.587.998.500,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	4.479.257.415,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	1.194.641.600,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	1.003.620.200,00							-	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	118.068.000,00							-	120.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	207.906.500,00							-	208.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	33.085.650.000,00							-	33.100.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	266.571.600,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	367.617.400,00							-	400.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.194.641.600,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	4 Unit	1.194.641.600,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						691.156.500,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	400 Paket	691.156.500,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						266.571.600,00			-	-	Dairi Cerdas			300.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	1310 Peserta Didik	266.571.600,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						207.906.500,00			-	-	Dairi Cerdas			208.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	262 Satuan Pendidikan	207.906.500,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	208.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						33.085.650.000,00			-	-	Dairi Cerdas			33.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	262 Satuan Pendidikan	33.085.650.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOS Reguler					-	33.100.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						367.617.400,00			-	-	Dairi Cerdas			400.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	50 Orang	367.617.400,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	400.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						99.549.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						64.999.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	64.999.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						3.587.998.500,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	9 Ruang	3.587.998.500,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.003.620.200,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Unit	1.003.620.200,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						118.068.000,00			-	-	Dairi Cerdas			120.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	262 Satuan Pendidikan	118.068.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	120.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						4.479.257.415,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	11 Ruang	4.479.257.415,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						32.088.052.014,00						-		22.714.000.000,00	
		-						32.088.052.014,00						-		22.714.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	64.999.000,00							-	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	99.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	545.969.314,00							-	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	99.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	461.984.600,00							-	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	292.031.200,00							-	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	99.549.000,00							-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	145.325.800,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	134.669.250,00							-	140.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	99.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	899.344.600,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	910.124.900,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	3.726.439.200,00							-	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	1.797.064.600,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	309.834.500,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	164.470.900,00							-	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	99.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	21.824.240.000,00							-	22.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	313.809.150,00							-	314.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						899.344.600,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	899.344.600,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						461.984.600,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	461.984.600,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						1.797.064.600,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	4 Ruang	1.797.064.600,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						309.834.500,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	309.834.500,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						3.726.439.200,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	28 Ruang	3.726.439.200,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						292.031.200,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	292.031.200,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						164.470.900,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Unit	164.470.900,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						545.969.314,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	300 Paket	545.969.314,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						145.325.800,00			-	-	Dairi Cerdas			150.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1200 Peserta Didik	145.325.800,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						313.809.150,00			-	-	Dairi Cerdas			314.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	310 Peserta Didik	313.809.150,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	314.000.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						99.549.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	62 Orang	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						99.549.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	62 Satuan Pendidikan	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						21.824.240.000,00			-	-	Dairi Cerdas			22.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	62 Satuan Pendidikan	21.824.240.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOS Reguler					-	22.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						99.549.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	62 Orang	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						99.549.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						64.999.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	64.999.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						134.669.250,00			-	-	Dairi Cerdas			140.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	62 Satuan Pendidikan	134.669.250,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	140.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						910.124.900,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	2 Ruang	910.124.900,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						99.549.000,00			-	-	Dairi Cerdas			110.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	62 Orang	99.549.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	110.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						3.132.702.500,00						-		4.406.000.000,00	
		-						3.132.702.500,00						-		4.406.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	68.095.000,00							-	24.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	67.718.150,00							-	72.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	115.751.950,00							-	370.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	148.748.000,00							-	145.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	2.478.450.000,00							-	2.700.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	136.296.000,00							-	920.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	117.643.400,00							-	175.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						148.748.000,00			-	-	Dairi Cerdas			145.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	120 Satuan Pendidikan	148.748.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	145.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2.478.450.000,00			-	-	Dairi Cerdas			2.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	150 Satuan Pendidikan	2.478.450.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler					-	2.700.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						68.095.000,00			-	-	Dairi Cerdas			24.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	68.095.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	24.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						115.751.950,00			-	-	Dairi Cerdas			370.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	115.751.950,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	370.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						117.643.400,00			-	-	Dairi Cerdas			175.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	150 Peserta didik	117.643.400,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						67.718.150,00			-	-	Dairi Cerdas			72.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	67.718.150,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	72.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						136.296.000,00			-	-	Dairi Cerdas			920.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	170 Satuan Pendidikan	136.296.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	920.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						230.494.060,00						-		640.000.000,00	
		-						230.494.060,00						-		640.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	20.071.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	30.423.060,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	180.000.000,00							-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						20.071.000,00			-	-	Dairi Cerdas			220.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	100 Peserta Didik	20.071.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	220.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						180.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	3 Satuan Pendidikan	180.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						30.423.060,00			-	-	Dairi Cerdas			220.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	100 Peserta Didik	30.423.060,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	220.000.000,00	Dinas Pendidikan
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**5.018.851.675,00**								**2.563.200.000,00**	
			-	-		-	-	5.018.851.675,00							-	2.563.200.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						5.018.851.675,00						-		2.563.200.000,00	
		-						5.018.851.675,00						-		2.563.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	515.026.000,00							-	585.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	4.503.825.675,00							-	1.978.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						515.026.000,00			-	-	Dairi Cerdas			585.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	6 Dokumen	515.026.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	585.200.000,00	Dinas Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						4.503.825.675,00			-	-	-			1.978.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	13 Laporan	4.503.825.675,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	1.978.000.000,00	Dinas Pendidikan
		Dinas Kesehatan						**180.099.750.000,00**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**180.037.750.000,00**								**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**180.037.750.000,00**								**0,00**	
4.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**98.035.356.648,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	97.960.356.648,00							-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	5 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						97.262.683.336,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						97.262.683.336,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	97.262.683.336,00							-	0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						97.262.683.336,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1284 Orang/bulan	97.262.683.336,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						230.000.000,00						-		0,00	
		-						230.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						167.673.312,00						-		0,00	
		-						167.673.312,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	122.673.312,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						122.673.312,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	122.673.312,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00						-		0,00	
		-						325.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	300.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
5.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**78.853.702.352,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	78.447.702.352,00							-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7.685.255.495,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						7.685.255.495,00						-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	171.499.000,00							-	0,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	230.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	-	231.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	6.850.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	15.120.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	-	87.036.495,00							-	0,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						100.000.000,00			-	-	Dairi Sehat			0,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						87.036.495,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	1 Unit	87.036.495,00	Kab. Dairi	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						15.120.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	4 Unit	15.120.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						171.499.000,00			-	-	-			0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	100 Unit	171.499.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						6.850.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	2 Paket	6.850.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						231.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	900000 Keluarga	231.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						230.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	2 Paket	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						71.005.246.857,00						-		0,00	
		-						71.005.246.857,00						-		0,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	376.994.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	589.392.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	50.121.832.800,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	2.084.549.000,00							-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	1.407.336.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	321.629.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	557.939.000,00							-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	119.256.800,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	4.885.123.057,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	3.531.853.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	132.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	2.648.955.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	931.843.000,00							-	0,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	1.654.200.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	274.293.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	420.283.200,00							-	0,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	247.068.000,00							-	0,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	-	32.500.000,00							-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						2.648.955.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3.794 Orang	2.648.955.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						132.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4157 Orang	132.600.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						589.392.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	4049 Orang	589.392.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						41.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	21223 Orang	41.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						376.994.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	60413 Orang	376.994.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						41.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	218384 Orang	41.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						41.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	37792 Orang	41.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						41.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	95405 Orang	41.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						41.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3986 Orang	41.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						274.293.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	409 Orang	274.293.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.654.200.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	6623 Orang	1.654.200.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	8018 Orang	31.600.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						2.084.549.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	3 Dokumen	2.084.549.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.407.336.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	1.407.336.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						321.629.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	321.629.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						557.939.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	557.939.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						420.283.200,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	75 Orang	420.283.200,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						50.121.832.800,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	50.121.832.800,00	Kab. Dairi	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Sawit Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.531.853.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	18 Dokumen	3.531.853.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						4.885.123.057,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Dokumen	4.885.123.057,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	1.98 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	40 Orang	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						32.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	7 Tatanan	32.500.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						119.256.800,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	119.256.800,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						247.068.000,00			-	-	-			0,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	247.068.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						60.000.000,00			-	-	Dairi Sehat			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	7 Laporan	60.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						931.843.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	2 Laporan	931.843.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						113.200.000,00						-		0,00	
		-						113.200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	81.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	145 Unit	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						81.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	145 Unit	81.600.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.585.587.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.553.987.000,00							-	0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						63.200.000,00						-		0,00	
		-						63.200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	300 Dokumen	31.600.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	145 Dokumen	31.600.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						302.387.000,00						-		0,00	
		-						302.387.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	282.387.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						282.387.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	282.387.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.220.000.000,00						-		0,00	
		-						1.220.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	1.220.000.000,00							-	0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.220.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	200 Orang	1.220.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	0,00	Dinas Kesehatan
7.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**158.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	94.800.000,00							-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						31.600.000,00						-		0,00	
		-						31.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						31.600.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						31.600.000,00						-		0,00	
		-						31.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	31.600.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	1 Dokumen	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						63.200.000,00						-		0,00	
		-						63.200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	-	63.200.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						63.200.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	10 Dokumen	63.200.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						31.600.000,00						-		0,00	
		-						31.600.000,00						-		0,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	31.600.000,00							-	0,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						31.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	25 Unit	31.600.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
8.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.405.104.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.405.104.000,00							-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						380.059.000,00						-		0,00	
		-						380.059.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	380.059.000,00							-	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						380.059.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	2 Dokumen	380.059.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.025.045.000,00						-		0,00	
		-						1.025.045.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	1.025.045.000,00							-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.025.045.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	2 Dokumen	1.025.045.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	Dinas Kesehatan
	X							**62.000.000,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**62.000.000,00**								**0,00**	
9.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**62.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	62.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.620.000,00						-		0,00	
		-						14.620.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	14.620.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						14.620.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	14.620.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.380.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						47.380.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	47.380.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.380.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	47.380.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Bintang Hulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Kesehatan
		Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang						**67.999.977.888,00**								**77.305.135.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67.999.977.888,00**								**77.305.135.650,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**67.999.977.888,00**								**77.305.135.650,00**	
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**63.004.292.000,00**								**72.792.535.650,00**	
			-	-		-	-	63.004.292.000,00							-	72.792.535.650,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.004.292.000,00						-		6.342.535.650,00	
		-						2.004.292.000,00						-		6.342.535.650,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	538.282.000,00							-	426.319.300,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	665.100.000,00							-	1.210.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	800.910.000,00							-	4.706.216.350,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						800.910.000,00			-	-	-			4.706.216.350,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	1 Unit	800.910.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.706.216.350,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						665.100.000,00			-	-	-			1.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	30 Unit	665.100.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.210.000.000,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						538.282.000,00			-	-	-			426.319.300,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	180 Unit	538.282.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	426.319.300,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						61.000.000.000,00						-		66.450.000.000,00	
		-						61.000.000.000,00						-		66.450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	61.000.000.000,00							-	66.450.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						61.000.000.000,00			-	-	-			66.450.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	61.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Pendapatan dari BLUD					-	66.450.000.000,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**4.995.685.888,00**								**4.512.600.000,00**	
			-	-		-	-	4.995.685.888,00							-	4.512.600.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						4.495.685.888,00						-		4.262.600.000,00	
		-						4.495.685.888,00						-		4.262.600.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	4.495.685.888,00							-	4.262.600.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						4.495.685.888,00			-	-	-			4.262.600.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	54 Orang	4.495.685.888,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.262.600.000,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						500.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	500.000.000,00							-	250.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			-	-	-			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	20 Orang	500.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						**72.192.359.000,00**								**21.810.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**62.445.857.978,00**								**12.229.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**54.860.771.478,00**								**12.130.000.000,00**	
12.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.347.237.728,00**								**2.200.000.000,00**	
			-	-		-	-	9.347.237.728,00							-	2.200.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		0,00	
		-						70.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	70.000.000,00							-	0,00	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						760.000.000,00						-		660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						760.000.000,00						-		660.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	760.000.000,00							-	660.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						760.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			660.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	250 Laporan	760.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	660.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.344.397.728,00						-		0,00	
		-						7.344.397.728,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.058.160.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	286.237.728,00							-	0,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.058.160.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	36 Laporan	7.058.160.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						286.237.728,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	200 Laporan	286.237.728,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.172.840.000,00						-		1.540.000.000,00	
		-						1.172.840.000,00						-		1.540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.172.840.000,00							-	1.540.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00							-	0,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.172.840.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.540.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	16 Unit	1.172.840.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.540.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**14.611.251.000,00**								**3.550.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	14.611.251.000,00							-	3.550.000.000,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						14.611.251.000,00						-		3.550.000.000,00	
		-						14.611.251.000,00						-		3.550.000.000,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	-	204.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	374.110.000,00							-	1.100.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	14.033.141.000,00							-	2.200.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						14.033.141.000,00			-	-	-			2.200.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	4 KM	14.033.141.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						374.110.000,00			-	-	-			1.100.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0,35 KM	374.110.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						204.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	4 Dokumen	204.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**1.550.000.000,00**								**1.320.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.550.000.000,00							-	1.320.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						1.550.000.000,00						-		1.320.000.000,00	
		-						1.550.000.000,00						-		1.320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	-	200.000.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	-	1.000.000.000,00							-	1.100.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	-	300.000.000,00							-	0,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						200.000.000,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						300.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	5 Liter/Detik	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000.000,00			-	-	-			1.100.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	500 SR	1.000.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						50.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	20 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.850.000.000,00**								**550.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.850.000.000,00							-	550.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.850.000.000,00						-		550.000.000,00	
		-						1.850.000.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	350.000.000,00							-	0,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	1.500.000.000,00							-	550.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						350.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	2 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						1.500.000.000,00			-	-	-			550.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	3.7 M³/Hari	1.500.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**1.635.613.600,00**								**2.970.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.635.613.600,00							-	2.970.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.635.613.600,00						-		2.970.000.000,00	
		-						1.635.613.600,00						-		2.970.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	-		-	-	0,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-		-	-	620.000.000,00							-	1.650.000.000,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	-		-	-	1.015.613.600,00							-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan						1.015.613.600,00			-	-	-			1.100.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	-		-	1000 M	1.015.613.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						620.000.000,00			-	-	-			1.650.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-		-	1 Sistem Drainase Lingkungan	620.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			220.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**2.200.000.000,00**								**220.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.200.000.000,00							-	220.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						2.200.000.000,00						-		220.000.000,00	
		-						2.200.000.000,00						-		220.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.000.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	200.000.000,00							-	220.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						200.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**1.000.000.000,00**								**1.320.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.000.000.000,00							-	1.320.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00						-		1.320.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00						-		1.320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	-	1.000.000.000,00							-	1.100.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			220.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	100 Kawasan	1.000.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
19.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**21.557.635.050,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	21.557.635.050,00							-	0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						21.557.635.050,00						-		0,00	
		-						21.557.635.050,00						-		0,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	5.481.770.500,00							-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	10.375.864.550,00							-	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	3.500.000.000,00							-	0,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	2.000.000.000,00							-	0,00	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						200.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	10 KM	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						5.481.770.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	3 KM	5.481.770.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						10.375.864.550,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	7.5 KM	10.375.864.550,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						3.500.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	1 KM	3.500.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						2.000.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	10 Meter	2.000.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**179.034.100,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	179.034.100,00							-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						58.480.100,00						-		0,00	
		-						58.480.100,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	-	58.480.100,00							-	0,00	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						58.480.100,00			-	-	-			0,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	50 Orang	58.480.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						120.554.000,00						-		0,00	
		-						120.554.000,00						-		0,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	-	70.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	50.554.000,00							-	0,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						50.554.000,00			-	-	-			0,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	20 Paket Pekerjaan	50.554.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						70.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	5 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**930.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	880.000.000,00							-	0,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						800.000.000,00						-		0,00	
		-						800.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	800.000.000,00							-	0,00	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						800.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						50.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	50 Layanan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						-		0,00	
		-						80.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						50.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						30.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	1 Kasus	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**7.585.086.500,00**								**99.000.000,00**	
22.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**421.285.000,00**								**66.000.000,00**	
			-	-		-	-	421.285.000,00							-	66.000.000,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						371.285.000,00						-		66.000.000,00	
		-						371.285.000,00						-		66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	371.285.000,00							-	66.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						371.285.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			66.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	5 Unit Rumah	371.285.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						50.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.050.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	525.000.000,00							-	0,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.050.000.000,00						-		0,00	
		-						1.050.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	525.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	525.000.000,00							-	0,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						525.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	1 Unit Rumah	525.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						525.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	1 Unit	525.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**550.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	550.000.000,00							-	0,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						550.000.000,00						-		0,00	
		-						550.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	550.000.000,00							-	0,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						550.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	25 Unit Rumah	550.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**5.563.801.500,00**								**33.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.563.801.500,00							-	33.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						5.563.801.500,00						-		33.000.000,00	
		-						5.563.801.500,00						-		33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	-	72.685.000,00							-	33.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	4.466.116.500,00							-	0,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	1.025.000.000,00							-	0,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						72.685.000,00			-	-	-			33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	2 Dokumen	72.685.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						1.025.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	1 Lokasi	1.025.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						4.466.116.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	15 Lokasi	4.466.116.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**350.000.000,00**								**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**350.000.000,00**								**0,00**	
26.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**100.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota						100.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1000 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**250.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	250.000.000,00							-	0,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00						-		0,00	
		-						250.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	-		-	-	250.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.10.05.2.01.0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	-		-	1 Laporan	250.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			0,00	
		Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	X							**9.396.501.022,00**								**9.581.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**9.396.501.022,00**								**9.581.000.000,00**	
28.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.396.501.022,00**								**9.581.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	9.396.501.022,00							-	9.581.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		220.000.000,00	
		-						70.000.000,00						-		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	70.000.000,00							-	220.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			220.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.099.121.919,00						-		8.800.000.000,00	
		-						9.099.121.919,00						-		8.800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.099.121.919,00							-	8.800.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.099.121.919,00			-	-	-			8.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1092 Orang/bulan	9.099.121.919,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						227.379.103,00						-		561.000.000,00	
		-						227.379.103,00						-		561.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	58.177.103,00							-	66.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	169.202.000,00							-	385.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			110.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	100 Paket	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						169.202.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			385.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	120 Paket	169.202.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						58.177.103,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			66.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	120 Paket	58.177.103,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Satuan Polisi Pamong Praja						**7.565.851.740,00**								**7.835.478.039,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.565.851.740,00**								**7.835.478.039,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.565.851.740,00**								**7.835.478.039,00**	
29.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.772.561.740,00**								**7.155.478.039,00**	
			-	-		-	-	6.767.561.740,00							-	7.002.478.039,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		6.500.000,00	
		-						10.000.000,00						-		6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.000.000,00							-	3.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.165.851.957,00						-		6.338.289.596,00	
		-						6.165.851.957,00						-		6.338.289.596,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.165.851.957,00							-	6.338.289.596,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.165.851.957,00			-	-	Dairi Clean Governance			6.338.289.596,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	94 Orang/bulan	6.165.851.957,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.338.289.596,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.838.800,00						-		214.450.000,00	
		-						243.838.800,00						-		214.450.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	190.225.100,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00							-	4.950.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.490.000,00							-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	38.623.400,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	8.000.300,00							-	6.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.490.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.490.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.623.400,00			-	-	Dairi Clean Governance			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	38.623.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.000.300,00			-	-	Dairi Clean Governance			6.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.000.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.500.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			4.950.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.950.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						190.225.100,00			-	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	190.225.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.304.000,00						-		150.000.000,00	
		-						78.304.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	78.304.000,00							-	150.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						78.304.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	78.304.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						261.531.440,00						-		197.000.000,00	
		-						261.531.440,00						-		197.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.000.000,00							-	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	238.531.440,00							-	165.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			32.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	23.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	32.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						238.531.440,00			-	-	Dairi Clean Governance			165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	238.531.440,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	165.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.035.543,00						-		249.238.443,00	
		-						13.035.543,00						-		249.238.443,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	7.355.543,00							-	243.338.443,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.680.000,00							-	5.900.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.355.543,00			-	-	Dairi Clean Governance			243.338.443,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	7.355.543,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	243.338.443,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.680.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			5.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	5.680.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.900.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
30.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**793.290.000,00**								**680.000.000,00**	
			-	-		-	-	793.290.000,00							-	680.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						513.290.000,00						-		555.000.000,00	
		-						513.290.000,00						-		555.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	55.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	85.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	229.370.000,00							-	230.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	-	143.920.000,00							-	75.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						85.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						229.370.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			230.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	60 laporan	229.370.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	230.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						143.920.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			75.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	10 Unit	143.920.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						55.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	69 Orang	55.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						280.000.000,00						-		125.000.000,00	
		-						280.000.000,00						-		125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	75.000.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	155.000.000,00							-	85.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						155.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			85.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	20 Laporan	155.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					-	85.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						75.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			40.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	15 Laporan	75.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						50.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**14.039.100.000,00**								**18.885.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.039.100.000,00**								**18.885.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.039.100.000,00**								**18.885.000.000,00**	
31.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.730.903.200,00**								**13.215.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.730.903.200,00							-	13.095.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.663.500,00						-		275.000.000,00	
		-						50.663.500,00						-		275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	30.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.663.500,00							-	225.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.663.500,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			225.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	20.663.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	225.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.039.099.447,00						-		9.300.000.000,00	
		-						9.039.099.447,00						-		9.300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.039.099.447,00							-	9.300.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.039.099.447,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			9.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	151 Orang/bulan	9.039.099.447,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	9.300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						682.603.647,00						-		990.000.000,00	
		-						682.603.647,00						-		990.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	13.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	445.758.000,00							-	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.925.647,00							-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	194.920.000,00							-	280.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						194.920.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			280.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	194.920.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	280.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.925.647,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	13.925.647,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						445.758.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	445.758.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						504.477.000,00						-		1.820.000.000,00	
		-						504.477.000,00						-		1.820.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	504.477.000,00							-	1.820.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						504.477.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.820.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	504.477.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.820.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.420.736,00						-		75.000.000,00	
		-						49.420.736,00						-		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	22.160.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.260.736,00							-	25.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.160.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	22.160.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.260.736,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	27.260.736,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						404.638.870,00						-		755.000.000,00	
		-						404.638.870,00						-		755.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	292.343.870,00							-	330.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	87.220.000,00							-	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.075.000,00							-	45.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						87.220.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	87.220.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	130.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						292.343.870,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	292.343.870,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	330.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.075.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	27 Unit	25.075.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.300.938.800,00**								**3.790.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.420.938.800,00							-	1.840.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						230.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						230.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	230.000.000,00							-	250.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						230.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	500 Orang	230.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						870.000.000,00						-		1.560.000.000,00	
		-						870.000.000,00						-		1.560.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	280.000.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	280.000.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	10.000.000,00							-	180.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	10.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	280.000.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	280.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						10.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			280.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	350 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	280.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						10.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			180.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	4 Kawasan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						280.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			300.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						280.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			300.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	280.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						280.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	250 Orang	280.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						600.938.800,00						-		1.050.000.000,00	
		-						600.938.800,00						-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	220.938.800,00							-	400.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	300.000.000,00							-	400.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	80.000.000,00							-	250.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						220.938.800,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			400.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	1 Dokumen	220.938.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						80.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	100 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						300.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			400.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	100 Orang	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						600.000.000,00						-		930.000.000,00	
		-						600.000.000,00						-		930.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	90.000.000,00							-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	-	110.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	100.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	300.000.000,00							-	230.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						110.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			200.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	20 Orang	90.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						300.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			230.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	230.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						100.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**1.007.258.000,00**								**1.880.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.007.258.000,00							-	1.880.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.007.258.000,00						-		1.880.000.000,00	
		-						1.007.258.000,00						-		1.880.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	10.000.000,00							-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	968.400.000,00							-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	28.858.000,00							-	500.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						968.400.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	968.400.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						10.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			180.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						28.858.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	100 Unit	28.858.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						**4.612.273.000,00**								**4.832.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.502.273.000,00**								**4.712.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.502.273.000,00**								**4.712.000.000,00**	
34.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.161.991.291,00**								**3.220.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.161.991.291,00							-	3.220.000.000,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.612.272.443,00						-		2.600.000.000,00	
		-						2.612.272.443,00						-		2.600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.612.272.443,00							-	2.600.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.612.272.443,00			-	-	-			2.600.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	2.612.272.443,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.600.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						281.024.300,00						-		336.000.000,00	
		-						281.024.300,00						-		336.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	197.223.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.778.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.996.500,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	63.026.800,00							-	85.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.996.500,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.996.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.026.800,00			-	-	-			85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	63.026.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.778.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.778.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						197.223.000,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	197.223.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.232.576,00						-		114.000.000,00	
		-						132.232.576,00						-		114.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00							-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.412.576,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.820.000,00							-	10.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00			-	-	-			24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.820.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	20 Laporan	12.820.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						95.412.576,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	7 Laporan	95.412.576,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.461.972,00						-		170.000.000,00	
		-						136.461.972,00						-		170.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	46.880.000,00							-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	89.581.972,00							-	110.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						89.581.972,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	89.581.972,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						46.880.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	46.880.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Sosial
35.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**144.212.000,00**								**221.000.000,00**	
			-	-		-	-	144.212.000,00							-	221.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						144.212.000,00						-		221.000.000,00	
		-						144.212.000,00						-		221.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	64.212.000,00							-	90.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	70.000.000,00							-	120.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						64.212.000,00			-	-	-			90.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	20 Keluarga	64.212.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	90.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						70.000.000,00			-	-	-			120.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Dinas Sosial
36.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**405.863.900,00**								**220.000.000,00**	
			-	-		-	-	405.863.900,00							-	220.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						405.863.900,00						-		220.000.000,00	
		-						405.863.900,00						-		220.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	105.723.900,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	71.640.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	123.460.000,00							-	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	105.040.000,00							-	120.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						71.640.000,00			-	-	-			0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	71.640.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						123.460.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	123.460.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						105.040.000,00			-	-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	150 Orang	105.040.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						105.723.900,00			-	-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	105.723.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Sosial
37.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**645.986.474,00**								**951.000.000,00**	
			-	-		-	-	645.986.474,00							-	951.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						645.986.474,00						-		951.000.000,00	
		-						645.986.474,00						-		951.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	198.823.500,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	285.257.000,00							-	600.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	-	151.905.974,00							-	120.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						198.823.500,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	198.823.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						285.257.000,00			-	-	-			600.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1000 Orang	285.257.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						151.905.974,00			-	-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	1000 Usulan	151.905.974,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Dinas Sosial
38.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**94.559.235,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	94.559.235,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						94.559.235,00						-		0,00	
		-						94.559.235,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	94.559.235,00							-	0,00	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						94.559.235,00			-	-	-			0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	94.559.235,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Sosial
39.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**49.660.100,00**								**100.000.000,00**	
			-	-		-	-	49.660.100,00							-	100.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						49.660.100,00						-		100.000.000,00	
		-						49.660.100,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	49.660.100,00							-	100.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						49.660.100,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	80 Makam	49.660.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Sosial
	X							**110.000.000,00**								**120.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**110.000.000,00**								**120.000.000,00**	
40.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**110.000.000,00**								**120.000.000,00**	
			-	-		-	-	110.000.000,00							-	120.000.000,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						110.000.000,00						-		120.000.000,00	
		-						110.000.000,00						-		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	110.000.000,00							-	120.000.000,00	
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						110.000.000,00			-	-	-			120.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	110.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	120.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan						**5.695.056.255,00**								**8.188.058.553,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.695.056.255,00**								**8.188.058.553,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.835.668.255,00**								**6.435.558.553,00**	
41.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.609.999.255,00**								**5.792.758.253,00**	
			-	-		-	-	4.609.999.255,00							-	5.792.758.253,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.119.927.413,00						-		4.557.837.753,00	
		-						4.119.927.413,00						-		4.557.837.753,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.119.927.413,00							-	4.557.837.753,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.119.927.413,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			4.557.837.753,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	4.119.927.413,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.557.837.753,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						358.468.700,00						-		926.200.000,00	
		-						358.468.700,00						-		926.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	269.919.000,00							-	440.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.977.200,00							-	139.700.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.531.100,00							-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	63.041.400,00							-	324.500.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.531.100,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			22.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	5.531.100,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.041.400,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			324.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	63.041.400,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	324.500.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.977.200,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			139.700.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	19.977.200,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	139.700.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						269.919.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			440.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	55 Laporan	269.919.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	440.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72.742.892,00						-		155.820.500,00	
		-						72.742.892,00						-		155.820.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	55.922.892,00							-	112.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.820.000,00							-	36.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00							-	7.320.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			7.320.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.320.500,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.922.892,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			112.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	55.922.892,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	112.200.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.820.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			36.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	14.820.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.300.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.860.250,00						-		152.900.000,00	
		-						58.860.250,00						-		152.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	58.860.250,00							-	152.900.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.860.250,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			152.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	58.860.250,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	152.900.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
42.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**165.000.000,00**								**346.800.300,00**	
			-	-		-	-	165.000.000,00							-	346.800.300,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						165.000.000,00						-		346.800.300,00	
		-						165.000.000,00						-		346.800.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	165.000.000,00							-	346.800.300,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						165.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			346.800.300,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	16 Orang	165.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	346.800.300,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
43.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**0,00**								**120.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	120.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						0,00						-		120.000.000,00	
		-						0,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	0,00							-	120.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						0,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			120.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Dairi	-					-	120.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
44.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**60.669.000,00**								**176.000.000,00**	
			-	-		-	-	50.669.000,00							-	176.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.669.000,00						-		176.000.000,00	
		-						50.669.000,00						-		176.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	40.669.000,00							-	176.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						10.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	1 Perusahaan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						40.669.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			176.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	1 Laporan	40.669.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	176.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		0,00	
		-						10.000.000,00						-		0,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						10.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	1000 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**859.388.000,00**								**1.752.500.000,00**	
45.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**444.743.000,00**								**302.500.000,00**	
			-	-		-	-	444.743.000,00							-	302.500.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						444.743.000,00						-		302.500.000,00	
		-						444.743.000,00						-		302.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	94.743.000,00							-	302.500.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	350.000.000,00							-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						94.743.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			302.500.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	94.743.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	302.500.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
46.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**24.645.000,00**								**320.000.000,00**	
			-	-		-	-	24.645.000,00							-	320.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						24.645.000,00						-		320.000.000,00	
		-						24.645.000,00						-		320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	-	24.645.000,00							-	320.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						24.645.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			320.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	24.645.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	320.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
47.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**240.000.000,00**								**690.000.000,00**	
			-	-		-	-	240.000.000,00							-	470.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						240.000.000,00						-		690.000.000,00	
		-						240.000.000,00						-		690.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	50.000.050,00							-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	150.000.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	39.999.950,00							-	220.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						39.999.950,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			220.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	75 Pelaku Usaha	39.999.950,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						150.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			220.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	60 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						50.000.050,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	10 Kegiatan Usaha	50.000.050,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
48.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**150.000.000,00**								**440.000.000,00**	
			-	-		-	-	150.000.000,00							-	440.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		440.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	40.000.000,00							-	275.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	110.000.000,00							-	165.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						40.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			275.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	6 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	275.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						110.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			165.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	3 Kegiatan Usaha	110.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	165.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**9.577.574.517,00**								**6.778.230.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.577.574.517,00**								**6.731.230.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.670.836.517,00**								**4.735.230.000,00**	
49.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.829.106.517,00**								**4.124.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.819.107.017,00							-	4.054.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.999.450,00						-		45.000.000,00	
		-						29.999.450,00						-		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.999.750,00							-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	10.000.500,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	9.999.200,00							-	15.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.999.750,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	9.999.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.999.200,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	9.999.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						10.000.500,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	3 Dokumen	10.000.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.520.740.316,00						-		3.745.000.000,00	
		-						3.520.740.316,00						-		3.745.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	9.999.500,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	9.999.500,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	29.999.500,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	29.999.600,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.440.742.216,00							-	3.700.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.440.742.216,00			-	-	-			3.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	3.440.742.216,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						9.999.500,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	9.999.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						29.999.500,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	29.999.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						29.999.600,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	29.999.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						9.999.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	9.999.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.250.000,00						-		30.000.000,00	
		-						25.250.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	25.250.000,00							-	30.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.250.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	25.250.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						179.760.000,00						-		210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						179.760.000,00						-		210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	158.760.000,00							-	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00							-	15.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						158.760.000,00			-	-	-			180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	158.760.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00						-		26.000.000,00	
		-						24.000.000,00						-		26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00							-	26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00			-	-	-			26.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Dairi	-					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.356.751,00						-		68.000.000,00	
		-						49.356.751,00						-		68.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00							-	18.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.335.401,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	44.021.350,00							-	40.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						44.021.350,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	44.021.350,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.335.401,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	5.335.401,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00			-	-	-			18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**169.900.000,00**								**192.000.000,00**	
			-	-		-	-	114.900.000,00							-	92.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
		-						35.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	10.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0017	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0018	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						64.900.000,00						-		90.000.000,00	
		-						64.900.000,00						-		90.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	14.900.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						14.900.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	14.900.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	2 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						70.000.000,00						-		67.000.000,00	
		-						70.000.000,00						-		67.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	10.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	28.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	12.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	20.000.000,00							-	12.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						28.000.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	28.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						12.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	6 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						20.000.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	20 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**216.450.000,00**								**98.230.000,00**	
			-	-		-	-	216.450.000,00							-	98.230.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						76.450.000,00						-		76.450.000,00	
		-						76.450.000,00						-		76.450.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	27.150.000,00							-	27.150.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-		-	-	26.550.000,00							-	26.550.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	22.750.000,00							-	22.750.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						22.750.000,00			-	-	-			22.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	22.750.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						27.150.000,00			-	-	-			27.150.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	3 Kegiatan	27.150.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					-	27.150.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						26.550.000,00			-	-	-			26.550.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	26.550.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					-	26.550.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						140.000.000,00						-		21.780.000,00	
		-						140.000.000,00						-		21.780.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	12.500.000,00							-	12.500.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	19.120.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	39.690.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	59.410.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	9.280.000,00							-	9.280.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						19.120.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	19.120.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						12.500.000,00			-	-	-			12.500.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	25 Orang	12.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						39.690.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	7 Orang	39.690.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						59.410.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	25 Orang	59.410.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	25 Orang	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						9.280.000,00			-	-	-			9.280.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	5 Orang	9.280.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	9.280.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**21.750.000,00**								**15.000.000,00**	
			-	-		-	-	21.750.000,00							-	11.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		2.000.000,00	
		-						0,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	15 Lembaga	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						21.750.000,00						-		13.000.000,00	
		-						21.750.000,00						-		13.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	21.750.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	-					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	10 Lembaga	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	1 Lembaga	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						21.750.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	20 Lembaga	21.750.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
53.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**55.000.000,00**								**110.000.000,00**	
			-	-		-	-	55.000.000,00							-	110.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00						-		110.000.000,00	
		-						55.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	55.000.000,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	-	0,00							-	50.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						55.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						0,00			-	-	-			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	- Lembaga	0,00	Kab. Dairi	-					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
54.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**55.000.000,00**								**31.000.000,00**	
			-	-		-	-	40.000.000,00							-	11.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						55.000.000,00						-		31.000.000,00	
		-						55.000.000,00						-		31.000.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	15.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	25.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	15.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	30 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						15.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	15 Orang	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						15.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
55.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**323.630.000,00**								**165.000.000,00**	
			-	-		-	-	323.630.000,00							-	165.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						102.680.000,00						-		115.000.000,00	
		-						102.680.000,00						-		115.000.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	20.004.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	25.396.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	32.280.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						32.280.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	32.280.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.08.07.2.01.0013	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						20.004.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	20.004.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						25.396.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	3 Kegiatan	25.396.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					-	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						190.000.000,00						-		0,00	
		-						190.000.000,00						-		0,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.125.000,00							-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	58.175.000,00							-	0,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	37.050.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	22.950.000,00							-	0,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	56.700.000,00							-	0,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						58.175.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	45 Orang	58.175.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						10.125.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	45 Orang	10.125.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						56.700.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	56.700.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						37.050.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	37.050.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						22.950.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	45 Orang	22.950.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.950.000,00						-		50.000.000,00	
		-						30.950.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	30.950.000,00							-	50.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						30.950.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	25 Orang	30.950.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.906.738.000,00**								**1.996.000.000,00**	
56.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**								**20.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	20.000.000,00	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00						-		20.000.000,00	
		-						0,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	0,00							-	20.000.000,00	
	2.14.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	5 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**1.162.800.000,00**								**1.210.000.000,00**	
			-	-		-	-	412.800.000,00							-	510.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						485.000.000,00						-		510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						485.000.000,00						-		510.000.000,00	
			Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	50.000.000,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	135.000.000,00							-	150.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						100.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	10 Perangkat Daerah	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0038	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	1 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						135.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	18 Kelompok	135.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK					-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0050	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	1 Indikator	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						50.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						677.800.000,00						-		700.000.000,00	
		-						677.800.000,00						-		700.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	26.400.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	101.400.000,00							-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-		-	-	100.000.000,00							-	100.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						100.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						26.400.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	1 Dokumen	26.400.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga						100.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						100.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-		-	15 Unit	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						100.000.000,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						101.400.000,00			-	-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	101.400.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK					-	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0035	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						50.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	1 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**1.864.338.000,00**								**766.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	1.864.338.000,00							-	766.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						570.900.000,00						-		616.000.000,00	
		-						570.900.000,00						-		616.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	225.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-		-	-	6.000.000,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-		-	-	299.900.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	-	40.000.000,00							-	60.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						6.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKB-KB					-	6.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						225.000.000,00			-	-	-			250.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	15 Laporan	225.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						299.900.000,00			-	-	-			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-		-	150 Laporan	299.900.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						40.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	10 Organisasi	40.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						63.375.000,00						-		150.000.000,00	
		-						63.375.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	-	63.375.000,00							-	150.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						63.375.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	169 Orang	63.375.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.230.063.000,00						-		0,00	
		-						1.230.063.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	19.780.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	1.210.283.000,00							-	0,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1.210.283.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	2646 Orang	1.210.283.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKB-KB					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						19.780.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	120 Laporan	19.780.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1.879.600.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.879.600.000,00							-	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						130.000.000,00						-		0,00	
		-						130.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-		-	-	130.000.000,00							-	0,00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						130.000.000,00			-	-	Dairi Sehat			0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-		-	10 Unit	130.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKB-KB					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.749.600.000,00						-		0,00	
		-						1.749.600.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	-	648.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	1.101.600.000,00							-	0,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						648.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	6480 laporan	648.000.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKB-KB					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.101.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	6480 Keluarga	1.101.600.000,00	Kab. Dairi	DAK Non Fisik-BOKB-KB					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X							**0,00**								**47.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**								**47.000.000,00**	
60.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**								**47.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	47.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00						-		10.000.000,00	
		-						0,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00						-		37.000.000,00	
		-						0,00						-		37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00							-	15.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan						**10.681.293.723,00**								**24.337.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.262.238.973,00**								**13.522.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**8.262.238.973,00**								**13.522.000.000,00**	
61.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.934.760.823,00**								**10.602.000.000,00**	
			-	-		-	-	7.934.760.823,00							-	10.527.000.000,00	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.802.566.104,00						-		8.350.000.000,00	
		-						5.802.566.104,00						-		8.350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.802.566.104,00							-	8.350.000.000,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.802.566.104,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			8.350.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	56 Orang/bulan	5.802.566.104,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.350.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						689.046.600,00						-		832.000.000,00	
		-						689.046.600,00						-		832.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	25.200.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	82.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	462.660.000,00							-	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	40.961.000,00							-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.608.000,00							-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.012.000,00							-	47.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.605.600,00							-	50.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						27.608.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			75.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	27.608.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.012.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			47.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	45.012.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	47.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.605.600,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.605.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.961.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	40.961.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	45.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25.200.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						82.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	82.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						462.660.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			550.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	462.660.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	550.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						836.849.504,00						-		850.000.000,00	
		-						836.849.504,00						-		850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	114.440.000,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	722.409.504,00							-	770.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						114.440.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	114.440.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						722.409.504,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			770.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	722.409.504,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	770.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						606.298.615,00						-		570.000.000,00	
		-						606.298.615,00						-		570.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	126.428.615,00							-	275.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	283.870.000,00							-	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	196.000.000,00							-	75.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						283.870.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	283.870.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						126.428.615,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	45 Unit	126.428.615,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	275.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						196.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	196.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
62.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**0,00**								**550.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	550.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		550.000.000,00	
		-						0,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	0,00							-	550.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			550.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	550.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
63.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**175.206.700,00**								**1.280.000.000,00**	
			-	-		-	-	175.206.700,00							-	1.280.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						175.206.700,00						-		1.280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						175.206.700,00						-		1.280.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	34.812.700,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	67.293.000,00							-	430.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-		-	-	73.101.000,00							-	600.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						73.101.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			600.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-		-	1 Laporan	73.101.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						67.293.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			430.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	50 Keluarga	67.293.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	430.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						34.812.700,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	1 laporan	34.812.700,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
64.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**152.271.450,00**								**540.000.000,00**	
			-	-		-	-	152.271.450,00							-	540.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						52.542.150,00						-		160.000.000,00	
		-						52.542.150,00						-		160.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	52.542.150,00							-	160.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						52.542.150,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			160.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	1 Dokumen	52.542.150,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	160.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						99.729.300,00						-		380.000.000,00	
		-						99.729.300,00						-		380.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	26.632.300,00							-	130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	73.097.000,00							-	250.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						73.097.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	73.097.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						26.632.300,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			130.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	1 Laporan	26.632.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	130.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
65.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**0,00**								**550.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	550.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		550.000.000,00	
		-						0,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	-	0,00							-	550.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			550.000.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	550.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.419.054.750,00**								**10.815.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**228.991.000,00**								**2.000.000.000,00**	
66.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**118.991.000,00**								**400.000.000,00**	
			-	-		-	-	118.991.000,00							-	400.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						118.991.000,00						-		400.000.000,00	
		-						118.991.000,00						-		400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	-	59.015.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	59.976.000,00							-	250.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						59.976.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	30 Orang	59.976.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						59.015.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	6 Kelompok	59.015.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
67.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**110.000.000,00**								**1.330.000.000,00**	
			-	-		-	-	110.000.000,00							-	1.330.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00						-		650.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		650.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	-	50.000.000,00							-	650.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			650.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	11 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	650.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						60.000.000,00						-		680.000.000,00	
		-						60.000.000,00						-		680.000.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	-	0,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	60.000.000,00							-	280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			250.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			280.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Unit	60.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	280.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			150.000.000,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
68.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**								**170.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	170.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						0,00						-		170.000.000,00	
		-						0,00						-		170.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	0,00							-	70.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	0,00							-	100.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			100.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	5 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			70.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	5 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	70.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
69.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**0,00**								**100.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	100.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						0,00						-		100.000.000,00	
		-						0,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	0,00							-	100.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			100.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	5 Unit Usaha	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.190.063.750,00**								**8.815.000.000,00**	
70.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**540.063.750,00**								**2.140.000.000,00**	
			-	-		-	-	540.063.750,00							-	1.640.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						342.973.750,00						-		1.790.000.000,00	
		-						342.973.750,00						-		1.790.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	-	60.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	-		-	-	182.973.750,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	0,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	100.000.000,00							-	840.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	0,00							-	250.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			250.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						100.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			840.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	840.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			250.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	1 Ton	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						60.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			200.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-		-	3500 Batang	60.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi						182.973.750,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	-		-	8,8 Ton	182.973.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						197.090.000,00						-		350.000.000,00	
		-						197.090.000,00						-		350.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	197.090.000,00							-	350.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						197.090.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			350.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	20 Ekor	197.090.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	350.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
71.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.450.000.000,00**								**4.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	900.000.000,00							-	4.500.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						550.000.000,00						-		1.400.000.000,00	
		-						550.000.000,00						-		1.400.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	550.000.000,00							-	600.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	-	0,00							-	250.000.000,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	0,00							-	550.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			250.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	1 Ha	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						550.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			600.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			550.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	550.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						900.000.000,00						-		3.100.000.000,00	
		-						900.000.000,00						-		3.100.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	550.000.000,00							-	1.700.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	-	350.000.000,00							-	1.400.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						550.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			1.700.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	12 Unit	550.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.700.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						350.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			1.400.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	12 Unit	350.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.400.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
72.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**100.000.000,00**								**675.000.000,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	675.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		500.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00							-	500.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			500.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		175.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		175.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	-	50.000.000,00							-	175.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			175.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	175.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
73.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**0,00**								**600.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	600.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						0,00						-		600.000.000,00	
		-						0,00						-		600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	0,00							-	600.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						0,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			600.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	500 Ha	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
74.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**100.000.000,00**								**900.000.000,00**	
			-	-		-	-	100.000.000,00							-	900.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						100.000.000,00						-		900.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		900.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	100.000.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00							-	650.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						100.000.000,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			250.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	9 Unit	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						0,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			650.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	60 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	650.000.000,00	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Dinas Lingkungan Hidup						**10.334.911.278,00**								**9.196.503.106,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.334.911.278,00**								**9.196.503.106,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**10.334.911.278,00**								**9.196.503.106,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
75.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.020.823.678,00**								**7.416.503.106,00**	
			-	-		-	-	8.020.823.678,00							-	7.416.503.106,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.179.265.410,00						-		6.179.265.410,00	
		-						6.179.265.410,00						-		6.179.265.410,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.179.265.410,00							-	6.179.265.410,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.179.265.410,00			-	-	-			6.179.265.410,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	99 Orang/bulan	6.179.265.410,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.179.265.410,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						324.766.072,00						-		80.000.000,00	
		-						324.766.072,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	258.654.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	66.112.072,00							-	30.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.112.072,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	66.112.072,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						258.654.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	258.654.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.293.000,00						-		0,00	
		-						7.293.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.293.000,00							-	0,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.293.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	7.293.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						608.247.696,00						-		609.247.696,00	
		-						608.247.696,00						-		609.247.696,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	138.000.000,00							-	139.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	470.247.696,00							-	470.247.696,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						138.000.000,00			-	-	-			139.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	138.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	139.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						470.247.696,00			-	-	-			470.247.696,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	470.247.696,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	470.247.696,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						901.251.500,00						-		547.990.000,00	
		-						901.251.500,00						-		547.990.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	792.320.000,00							-	547.990.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	11.320.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	97.611.500,00							-	0,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						792.320.000,00			-	-	-			547.990.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	40 Unit	792.320.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	547.990.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.320.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	11.320.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						97.611.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	97.611.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
76.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**								**700.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	700.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						0,00						-		700.000.000,00	
		-						0,00						-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	0,00							-	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	0,00							-	300.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						0,00			-	-	Dairi Hijau			300.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						0,00			-	-	Dairi Hijau			400.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
77.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**120.174.100,00**								**150.000.000,00**	
			-	-		-	-	120.174.100,00							-	150.000.000,00	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						120.174.100,00						-		150.000.000,00	
		-						120.174.100,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-		-	-	120.174.100,00							-	150.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						120.174.100,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-		-	2 Laporan	120.174.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
78.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**380.862.000,00**								**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			-	-		-	-	380.862.000,00							-	150.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						380.862.000,00						-		150.000.000,00	
		-						380.862.000,00						-		150.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	380.862.000,00							-	150.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						380.862.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1,99 Ha	380.862.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
79.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**40.000.000,00**								**30.000.000,00**	
			-	-		-	-	40.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	40.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						40.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	25 Badan Usaha	40.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
80.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**282.063.000,00**								**150.000.000,00**	
			-	-		-	-	282.063.000,00							-	150.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						282.063.000,00						-		150.000.000,00	
		-						282.063.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	-	282.063.000,00							-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						282.063.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	5 Lembaga	282.063.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
81.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**1.490.988.500,00**								**600.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.490.988.500,00							-	600.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						1.490.988.500,00						-		600.000.000,00	
		-						1.490.988.500,00						-		600.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	1.490.988.500,00							-	600.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						1.490.988.500,00			-	-	-			600.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	16431,00 Ton	1.490.988.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**5.608.051.548,00**								**5.516.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.608.051.548,00**								**5.516.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.608.051.548,00**								**5.516.000.000,00**	
82.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.284.771.548,00**								**4.995.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.284.771.548,00							-	4.855.000.000,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.608.052.634,00						-		4.300.000.000,00	
		-						4.608.052.634,00						-		4.300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.608.052.634,00							-	4.300.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.608.052.634,00			-	-	-			4.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	47 Orang/bulan	4.608.052.634,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						265.590.234,00						-		267.000.000,00	
		-						265.590.234,00						-		267.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	65.649.000,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.125.000,00							-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	159.809.950,00							-	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	30.006.284,00							-	35.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						159.809.950,00			-	-	-			140.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	159.809.950,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	140.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.006.284,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	30.006.284,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.125.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.125.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						65.649.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	65.649.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						96.000.000,00						-		120.000.000,00	
		-						96.000.000,00						-		120.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	96.000.000,00							-	120.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						96.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	13 Unit	96.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	120.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.203.680,00						-		250.000.000,00	
		-						266.203.680,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	129.900.000,00							-	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	136.303.680,00							-	110.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						129.900.000,00			-	-	-			140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	129.900.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	140.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						136.303.680,00			-	-	Dairi Clean Governance			110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	136.303.680,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.925.000,00						-		58.000.000,00	
		-						48.925.000,00						-		58.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	48.925.000,00							-	8.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48.925.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	19 Unit	48.925.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Dairi Clean Governance			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
83.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**298.280.000,00**								**472.000.000,00**	
			-	-		-	-	288.280.000,00							-	472.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00						-		12.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	-	5.000.000,00							-	12.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						283.280.000,00						-		420.000.000,00	
		-						283.280.000,00						-		420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	-	283.280.000,00							-	420.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						283.280.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			420.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	283.280.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	420.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						10.000.000,00						-		40.000.000,00	
		-						10.000.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	5.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			30.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
84.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**13.000.000,00**								**26.000.000,00**	
			-	-		-	-	8.000.000,00							-	16.000.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						13.000.000,00						-		26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						13.000.000,00						-		26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	-	3.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						3.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
85.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**7.000.000,00**								**17.000.000,00**	
			-	-		-	-	7.000.000,00							-	17.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						5.000.000,00						-		12.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	5.000.000,00							-	12.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						5.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			12.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						2.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	2.000.000,00							-	5.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						2.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
86.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**5.000.000,00**								**6.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						5.000.000,00						-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		6.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**7.244.414.943,00**								**6.177.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.206.654.943,00**								**6.177.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**7.206.654.943,00**								**6.177.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
87.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.133.395.963,00**								**3.177.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.133.395.963,00							-	3.177.000.000,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.744.414.613,00						-		2.900.000.000,00	
		-						2.744.414.613,00						-		2.900.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.744.414.613,00							-	2.900.000.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.744.414.613,00			-	-	-			2.900.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	24 Orang/bulan	2.744.414.613,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.900.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						226.000.000,00						-		215.000.000,00	
		-						226.000.000,00						-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	175.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	40.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	6.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.000.000,00			-	-	-			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	175.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.073.750,00						-		0,00	
		-						120.073.750,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	59.323.750,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	60.750.000,00							-	0,00	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						59.323.750,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	55 Unit	59.323.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.750.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	60.750.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.989.600,00						-		20.000.000,00	
		-						19.989.600,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	19.989.600,00							-	20.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.989.600,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	19.989.600,00	Kab. Dairi	Retribusi Jasa Umum					-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.918.000,00						-		42.000.000,00	
		-						22.918.000,00						-		42.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	12.888.000,00							-	42.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.030.000,00							-	0,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12.888.000,00			-	-	-			42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	12.888.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	42.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.030.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	10.030.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
88.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**20.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						20.000.000,00						-		0,00	
		-						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						20.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
89.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**3.713.258.980,00**								**2.700.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.563.258.980,00							-	2.700.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.713.258.980,00						-		2.700.000.000,00	
		-						3.713.258.980,00						-		2.700.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	60.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	1.923.258.980,00							-	2.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	1.500.000.000,00							-	0,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	13 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						30.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						1.923.258.980,00			-	-	-			2.700.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	12 Dokumen	1.923.258.980,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						60.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	99 Orang	60.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						1.500.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	33 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
90.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**340.000.000,00**								**300.000.000,00**	
			-	-		-	-	340.000.000,00							-	300.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						340.000.000,00						-		300.000.000,00	
		-						340.000.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	200.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	120.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00							-	100.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						20.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						120.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						0,00			-	-	-			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	3 Lembaga	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						200.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	X							**37.760.000,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**37.760.000,00**								**0,00**	
91.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**37.760.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	37.760.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.760.000,00						-		0,00	
		-						37.760.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	37.760.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						37.760.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	37.760.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Perhubungan						**6.355.474.526,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.332.974.526,00**								**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**6.332.974.526,00**								**0,00**	
92.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.562.865.526,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	5.562.865.526,00							-	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.524.000,00						-		0,00	
		-						12.524.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.524.000,00							-	0,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.524.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	12.524.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.988.995.040,00						-		0,00	
		-						4.988.995.040,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.988.995.040,00							-	0,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.988.995.040,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	69 Orang/bulan	4.988.995.040,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	70 Paket	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						298.597.500,00						-		0,00	
		-						298.597.500,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	219.290.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.002.500,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.984.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	59.321.000,00							-	0,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.984.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.984.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						59.321.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	59.321.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.002.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	11.002.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						219.290.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	219.290.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.260.736,00						-		0,00	
		-						67.260.736,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.260.736,00							-	0,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.260.736,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	27.260.736,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195.488.250,00						-		0,00	
		-						195.488.250,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	51.300.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	125.860.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	12.488.250,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.840.000,00							-	0,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.488.250,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	12.488.250,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.860.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	125.860.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.840.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.840.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.300.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	51.300.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
93.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**770.109.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	770.109.000,00							-	0,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						171.370.000,00						-		0,00	
		-						171.370.000,00						-		0,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	171.370.000,00							-	0,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	100 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						171.370.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	2 Unit	171.370.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						99.976.000,00						-		0,00	
		-						99.976.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	99.976.000,00							-	0,00	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						99.976.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	2020 Dokumen	99.976.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						198.763.000,00						-		0,00	
		-						198.763.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	198.763.000,00							-	0,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						198.763.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	3 Laporan	198.763.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						300.000.000,00						-		0,00	
		-						300.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	-	300.000.000,00							-	0,00	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						300.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
	X							**22.500.000,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**22.500.000,00**								**0,00**	
94.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.500.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	22.500.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.500.000,00						-		0,00	
		-						22.500.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	22.500.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						22.500.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	3 Orang	22.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**9.379.988.955,00**								**300.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.206.685.483,00**								**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.126.685.483,00**								**300.000.000,00**	
95.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.523.808.008,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.523.808.008,00							-	0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.968.500,00						-		0,00	
		-						26.968.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	26.968.500,00							-	0,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.968.500,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	26.968.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						475.549.300,00						-		0,00	
		-						475.549.300,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	27.100.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	324.252.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.023.800,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.173.500,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.173.500,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.173.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.023.800,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.023.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						27.100.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	27.100.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						324.252.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	324.252.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						186.476.000,00						-		0,00	
		-						186.476.000,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	16.276.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	170.200.000,00							-	0,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						16.276.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	16.276.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						170.200.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	170.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.334.708,00						-		0,00	
		-						210.334.708,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	96.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	103.742.208,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.592.500,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	96.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.592.500,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	10.592.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						103.742.208,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	103.742.208,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						624.479.500,00						-		0,00	
		-						624.479.500,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	3.679.100,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	88.850.400,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	531.950.000,00							-	0,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						88.850.400,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	88.850.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.679.100,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	3.679.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						531.950.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	531.950.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
96.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.224.990.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.224.990.000,00							-	0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.224.990.000,00						-		0,00	
		-						1.224.990.000,00						-		0,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	825.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	330.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	9.990.000,00							-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						825.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	4 Laporan	825.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						50.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						10.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	60000 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						9.990.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						0,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Dairi	-					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						330.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	30 Konten	330.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
97.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.377.887.475,00**								**300.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.377.887.475,00							-	300.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.377.887.475,00						-		300.000.000,00	
		-						3.377.887.475,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	202.912.475,00							-	0,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	9.999.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.734.996.000,00							-	0,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	429.980.000,00							-	300.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						202.912.475,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	202.912.475,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						2.734.996.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	123 Titik	2.734.996.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						9.999.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	2 Layanan	9.999.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						429.980.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	123 Titik	429.980.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**35.000.000,00**								**0,00**	
98.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**35.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	35.000.000,00							-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00						-		0,00	
		-						35.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	-	35.000.000,00							-	0,00	
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						35.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**45.000.000,00**								**0,00**	
99.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**45.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	45.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00						-		0,00	
		-						45.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						15.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						30.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X							**3.173.303.472,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.173.303.472,00**								**0,00**	
100.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.173.303.472,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	3.173.303.472,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.173.303.472,00						-		0,00	
		-						3.173.303.472,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.173.303.472,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.173.303.472,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	3.173.303.472,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**5.801.900.000,00**								**7.174.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.960.439.400,00**								**5.437.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.960.439.400,00**								**5.437.000.000,00**	
101.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.450.388.400,00**								**4.755.000.000,00**	
			-	-		-	-	4.450.388.400,00							-	4.715.000.000,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.640.378.714,00						-		3.800.000.000,00	
		-						3.640.378.714,00						-		3.800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.640.378.714,00							-	3.800.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.640.378.714,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	490 Orang/bulan	3.640.378.714,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.800.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						197.000.000,00						-		250.000.000,00	
		-						197.000.000,00						-		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	158.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	4.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						158.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	158.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						162.860.736,00						-		200.000.000,00	
		-						162.860.736,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	123.600.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.260.736,00							-	50.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.600.000,00			-	-	-			150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	123.600.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						39.260.736,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	39.260.736,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						450.148.950,00						-		505.000.000,00	
		-						450.148.950,00						-		505.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	173.000.000,00							-	175.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	20.000.000,00							-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	257.148.950,00							-	300.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						173.000.000,00			-	-	-			175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	11 Unit	173.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	175.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						257.148.950,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	257.148.950,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
102.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**60.000.000,00**								**70.000.000,00**	
			-	-		-	-	60.000.000,00							-	70.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						60.000.000,00						-		70.000.000,00	
		-						60.000.000,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	-	35.000.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						35.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			40.000.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	169 Unit Usaha	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	40 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
103.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**30.000.000,00**								**30.000.000,00**	
			-	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						30.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			30.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	50 Orang	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
104.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**229.989.000,00**								**320.000.000,00**	
			-	-		-	-	229.989.000,00							-	260.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						229.989.000,00						-		320.000.000,00	
		-						229.989.000,00						-		320.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	-	30.000.000,00							-	60.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	149.989.000,00							-	200.000.000,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	-	50.000.000,00							-	60.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			60.000.000,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	30 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						30.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			60.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	50 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						149.989.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			200.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	25 Unit Usaha	149.989.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
105.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**190.062.000,00**								**262.000.000,00**	
			-	-		-	-	190.062.000,00							-	262.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						190.062.000,00						-		262.000.000,00	
		-						190.062.000,00						-		262.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	20.002.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	50.000.000,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	110.060.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	10.000.000,00							-	12.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			60.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	10 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						110.060.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	50 Orang	110.060.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						10.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	240 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						20.002.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	20.002.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**841.460.600,00**								**1.737.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**360.858.600,00**								**975.000.000,00**	
106.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**9.057.000,00**								**30.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	9.057.000,00							-	30.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						0,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			0,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						9.057.000,00						-		30.000.000,00	
		-						9.057.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	-	9.057.000,00							-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						9.057.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	12 Laporan	9.057.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
107.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**100.805.000,00**								**500.000.000,00**	
			-	-		-	-	100.805.000,00							-	500.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						100.805.000,00						-		500.000.000,00	
		-						100.805.000,00						-		500.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	100.805.000,00							-	500.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						100.805.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	1 Unit	100.805.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
108.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**64.996.600,00**								**80.000.000,00**	
			-	-		-	-	64.996.600,00							-	40.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						64.996.600,00						-		80.000.000,00	
		-						64.996.600,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	29.996.600,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	-	35.000.000,00							-	40.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						35.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						29.996.600,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	29.996.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
109.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**136.000.000,00**								**300.000.000,00**	
			-	-		-	-	136.000.000,00							-	300.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						136.000.000,00						-		300.000.000,00	
		-						136.000.000,00						-		300.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	-	86.000.000,00							-	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	-	50.000.000,00							-	100.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						86.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	30 Pelaku Usaha	86.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						50.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
110.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**50.000.000,00**								**65.000.000,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	65.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						50.000.000,00						-		65.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		65.000.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	35.000.000,00							-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	-	15.000.000,00							-	25.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						35.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			40.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	500 Unit	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						15.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			25.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	20 Orang	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
111.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**0,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-		-	15 UMKM	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**480.602.000,00**								**762.000.000,00**	
112.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**480.602.000,00**								**762.000.000,00**	
			-	-		-	-	480.602.000,00							-	762.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						480.602.000,00						-		762.000.000,00	
		-						480.602.000,00						-		762.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	121.256.000,00							-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	149.895.000,00							-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	199.451.000,00							-	200.000.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	-	10.000.000,00							-	12.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						199.451.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	199.451.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						121.256.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			300.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	1 Dokumen	121.256.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						149.895.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			250.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	1 Dokumen	149.895.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	Dairi Ekonomi Bangkit			12.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						**9.099.140.000,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.399.140.000,00**								**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.749.140.000,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
113.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.819.140.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	6.799.140.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		0,00	
		-						20.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	5 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.763.217.846,00						-		0,00	
		-						5.763.217.846,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.763.217.846,00							-	0,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.763.217.846,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	80 Orang/bulan	5.763.217.846,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						370.000.000,00						-		0,00	
		-						370.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						51.175.000,00						-		0,00	
		-						51.175.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	51.175.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						51.175.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	51.175.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						395.000.000,00						-		0,00	
		-						395.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	195.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						195.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	195.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						219.747.154,00						-		0,00	
		-						219.747.154,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	208.861.954,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.205.200,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.680.000,00							-	0,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.205.200,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	5.205.200,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.680.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	5.680.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						208.861.954,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	208.861.954,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Batang Beruh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
114.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**225.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	225.000.000,00							-	0,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00						-		0,00	
		-						225.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	225.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						225.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	2 Organisasi	225.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
115.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**705.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	505.000.000,00							-	0,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00						-		0,00	
		-						250.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00						-		0,00	
		-						200.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						150.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						205.000.000,00						-		0,00	
		-						205.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	180.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						180.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kerja Sama	180.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.04.0008	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota						25.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05.0011	Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	0 Lembaga	0,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**650.000.000,00**								**0,00**	
116.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**500.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	500.000.000,00							-	0,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00						-		0,00	
		-						400.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	400.000.000,00							-	0,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						400.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	1 Objek	400.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	1 Objek	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
117.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**150.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	10 Objek	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	10 Objek	100.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**700.000.000,00**								**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**700.000.000,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
118.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**400.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						400.000.000,00						-		0,00	
		-						400.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	Dairi Wisata Maju			0,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	2 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
119.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**50.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	0 Kegiatan	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	10 Promosi	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
120.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**50.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-		-	2 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
121.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**200.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00						-		0,00	
		-						100.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**3.403.696.448,00**								**3.488.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.403.696.448,00**								**3.488.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.339.352.148,00**								**3.388.000.000,00**	
122.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.791.472.548,00**								**2.738.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.791.472.548,00							-	2.738.000.000,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.403.697.998,00						-		2.300.000.000,00	
		-						2.403.697.998,00						-		2.300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.403.697.998,00							-	2.300.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.403.697.998,00			-	-	-			2.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	2.403.697.998,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.071.250,00						-		193.000.000,00	
		-						172.071.250,00						-		193.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	79.821.000,00							-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	25.134.000,00							-	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	67.116.250,00							-	80.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.116.250,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	67.116.250,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.134.000,00			-	-	-			28.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	25.134.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						79.821.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	500 Laporan	79.821.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.040.000,00						-		15.000.000,00	
		-						10.040.000,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	10.040.000,00							-	15.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.040.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	10.040.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.660.000,00						-		35.000.000,00	
		-						32.660.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	32.660.000,00							-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.660.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	36 Laporan	32.660.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.003.300,00						-		195.000.000,00	
		-						173.003.300,00						-		195.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	61.998.300,00							-	65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	61.066.000,00							-	70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	49.939.000,00							-	60.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						61.998.300,00			-	-	-			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	61.998.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	65.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						61.066.000,00			-	-	-			70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	61.066.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						49.939.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	49.939.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
123.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**520.729.600,00**								**610.000.000,00**	
			-	-		-	-	520.729.600,00							-	560.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						197.578.850,00						OPD dan Masyarakat		265.000.000,00	
		-						197.578.850,00						OPD dan Masyarakat		265.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	55.288.000,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	-	14.999.850,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	-	0,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	-	17.290.800,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	8.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	10.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	92.000.200,00							-	120.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						8.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	30 Perpustakaan	8.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						92.000.200,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	15 Perpustakaan	92.000.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	120.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	30 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	3000 Eksemplar	0,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						14.999.850,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	1 Dokumen	14.999.850,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						55.288.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	265 Eksemplar	55.288.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						17.290.800,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	1 Perpustakaan	17.290.800,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						323.150.750,00						Perpustakaan		345.000.000,00	
		-						323.150.750,00						Perpustakaan		345.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	283.150.000,00							-	310.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	40.000.750,00							-	35.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						283.150.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			310.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	100 Perpustakaan	283.150.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	310.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						40.000.750,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			35.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	15 Lokus	40.000.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
124.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**27.150.000,00**								**40.000.000,00**	
			-	-		-	-	27.150.000,00							-	20.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						27.150.000,00						Masyarakat		40.000.000,00	
		-						27.150.000,00						Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	10.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	17.150.000,00							-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			20.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	30 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						17.150.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	2 Eksemplar	17.150.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**64.344.300,00**								**100.000.000,00**	
125.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**53.256.700,00**								**80.000.000,00**	
			-	-		-	-	53.256.700,00							-	60.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						9.985.000,00						OPD		15.000.000,00	
		-						9.985.000,00						OPD		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	9.985.000,00							-	15.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						9.985.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	164 Laporan	9.985.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						13.078.200,00						-		20.000.000,00	
		-						13.078.200,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	-	13.078.200,00							-	20.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						13.078.200,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	350 Arsip	13.078.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						30.193.500,00						-		45.000.000,00	
		-						30.193.500,00						-		45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.219.500,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	9.974.000,00							-	20.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						9.974.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			20.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	3 Pengguna	9.974.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						20.219.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	41 Laporan	20.219.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
126.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**11.087.600,00**								**20.000.000,00**	
			-	-		-	-	11.087.600,00							-	20.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						11.087.600,00						-		20.000.000,00	
		-						11.087.600,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	-	11.087.600,00							-	20.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						11.087.600,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	3000 Berkas	11.087.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Sekretariat Daerah						**24.744.344.729,00**								**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.744.344.729,00**								**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.744.344.729,00**								**0,00**	
127.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.751.045.679,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	22.751.045.679,00							-	0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						126.331.600,00						-		0,00	
		-						126.331.600,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	15.300.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.370.700,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	22.826.900,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	42.834.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.370.700,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	25.370.700,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.300.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	15.300.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						22.826.900,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	22.826.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.834.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	42.834.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.089.712.723,00						-		0,00	
		-						14.089.712.723,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	122.611.500,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	34.769.400,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	13.932.331.823,00							-	0,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.932.331.823,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	140 Orang/bulan	13.932.331.823,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						122.611.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	122.611.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						34.769.400,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	34.769.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						42.374.500,00						-		0,00	
		-						42.374.500,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	42.374.500,00							-	0,00	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						42.374.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	42.374.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						119.283.500,00						-		0,00	
		-						119.283.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	11.283.500,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	57.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	51.000.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						11.283.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	40 Dokumen	11.283.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						51.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	20 Orang	51.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						57.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	27 Orang	57.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.556.989.655,00						-		0,00	
		-						2.556.989.655,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	52.440.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	901.085.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.386.783.500,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	64.653.300,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.118.400,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	93.909.455,00							-	0,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						58.118.400,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	58.118.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						93.909.455,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	93.909.455,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						64.653.300,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	64.653.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						52.440.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	49 Dokumen	52.440.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						901.085.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	50 Laporan	901.085.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.386.783.500,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2000 Laporan	1.386.783.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178.128.000,00						-		0,00	
		-						178.128.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	178.128.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						178.128.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	178.128.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.508.713.456,00						-		0,00	
		-						1.508.713.456,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	705.350.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	773.263.456,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	30.100.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.100.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	30.100.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						705.350.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	705.350.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						773.263.456,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	773.263.456,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.409.722.445,00						-		0,00	
		-						1.409.722.445,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	234.300.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	832.055.917,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	309.221.528,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	34.145.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						309.221.528,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	309.221.528,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						832.055.917,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	37 Unit	832.055.917,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						234.300.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	234.300.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						34.145.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	70 Unit	34.145.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						833.940.000,00						-		0,00	
		-						833.940.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	450.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	206.010.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	127.930.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						206.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	206.010.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						127.930.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	2 Paket	127.930.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						450.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang/Bulan	450.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.107.145.800,00						-		0,00	
		-						1.107.145.800,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	87.145.800,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	420.000.000,00							-	0,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						600.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	600.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						420.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	420.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						87.145.800,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	87.145.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						437.065.500,00						-		0,00	
		-						437.065.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	222.411.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	106.750.400,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	107.904.100,00							-	0,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						222.411.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	4 Dokumen	222.411.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						107.904.100,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Laporan	107.904.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						106.750.400,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	2 Dokumen	106.750.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	3 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						341.638.500,00						-		0,00	
		-						341.638.500,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	134.372.400,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	103.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	103.666.100,00							-	0,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						134.372.400,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	12 Laporan	134.372.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						103.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	12 Laporan	103.600.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						103.666.100,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	12 Laporan	103.666.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
128.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.185.524.600,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.185.524.600,00							-	0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						375.000.000,00						-		0,00	
		-						375.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	99.999.800,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	175.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	100.000.200,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						175.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	10 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						100.000.200,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	2 Dokumen	100.000.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						99.999.800,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	4 Dokumen	99.999.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						545.875.600,00						-		0,00	
		-						545.875.600,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	311.668.100,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	158.738.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	75.469.500,00							-	0,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						311.668.100,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	5 Dokumen	311.668.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						75.469.500,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	2 Dokumen	75.469.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						158.738.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	5 Dokumen	158.738.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						264.649.000,00						-		0,00	
		-						264.649.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	114.649.000,00							-	0,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						100.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						114.649.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	4 Kasus	114.649.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	300 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
129.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**807.774.450,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	757.774.450,00							-	0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						301.932.700,00						-		0,00	
		-						301.932.700,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	102.010.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	100.051.700,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	99.871.000,00							-	0,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						102.010.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	43 Dokumen	102.010.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						99.871.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	35 Laporan	99.871.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						100.051.700,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	34 Dokumen	100.051.700,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						181.670.000,00						-		0,00	
		-						181.670.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	81.670.000,00							-	0,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						81.670.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	13 Laporan	81.670.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						50.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						324.171.750,00						-		0,00	
		-						324.171.750,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	57.826.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	112.035.750,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	154.310.000,00							-	0,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						112.035.750,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	25 Dokumen	112.035.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						57.826.000,00			-	-	-			0,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	0 Dokumen	57.826.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						154.310.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	5 Orang	154.310.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD						**25.865.082.650,00**								**28.261.822.068,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.865.082.650,00**								**28.261.822.068,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**25.865.082.650,00**								**28.261.822.068,00**	
130.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.655.973.650,00**								**23.652.860.374,00**	
			-	-		-	-	21.655.973.650,00							-	23.592.860.374,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.312.343.501,00						-		3.500.000.000,00	
		-						3.312.343.501,00						-		3.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.312.343.501,00							-	3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.312.343.501,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	372 Orang/bulan	3.312.343.501,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						387.275.000,00						-		400.000.000,00	
		-						387.275.000,00						-		400.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	387.275.000,00							-	400.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						387.275.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			400.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	387.275.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	400.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.308.874.900,00						-		1.555.647.000,00	
		-						1.308.874.900,00						-		1.555.647.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	13.320.000,00							-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.156.343.000,00							-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	60.030.700,00							-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.647.000,00							-	21.647.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.534.200,00							-	60.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.647.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			21.647.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	20.647.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.647.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58.534.200,00			-	-	Dairi Clean Governance			60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	58.534.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.030.700,00			-	-	Dairi Clean Governance			60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	60.030.700,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13.320.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	13.320.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.156.343.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	1.156.343.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.400.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						522.921.249,00						-		575.213.374,00	
		-						522.921.249,00						-		575.213.374,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	118.660.000,00							-	130.526.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	404.261.249,00							-	444.687.374,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						118.660.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			130.526.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	118.660.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	130.526.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						404.261.249,00			-	-	Dairi Clean Governance			444.687.374,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	14 Laporan	404.261.249,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	444.687.374,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.820.000,00						-		2.000.000,00	
		-						1.820.000,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	420.000,00							-	500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.400.000,00							-	1.500.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.400.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	1.400.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	420.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						15.762.739.000,00						-		17.230.000.000,00	
		-						15.762.739.000,00						-		17.230.000.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	15.552.739.000,00							-	17.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	210.000.000,00							-	230.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						15.552.739.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			17.000.000.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	420 Orang/Bulan	15.552.739.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	17.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						210.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			230.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	35 Orang	210.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	230.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						360.000.000,00						-		390.000.000,00	
		-						360.000.000,00						-		390.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	-	360.000.000,00							-	390.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						360.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			390.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	12 Paket	360.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	390.000.000,00	Sekretariat DPRD
131.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**4.209.109.000,00**								**4.608.961.694,00**	
			-	-		-	-	4.209.109.000,00							-	4.608.961.694,00	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.185.109.000,00						-		4.583.961.694,00	
		-						4.185.109.000,00						-		4.583.961.694,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	1.015.760.000,00							-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-		-	-	3.169.349.000,00							-	3.483.961.694,00	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD						3.169.349.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			3.483.961.694,00	
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-		-	35 Dokumen	3.169.349.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.483.961.694,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.015.760.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	5 Dokumen	1.015.760.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						24.000.000,00						-		25.000.000,00	
		-						24.000.000,00						-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	24.000.000,00							-	25.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						24.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			25.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	5 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah						**6.642.527.814,00**								**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.891.565.400,00**								**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**1.548.640.700,00**								**0,00**	
132.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.035.396.500,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.035.396.500,00							-	0,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						772.198.900,00						-		0,00	
		-						772.198.900,00						-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	110.318.900,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	661.880.000,00							-	0,00	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						110.318.900,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	110.318.900,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						661.880.000,00			-	-	-			0,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	2 Dokumen	661.880.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						263.197.600,00						-		0,00	
		-						263.197.600,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	263.197.600,00							-	0,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						263.197.600,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	263.197.600,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
133.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**513.244.200,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	513.244.200,00							-	0,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						279.384.300,00						-		0,00	
		-						279.384.300,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	183.653.500,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	95.730.800,00							-	0,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						95.730.800,00			-	-	-			0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	95.730.800,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						183.653.500,00			-	-	-			0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	1 Laporan	183.653.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						153.549.900,00						-		0,00	
		-						153.549.900,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	74.433.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	-	79.116.900,00							-	0,00	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						74.433.000,00			-	-	-			0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	74.433.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						79.116.900,00			-	-	-			0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	1 Laporan	79.116.900,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						80.310.000,00						-		0,00	
		-						80.310.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	80.310.000,00							-	0,00	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						80.310.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	80.310.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**342.924.700,00**								**0,00**	
134.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**235.577.500,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	235.577.500,00							-	0,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						96.882.500,00						-		0,00	
		-						96.882.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	-	96.882.500,00							-	0,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						96.882.500,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-		-	1 Dokumen	96.882.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						138.695.000,00						-		0,00	
		-						138.695.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-		-	-	64.640.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	-	74.055.000,00							-	0,00	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						74.055.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	1 Dokumen	74.055.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika						64.640.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-		-	1 Dokumen	64.640.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
135.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**107.347.200,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	107.347.200,00							-	0,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						57.422.200,00						-		0,00	
		-						57.422.200,00						-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	57.422.200,00							-	0,00	
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						57.422.200,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	1 Laporan	57.422.200,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						49.925.000,00						-		0,00	
		-						49.925.000,00						-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	-	49.925.000,00							-	0,00	
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						49.925.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	1 Laporan	49.925.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X							**4.750.962.414,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.750.962.414,00**								**0,00**	
136.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.750.962.414,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	4.750.962.414,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.154.000,00						-		0,00	
		-						35.154.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.137.500,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	20.016.500,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.137.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	15.137.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.016.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	20.016.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.696.549.934,00						-		0,00	
		-						3.696.549.934,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.696.549.934,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.696.549.934,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	770 Orang/bulan	3.696.549.934,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.000.000,00						-		0,00	
		-						45.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	45.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						45.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.980.000,00						-		0,00	
		-						470.980.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.400.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	388.260.600,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	40.352.400,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.016.800,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.950.200,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.016.800,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.016.800,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.950.200,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	30.950.200,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.352.400,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	40.352.400,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.400.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						388.260.600,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	388.260.600,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						266.263.500,00						-		0,00	
		-						266.263.500,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	266.263.500,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						266.263.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	8 Unit	266.263.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.160.000,00						-		0,00	
		-						59.160.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	31.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.160.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	31.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						28.160.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.160.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.854.980,00						-		0,00	
		-						177.854.980,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	60.944.000,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	277.420,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	82.733.560,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.300.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	26.600.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						82.733.560,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	82.733.560,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)						-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						277.420,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	277.420,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)						-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.300.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	7.300.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						60.944.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	60.944.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						26.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	26.600.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
		Badan Keuangan dan Aset Daerah						**199.999.934.800,00**								**217.819.760.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**199.999.934.800,00**								**217.819.760.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**199.999.934.800,00**								**217.819.760.000,00**	
137.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.573.243.000,00**								**7.205.960.000,00**	
			-	-		-	-	6.293.243.000,00							-	6.876.730.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.597.000,00						-		20.460.000,00	
		-						18.597.000,00						-		20.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.298.000,00							-	10.230.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	9.299.000,00							-	10.230.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.298.000,00			-	-	-			10.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	9.298.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.230.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.299.000,00			-	-	-			10.230.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	13 Laporan	9.299.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.230.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.045.000.000,00						-		5.524.500.000,00	
		-						5.045.000.000,00						-		5.524.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.025.000.000,00							-	5.502.500.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.025.000.000,00			-	-	-			5.502.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	38 Orang/bulan	5.025.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.502.500.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
		-						150.000.000,00						-		165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	150.000.000,00							-	165.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						150.000.000,00			-	-	-			165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	82 Orang	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	165.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						569.995.500,00						-		627.000.000,00	
		-						569.995.500,00						-		627.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00							-	330.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	130.000.000,00							-	143.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.995.500,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	33.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.995.500,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.995.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						130.000.000,00			-	-	-			143.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	130.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	143.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-	-			330.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	330.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						399.998.000,00						-		440.000.000,00	
		-						399.998.000,00						-		440.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00							-	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	249.998.000,00							-	275.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00			-	-	-			165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	165.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						249.998.000,00			-	-	-			275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	249.998.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	275.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						289.652.500,00						-		319.000.000,00	
		-						289.652.500,00						-		319.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	49.655.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	199.997.500,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00							-	33.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						199.997.500,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	199.997.500,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	20 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						49.655.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	49.655.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	-			33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
138.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**192.744.691.800,00**								**209.864.100.000,00**	
			-	-		-	-	192.034.691.800,00							-	209.083.100.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						931.000.000,00						-		1.024.100.000,00	
		-						931.000.000,00						-		1.024.100.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	290.000.000,00							-	319.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	280.000.000,00							-	308.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	41.000.000,00							-	45.100.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	41 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	41 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	41 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						41.000.000,00			-	-	-			45.100.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	41 Dokumen	41.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	45.100.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						290.000.000,00			-	-	-			319.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	290.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	319.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						280.000.000,00			-	-	-			308.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	280.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	308.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						330.000.000,00						-		363.000.000,00	
		-						330.000.000,00						-		363.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	90.000.000,00							-	99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	90.000.000,00							-	99.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	250 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						90.000.000,00			-	-	-			99.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	100 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	99.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						90.000.000,00			-	-	-			99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	41 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	99.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	123 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						577.000.000,00						-		627.000.000,00	
		-						577.000.000,00						-		627.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	200.000.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	157.000.000,00							-	165.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000.000,00							-	220.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						157.000.000,00			-	-	-			165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	4 Laporan	157.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	165.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						200.000.000,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						200.000.000,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-		-	4 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						190.806.691.800,00						-		207.740.000.000,00	
		-						190.806.691.800,00						-		207.740.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	184.900.324.000,00							-	201.410.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	2.606.368.800,00							-	2.700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	3.299.999.000,00							-	3.630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						184.900.324.000,00			-	-	-			201.410.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	161 Laporan	184.900.324.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	201.410.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						3.299.999.000,00			-	-	-			3.630.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	12 Laporan	3.299.999.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.630.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						2.606.368.800,00			-	-	-			2.700.000.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	161 Laporan	2.606.368.800,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.700.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	100.000.000,00							-	110.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						100.000.000,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
139.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**682.000.000,00**								**749.700.000,00**	
			-	-		-	-	682.000.000,00							-	749.700.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						682.000.000,00						-		749.700.000,00	
		-						682.000.000,00						-		749.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	60.000.000,00							-	66.000.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	200.000.000,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	175.000.000,00							-	192.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	-	120.000.000,00							-	132.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.000.000,00							-	24.200.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	55.000.000,00							-	60.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						55.000.000,00			-	-	-			60.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	41 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	60.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						22.000.000,00			-	-	-			24.200.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	41 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.200.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						175.000.000,00			-	-	-			192.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	41 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	192.500.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						120.000.000,00			-	-	-			132.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	41 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	132.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	41 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						60.000.000,00			-	-	-			66.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	41 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						200.000.000,00			-	-	-			220.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	84 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						**5.843.450.000,00**								**5.278.455.230,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.633.995.923,00**								**5.137.971.994,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**5.633.995.923,00**								**5.137.971.994,00**	
140.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.560.975.673,00**								**4.220.884.507,00**	
			-	-		-	-	4.560.975.673,00							-	4.220.884.507,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						295.486.100,00						-		64.297.252,00	
		-						295.486.100,00						-		64.297.252,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	295.486.100,00							-	64.297.252,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						295.486.100,00			-	-	-			64.297.252,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	295.486.100,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	64.297.252,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.931.764.363,00						-		3.914.323.041,00	
		-						3.931.764.363,00						-		3.914.323.041,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.931.764.363,00							-	3.914.323.041,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.931.764.363,00			-	-	-			3.914.323.041,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	3.931.764.363,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.914.323.041,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						200.659.850,00						-		114.738.234,00	
		-						200.659.850,00						-		114.738.234,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	27.074.650,00							-	28.428.492,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	173.585.200,00							-	86.309.742,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						173.585.200,00			-	-	-			86.309.742,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	173.585.200,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	86.309.742,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.074.650,00			-	-	-			28.428.492,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	27.074.650,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.428.492,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						133.065.360,00						-		127.525.980,00	
		-						133.065.360,00						-		127.525.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	59.320.000,00							-	46.235.543,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	73.745.360,00							-	81.290.437,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						59.320.000,00			-	-	-			46.235.543,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	59.320.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	46.235.543,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						73.745.360,00			-	-	-			81.290.437,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	73.745.360,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	81.290.437,00	Badan Pendapatan Daerah
141.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.073.020.250,00**								**917.087.487,00**	
			-	-		-	-	1.073.020.250,00							-	917.087.487,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.073.020.250,00						-		917.087.487,00	
		-						1.073.020.250,00						-		917.087.487,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	-	70.123.000,00							-	73.880.903,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	105.499.100,00							-	125.874.956,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	225.624.000,00							-	127.406.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	90.868.000,00							-	110.962.503,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	226.060.000,00							-	107.613.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	55.125.000,00							-	57.881.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	85.165.000,00							-	87.181.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	70.249.950,00							-	75.762.500,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	49.305.150,00							-	52.881.250,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	95.001.050,00							-	97.643.750,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						55.125.000,00			-	-	-			57.881.250,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	16 Dokumen	55.125.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	57.881.250,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						105.499.100,00			-	-	-			125.874.956,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	105.499.100,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	125.874.956,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						70.249.950,00			-	-	-			75.762.500,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	9 Laporan	70.249.950,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.762.500,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						226.060.000,00			-	-	-			107.613.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	226.060.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	107.613.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						95.001.050,00			-	-	-			97.643.750,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	9 Layanan	95.001.050,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	97.643.750,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						70.123.000,00			-	-	-			73.880.903,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	16 Dokumen	70.123.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	73.880.903,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						225.624.000,00			-	-	-			127.406.250,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	9 Dokumen	225.624.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	127.406.250,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						90.868.000,00			-	-	-			110.962.503,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	90.868.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.962.503,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						85.165.000,00			-	-	-			87.181.125,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	16 Laporan	85.165.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	87.181.125,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						49.305.150,00			-	-	-			52.881.250,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	2 Laporan	49.305.150,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	52.881.250,00	Badan Pendapatan Daerah
	X							**209.454.077,00**								**140.483.236,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**209.454.077,00**								**140.483.236,00**	
142.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**209.454.077,00**								**140.483.236,00**	
			-	-		-	-	209.454.077,00							-	140.483.236,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						209.454.077,00						-		140.483.236,00	
		-						209.454.077,00						-		140.483.236,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	209.454.077,00							-	140.483.236,00	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						209.454.077,00			-	-	-			140.483.236,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	209.454.077,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sidikalang || Kelurahan Sidikalang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	140.483.236,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**4.281.592.682,00**								**4.949.208.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.281.592.682,00**								**4.949.208.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.030.843.682,00**								**4.404.114.000,00**	
143.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.227.326.682,00**								**3.249.114.000,00**	
			-	-		-	-	3.227.326.682,00							-	3.249.114.000,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.781.592.682,00						-		2.530.000.000,00	
		-						2.781.592.682,00						-		2.530.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.781.592.682,00							-	2.530.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.781.592.682,00			-	-	-			2.530.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	24 Orang/bulan	2.781.592.682,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.530.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						356.274.000,00						-		494.296.000,00	
		-						356.274.000,00						-		494.296.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	9.360.000,00							-	10.296.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	205.875.000,00							-	330.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	39.919.800,00							-	44.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	91.119.200,00							-	99.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						91.119.200,00			-	-	-			99.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	91.119.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	99.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						39.919.800,00			-	-	-			44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	39.919.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	44.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.360.000,00			-	-	-			10.296.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.296.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						205.875.000,00			-	-	-			330.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	200 Laporan	205.875.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	330.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		121.000.000,00	
		-						0,00						-		121.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	66.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	55.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00			-	-	-			66.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	20 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.000.000,00						-		16.500.000,00	
		-						15.000.000,00						-		16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	16.500.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00			-	-	-			16.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74.460.000,00						-		87.318.000,00	
		-						74.460.000,00						-		87.318.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	44.530.000,00							-	54.318.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	29.930.000,00							-	33.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.530.000,00			-	-	-			54.318.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	44.530.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	54.318.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.930.000,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	29.930.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
144.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**803.517.000,00**								**1.155.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	753.517.000,00							-	1.045.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						210.000.000,00						-		396.000.000,00	
		-						210.000.000,00						-		396.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	60.000.000,00							-	66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	100.000.000,00							-	275.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						100.000.000,00			-	-	-			275.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	50 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	275.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						60.000.000,00			-	-	-			66.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	231 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	1000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						450.002.000,00						-		550.000.000,00	
		-						450.002.000,00						-		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	400.000.000,00							-	495.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	50.002.000,00							-	55.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						400.000.000,00			-	-	-			495.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	450 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	495.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						50.002.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	500 Dokumen	50.002.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						93.515.000,00						-		154.000.000,00	
		-						93.515.000,00						-		154.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	93.515.000,00							-	154.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						93.515.000,00			-	-	-			154.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	120 Orang	93.515.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	154.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**250.749.000,00**								**545.094.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
145.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**250.749.000,00**								**545.094.000,00**	
			-	-		-	-	250.749.000,00							-	545.094.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						175.034.000,00						-		334.400.000,00	
		-						175.034.000,00						-		334.400.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	-	175.034.000,00							-	334.400.000,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						175.034.000,00			-	-	-			334.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	100 Orang	175.034.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	334.400.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						75.715.000,00						-		210.694.000,00	
		-						75.715.000,00						-		210.694.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-		-	-	0,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	75.715.000,00							-	100.694.000,00	
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga						0,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						75.715.000,00			-	-	-			100.694.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	5 Laporan	75.715.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.694.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat						**10.953.019.162,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.953.019.162,00**								**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.953.019.162,00**								**0,00**	
146.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.404.548.162,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	9.404.548.162,00							-	0,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.453.020.169,00						-		0,00	
		-						7.453.020.169,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.453.020.169,00							-	0,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.453.020.169,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	49 Orang/bulan	7.453.020.169,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						785.000.000,00						-		0,00	
		-						785.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	755.000.000,00							-	0,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						755.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	50 Orang	755.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1 Orang	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						817.445.855,00						-		0,00	
		-						817.445.855,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.800.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	537.260.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	66.127.050,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.104.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	193.154.805,00							-	0,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.104.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.104.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						193.154.805,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	193.154.805,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						66.127.050,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	66.127.050,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						537.260.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	537.260.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						275.992.900,00						-		0,00	
		-						275.992.900,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	138.992.900,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	112.000.000,00							-	0,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	40 Unit	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						138.992.900,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	138.992.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						112.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	112.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46.960.736,00						-		0,00	
		-						46.960.736,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	18.700.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.260.736,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.700.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	18.700.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.260.736,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	27.260.736,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.128.502,00						-		0,00	
		-						26.128.502,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.705.765,00							-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	5.772.737,00							-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	17.650.000,00							-	0,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.772.737,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	5.772.737,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.705.765,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	2.705.765,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.650.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	17.650.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
147.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.413.714.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.293.714.000,00							-	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.154.446.000,00						-		0,00	
		-						1.154.446.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	273.196.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	270.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	281.250.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	90.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	120.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	120.000.000,00							-	0,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						90.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	90.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						281.250.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	281.250.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						120.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	41 Laporan	120.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						120.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	41 Laporan	120.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						270.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	161 Laporan	270.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						273.196.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	1 Dokumen	273.196.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						259.268.000,00						-		0,00	
		-						259.268.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	229.268.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						30.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						229.268.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	1 Laporan	229.268.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
148.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**134.757.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	134.757.000,00							-	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						134.757.000,00						-		0,00	
		-						134.757.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	56.907.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	24.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	53.850.000,00							-	0,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						53.850.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	40 perangkat daerah	53.850.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						24.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	40 perangkat daerah	24.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						56.907.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	1 Kegiatan	56.907.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						0,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	40 perangkat daerah	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kecamatan Sidikalang						**7.024.333.000,00**								**5.947.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.024.333.000,00**								**5.947.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.024.333.000,00**								**5.947.800.000,00**	
149.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.730.942.000,00**								**4.878.800.000,00**	
			-	-		-	-	5.725.942.000,00							-	4.823.800.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.485.000,00						-		11.500.000,00	
		-						22.485.000,00						-		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.585.000,00							-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	6.900.000,00							-	7.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.585.000,00			-	-	-			4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	15.585.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.900.000,00			-	-	-			7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	6.900.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.500.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.524.332.084,00						-		3.953.000.000,00	
		-						4.524.332.084,00						-		3.953.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.524.332.084,00							-	3.953.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.524.332.084,00			-	-	-			3.953.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	55 Orang/bulan	4.524.332.084,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.953.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						237.965.695,00						-		135.000.000,00	
		-						237.965.695,00						-		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	154.260.000,00							-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	78.705.695,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						78.705.695,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	78.705.695,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						154.260.000,00			-	-	-			80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	154.260.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						130.213.800,00						-		50.000.000,00	
		-						130.213.800,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	130.213.800,00							-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						130.213.800,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	130.213.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						754.285.000,00						-		706.300.000,00	
		-						754.285.000,00						-		706.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.500.000,00							-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	676.800.000,00							-	676.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	49.985.000,00							-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						49.985.000,00			-	-	-			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	49.985.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.500.000,00			-	-	-			27.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	27.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						676.800.000,00			-	-	-			676.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	676.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	676.800.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.660.421,00						-		23.000.000,00	
		-						61.660.421,00						-		23.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	56.660.421,00							-	18.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						56.660.421,00			-	-	-			18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 MOBIL 4 MOTOR Unit	56.660.421,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
150.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.220.016.000,00**								**1.013.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.220.016.000,00							-	1.013.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						220.016.000,00						-		13.000.000,00	
		-						220.016.000,00						-		13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	200.001.000,00							-	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	20.015.000,00							-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						200.001.000,00			-	-	-			8.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	5 Dokumen	200.001.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.015.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	20.015.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.000.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
		-						1.000.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	1.000.000.000,00							-	1.000.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.000.000.000,00			-	-	-			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
151.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**61.100.000,00**								**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	61.100.000,00							-	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						61.100.000,00						-		50.000.000,00	
		-						61.100.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	61.100.000,00							-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						61.100.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	500 Orang	61.100.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
152.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**12.275.000,00**								**6.000.000,00**	
			-	-		-	-	12.275.000,00							-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.275.000,00						-		6.000.000,00	
		-						12.275.000,00						-		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.275.000,00							-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	5.000.000,00							-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						5.000.000,00			-	-	-			3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.275.000,00			-	-	-			3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	11 Dokumen	7.275.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	Kecamatan Sidikalang
		Kecamatan Sumbul						**2.826.397.830,00**								**16.098.381.803,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.826.397.830,00**								**16.098.381.803,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.826.397.830,00**								**16.098.381.803,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
153.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.541.563.162,00**								**15.553.681.803,00**	
			-	-		-	-	2.541.563.162,00							-	15.553.681.803,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.200.000,00						-		11.500.000,00	
		-						9.200.000,00						-		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.500.000,00							-	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.700.000,00							-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.500.000,00			-	-	-			5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.700.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	4.700.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.226.397.262,00						-		2.540.181.803,00	
		-						2.226.397.262,00						-		2.540.181.803,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.226.397.262,00							-	2.540.181.803,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.226.397.262,00			-	-	-			2.540.181.803,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27 Orang/bulan	2.226.397.262,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.540.181.803,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						99.966.200,00						-		350.000.000,00	
		-						99.966.200,00						-		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	56.140.000,00							-	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.686.500,00							-	8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.941.300,00							-	18.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	36.198.400,00							-	148.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.941.300,00			-	-	-			18.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.941.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.500.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36.198.400,00			-	-	-			148.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	36.198.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	148.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.686.500,00			-	-	-			8.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.686.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.500.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.140.000,00			-	-	-			175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	56.140.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	175.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.197.200,00						-		55.000.000,00	
		-						36.197.200,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	36.197.200,00							-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.197.200,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	36.197.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.982.500,00						-		12.535.000.000,00	
		-						126.982.500,00						-		12.535.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	11.782.500,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.200.000,00							-	12.520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.782.500,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	11.782.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						115.200.000,00			-	-	-			12.520.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	115.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.520.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.820.000,00						-		62.000.000,00	
		-						42.820.000,00						-		62.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.170.000,00							-	42.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.650.000,00							-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.170.000,00			-	-	-			42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	36.170.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	42.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.650.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	6.650.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Kecamatan Sumbul
154.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**215.730.750,00**								**334.700.000,00**	
			-	-		-	-	215.730.750,00							-	334.700.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.730.750,00						-		134.000.000,00	
		-						15.730.750,00						-		134.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	4.280.000,00							-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	11.450.750,00							-	89.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						4.280.000,00			-	-	-			45.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	2 Dokumen	4.280.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	45.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						11.450.750,00			-	-	-			89.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	11.450.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	89.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00						-		200.700.000,00	
		-						200.000.000,00						-		200.700.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	5.180.000,00							-	5.200.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	194.820.000,00							-	195.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.180.000,00			-	-	-			5.200.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.180.000,00	Kab. Dairi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					-	5.200.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						194.820.000,00			-	-	-			195.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	194.820.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Sumbul || Kelurahan Pagagan Julu I || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					-	195.500.000,00	Kecamatan Sumbul
155.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**49.985.768,00**								**170.000.000,00**	
			-	-		-	-	49.985.768,00							-	170.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.985.768,00						-		170.000.000,00	
		-						49.985.768,00						-		170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	49.985.768,00							-	170.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					49.985.768,00			-	-	-			170.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	1000 Orang	49.985.768,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	170.000.000,00	Kecamatan Sumbul
156.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**19.118.150,00**								**40.000.000,00**	
			-	-		-	-	19.118.150,00							-	40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						19.118.150,00						-		40.000.000,00	
		-						19.118.150,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	6.325.400,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.320.750,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	5.472.000,00							-	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						5.472.000,00			-	-	-			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	5.472.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.320.750,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	7.320.750,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Sumbul
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						6.325.400,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	6.325.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sumbul
		Kecamatan Silima Pungga pungga						**2.734.487.920,00**								**2.556.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.734.487.920,00**								**2.556.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.734.487.920,00**								**2.556.200.000,00**	
157.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.459.487.920,00**								**2.253.200.000,00**	
			-	-		-	-	2.424.487.920,00							-	2.210.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.587.700,00						-		4.200.000,00	
		-						3.587.700,00						-		4.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.587.700,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.000.000,00							-	2.200.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.587.700,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	1.587.700,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00			-	-	-			2.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.200.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.234.487.591,00						-		2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						2.234.487.591,00						-		2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.234.487.591,00							-	2.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.234.487.591,00			-	-	Dairi Clean Governance			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	180 Orang/bulan	2.234.487.591,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.000.000,00						-		121.000.000,00	
		-						105.000.000,00						-		121.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.000.000,00						-		126.000.000,00	
		-						115.000.000,00						-		126.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00							-	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						80.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	85.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.412.629,00						-		2.000.000,00	
		-						1.412.629,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.412.629,00							-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.412.629,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	1.412.629,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
158.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**25.000.000,00**								**30.000.000,00**	
			-	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						25.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
159.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**210.000.000,00**								**223.000.000,00**	
			-	-		-	-	200.000.000,00							-	223.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.000.000,00						-		23.000.000,00	
		-						20.000.000,00						-		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	10.000.000,00							-	12.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.000.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Dairi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					-	12.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	0 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						190.000.000,00						-		200.000.000,00	
		-						190.000.000,00						-		200.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	190.000.000,00							-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						190.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	190.000.000,00	Kab. Dairi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan					-	200.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
160.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**40.000.000,00**								**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	20.000.000,00							-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						20.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						20.000.000,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	0 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Silima Pungga pungga
		Kecamatan Siempat Nempu						**2.018.431.655,00**								**1.696.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.976.935.755,00**								**1.654.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.976.935.755,00**								**1.654.900.000,00**	
161.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.876.987.987,00**								**1.554.900.000,00**	
			-	-		-	-	1.876.987.987,00							-	1.514.900.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00						-		400.000,00	
		-						4.000.000,00						-		400.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	4.000.000,00							-	400.000,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00			-	-	-			400.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	400.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.768.431.506,00						-		1.449.500.000,00	
		-						1.768.431.506,00						-		1.449.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.768.431.506,00							-	1.449.500.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.768.431.506,00			-	-	-			1.449.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	1.768.431.506,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.449.500.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.561.300,00						-		65.000.000,00	
		-						64.561.300,00						-		65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	39.575.000,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.100,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.986.200,00							-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.986.200,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.986.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.100,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						39.575.000,00			-	-	-			40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	39.575.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.995.181,00						-		40.000.000,00	
		-						39.995.181,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	39.995.181,00							-	40.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.995.181,00			-	-	-			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	39.995.181,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
162.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**39.981.000,00**								**40.000.000,00**	
			-	-		-	-	39.981.000,00							-	40.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						39.981.000,00						-		40.000.000,00	
		-						39.981.000,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	29.985.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	9.996.000,00							-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.996.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	13 Lembaga Kemasyarakatan	9.996.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						29.985.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	29.985.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
163.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**59.966.768,00**								**60.000.000,00**	
			-	-		-	-	59.966.768,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.966.768,00						-		60.000.000,00	
		-						59.966.768,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	29.983.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	29.983.768,00							-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						29.983.768,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	1000 Orang	29.983.768,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						29.983.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	1500 Orang	29.983.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	X							**41.495.900,00**								**41.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**41.495.900,00**								**41.500.000,00**	
164.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**41.495.900,00**								**41.500.000,00**	
			-	-		-	-	41.495.900,00							-	41.500.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.995.900,00						-		30.000.000,00	
		-						29.995.900,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.995.900,00							-	30.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.995.900,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	29.995.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.500.000,00						-		11.500.000,00	
		-						11.500.000,00						-		11.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	11.500.000,00							-	11.500.000,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.500.000,00			-	-	-			11.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.500.000,00	Kecamatan Siempat Nempu
		Kecamatan Tiga Lingga						**1.818.150.000,00**								**2.018.516.461,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.818.150.000,00**								**2.018.516.461,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.818.150.000,00**								**2.018.516.461,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
165.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.724.094.100,00**								**1.929.788.461,00**	
			-	-		-	-	1.724.094.100,00							-	1.929.788.461,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.092.000,00						-		10.150.000,00	
		-						9.092.000,00						-		10.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.318.000,00							-	3.888.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.774.000,00							-	6.262.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.318.000,00			-	-	-			3.888.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	3.318.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.888.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.774.000,00			-	-	-			6.262.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	5.774.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.262.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.518.149.366,00						-		1.662.784.461,00	
		-						1.518.149.366,00						-		1.662.784.461,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.518.149.366,00							-	1.662.784.461,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.518.149.366,00			-	-	-			1.662.784.461,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	13 Orang/bulan	1.518.149.366,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.662.784.461,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.943.900,00						-		125.608.000,00	
		-						82.943.900,00						-		125.608.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	40.780.000,00							-	62.087.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.616.900,00							-	16.398.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.607.600,00							-	5.472.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	23.939.400,00							-	41.651.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.607.600,00			-	-	-			5.472.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.607.600,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.472.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.939.400,00			-	-	-			41.651.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	23.939.400,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	41.651.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.616.900,00			-	-	-			16.398.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	15.616.900,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.398.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.780.000,00			-	-	-			62.087.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	40.780.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	62.087.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.387.720,00						-		44.932.000,00	
		-						32.387.720,00						-		44.932.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00							-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	24.887.720,00							-	22.932.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.500.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.887.720,00			-	-	-			22.932.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	24.887.720,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.932.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.700.736,00						-		36.702.000,00	
		-						35.700.736,00						-		36.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.440.000,00							-	8.202.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.260.736,00							-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.440.000,00			-	-	-			8.202.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	7.440.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.202.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.260.736,00			-	-	-			27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	27.260.736,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.820.378,00						-		49.612.000,00	
		-						45.820.378,00						-		49.612.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	42.900.378,00							-	46.305.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.920.000,00							-	3.307.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.900.378,00			-	-	-			46.305.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	42.900.378,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)						-	46.305.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.920.000,00			-	-	-			3.307.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	2.920.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tigalingga || Desa Tigalingga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.307.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
166.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**28.040.500,00**								**55.728.000,00**	
			-	-		-	-	28.040.500,00							-	55.728.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.040.500,00						-		55.728.000,00	
		-						28.040.500,00						-		55.728.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	12.800.000,00							-	23.728.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.240.500,00							-	32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						12.800.000,00			-	-	-			23.728.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	15 Dokumen	12.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	23.728.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.240.500,00			-	-	-			32.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	15.240.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	32.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
167.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**38.800.000,00**								**11.000.000,00**	
			-	-		-	-	38.800.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						38.800.000,00						-		11.000.000,00	
		-						38.800.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	38.800.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						38.800.000,00			-	-	-			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	500 Orang	38.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
168.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.215.400,00**								**22.000.000,00**	
			-	-		-	-	27.215.400,00							-	11.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.215.400,00						-		22.000.000,00	
		-						27.215.400,00						-		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.800.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	9.834.400,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	9.581.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						9.581.000,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	28 Dokumen	9.581.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						9.834.400,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	14 Dokumen	9.834.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Kecamatan Tiga Lingga
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.800.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	3 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tiga Lingga
		Kecamatan Tanah Pinem						**1.690.283.000,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.447.443.191,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.447.443.191,00**								**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
169.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.340.282.191,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.340.282.191,00							-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.340.282.191,00						-		0,00	
		-						1.340.282.191,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.340.282.191,00							-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.340.282.191,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	10 Orang/bulan	1.340.282.191,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
170.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	25.000.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						25.000.000,00						-		0,00	
		-						25.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.000.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
171.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**60.490.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	60.490.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						60.490.000,00						-		0,00	
		-						60.490.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	60.490.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						60.490.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	3000 Orang	60.490.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
172.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**21.671.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	21.671.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						21.671.000,00						-		0,00	
		-						21.671.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	11.746.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	9.925.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						9.925.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	19 Dokumen	9.925.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						11.746.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	19 Dokumen	11.746.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X							**242.839.809,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**242.839.809,00**								**0,00**	
173.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**242.839.809,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	242.839.809,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.004.000,00						-		0,00	
		-						9.004.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.504.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.500.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.504.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	4.504.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.500.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.378.900,00						-		0,00	
		-						145.378.900,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	107.620.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.226.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.002.600,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.530.300,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.002.600,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	5.002.600,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.530.300,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	24.530.300,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.226.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.226.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						107.620.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	107.620.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.960.000,00						-		0,00	
		-						22.960.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	22.960.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.960.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	22.960.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.230.368,00						-		0,00	
		-						25.230.368,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.600.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.630.368,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.600.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.600.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.630.368,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	13.630.368,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.266.541,00						-		0,00	
		-						40.266.541,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	34.426.541,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.840.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34.426.541,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	34.426.541,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.840.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	5.840.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Tanah Pinem || Desa Kuta Buluh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Tanah Pinem
		Kecamatan Pegagan Hilir						**1.798.597.000,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**128.007.954,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**128.007.954,00**								**0,00**	
174.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**37.010.100,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	37.010.100,00							-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.010.100,00						-		0,00	
		-						37.010.100,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	37.010.100,00							-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.010.100,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	37.010.100,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
175.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**14.500.474,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	14.500.474,00							-	0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						14.500.474,00						-		0,00	
		-						14.500.474,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	14.500.474,00							-	0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						14.500.474,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	14.500.474,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
176.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**14.655.500,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	14.655.500,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						14.655.500,00						-		0,00	
		-						14.655.500,00						-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	14.655.500,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.655.500,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	14.655.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
177.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**33.633.400,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	33.633.400,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.633.400,00						-		0,00	
		-						33.633.400,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	15.300.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	18.333.400,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						18.333.400,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	0 Orang	18.333.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						15.300.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	0 Orang	15.300.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
178.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**28.208.480,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	28.208.480,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						28.208.480,00						-		0,00	
		-						28.208.480,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.988.480,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	20.220.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						20.220.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	20.220.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.988.480,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	0 Dokumen	7.988.480,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	X							**1.670.589.046,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.670.589.046,00**								**0,00**	
179.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.670.589.046,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.670.589.046,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.130.500,00						-		0,00	
		-						3.130.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.130.500,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.130.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	3.130.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.548.596.946,00						-		0,00	
		-						1.548.596.946,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.548.596.946,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.548.596.946,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	1.548.596.946,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.570.000,00						-		0,00	
		-						78.570.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	78.570.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						78.570.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	78.570.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.200.000,00						-		0,00	
		-						7.200.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.200.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.200.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	7.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.091.600,00						-		0,00	
		-						33.091.600,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	33.091.600,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.091.600,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	33.091.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Pegagan Hilir
		Kecamatan Parbuluan						**2.005.754.488,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.005.754.488,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.005.754.488,00**								**0,00**	
180.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.879.129.488,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	1.879.129.488,00							-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.705.754.352,00						-		0,00	
		-						1.705.754.352,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.705.754.352,00							-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.705.754.352,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 Orang/bulan	1.705.754.352,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.982.900,00						-		0,00	
		-						104.982.900,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	67.830.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.639.400,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	951.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	23.562.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						951.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	951.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.562.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	23.562.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.639.400,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.639.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.830.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	67.830.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.490.736,00						-		0,00	
		-						22.490.736,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	8.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.490.736,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.490.736,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	13.490.736,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.901.500,00						-		0,00	
		-						45.901.500,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.901.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.901.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	45.901.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**35.990.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	35.990.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						35.990.000,00						-		0,00	
		-						35.990.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.365.000,00							-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	25.625.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						25.625.000,00			-	-	-			0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	11 Lembaga Kemasyarakatan	25.625.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.365.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	10.365.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
182.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**84.635.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	84.635.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						84.635.000,00						-		0,00	
		-						84.635.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	36.400.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	48.235.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						48.235.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	48.235.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						36.400.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	36.400.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
183.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**6.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	6.000.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.000.000,00						-		0,00	
		-						6.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	6.000.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						6.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	11 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Parbuluan
		Kecamatan Siempat Nempu Hilir						**1.270.700.699,00**								**1.403.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.270.700.699,00**								**1.403.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.270.700.699,00**								**1.403.300.000,00**	
184.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.207.000.299,00**								**1.307.500.000,00**	
			-	-		-	-	1.207.000.299,00							-	1.282.500.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.020.700.359,00						-		1.102.000.000,00	
		-						1.020.700.359,00						-		1.102.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.020.700.359,00							-	1.102.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.020.700.359,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.102.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	10 Orang/bulan	1.020.700.359,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.102.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.031.500,00						-		78.000.000,00	
		-						76.031.500,00						-		78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	24.970.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.062.900,00							-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.998.800,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.999.800,00							-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.998.800,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.998.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.999.800,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	29.999.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.062.900,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			17.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.062.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	17.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.970.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	24.970.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.801.000,00						-		23.000.000,00	
		-						20.801.000,00						-		23.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.801.000,00							-	23.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.801.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			23.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	20.801.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	23.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.054.800,00						-		45.500.000,00	
		-						31.054.800,00						-		45.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00							-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	14.554.800,00							-	16.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.554.800,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			16.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	14.554.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.500.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			4.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.500.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.412.640,00						-		59.000.000,00	
		-						58.412.640,00						-		59.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	49.993.640,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	8.419.000,00							-	9.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						49.993.640,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	49.993.640,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.419.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	8.419.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	9.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
185.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.998.000,00**								**8.800.000,00**	
			-	-		-	-	7.998.000,00							-	8.800.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.998.000,00						-		8.800.000,00	
		-						7.998.000,00						-		8.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.998.000,00							-	8.800.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.998.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			8.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.998.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.800.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
186.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.702.400,00**								**43.000.000,00**	
			-	-		-	-	11.702.400,00							-	43.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11.702.400,00						-		43.000.000,00	
		-						11.702.400,00						-		43.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	11.702.400,00							-	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	0,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	600 Orang	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						11.702.400,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			13.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	150 Orang	11.702.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	13.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
187.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**44.000.000,00**								**44.000.000,00**	
			-	-		-	-	32.000.000,00							-	32.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						44.000.000,00						-		44.000.000,00	
		-						44.000.000,00						-		44.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	12.000.000,00							-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	12.000.000,00							-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						12.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						12.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						20.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
		Kecamatan Siempat Nempu Hulu						**1.876.742.824,00**								**1.627.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.876.742.824,00**								**1.627.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.876.742.824,00**								**1.627.800.000,00**	
188.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.800.268.024,00**								**1.565.800.000,00**	
		-	-	-		-	-	1.800.268.024,00							-	1.565.200.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.626.778.024,00						-		1.500.000.000,00	
		-						1.626.778.024,00						-		1.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.626.778.024,00							-	1.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.626.778.024,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	1.626.778.024,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.500.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.400.000,00						-		34.400.000,00	
		-						89.400.000,00						-		34.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	67.900.000,00							-	32.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	1.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.500.000,00							-	600.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			1.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.200.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.500.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	21.500.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	600.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	600.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.900.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			32.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	67.900.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	32.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34.090.000,00						-		29.200.000,00	
		-						34.090.000,00						-		29.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.090.000,00							-	3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00							-	26.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.090.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			3.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	10.090.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.200.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	24 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	26.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00						-		2.200.000,00	
		-						50.000.000,00						-		2.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00							-	2.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	2.200.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
189.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.650.000,00**								**11.000.000,00**	
			-	-		-	-	6.650.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.650.000,00						-		11.000.000,00	
		-						6.650.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	6.650.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.650.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			11.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	24 Dokumen	6.650.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	11.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
190.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**16.300.000,00**								**11.000.000,00**	
			-	-		-	-	16.300.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.300.000,00						-		11.000.000,00	
		-						16.300.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	16.300.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16.300.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	12 desa 1 kecamatan Lembaga Kemasyarakatan	16.300.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	11.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
191.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**45.500.000,00**								**33.000.000,00**	
			-	-		-	-	45.500.000,00							-	33.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						45.500.000,00						-		33.000.000,00	
		-						45.500.000,00						-		33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	28.000.000,00							-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	17.500.000,00							-	21.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						17.500.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	500 Orang	17.500.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	21.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						28.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	1000 Orang	28.000.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	12.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
192.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8.024.800,00**								**7.000.000,00**	
			-	-		-	-	8.024.800,00							-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.024.800,00						-		7.000.000,00	
		-						8.024.800,00						-		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	6.000.000,00							-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.024.800,00							-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						6.000.000,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.024.800,00			-	-	Dairi Infrastruktur Tangguh			3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	12 DESA Dokumen	2.024.800,00	Kab. Dairi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
		Kecamatan Lae Parira						**1.781.023.239,00**								**1.624.570.719,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.781.023.239,00**								**1.624.570.719,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.781.023.239,00**								**1.624.570.719,00**	
193.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.734.838.239,00**								**1.564.470.719,00**	
			-	-		-	-	1.734.838.239,00							-	1.564.470.719,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.613.855.639,00						-		1.466.106.119,00	
		-						1.613.855.639,00						-		1.466.106.119,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.613.855.639,00							-	1.466.106.119,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.613.855.639,00			-	-	-			1.466.106.119,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	1.613.855.639,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.466.106.119,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.882.600,00						-		71.074.600,00	
		-						95.882.600,00						-		71.074.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	56.840.000,00							-	33.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00							-	7.605.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	4.272.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.042.600,00							-	26.197.600,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	-	-			4.272.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.272.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.042.600,00			-	-	-			26.197.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	24.042.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.197.600,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00			-	-	-			7.605.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.605.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.840.000,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	56.840.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.100.000,00						-		25.090.000,00	
		-						23.100.000,00						-		25.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	9.600.000,00							-	10.560.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00							-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00							-	2.530.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			-	-	-			2.530.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.530.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.600.000,00			-	-	-			10.560.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.560.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.000.000,00			-	-	-			12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Kecamatan Lae Parira
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.000.000,00						-		2.200.000,00	
		-						2.000.000,00						-		2.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.000.000,00							-	2.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000,00			-	-	-			2.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.200.000,00	Kecamatan Lae Parira
194.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.445.000,00**								**5.100.000,00**	
			-	-		-	-	4.445.000,00							-	5.100.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.445.000,00						-		5.100.000,00	
		-						4.445.000,00						-		5.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	4.445.000,00							-	5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4.445.000,00			-	-	-			5.100.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.445.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.100.000,00	Kecamatan Lae Parira
195.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**41.740.000,00**								**55.000.000,00**	
			-	-		-	-	41.740.000,00							-	55.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						41.740.000,00						-		55.000.000,00	
		-						41.740.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	25.180.000,00							-	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	16.560.000,00							-	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						16.560.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	300 Orang	16.560.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Kecamatan Lae Parira

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						25.180.000,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	300 Orang	25.180.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Kecamatan Lae Parira
		Kecamatan Gunung Sitember						**1.637.066.000,00**								**1.643.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.637.066.000,00**								**1.643.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.637.066.000,00**								**1.643.400.000,00**	
196.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.521.966.000,00**								**1.505.300.000,00**	
			-	-		-	-	1.516.966.000,00							-	1.484.300.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		12.000.000,00	
		-						10.000.000,00						-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.000.000,00							-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	-			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.387.065.570,00						-		1.200.000.000,00	
		-						1.387.065.570,00						-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.387.065.570,00							-	1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.387.065.570,00			-	-	-			1.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	13 Orang/bulan	1.387.065.570,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.200.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00						-		15.000.000,00	
		-						0,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00							-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.437.064,00						-		183.000.000,00	
		-						105.437.064,00						-		183.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	40.642.400,00							-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	16.000.000,00							-	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.390.900,00							-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	32.203.764,00							-	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.200.000,00							-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.390.900,00			-	-	-			7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.390.900,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.203.764,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	32.203.764,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.200.000,00			-	-	-			12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.000.000,00			-	-	-			18.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.642.400,00			-	-	-			110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	40.642.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	110.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00						-		16.000.000,00	
		-						0,00						-		16.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	16.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	-			16.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.566.776,00						-		23.500.000,00	
		-						17.566.776,00						-		23.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.344.000,00							-	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.222.776,00							-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.344.000,00			-	-	-			8.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	7.344.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.500.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.222.776,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.222.776,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.896.590,00						-		55.800.000,00	
		-						1.896.590,00						-		55.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	1.096.590,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	800.000,00							-	800.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.096.590,00			-	-	-			55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	1.096.590,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						800.000,00			-	-	-			800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	800.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
197.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**40.000.000,00**								**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	40.000.000,00							-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	30.000.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	10.000.000,00							-	15.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						30.000.000,00			-	-	-			35.000.000,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	35.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
198.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**26.100.000,00**								**30.100.000,00**	
			-	-		-	-	26.100.000,00							-	30.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						26.100.000,00						-		30.100.000,00	
		-						26.100.000,00						-		30.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	26.100.000,00							-	30.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						26.100.000,00			-	-	-			30.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	500 Orang	26.100.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.100.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
199.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**49.000.000,00**								**58.000.000,00**	
			-	-		-	-	37.000.000,00							-	44.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						49.000.000,00						-		58.000.000,00	
		-						49.000.000,00						-		58.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	25.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	12.000.000,00							-	14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	12.000.000,00							-	14.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						12.000.000,00			-	-	-			14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	8 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						12.000.000,00			-	-	-			14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	8 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						25.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Kecamatan Gunung Sitember
		Kecamatan Berampu						**1.581.568.000,00**								**1.650.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.581.568.000,00**								**1.650.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.581.568.000,00**								**1.650.000.000,00**	
200.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.507.016.650,00**								**1.567.500.000,00**	
			-	-		-	-	1.507.016.650,00							-	1.564.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.700.000,00						-		7.370.000,00	
		-						6.700.000,00						-		7.370.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00							-	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.700.000,00							-	4.070.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			-	-	-			3.300.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.300.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.700.000,00			-	-	-			4.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	10 Laporan	3.700.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.070.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.331.567.369,00						-		1.382.711.000,00	
		-						1.331.567.369,00						-		1.382.711.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.331.567.369,00							-	1.382.711.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.331.567.369,00			-	-	-			1.382.711.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	13 Orang/bulan	1.331.567.369,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.382.711.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.075.700,00						-		83.050.000,00	
		-						82.075.700,00						-		83.050.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	41.660.000,00							-	39.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.441.200,00							-	6.050.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.975.200,00							-	3.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.999.300,00							-	34.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.975.200,00			-	-	-			3.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.975.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.300.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.999.300,00			-	-	-			34.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.999.300,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	34.100.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.441.200,00			-	-	-			6.050.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.441.200,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.050.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						41.660.000,00			-	-	-			39.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	20 Laporan	41.660.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	39.600.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46.600.000,00						-		51.260.000,00	
		-						46.600.000,00						-		51.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	17.000.000,00							-	18.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.600.000,00							-	30.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00							-	2.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	-			2.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	50 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.200.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.000.000,00			-	-	-			18.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	20 Laporan	17.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.700.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						27.600.000,00			-	-	-			30.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	27.600.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.360.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.073.581,00						-		43.109.000,00	
		-						40.073.581,00						-		43.109.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	37.883.581,00							-	40.700.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.190.000,00							-	2.409.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.883.581,00			-	-	-			40.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	37.883.581,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.700.000,00	Kecamatan Berampu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.190.000,00			-	-	-			2.409.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	2.190.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.409.000,00	Kecamatan Berampu
201.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**24.551.350,00**								**27.500.000,00**	
			Dana Yang Dibutuhkan	-		-	undefined undefined	24.551.350,00							-	27.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						24.551.350,00						-		27.500.000,00	
		-						24.551.350,00						-		27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.551.350,00							-	17.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	9.000.000,00							-	9.900.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.000.000,00			-	-	-			9.900.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	9.900.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.551.350,00			-	-	-			17.600.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	5 Laporan	15.551.350,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	17.600.000,00	Kecamatan Berampu
202.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.000.000,00**								**44.000.000,00**	
			-	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
		-						40.000.000,00						-		44.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	100 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Kecamatan Berampu
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						20.000.000,00			-	-	-			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	100 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,00	Kecamatan Berampu
203.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**10.000.000,00**								**11.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						10.000.000,00						-		11.000.000,00	
		-						10.000.000,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						10.000.000,00			-	-	-			11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Kecamatan Berampu
		Kecamatan Silahisabungan						**1.265.076.843,00**								**1.430.000.286,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.265.076.843,00**								**1.430.000.286,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.265.076.843,00**								**1.430.000.286,00**	
204.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.167.700.893,00**								**1.276.330.286,00**	
			-	-		-	-	1.167.700.893,00							-	1.276.330.286,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00						-		18.150.000,00	
		-						0,00						-		18.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00							-	18.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00			-	-	Dairi Cerdas			18.150.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.150.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.015.076.162,00						-		1.046.416.800,00	
		-						1.015.076.162,00						-		1.046.416.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.015.076.162,00							-	1.046.416.800,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.015.076.162,00			-	-	-			1.046.416.800,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	1.015.076.162,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.046.416.800,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.851.150,00						-		145.268.486,00	
		-						105.851.150,00						-		145.268.486,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	68.972.000,00							-	94.380.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.626.150,00							-	24.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.495.000,00							-	6.050.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.758.000,00							-	20.638.486,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.495.000,00			-	-	-			6.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.495.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.050.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.758.000,00			-	-	Dairi Cerdas			20.638.486,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	18.758.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.638.486,00	Kecamatan Silahisabungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.626.150,00			-	-	-			24.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	12.626.150,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.200.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						68.972.000,00			-	-	-			94.380.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	150 Laporan	68.972.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	94.380.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.000.000,00						-		6.600.000,00	
		-						6.000.000,00						-		6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00							-	6.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			-	-	-			6.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.600.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.773.581,00						-		59.895.000,00	
		-						40.773.581,00						-		59.895.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	40.773.581,00							-	59.895.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.773.581,00			-	-	-			59.895.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	40.773.581,00	Provinsi Sumatera Utara || Kab. Dairi || Kecamatan Silahisabungan || Desa Silalahi III || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	59.895.000,00	Kecamatan Silahisabungan
205.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**28.530.000,00**								**42.350.000,00**	
			-	-		-	-	28.530.000,00							-	42.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.530.000,00						5 (lima) Desa		42.350.000,00	
		-						28.530.000,00						5 (lima) Desa		42.350.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	20.550.000,00							-	24.200.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.980.000,00							-	18.150.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.980.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dairi Cerdas			18.150.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.980.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.150.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.550.000,00			-	-	Dairi Cerdas			24.200.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	5 Laporan	20.550.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.200.000,00	Kecamatan Silahisabungan
206.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**52.346.000,00**								**66.550.000,00**	
			-	-		-	-	52.346.000,00							-	66.550.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.346.000,00						-		66.550.000,00	
		-						52.346.000,00						-		66.550.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	30.350.000,00							-	36.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	-	21.996.000,00							-	30.250.000,00	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						21.996.000,00			-	-	Dairi Cerdas			30.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-		-	15 Orang	21.996.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.250.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						30.350.000,00			-	-	-			36.300.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	200 Orang	30.350.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.300.000,00	Kecamatan Silahisabungan
207.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**16.499.950,00**								**44.770.000,00**	
			-	-		-	-	16.499.950,00							-	44.770.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.499.950,00						-		44.770.000,00	
		-						16.499.950,00						-		44.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	0,00							-	26.620.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	16.499.950,00							-	18.150.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						16.499.950,00			-	-	Dairi Cerdas			18.150.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	5 Dokumen	16.499.950,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.150.000,00	Kecamatan Silahisabungan
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00			-	-	Dairi Peduli			26.620.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.620.000,00	Kecamatan Silahisabungan
		Kecamatan Sitinjo						**2.559.088.000,00**								**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.559.088.000,00**								**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.559.088.000,00**								**0,00**	
208.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.293.703.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	2.293.703.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.599.000,00						-		0,00	
		-						5.599.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.599.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.599.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	0 Laporan	5.599.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.109.087.550,00						-		0,00	
		-						2.109.087.550,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.109.087.550,00							-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.109.087.550,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	2.109.087.550,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.620.450,00						-		0,00	
		-						86.620.450,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	58.555.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.042.650,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.022.800,00							-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Kab. Dairi	-					-	0,00	Kecamatan Sitinjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.022.800,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	27.022.800,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.042.650,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.042.650,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						58.555.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	58.555.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.300.000,00						-		0,00	
		-						84.300.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	11.800.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	72.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.800.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	11.800.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	72.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.096.000,00						-		0,00	
		-						8.096.000,00						-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	8.096.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.096.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	8.096.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
209.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**221.560.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	221.560.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21.560.000,00						-		0,00	
		-						21.560.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	21.560.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						0,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						21.560.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	21.560.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.000.000,00						-		0,00	
		-						200.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	200.000.000,00							-	0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						200.000.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
210.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**42.825.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	42.825.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						42.825.000,00						-		0,00	
		-						42.825.000,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	-	17.200.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	25.625.000,00							-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						25.625.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	1000 Orang	25.625.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						17.200.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-		-	1000 Orang	17.200.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
211.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.000.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.000.000,00						-		0,00	
		-						1.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						500.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						500.000,00			-	-	Dairi Clean Governance			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Kecamatan Sitinjo
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**4.590.000.000,00**								**1.414.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**2.425.961.862,00**								**1.414.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**2.425.961.862,00**								**1.414.000.000,00**	
212.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**73.833.522,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	70.833.522,00							-	0,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00						-		0,00	
		-						6.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00							-	0,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00			-	-	Dairi Cerdas			0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.555.100,00						-		0,00	
		-						58.555.100,00						-		0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.900.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	46.261.600,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	4.393.500,00							-	0,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						46.261.600,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	46.261.600,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.393.500,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	4.393.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.900.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	7.900.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.278.422,00						-		0,00	
		-						9.278.422,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	9.278.422,00							-	0,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.278.422,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	9.278.422,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
213.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**540.007.400,00**								**636.000.000,00**	
			-	-		-	-	540.007.400,00							-	636.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						540.007.400,00						-		636.000.000,00	
		-						540.007.400,00						-		636.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-		-	-	10.007.400,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	50.000.000,00							-	75.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	460.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	20.000.000,00							-	36.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10.007.400,00			-	-	-			25.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-		-	12 Dokumen	10.007.400,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						50.000.000,00			-	-	-			75.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	75.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						460.000.000,00			-	-	-			500.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	30 Orang	460.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						20.000.000,00			-	-	-			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	36.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
214.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.001.169.500,00**								**25.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	1.001.169.500,00							-	25.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.001.169.500,00						-		25.000.000,00	
		-						1.001.169.500,00						-		25.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	956.169.500,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	35.000.000,00							-	25.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					956.169.500,00			-	-	-				0,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	0 Dokumen	956.169.500,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					35.000.000,00			-	-	-				25.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	50 Orang	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					10.000.000,00			-	-	-				0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	0 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
215.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**15.000.000,00**								**20.000.000,00**	
			-	-		-	-	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						15.000.000,00						-		20.000.000,00	
		-						15.000.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	15.000.000,00							-	20.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						15.000.000,00			-	-	-			20.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
216.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**654.281.440,00**								**700.000.000,00**	
			-	-		-	-	654.281.440,00							-	700.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						654.281.440,00						-		700.000.000,00	
		-						654.281.440,00						-		700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	-	605.000.000,00							-	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	49.281.440,00							-	0,00	
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						605.000.000,00			-	-	-			700.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	20 Dokumen	605.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						49.281.440,00			-	-	Dairi Tani Sejahtera			0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	0 Laporan	49.281.440,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
217.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**141.670.000,00**								**33.000.000,00**	
			-	-		-	-	141.670.000,00							-	33.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						141.670.000,00						-		33.000.000,00	
		-						141.670.000,00						-		33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	55.000.000,00							-	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	35.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	51.670.000,00							-	0,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						51.670.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	0 Orang	51.670.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						35.000.000,00			-	-	-			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	0 Orang	35.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00			-	-	-			33.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X							**2.164.038.138,00**								**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.164.038.138,00**								**0,00**	
218.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.164.038.138,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	2.164.038.138,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.977.652.138,00						-		0,00	
		-						1.977.652.138,00						-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.977.652.138,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.977.652.138,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	1.977.652.138,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						164.386.000,00						-		0,00	
		-						164.386.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	164.386.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						164.386.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	164.386.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.000.000,00						-		0,00	
		-						22.000.000,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00							-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dairi	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**1.187.083.379.301,00**								**934.261.691.308,00**	

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

DAFTAR POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD KABUPATEN DAIRI

Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dairi

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
1	Apt. ANDI P. S. PASARIBU	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Penambahan Lampu Jalan Pada Ruas Jalan Lintas Tigalingga Baturdan	Jalan Tigalingga Ke Baturdan, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Apt. ANDI P. S. PASARIBU	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	Penambahan Instalasi Air Minum Dari Sumber Air Baru Untuk Kec. Tigalingga	Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN JURUSAN LAE SERING KE AEK NAULI KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA LAE SERING KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN JALAN JURUSAN AEK NAULI KE PARSAORAN KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA AEK NAULI KEC. SIEMPAT NENPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN JURUSAN DESA LAE MARKELANG KE DESA AEK NAULI KEC SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA LAE MARKELANG KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN JURUSAN DESA SIMUNGUN KE DESA LAE MBALE KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA SIMUNGUN KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan	LANJUTAN PENGASPALAN JURUSAN DESA LAE LONGKI KE DESA LAE GAMBIR KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA LAE LONGKI KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	JUANGGA SILABAN, S.E.	Pembangunan Jalan Pertanian	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DESA LAE SERING KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR	DESA LAE SERING KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
9	J. PUTRA GINTING, S.H., M.H.	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN PENGHUBUNG DUSUN LINGGA JULU KE DESA PALDING	DUSUN LINGGA JULU KEC. TIGALINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	J. PUTRA GINTING, S.H., M.H.	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN PENGHUBUNG DESA PASIR TENGAH KE DESA MANGAN MOLIH	DESA PASIR TENGAH KEC. TANAH PINEM, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
11	J. PUTRA GINTING, S.H., M.H.	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	PENGADAAN BIBIT DURIAN BLACK TONE	KEC TIGALINGGA KEC TANAH PINEM KEC GUNUNG SITEMBER, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	J. PUTRA GINTING, S.H., M.H.	Pembangunan Jalan Pertanian	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI	KEC TIGALINGGA KEC TANAH PINEM, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	KIAN MUNTHE	Pembangunan Jalan	LANJUTAN PENGASPALAN JALAN JURUSAN MESJID LINGGA RAJA KE DUSUN SUKA MAKMUR KEC. PEGAGAN HILIR	DESA LINGGA RAJA KEC. PEGAGAN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	CIPTA KARO KARO	Pembangunan Jalan	LANJUTAN HOTMIX KE DESA GUNUNG SITEMBER	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	HALIM P. LUMBANBATU	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN HOTMIX JALAN KUTA GAMBIR	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	HALIM P. LUMBANBATU	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN JALAN KEPEMAKAMAN UMUM KUTA GAMBIR	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DI SIDIANGKAT	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN HUTA NADEAK KELURAHAN SIDIANGKAT	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN DUSUN 2 TOMBAK SIMBOLON	DESA PARBULUAN IV KECAMATAN PARBULUAN, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pembangunan Ruang Kelas Baru	PEMBANGUNAN KANTOR DPRD	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
21	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN DUSUN 2 TOMBAK SIMBOLON	DESA PARBULUAN IV, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	Drs. BONA HASUDUNGAN SITINDAON	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PEMASANGAN LAMPU JALAN DI JALAN AIR BERSIH KELURAHAN BATANG BERUH	KELURAHAN BATANG BERUH SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
23	RUKIATNO NAINGGOLAN, SP	Pembangunan Jalan Pertanian	PERBAIKAN JALAN USAHA TANI DI DESA PEGAGAN JULU VIII	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
24	RUKIATNO NAINGGOLAN, SP	Pembangunan Jalan	PENATAAN LAPANGAN UDKP SUMBUL	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	MITRO LUMBAN BATU	Pembangunan Jalan	PEMBUKAAN JALAN DI DUSUN LAE NABERU I DESA ADIAN NANGKA	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	MITRO LUMBAN BATU	Pembangunan Jalan	PENGERASAN JALAN DESA SIHORBO	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	MITRO LUMBAN BATU	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN DESA HUTA KARANGAN	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	CIPTA KARO KARO	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PENGASPALAN DARI DUSUN TAMPUK KITE KEDUSUN PONDOK	KECAMATAN TIGA LINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	CIPTA KARO KARO	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN PERBATASAN DUSUN LAU KINAPAN KE DESA BUKIT LAU KERSIK	KECAMATAN TIGA LINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30	CIPTA KARO KARO	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN DARI TIGA LINGGA KE DUSUN LAU MIL	KECAMATAN TIGALINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
31	CIPTA KARO KARO	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN SIMPANGBULUH SEMA KEDUSUN NAMOBUAH	KECAMATAN TIGA LINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
32	CIPTA KARO KARO	Pemeliharaan Jalan	PENINGKATAN PENGASPALAN JALAN DARI DUSUN KUTAMBARU KE LAU SUNGSANG	KECAMATAN TANAH PINEM, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
33	CIPTA KARO KARO	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN LINGKAR PUSKESMAS - KANTOR CAMAT KE DESA GUNUNG SITEMBER	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
34	RUKIATNO NAINGGOLAN, SP	Pembangunan Jalan Pertanian	PENGASPALAN JALAN USAHA TANI DESA PEGAGAN JULU VII	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
35	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pemeliharaan Jalan	PERBAIKAN JALAN DARI DUSUN SIMANUK MANUK KE PAJAK PERGAMBIRAN	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
36	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pemeliharaan Jalan	PERBAIKAN JALAN SIMANDUMA	KECAMATAN PEGAGAN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
37	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pemeliharaan Jalan	PERBAIKAN JALAN DESA LINGGA RAJA 2	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN JALAN HUTA GUGUNG LINK PARMANTIAN - BULUH UJUNG	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
39	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SIBABI	KECAMATAN PEGAGAN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
40	WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH	Pembangunan Jalan	PERBAIKAN JALAN DESA PEGAGAN JULU IX	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
41	Ir. TOGAR PASARIBU	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari jalan Lae si rambon,ke Rimo Bunga sampai ke simpang penjara	Jalan Lae Sirambon ke Rimo Bunga Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
42	Ir. TOGAR PASARIBU	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan dan pengaspalan jalan menuju terminal sitinjo ke Mesjid hingga ke simpang jalan toba	Jalan terminal sitinjo ke jalan mesjid, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
43	Ir. TOGAR PASARIBU	Rehabilitasi Saluran Drainase	Perbaikan saluran irigasi Lae Paski	Lae Paski sitinjo , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
44	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari KM.11 menuju Desa Silumboyah	Jalan KM 11 menuju Desa Silumboyah, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
45	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pembangunan tembok penahan pagar SD belang Malum	Desa Belang Malum Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
46	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan Manunggal Sidikalang	Jalan Manunggal Sidikalang , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari Desa Belang Malum menuju dusun Lae gering	Bandar selamat sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Pengadaan Bibit jagung kepada kelompok tani desa Belang malum	Desa Belang malum bandar selamat sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
49	RADEANTO BANJARNAHOR, ST	Pembangunan Jalan Pertanian	Perbaikan jalan pertanian di desa Belang malum	Desa Belang malum sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
50	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari dusun malum desa Lae haporas menuju desa sinar pagi	Desa Lae haporas menuju sinar pagi kecamatan tanah Pinem , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
51	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Jalan desa ingin maju	Desa ingin maju Sempat nempu Hilir, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari desa kempawa menuju Lae primbon	Desa kempawa menuju Lae primbon kecamatan tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan desa Ujung Teran	Desa Ujung Teran Kecamatan Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
54	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan desa Kuta tengah	Desa Kuta tengah Ditempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pengadaan alat dan mesin pertanian	Pengadaan mobil pemadam kebakaran	Kecamatan Gunung Sitember , Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
56	ERICK SANJAYA SIMBOLON, S.M	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan desa tornauli	Desa tornauli kecamatan Tigalingga , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
57	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN HUTA BARU DUSUN III DESA BINTANG MERSADA	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
58	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN NJUAH NJUAH DESA BINTANG MERSADA	SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
59	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Rehabilitasi Saluran Drainase	PEMBANGUNAN TEMBIK OENAHAN TANAH DI JALAN NJUAH NJUAH DESA BINTANG MERSADA	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
60	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN JUMA TAKKAR DUSUN 4-5 DESA BINTANG MERSADA	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
61	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	PERBAIKAN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN HALIBEMA KELURAHAN SIDIANGKAT	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
62	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pembangunan Jalan	PERKERASAN JALAN PARHUTA HUTAANDI DESA PARBULUAN I DUSUN 2	KECAMATAN PARBULUAN, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
63	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pembangunan SPALD-S Permukiman	PEMBANGUNAN BRONJONG DI DESA KALANG SIMBARA	KECAMATAN SIDKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
64	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	PEMBANGUNAN PIPA AIR MINUM DI DESA KALANG SIMBARA	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
65	TONY JUNI PUTRA LUMBAN GAOL	Pembangunan SPALD-S Permukiman	PEBANGUNAN BRONJONG DI DESA KALANG SIMBARA	KECAMATAN SIDIKALANG, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
66	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Jalan	PEMBUKAAN JALAN DUSUN II KELURAHAN PEGAGAN JULU I	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
67	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN SITALMAK - SIMPANG3	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
68	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pemeliharaan Jalan	PENINGKATAN JALAN SIMPANG 3 - LAE KOMBIH	KECAMATAN SUMBUL , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
69	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	PEMBANGUNAN IRIGASI SITALMAK KELURAHAN PEGAGAN JULU I	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
70	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan protokol di kecamatan Sempat Nempu	Jalan Protokol Kecamatan Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
71	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan longsor di Desa Juma Siulok	Desa Juma Siulok , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
72	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan desa soban	Desa Soban Kec.Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
73	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Jalan	PENINGKTAN JALAN BANDAR HUTA USANG - KANTOR CAMAT PEGAGAN HILIR	KECAMATAN PEGAGAN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
74	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pembangunan pagar sekolah SD 036565 Lumban sinambel	Desa Lumban Sinambel Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
75	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN DESA ONAN LAMA KUTA USANG	KECAMATAN PEGAGAGN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
76	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Pembangunan poskesdes di perumahan grand paviliun Antuang	Perumahan grand paviliun Antuang , Kab. Dairi	Dinas Kesehatan
77	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan dan pengaspalan jalan desa jumantuang ke desa tualang	Desa jumantuang ke desa tualang Siempat Nempu , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
78	SABAM SIBARANI, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan Dusun IV desa gomit	DUSUN IV Desa gomit Siempat nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
79	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Sekolah	PEMBENTUKAN SEKOLAH SATU ATAP SD/SMP DI DESA PANGGURUAN	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
80	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN DARI PEGAGAN JULU III MENUJU DODLOK TOLONG	KEV=CAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
81	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	PEMELIHARAAN IRIGASI DARI BENDUNGAN KE JUMATOSI	PEGAGAGN JULU V KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
82	NURLINDA ANGKAT, SE	Pembangunan Jalan Pertanian	Pengaspalan jalan usah tani dusun Pulo gajah juma rindang menuju Kuta mbelang sampai ke kantor desa karing	Desa karing kecamatan berampu, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
83	NURLINDA ANGKAT, SE	Pembangunan Dam Parit	Pembangunan parit semen permukiman dusun Kuta maha desa Sosor lottung	Dusun Kuta maha desa Sosor lottung, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
84	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Dam Parit	PEMBANGUNA PARIT SEMEN DI SD 034799 DOLOK TOLONG	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
85	NURLINDA ANGKAT, SE	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan desa sempung polling Samapi ke dusun si dumpe takal lae	Desa sempung polling sampai desa sidumpe takal lae, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
86	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pembangunan Jalan Pertanian	PEMBUKAAN JALAN PERTANIAN DI DUSUN LUMBAN SIMBOLON	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
87	NURLINDA ANGKAT, SE	Pengadaan alat dan mesin pertanian	Pengadaan alsintan bagi kelompok tani	Kecamatan berampu,Lae parira,silima pungga2, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
88	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN DUSUN III JUMA MANGKAT - DESA PEGAGAN JULU VII	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
89	NURLINDA ANGKAT, SE	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari desa simpang karing Kuta mbelang batu kapur	Kecamatan berampu , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
90	NURLINDA ANGKAT, SE	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Pembangunan irigasi di desa Bantun kerbo	Desa Bantun kerbo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
91	NURLINDA ANGKAT, SE	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dari simpang Lae parira sampai ke silima pungga2 pungga	Lae parira sampai silima pungga2 pungga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
92	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	PEMELIHARAAN IRIGASI GAPONSI DUSUN III , DESA PEGAGAN JULU X	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
93	NAHASON LUMBAN GAOL, S.E	Pemeliharaan Jalan	PEMELIHARAAN JALAN DUSUN JUMATUKKE -DUSUN SILAMONCIK I DESA SIMANDUMA	KECAMATAN PEGAGAN HILIR, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
94	ROMY FRIDA MARIANI	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan Pertanian Dusun VI Lae Markeppeas	Desa Lae hitam Siempat Nempu hilir, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
95	ROMY FRIDA MARIANI	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan pertanian Dusun VIII Labah Raja	Desa Lae hitam Siempat nempu hilir, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
96	ROMY FRIDA MARIANI	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pembangunan tower /jaringan internet untuk sekolah maupun desa	Desa Lae Itam kecamatan Siempat Nempu hilir , Kab. Dairi	Dinas Pendidikan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
97	ROMY FRIDA MARIANI	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan simpang 3 juma teguh	Desa juma teguh Siempat nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
98	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan Kuta buluh ke dusun lau belin	Tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
99	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan Kuta buluh lau primbon	Kecamatan Tanah Pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
100	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan desa liren ke desa kempawa	Tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
101	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan dusun lau patundal desa pamah	Tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
102	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan antara pasir mbellang menuju pasir tengah	Tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
103	HENRA J SINAGA, S.IP	Optimalisasi Saluran Drainase	Pemeliharaan dan Pembersihan seluruh saluran Parit Drainase seputaran Kota Sidikalang	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
104	HENRA J SINAGA, S.IP	Pengadaan alat kesehatan	Penambahan Pengangkuan Truk Sampah Terkhusus Untuk Melayani Kebutuhan di Kota Sidikalang	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Kesehatan
105	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Rehabilitasi toilet sekolah	Perbaikan kamar mandi sekolah SD Inpres Kuta buluh	Tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
106	HENRA J SINAGA, S.IP	Fasilitasi akses permodalan/pembiayaan	Penggunaan Sistem Non Tunai dalam pemungutan iuran kebersihan	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
107	HENDRA KRISTA TARIGAN, S.Kep	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan renun	Kecamatan tanah pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
108	HENRA J SINAGA, S.IP	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan Parit di Dusun Paroki Desa Parbuluan VI	Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
109	M. SYAHDANI PUTRA PARDOSI, S.H.	Pembangunan Jalan	Perbaikan Jalan Dari Parongil menuju Desa Tuntung Batu	Desa Parongil, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
110	M. SYAHDANI PUTRA PARDOSI, S.H.	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Hotmix Menuju Desa Pasi	Desa Pasi, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
111	M. SYAHDANI PUTRA PARDOSI, S.H.	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan Desa Lumban Sihite menuju Desa Pandiangan	Kec. Lae Parira, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
112	M. SYAHDANI PUTRA PARDOSI, S.H.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Perbaikan Saluran Irigasi	Desa Pasi, Kec. Berampu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
113	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan jurusan kedeberrek ke lau pangguh	Kecamatan tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
114	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan dari launpangguh ke Sabungan	Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
115	M. SYAHDANI PUTRA PARDOSI, S.H.	Pengembangan Sentra Industri	Menyusun Perda Agar Seluruh ASN memakai Baju Adat Pakpak sekali Seminggu untuk Menjaga dan Melestarikan Budaya Pakpak	Kab. Dairi, Kab. Dairi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
116	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan gunung Sitember ke gundaling	Gunung sitember, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
117	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan kota gunung sitember	Gunung sitember, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
118	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan kedeberrek - bertungen julu-pandan-kabanjulu	Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
119	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan desa palding jaya sumbul-ujung parira -rindang desa Sumbul tengah	Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
120	CARLES TAMBA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan jurusan pandan -ujung - soban	Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
121	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Kurangnya sarana dan prasarana SMP Swasta Muhammadiyah 51 Sidikalang	SMP Swasta Muhammadiyah 51, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
122	CARLES TAMBA	Pengadaan mobilier sekolah	Pengadaan mobiler sekolah SMP Negeri 2 Tigalingga,SMP Negri 3 Tigalingga ,SMP negri 1 gunung sitember	Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
123	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan Tombak Baru Dusun III	Parbuluan, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
124	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Perbaikan saluran irigasi persawahan dusun II Kuta rimbaru	Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
125	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan Dusun IV desa sitinjo	Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
126	HALVENSIUS TONDANG	Pembangunan Jalan	Lanjutkan Pengaspalan Tanjung Beringin I menuju Barisan Nauli	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
127	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan perumahan rorinata III	Bintang hulu , Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
128	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan laubsirambon ke Rimo bunga	Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
129	HALVENSIUS TONDANG	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Periodik Jalan Desa Barisan Nauli	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
130	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	PERBAIKAN JALAN DESA PARGAMBIRAN DUSUN II	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
131	HALVENSIUS TONDANG	Pemeliharaan Jalan	Lanjutkan Pengaspalan Desa Perjuangan SD Lae Pinaga	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
132	HALVENSIUS TONDANG	Pembangunan Jalan	Lanjutkan Pengaspalan Desa Pergambiran ke Dusun Barisan Samosir	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
133	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PENGADAAN TIANG LISTRIK DI JALAN SI NOPPA ,PEGAGAN JULU I	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
134	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PERBAIKAN LAMPU JALAN UTAMA KOTA SUMBUL	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
135	HALVENSIUS TONDANG	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pembangunan Pagar SD 035937 Desa Tanjung Beringin I	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
136	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Pembangunan Jalan Pertanian	PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI DUSUN PARBUAHAN PEGAGAN JULU VI	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
137	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	PENGADAAN BEDAH RUMAH DI PEGAGAN JULUVIII	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
138	AGUSTO BENYAMIN SAMOSIR, S.Sos	Pembangunan Jalan	PERBAIKAN JALAN SINOPPA PEGAGAN JULU I	KECAMATAN SUMBUL, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
139	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Perbaikan/Pemugaran Kolam Renang Stadion Sidikalang	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
140	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Halaman Stadion Sidikalang	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
141	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan Lestari	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
142	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan Dam Parit	Pembangunan Parit Semen di Dusun III Desa Parbuluan I	Kec. Parbuluan, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
143	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Di Dusun 4 Desa Parbuluan I	Parbuluan I, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
144	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan dan Saluran Drainase di Jalan R. Dj Bako Desa Sitinjo II	Kec. Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
145	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Pembangunan Jalan	Melanjutkan Pembangunan Jalan Dusun II Kutarimbaru Desa Sitinjo Menuju Komplek Taman Wisata Iman Sitinjo	Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
146	BATARA ARMIN S. SINAGA, ST	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Perbaikan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Persawahan Dusun II, Desa Sitnjo Induk Ke. Sitinjo	Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
147	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Penembokan SMP N Samping Gerja HKI Menuju SMP Kanopan	Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pendidikan
148	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Optimalisasi Saluran Drainase	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Menuju Desa Gomit	Kec. Siempat Nampu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
149	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan Kedesa Jumantuang	Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
150	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pembangunan Jalan	Lanjutkan Pengaspalan Desa Lumban Sinaga	Kec Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
151	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Hotmix Ke Tangkahan Dolok Siraut	Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
152	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Sambungan Jalan Ke Juma Togu	Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
153	HENDRA CHRISTIAN P. TAMBUNAN	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Penyambungan Jalan Pemotongan Dari Lae Parira ke Juma Togu	Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
154	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Pembangunan Jalan	Kualitas Jalan Rusak	Lalan AMD Dusun 2 menuju Dusun 3 Bintang Mersada, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
155	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Optimalisasi Saluran Drainase	Terjadi longsor pada dinding tanah pada saluran pembuangan	Sekitar Gedung MTQ di Dusun 1 Bintang Mersada, Kec Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
156	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Pembangunan Jalan Pertanian	Kurangnya akses pertanian	Lingkungan 2 Kelurahan Sidiangkat, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
157	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Pembangunan Jalan	Kualitas jalan rusak	Jalan Kuta Padang Lingkungan 2 Kelurahan Sidiangkat, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
158	ABDUL GAFUR SIMATUPANG, S.Pd.I	Pengadaan Calon Induk Ternak	Peningkatan usaha tani	Kelurahan Sidiangkat, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
159	JOEL SIMANULLANG, S.Sos	Pembangunan Jalan Pertanian	akses pertanian yg kurang baik akibat kualitas jalan dan adanya longsoran tanah	Jalan Saroha Kelurahan Kuta Gambir, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
160	JOEL SIMANULLANG, S.Sos	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Bangunan Pustu rusak	Pustu Desa Kalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Kesehatan
161	JOEL SIMANULLANG, S.Sos	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Jalan Air Bersih Desa Kalang, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
162	JOEL SIMANULLANG, S.Sos	Pelatihan dan Pendampingan UMKM	Peningkatan Dana Pembinaan Atlit Dairi	Dinas Pemuda dan Olahraga, Kab. Dairi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
					Usaha Kecil dan Menengah
163	RADE PANDAPOTAN SIMAMORA	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Jalan Tuntung Batu, Desa Bongkaras, Kec. Silima Pungga-pungga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
164	RADE PANDAPOTAN SIMAMORA	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Jalan lingkungan desa sempung menuju desa pandiangan, Kec. Lae Parira, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
165	RADE PANDAPOTAN SIMAMORA	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	Tidak ada akses air minum	Desa Gomit, Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
166	RASIDEN DAMANIK, SE	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Jalan sukandebi Link, Bertungen Jehe I-Dusun Bertungen Jehe II, Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
167	RASIDEN DAMANIK, SE	Pembangunan Jalan Pertanian	akses pertanian yang sulit	Dusun Pertumbungen menuju Lumur Desa Sarintonu, Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
168	RASIDEN DAMANIK, SE	Pembangunan Jembatan	Akses tidak ada	Jembatan gantung (Rambingan kepar) Desa Lau Lebah, Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
169	RASIDEN DAMANIK, SE	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Dusun Kinangkong, Desa Pamah Kec Tanah Pinem, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
170	RASIDEN DAMANIK, SE	Pemeliharaan Jalan	Kualitas jalan rusak	Desa Lau Kersik, Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
171	CIPTA KARO KARO	Pemeliharaan Jalan	PENGASPALAN JALAN DARI DUSUN KEDENBEREK KE DESA BERTUNGEN JULU	KECAMATAN TIGA LINGGA, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
172	MITRO LUMBAN BATU	Pembangunan Jalan	PENGASPALAN JALAN DUSUN BATU DONGKOL DESA SINAMPANG	KECAMATAN SI EMPAT NEMPU, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
173	IDUL FITRI TARIGAN	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan dari Gunungsayang ke Desa Sarintonu	Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
174	IDUL FITRI TARIGAN	Rehabilitasi Saluran Drainase	Pembangunan Parit Saluran	Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
175	IDUL FITRI TARIGAN	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Pengadaan Lampu Jalan	Kec. Tigalingga, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
176	VERI ANTONI SIDEBANG	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Jalan Dusun Sitio-tio sampai Perbatasan Kab. Samosir	Kec. Sailalahi, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
177	VERI ANTONI SIDEBANG	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Penembokan Pinggir sungai (Binagan somaila)	Kec. Silahisabungan, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
178	VERI ANTONI SIDEBANG	Pemeliharaan Jalan	Pembenahaan disepanjang jalan lae pondom (Akibat Longsorpada bulan Februari tahun 2025) di Desa Silalahi I	Kec. Silahisabungan, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
179	FERRY MARLINTON SINAGA, S.M	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Hotmix dari SMP 2 Tanjung Beringin ke Dolok Tolong	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
180	FERRY MARLINTON SINAGA, S.M	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Penambahan Lampu Jalan di Desa Tanjung Beringin	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
181	FERRY MARLINTON SINAGA, S.M	Pembangunan Jalan Pertanian	Pembangunan Jalan ke Perkebunan Warga di simpang Wisma Horas Tanjung Beringin	Kec. Sumbul, Kab. Dairi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
182	JOGIA SOPIPOT SIMARMATA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Jalan Batu Kapur gang Horas Kelurahan Huta Gambir	Kec. Sidikalang, Kab. Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027

DAFTAR USULAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2027
DI KECAMATAN

Daftar Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2027 di Kecamatan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
1	EDWARD SORIANTO SIHOMBING	Pembangunan Jalan	Jalan Kabupaten Huta Juhar - Lae Tanggiang, mulai dari Dusun IV Parbuahan sampai dengan Dusun VI Lae Tanggiang rusak parah dan diperlukan segera perbaikan dengan lancarnya mobilitas masyarakat	Dusun IV Parbuahan s.d Dusun VI Lae Tanggiang, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	EDWARD SORIANTO SIHOMBING	Pemeliharaan Jalan	Terdapat bahu jalan yang tidak terawat dan tidak mempunyai saluran air (parit) yang mengakibatkan ketika musim penghujan air meluap ke jalan.	Dusun III Huta Juhar - Dusun IV Lae Tanggiang, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	MAWARDI TUMANGGER	Pembangunan Jalan Pertanian	Terhambatnya mobilitas alat mesin pertanian (alsintan), pengangkutan sarana produksi dan distribusi hasil panen	Jalan pertanian antara puncak menuju Kutarimbaru, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidiangkat	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	POLTAK LINGGA	Pembangunan Jalan	Jalan penghubung Desa sepanjang 300 km rusak parah	Desa Pegagan Julu VIII.Kecamatan Sumbul Kab.Dairi, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VIII	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	POLTAK LINGGA	Pembangunan Dam Parit	pembangunan parit semen sepanjang 1 km	Desa Pegagan Julu VIII.Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VIII	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
6	MAWARDI TUMANGGER	Pemeliharaan Jalan	Terhambatnya mobilitas akibat jalan yang rusak dan berlubang	Kuta Rimbaru Lingkungan VII, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidiangkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	MAWARDI TUMANGGER	Pemeliharaan Jalan	Terhambatnya mobilitas akibat jalan yang rusak dan berlubang	Kuta Nadeak Lingkungan IV, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidiangkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	FRISKA PANGARIBUAN	Pembangunan Jalan	JALAN RUSAK PARAH	pEGAGAN JULU X, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu X	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	FRISKA PANGARIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengangkutan bahan pertanian sulit di angkut,,sekaligus jalan penghubung yang dilalui anak sekolah menuju SMA Negeri Tiga baru, yang dilalui setiap hari.	Dusun 3 Pegagan Julu X, Menuju desa Pegagan Julu VIII kecamatan Sumbul, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu X	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
10	HISAR MATANARI	Pembangunan Jalan Pertanian	Pengaspalan jalan Pertanian sepanjang kurang lebih 2 km berhubung lokasi ini bisa menghubungkan dua dusun dan merupakan areal perladangan	Dusun V Jumala Menuju Dusun I Gunung Maria, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu II	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
11	HISAR MATANARI	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan mulai dari Kelurahan/ Rangkom menuju Dusun III Sikunihan I jalan ini sudah rusak dan sulit dilalui kendaraan.	Dusun III Sikunihan I, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	FRISKA PANGARIBUAN	Pembangunan Jalan	jalan sangat sulit dilalui apabila warga hendak pergi ke kecamatan sumbul	Dusun 3 (lae garut) menuju desa pegagan Julu IX sekaligus ke kecamatan Sumbul, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu X	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	PATAR NAINGGOLAN	Pembangunan Jalan	jalan yang rusak sehingga menggangu aktifitas warga setiap hari	Desa Pegagan Julu III, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu III	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	NOVLENTINA PASI	Pembangunan Jalan	Jalan belum ada menuju ke mesjid (fasilitas publik) dan perumahan warga sepanjang 150 meter	Jl. Air Bersih Gg. Mesjid Insyiriah Lingkungan IX, Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	NOVLENTINA PASI	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak sepanjang 100 meter	Jl. Mekar Lingkungan V, Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	NOVLENTINA PASI	Rehabilitasi Saluran Drainase	Drainase yang rusak sepanjang 100 meter	Jl. Empat Lima, Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	PATAR NAINGGOLAN	Pembangunan Dam Parit	parit yang belum memadai di sepanjang jalan yang ada di desa pegagan julu III	desa pegagan julu III, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu III	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	JUARA PURBA	Pembangunan Jalan	Lanjutan Pengaspalan Jalan Simondor Ondor Menuju SD Sipali Pali Volime 800 meter	Dusun VI Simondor Ondor, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VII	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	SARIDAYAN MALAU	Pembangunan Jalan	Jalan Sekolah SD Negeri Barisan Nauli Rusak sepanjang kurang lebih 200 m di Dusun II Sindoro	Dusun II Sindoro, Kab. Dairi	Sumbul	Barisan Nauli	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	JUARA PURBA	Pembangunan Jalan	lanjutan Pembangunan jalan hotmus parsaoran menuju lae tanggiang Volume 5000 Meter	Dusun VII Parsaoran Menuju Dusun VIII Lae Tanggiang, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu VII	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
21	SARIDAYAN MALAU	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan Utama Dusun II Sindoro menuju Dusun III Aek Nauli sudah Rusak sepanjang kuramng lebih 500 m	Dusun II Sindoro menuju Dusun III Aek Nauli, Kab. Dairi	Sumbul	Barisan Nauli	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	OJAHAN GIRSANG	Pembangunan Jalan Pertanian	Pembangunan bronjong untuk menahan badan jalan pertanian yang longsor 2 titik dengan ukuran - p = 20 m, t=15 m dan p=15 m, t= 15 m. (jika dibiarkan lebih lama memungkinkan badan jalan longsor semua)	ujung baru, dusun setia, Kab. Dairi	Sumbul	Tanjung Beringin I	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
23	HEBRON PINTUBATU	Optimalisasi Saluran Drainase	Pembangunan parit semen dari jalan simpang 4 menuju SDN 034799 dolok tolong sepanjang 800 meter	Dolok tolong, Kab. Dairi	Sumbul	Dolok Tolong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	OJAHAN GIRSANG	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan penghubung desa Tanjung Beringin I menuju desa Dolok Tolong sepanjang 1.000 m	dusun aman, Kab. Dairi	Sumbul	Tanjung Beringin I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	HEBRON PINTUBATU	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan dari batas desa dolok tolong dan tanjung berimgin menuju batas desa dolok tolong dan desa pegagan julu VI	Dolok tolong, Kab. Dairi	Sumbul	Dolok Tolong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	ALEXANDER SINAGA	Optimalisasi Saluran Drainase	Genangan air meluap ke jalan,	Dusun 2 Tumpak debata Desa pegagan Julu IV, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IV	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	EDWARD KENNEDY SIMANJORANG	Pembangunan Jalan	Jalan menuju desa Dolok Tolong sepanjang 1.800 meter sudah sangat rusak dan merupakan jalan yang sangat penting untuk masyarakat desa Tanjung Beringin dan masyarakat desa Dolok Tolong.	Tanjung Beringin, Dusun III, Kab. Dairi	Sumbul	Tanjung Beringin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	ALEXANDER SINAGA	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak parah sepanjang 3 km dari dusun 2 ke dusun 3 desa Pegagan Julu IV	Duaun 2 ke dusun 3, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IV	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	IRUAN SAGALA	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak Parah dan tidak layak dilalui oleh masyarakat	Dusun I (Satu), Kab. Dairi	Sumbul	Pargambiran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
30	EDWARD KENNEDY SIMANJORANG	Pemeliharaan Jalan	Jalan menuju SMP Negeri 2 Sumbul sudah rusak parah, dan jalan ini juga sangat penting bagi masyarakat menuju lahan pertanian sepanjang 200m	Tanjung Beringin, Dusun I, Kab. Dairi	Sumbul	Tanjung Beringin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
31	IRUAN SAGALA	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak Parah dan tidak layak di lalaui masyarakat	Dusun III Menuju Dusun IV, Kab. Dairi	Sumbul	Pargambiran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
32	Lasner Sinurat	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SMP 3 Kecamatan Sumbul	Lingkungan 5, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
33	Lasner Sinurat	Pembangunan Jalan	Pembangunan Gang Kebakaran di areal pemukiman warga di lingkungan 1	Lingkungan 1, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
34	Lasner Sinurat	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SMP Negeri 3 Kecamatan Sumbul	Lingkungan 5, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
35	Lasner Sinurat	Pembangunan Jalan	Pembuatan Gang Kebakaran di areal pemukiman warga di lingkungan 1	Lingkungan 1, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36	AGUSTINA SILABAN	Pembangunan Jalan	Rusak berat	Dusun 1, Kab. Dairi	Sumbul	Sileuh-leuh Parsaoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
37	SADARWIN MATANARI	Pembangunan Jalan	pengaspalan jalan ulang Parnantian-Buluh Ujung sepanjang lebih kurang 2,5 km	Parnantian-Buluh Ujung, Kab. Dairi	Sumbul	Kuta Gugung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38	SADARWIN MATANARI	Pembangunan Jalan	TPT sepanjang lebih kurang 300 M	Singgodang, Kab. Dairi	Sumbul	Kuta Gugung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
39	SABAR SITUMORANG	Pembangunan Jalan	1. Pengaspalan jalan rusak huta juhar kesagala raja 2. Pengaspalan jalan rusak sisolu-solu kepoltak bintang	Desa Pegagan Julu V, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu V	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
40	HOTLER SIHOMBING	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan Dusun I lae pinagar menuju desa pegagan julu IV sepanjang 1200M	Dusun I lae pinagar Desa perjuangan, Kab. Dairi	Sumbul	Perjuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
41	HOTLER SIHOMBING	Pembangunan Jalan	Pengaspalan lanjutan jalan Dos ukur menuju Desa Pegagan Julu IV sepanjang 700M	Jl. Dos ukur Dusun IV Desa Perjuangan, Kab. Dairi	Sumbul	Perjuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
42	MUKSIN SINAGA	Pemeliharaan Jalan	"Jalan dari Desa Pangguruan menuju Desa Silau-lauh Parsaoran ini merupakan jalan yang selalu digunakan untuk para pedagang dari kabupaten dari sidikalang dan kecamatan sumbul untuk menuju Pajak pargambiran serta jalan alternatif penghubung jalan Lintas PLTA ,keadaan sekarang jalan tersebut sangat rusak parah dan banyak berlobang"	Desa Pangguruan Pangguruan, Kab. Dairi	Sumbul	Pangguruan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
43	ALADIN LINGGA	Pembangunan Dam Parit	Saluran parit tidak ada	Desa Pegagan Julu IX, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IX	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
44	ALADIN LINGGA	Pembangunan Jalan	Jalan banyak yang berlubang	Desa Pegagan julu IX, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IX	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
45	ALADIN LINGGA	Pembangunan Dam Parit	Parit tidak ada	desa pegagan julu IX, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IX	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
46	ALADIN LINGGA	Pembangunan Jalan	Banyak jalan yang berlubang	desa pegagan julu IX, Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu IX	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47	NOVLENTINA PASI	Rehabilitasi Saluran Drainase	Banjir diakibatkan saluran drainase yang tidak sesuai dengan debit air	Jl. Dr. F.L Tobing (dari simpang Gg. Pelita sepanjang 200 meter) , Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	NOVLENTINA PASI	Rehabilitasi Saluran Drainase	Banjir diakibatkan saluran drainase yang tidak sesuai dengan debit air	Jl. Dr. F.L. Tobing (dari Bengkel Arkey sampai sepanjang 100 meter) , Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
49	NOVLENTINA PASI	Rehabilitasi Saluran Drainase	Banjir diakibatkan saluran drainase yang tidak sesuai dengan debit air	Jl. Ahmad Yani (simpang jl. mekar sampai pujasera sepanjang 250 meter), Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
50	ALADIN SINAGA	Pemeliharaan Jalan	JALAN RUSAK TOTAL	HUTA LAMA DUSUN III, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
51	ALADIN SINAGA	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	PNAMBAHAN PEMAANGAN TRAFO (KARNA MASYARAKAT SERING MENGELUH LISTRIK KURANG ARUS	LAE PANCUR DUSUN V, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52	ALADIN SINAGA	Pemeliharaan Jalan	JALAN RUSAK	JALAN KM3 DUSUN I LAE PINANG, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53	USWATUN BINTANG	Pembangunan Jalan	KARENA JALAN TSB RUSAK MENGAKIBATKAN 1.BANJIR SAMPAI MENGGENANGI HALAMAN WARGA 2.TERJADI GENANGAN AIR DI SEPANJANG JALAN YG BERLOBANG 3.SERING TERJADI KECELAKAAN 4.KENAIKAN ONGKOS TRANSPORTASI	JALAN JUMA TAKKAR (JALAN PROTOKOL PENGHUBUNG DESA BINTANG MERSADA DENGAN DESA BINTANG) ., Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Mersada	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
54	USWATUN BINTANG	Pembangunan Dam Parit	DIKARENAKAN TIDAK ADANYA PARET DI PINGGIR JALAN MENGAKIBATKAN HALAMAN WARGA SERING KEBANJIRAN SERTA JALAN TERGENANG AIR. SANGAT RAWAN TERJADINYA KECELAKAAN	DUSUN IV - DUSUN V (JALAN PROTOKOL MENUJU DESA BINTANG), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Mersada	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
55	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi jalan rusak berat	Jalan Pandu -Lingkungan IV (Lae Siramben), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
56	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan Rusak Berat (Usulan Hotmix)	Lingkungan IV (Rimobunga atas - Rimobunga bawah, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
57	Bintang	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Proses belajar mengajar di SD Inpres tidak nyaman karena tidak adanya pagar sekolah	Lingkungan I (Pancuran) SD Inpres Nomor 03595, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pendidikan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
58	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi jalan ke SD rusak berat	Lingkungan I (pancuran) SD Inpres No. 03595, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
59	Bintang	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Halaman SD Inpres rusak berat, perlu pembuatan paving block	Lingkungan I (Pancuran) SD Inpres No. 03595, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pendidikan
60	Bintang	Pembangunan Jalan	Menghubungkan jalan (pengaspalan jalan)	Lingkungan I (Barung-barung)-Lingkungan III (kuta Gerat), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
61	Bintang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Adanya Genangan Air perlu adanya parit semen	Sepanjang Jalan Pandu - Kalang Simbara, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
62	Bintang	Pembangunan Dam Parit	Tidak adanya saluran pembuangan air (gorong-gorong/bubusan)	Lingkungan I, II dan III, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
63	Bintang	Pembangunan Jalan	Kopndisi Jalan Rusak Berat (Pengaspalan)	Lingkungan III (Kuta Gerat), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
64	Bintang	Pembangunan Jalan Pertanian	Kondisi Jalan Tidak Layak	Lingkungan I (Barung Barung), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
65	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan Rusak Berat	Link. I-Desa Bintang (Juma Takkar), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
66	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan Rusak Berat	Lingk. III (Jalan Lae Sampula - Kalang Simbara), Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
67	Bintang	Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan Rusak Berat	Lingk. I-Lingk.II, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
68	Bintang	Pembangunan Jalan	Menghubungkan jalan (Pengaspalan)	Lingk. I - Desa Bintang Mersada, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
69	Bintang	Pembangunan Jalan	Tidak adanya tembok penahan longsor	Lingkungan I, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
70	Bintang	Pembangunan Jalan	Jalan TPU tidak layak	Lingkungan II, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
71	Bintang	Pembangunan Jalan	Jalan tidak layak perlu pengerasan	Lingkungan II, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
72	Bintang	Pembangunan Jalan	Tidak adanya tembok penahan longsor	Lingkungan IV Rimobunga atas -rimobunga bawah, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
73	Bintang	Pembangunan Jalan	Jalan rusak butuh pengaspalan	Lingkungan IV, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
74	MARHAEN LINGGA	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak parah sepanjang 400 m. longsor sepanjang 6 meter dan lebar 3 meter.	Lumban Situngkir, Desa Onan Lama, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Onan Lama	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
75	APRIL UJUNG	Pembangunan Jalan	Jalan berlubang lubang	Jalan batu kapur kelurahan kuta gambir , Kab. Dairi	Sidikalang	Kuta Gambir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
76	SUNTA TUTUR SIMORANGKIR	Pemeliharaan Jalan	Jalan Umum sudah rusak parah dan Rawan Longsor, dimana jalan tersebut merupakan aset jalan Kabupaten	Dusun I - Lae Malum Dusun V - Huta Baru Dusun III - Banjar Nauli, Kab. Dairi	Sidikalang	Belang Malum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
77	ANJAS UJUNG	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan menuju Kolam Renang Zwembad ± 200 M	Jl. Keluarga Berencana, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidikalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
78	ANJAS UJUNG	Rehabilitasi Saluran Drainase	Rehabilitasi Drainase di Jalan Trikora Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Sidikalang	Jl. Trikora, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidikalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
79	ANJAS UJUNG	Pembangunan Jalan	Perbaikan Parit antara Jalan Dalihan Natolu/Tapanuli di Lingkungan IX Kelurahan Sidikalang	Jl. Boang, Kab. Dairi	Sidikalang	Sidikalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
80	TETTY BR. PASARIBU	Optimalisasi Saluran Drainase	Rusaknya saluran Drainase yang mengakibatkan rubuhnya badan jalan dan dikhawtirkan apabila hujan deras akan memperparah kondisi serta mengakibatkan kemacetan jalan.	JL. SENTOSA (sekitaran sekolah methodist sidikalang), Kab. Dairi	Sidikalang	Kalang Simbara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
81	TETTY BR. PASARIBU	Optimalisasi Saluran Drainase	Perbaikan plat beton dua unit di jalan nusa indah perumnas kalang Simbara, dimana plat beton itu membuat parit tersumbat dan apabila hujan deras air masuk ke rumah warga sampai ketinggian 1/2 meter	Jl. Nusa Indah Perumnas, Dusun VI Desa Kalang Simbara, Kab. Dairi	Sidikalang	Kalang Simbara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
82	TETTY BR. PASARIBU	Pembangunan Jalan	longsornya badan jalan (sepanjang 30 M) penghubung Dusun 1 menuju ibu kota Kecamatan	JL. Barisan Kalang Simbara, Dusun 1 Desa Kalang Simbara, Kab. Dairi	Sidikalang	Kalang Simbara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
83	MARIHOT SITOHANG	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Belum tersedianya jaringan pipa air bersih yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga.	DUSUN II Lumban Togi Desa Parbuluan II , Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
84	MARIHOT SITOHANG	Pemeliharaan Jalan	Kondisi jalan kabupaten di Dusun 1 mengalami kerusakan (berlubang, retak, permukaan tidak rata).	Dusun I Lumban Nahot Desa Parbuluan II , Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
85	MARADEN SAGALA	Optimalisasi Saluran Drainase	Pembangunan bronjong Air sungai sepanjang 3 KM di dusun II Pangiringan	Dusun II Pangiringan, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan V	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
86	MARADEN SAGALA	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan menuju tempat tinggal masyarakat dusun IV Adian Padang sepanjang 1 Km	Dusun IV Adian Padang, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan V	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
87	MARADEN SAGALA	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Pemasangan Lampu Jalan Di sepanjang Jalan Raya Desa Parbuluan V Sebanyak 20 Titik.	Jalan Raya Desa Parbuluan V, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan V	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
88	NOVLENTINA PASI	Rehabilitasi Saluran Drainase	banjir diakibatkan saluran drainase yang tidak sesuai dengan debit air	Jl. Ahmad Yani, simpang jalan runding (Eks Timbangan (sepanjang 150 meter), Kab. Dairi	Sidikalang	Batang Beruh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
89	GARANG SIHOMBING	Pembangunan Jalan	Jalan menuju Puskesmas Huta Rakyat rusak	Jl. Persada , Kab. Dairi	Sidikalang	Huta Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
90	Bintang	Pembangunan Jalan	Jalan TPU tidak layak butuh pengaspalan	Lingkungan III Bintang Hulu, Kab. Dairi	Sidikalang	Bintang Hulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
91	JAPIRIN SIHOTANG	Pembangunan Jalan	Permohonan Pengaspalan Jalan Bangun 2 Tobbak menuju Huta Silaban +-500m.	Desa Bangun Dusun 3., Kab. Dairi	Parbuluan	Bangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
92	JAPIRIN SIHOTANG	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Permohonan Benih, Herbisida dan Obat2n serta Alsintan utk Kelompok Tani.	Desa Bangun, Kab. Dairi	Parbuluan	Bangun	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
93	MARADEN SAGALA	Pemeliharaan Jembatan	Perbaikan jembatan yang rusak di Dusun I Pasaribu sepanjang 10 meter	Dusun I Pasaribu , Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan V	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
94	RAMLI SIHITE	Pemeliharaan Jalan	pengaspalan jalan dan parit semen dusun III (jln makmur) menuju huta sitanggang sepanjang 1 km (akses jalan yang rusak dan menghambat hasil panen petani)	Dusun III, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan IV	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
95	RAMLI SIHITE	Pemeliharaan Jalan	pengaspalan jalan dusun IV menuju PT. MDH sepanjang 2 km (akses jalan tidak layak dilalui dan menghambat hasil panen petani)	Dusun IV, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan IV	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
96	PARASIAN NADEAK	Pembangunan Jalan	Jalan trak menuju kantor desa tersebut sering dilalui oleh masyarakat bila ingin mengurus admisnistrasi kependudukan, dan untuk menuju jalan perladangan masyarakat	Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
97	PARASIAN NADEAK	Pembangunan Jalan	Jalan Perladangan masyarakat dan jalan lintas parlambuhan menuju parbuluan IV, yang sering dilalui oleh masyarakat untuk mengeluarkan hasil panen yang menjadi terhambat.	Dusun III, Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
98	TUMPAK SITOHANG	Optimalisasi Saluran Drainase	Banyaknya pembuangan langsung ke jalan kabupaten, menyebadkan jalan tergenang dan mempercepat kerusakan jalan jadi diperlukan pembangunan saluran drainase dari jalan protocol menuju lae hole 2 sepanjang 5 km	Dusun II, dusun III, Dusun V, Kab. Dairi	Parbuluan	Lae Hole	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
99	JALIMA SIBORO	Optimalisasi Saluran Drainase	Drainase di jalan kabupaten di dusun I sepanjang 300 m sudah rusak dan perlu adanya perbaikan karena aliran air	Dusun I Desa Lae Hole I, Kab. Dairi	Parbuluan	Lae Hole I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
			sepanjang jalan sudah merusak sisi jalan yang mengakibatkan jalan longsor				
100	TUMPAK SITOHANG	Pemeliharaan Jalan	Jalan protocol menuju SMK N 1 Parbuluan sudah hampir longsor, jadi perlu pembangunan bronjong, sepanjang 50 m lebar 20 meter	Dusun II, Kab. Dairi	Parbuluan	Lae Hole	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
101	JALIMA SIBORO	Pemeliharaan Jalan	Jalan sepanjang Dusun I ,Dusun II, Dusun III (Desa Lae Hole I) kec. Parbuluan sudah rusak parah dan perlu adanya perbaikan ulang karena sudah mengganggu aktifitas masyarakat dan menghambat perekonomian seluruh masyarakat	Lae Hole I, Kab. Dairi	Parbuluan	Lae Hole I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
102	RANTO PANDAPOTAN A. NABABAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Longsor areal pemukiman warga(bantaran sungai lae nuaha	JL.Tirtanadi (belakang rumah penduduk) bantaran sungai lae nuaha, Kab. Dairi	Sidikalang	Kalang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
103	RANTO PANDAPOTAN A. NABABAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Longsor di areal pemukiman warga (bantaran sungai lae nuaha)	Dusun 6 JL.Mandiri (areal pemukiman warga) bantaran sungai lae nuaha, Kab. Dairi	Sidikalang	Kalang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
104	MARUDUT MAIBANG	Pembangunan Jalan	Jalan rusak parah dan berlobang. Jalan utama yang digunakan sebagian besar masyarakat dan anak sekolah.	Jalan Dusun Laksa menuju Dusun Langga Suka, Desa Laksa., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
105	MARUDUT MAIBANG	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Kertersediaan air bersih di Dusun Langga Suka, Desa Laksa sulit di dapatkan.	Dusun Langga Suka, Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
106	MARUDUT MAIBANG	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Kertersediaan air bersih di Dusun Karebaren, Desa Laksa sulit di dapatkan.	Dusun Karebaren, Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
107	MARUDUT MAIBANG	Pengadaan mobilier sekolah	Gapura di Sekolah SD N No.030327 Laksa sudah tidak layak dan sudah rusak	Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Pendidikan
108	MARUDUT MAIBANG	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni.	Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
109	MARUDUT MAIBANG	Jaminan kesehatan masyarakat	Pemberian gizi untuk ibu hamil dan BALITA.	Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Kesehatan
110	MARUDUT MAIBANG	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Penyediaan bak penampungan air di PUSTU dan pengadaan pagar PUSTU	Desa Laksa, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi., Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Laksa	Dinas Kesehatan
111	OJAK MANIK	Pembangunan Jalan Pertanian	Penyisipan Jalan Dusun Kuta Usang menuju Gunung Mas Sepanjang 1 KM. Penyisipan Jalan Pertanian ini menghubungkan 2 Dusun, diantaranya Dusun Kuta Usang menuju Dusun Gunung Mas, ini adalah satu-satunya jalan menuju lahan Masyarakat, dan banyak anak sekolah juga melewati jalan ini untuk menuju sekolah mereka yaitu SD dan SMP N1 Pegagan Hlir yang berada di Desa Lingga Raja II	Desa Kuta Usang, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Kuta Usang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
112	OJAK MANIK	Pemeliharaan Jalan	Penyisipan Jalan Sekolah Sepanjang 250 M. Jalan ini sudah sangat rusak parah dan berbahaya bagi anak sekolah yang membawa kendaraan	Dusun Komplek Inpres Desa Kuta Usang, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Kuta Usang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
113	OJAK MANIK	Pemeliharaan Jalan	Perkerasan Jalan Dusun Komplek Inpres menuju Perladangan Situkkik Dusun Komplek Inpres. Jalan ini sudah sangat tidak memadai lagi karena masih jalan Tanah, apalagi musim hujan petani sangat kewalahan dalam pengangkutan hasil bumi mereka	Dusun Komplek Inpres Desa Kuta Usang, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Kuta Usang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
114	OLIHIN KUDADIRI, SH	Pemeliharaan Jalan	Jalan tersebut adalah jalan penghubung antar Dusun III Lae Sirambon dengan Dusun I Payung Raja, yang dimana segala aktivitas warga selalu melalui/melewati jalan tersebut, anak-anak sekolah juga menjadi sangat terganggu saat berangkat kesekolah terutama saat musim hujan. Adapun jumlah KK yang melalui jalan	Jalan Lae Sirambon Dusun I Menuju Dusun III Lae Sirambon, Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi, Kab. Dairi	Sitinjo	Sitinjo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
			tersebut adalah 152 KK, atas dasar itulah kami mengajukan permohonan rehab lapisan penetrasi 700 M				
115	HAPOSAN BANCIN, S.AP	Pembangunan Dam Parit	Apabila Hujan Deras Sering Terjadinya Banjir Kerena Tidak Adanya Drainase Atau Parit Tepat Di Depan Pekarangan Kantor Puskesmas Pembantu Panji Dabutar Lae Mbulan Lingkungan III Kelurahan Panji Dabutar Sehingga Mengakibatkan Masyarakat Yang Ingin Berobat Atau Memeriksa Kesehatannya Ke Puskesmas Menjadi Susah Dan Terkendala Menuju Akses Ketempat Tersebut.	Lingkungan III Kelurahan Panji Dabutar, Kab. Dairi, Kab. Dairi	Sitinjo	Panji Dabutar	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
116	UMUM SUKARJO	Pemeliharaan Jalan	Jalan Ini merupakan akses yang menghubungkan Desa Sitinjo II dengan Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo Kondisi saat ini rusak ditandai dengan jalanan berlubang dimana kalau turun hujan menyebabkan genangan air sehingga susah menggangu mobilitas warga khususnya bagi warga yang hendak mengangkut hasil bumi dari perladangan.	Jalan Multi Panji BAKO Sitinjo II, Kab. Dairi	Sitinjo	Sitinjo II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
117	MELDA MANURUNG	Pemeliharaan Jalan	Rusak berat	Dusun I sampai dengan Dusun IV, 2.9061323271274486, 97.96455422771604, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Lae Rambong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
118	REKSON MARBUN	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Janji, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Janji	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
119	REKSON MARBUN	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pagar rusak	Desa Janji, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Janji	Dinas Pendidikan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
120	MARLIN MANALU	Rehabilitasi Saluran Drainase	Saluran Drainase sepanjang jalan protokol desa Adian Nangka sudah banyak yang sumbat, sehingga perlu adanya pemeliharaan sepanjang 3.000 Meter dengan biaya sekitar Rp. 200.000.000,-	Dusun I, II, III, IV, V, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Adian Nangka	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
121	TUPANG SIANTURI	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rumah masyarakat rusak	Desa Simungun, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Simungun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
122	MARLIN MANALU	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	PEKARANGAN / SEBAGIAN HALAMAN SD NEGERI O3O359 RAWAN LONGSOR, MURID MURID SERING BERMAIN MAIN DI AREA PEKARANGAN SEKOLAH, UNTUK ITU PERLU MEMBANGUN TEMBOK PENAHAN TANAH SEPANJANG 75 M DENGAN PERKIRAAN BIAYA RP 150.000.000,-	SD NEGERI 030359 LAE NABERU, DUSUN II, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Adian Nangka	Dinas Pendidikan
123	TUPANG SIANTURI	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Simungun Dusun V-VI, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Simungun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
124	JULFRI R.A BANJAR NAHOR	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan dusun Silamoncik 1 Menuju Juma tungke sepanjang 2000 Km	Dusun Silamoncik 1, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simanduma	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
125	SAMTA SEMBIRING	Pemeliharaan Jalan	jalan sulit dilalui masyarakat	pandan2.869532726923234, 98.21437012829075, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Pandan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
126	JULFRI R.A BANJAR NAHOR	Pemeliharaan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Barisan Menuju Dusun Binjara Sepanjang 600 Meter	Dusun Barisan, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simanduma	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
127	JULFRI R.A BANJAR NAHOR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Perbaikan Irigasi Galian Silinggarung Dan Galian Sipoga-poga Sepanjang 500 Meter	Dusun Simanduma Julu, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simanduma	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
128	WESLY LINGGA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan jalan Desa Mbinanga Menuju Desa laksa Sepanjang 1.000 M	Desa Mbinanga, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Mbinanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
129	WANTON PASARIBU	Pemeliharaan Jalan	jalan dusun II menuju juma padi	Tualang 2.869532726923234, 98.21437012829075, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Tualang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
130	HEHE RAYA SIHALOHO	Pembangunan Jembatan	akses penghubung jalan masyarakat	Dusun III Huta uruk, Kab. Dairi	Silahisabungan	Paropo I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
131	JULFRI R.A BANJAR NAHOR	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sekitar 30 Unit	Desa Simanduma, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simanduma	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
132	BENTUS MANALU	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Lae Sering, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Sering	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
133	WESLY LINGGA	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Akibat Mahalnya Harga Bibit di Kabupaten Dairi	Desa Mbinanga, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Mbinanga	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
134	WESLY LINGGA	Pengadaan alat dan mesin pertanian	Sulitnya Penyewaan Alat Pengolah Tanah (TRAKTOR) Di desa Mbinanga	Mbinanga, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Mbinanga	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
135	BENTUS MANALU	Pembangunan Jembatan	Gorong gorong rusak	Desa Lae Sering, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Sering	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
136	WESLY LINGGA	Pengadaan alat kesehatan	Kurangnya Alat Untuk Cek Kesehatan Seperti Alat Cek Darah,Timbangan Digital Untuk Bayi balita dan Alat Pengukur tinggi Badan	Mbinanga, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Mbinanga	Dinas Kesehatan
137	BERES SILABAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Irigasi belum ada	Desa Jambur Indonesia, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Jambur Indonesia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
138	ARDONIUS SIDEBANG	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan rabat jalan beton kanan kiri jalan	silalahi 1, Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
139	BERES SILABAN	Pembangunan Jembatan	Jembatan Rusak	Desa Jambur Indonesia, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Jambur Indonesia	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
140	PARGAULAN SIMBOLON	Pembangunan Jalan	Jalan Belum di aspal	Desa Lae Itam, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Itam	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
141	RONAL LUMBAN GAOL	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak berat	Desa Gunung Meriah, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Gunung Meriah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
142	PARGAULAN SIMBOLON	Pembangunan Jalan	Jalan Belum Diaspal / Rusak	Desa Lae Itam, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Itam	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
143	MARTIN MARBUN	Pembangunan Jalan	Jalan rusak	Desa Lae Markelang, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Markelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
144	WELKOM MALAU	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Pemagaran sekolah SDN nomor 034788	Desa Tanjung Saluksuk, Kec.Pegagan Hilir, Kab.Dairi, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Tanjung Saluksuk	Dinas Pendidikan
145	ARDONIUS SIDEBANG	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	pembuatan bak air, pendendapan dan penampungan air di sungai si bola huta	silalahi 1 , di sungai sibolahuta (parbiangsaan), Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
146	MARTIN MARBUN	Pembangunan Dam Parit	Parit jalan rusak	Desa Lae Markelang, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Markelang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
147	WELKOM MALAU	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun Sambungan Rumah	Pengadaan perpipaan air bersih untuk masyarakat Desa Tanjung Saluksuk	Desa Tanjung saluksuk, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Tanjung Saluksuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
148	WESLY LINGGA	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Jalan Yang Amblas Di Dusun Bukit Satu Desa Mbinanga Sepanjang 50 M	Desa Mbinanga, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Mbinanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
149	LAMHOT SIMBOLON	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Lae Haporas, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Haporas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
150	BELMAN SILALAHI	Pemeliharaan Jalan	pengaspalan jalan dan jambatan 1 km	silalahi II, si tio-tio, Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
151	LAMHOT SIMBOLON	Pemeliharaan Jembatan	Gorong gorong rusak	Desa Lae Haporas, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Haporas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
152	SARDI SITUNGKIR	Pemeliharaan Jalan	pengaspalan jalan 1.5 km	paropo, Kab. Dairi	Silahisabungan	Paropo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
153	RINTO PARDO SIMBOLON	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak Parah karena Aspal sudah terkelupas sehingga badan jalan berlobang dan saat hujan akan tergenang air.	Jalan Tigabaru ke SMK Negeri 1 Pegagan Hilir , Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
154	DARTO PARMAN TAMBA	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Pardomuan, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Pardomuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
155	DARTO PARMAN TAMBA	Pembangunan Jembatan	Gorong Gorong rusak	Desa Pardomuan, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Pardomuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
156	RINTO PARDO SIMBOLON	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak Parah, badan jalan berlobang dalam, dan saat hujan akan tergenang air. Parit semen tidak ada sehingga air mengalir dari badan jalan.	Jalan SMK sampe Dusun Pispis sepanjang 4 km, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
157	TUMPAL H. SIMBOLON	Pengadaan alat dan mesin pertanian	Peralatan Pendukung Pertanian tidak memadai	Desa Sopobutar, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Sopo Butar	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
158	RINTO PARDO SIMBOLON	Jaminan kesehatan masyarakat	Tidak tersedianya Lapangan Olahraga sehingga Masyarakat membutuhkan Pengadaan Lapangan Sepak bola dan sarana olahraga lainnya.	Desa Bandar Huta Usang , Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang	Dinas Kesehatan
159	TUMPAL H. SIMBOLON	Pembangunan Jalan Pertanian	Akses Pertanian Tidak Ada	Desa Sopobutar, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Sopo Butar	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
160	MARSANA SIMAMORA	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak berat	Dusun 3 menuju Dusun 5 Desa kuta tengah , Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Kuta Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
161	JOSEP JAMINTA SIRINGO RINGO	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Desa Lae Luhung, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Luhung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
162	RINTO PARDO SIMBOLON	Pengadaan alat dan mesin pertanian	Kelompok Tani membutuhkan Alsintan dikarenakan alat pertanian msh manual. Kelompok Tani ada 16 kelompok.	Tigabaru dan Pispis , Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
163	IIN NENCI F. LUMBAN TOBING	Pembangunan Jalan	Jalan dari desa Berampu menuju desa banjar toba dan paret semen rusak parah sehingga warga kesulitan berkendara	berampu, Kab. Dairi	Berampu	Banjar Toba	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
164	RINTO PARDO SIMBOLON	Pengadaan alat kesehatan	Pengadaan Alat kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan Masyarakat Dobbler, timbangan digital dan alat pengukur tensi	Tigabaru , Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bandar Huta Usang	Dinas Kesehatan
165	TONGGO BANJAR NAHOR	Pemeliharaan Jalan	Regap jalan kabupaten dusun 3 bukit lehh pj 300 meter	Bukit lehu, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bukit Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
166	TONGGO BANJAR NAHOR	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Pengadaan bibit jagung	Desa Bukit Tinggi, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Bukit Tinggi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
167	JOSEP JAMINTA SIRINGO RINGO	Pembangunan Jalan	Tembok Penahan Tanah untuk jalan tidak ada	Desa Lae Luhung, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hilir	Lae Luhung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
168	MASRAN BAKO	Pemeliharaan Jalan	lanjutan Hotmix Jalan Protokol Pasi-Berampu Jalan rusak dan banyak yang berlobang, apabila hujan deras jalan tersebut tergenang air dan lumpur sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.	Dusun I , Kab. Dairi	Berampu	Pasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
169	MASRAN BAKO	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Jalan Pasi - Banjartoba. Jalan Rusak Berat dan berlobang. apabila hujan deras jalan tersebut tergenang air dan lumpur. sehingga banyak masyarakat yang mengeluh saat melewati jalan tersebut dikarenakan sangat licin dan mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan.	Dusun II Tara , Kab. Dairi	Berampu	Pasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
170	SAHALA BOINER SITUMORANG	Pembangunan Jalan	badan jalan rusak akibat drinise/paret semen tidak ada	bakal julu 2.851769876138796 , Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Bakal Julu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
171	LUAT DARSON SIMANULLANG	Pembangunan Jalan	Jalan rusak parak, Susah untuk dilalui masyarakat untuk melakukan aktivitas setiap hari	Jalan Tigalingga Km 6 Dusun Tapindohara, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sungai Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
172	PARULIAN KUDADIRI	Pemeliharaan Jalan	jalan sudah rusak parah sehingga masyarakat susah mengakses hasil pertanian ,dan mengakibatkan masyarakat susah menuju akses ke kota	dusun II, Kab. Dairi	Sitinjo	Sitinjo I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
173	HOBBI CALCES ANGKAT	Pembangunan Dam Parit	Tidak Adanya Drainase	Dusun 3 sampai dengan dusun 5 , Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sipoltong	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
174	HOBBI CALCES ANGKAT	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Minimnya petani Coklat	Dusun 1 Sampai dengan Dusun 6, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sipoltong	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
175	LUAT DARSON SIMANULLANG	Pembangunan Jalan	Jalan rusak parah, susah dilalui oleh masyarakat untuk beraktifitas setiap hari	Jalan kuta tengah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi , Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sungai Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
176	LUAT DARSON SIMANULLANG	Pembangunan Jalan	jalan rusak parah, jalan sulit dilalui untuk aktivitas masyarakat setiap hari	jalan repelita-simonggal, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sungai Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
177	HOBBI CALCES ANGKAT	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak	Dusun I Samapi dengan Dusun 6, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sipoltong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
178	ALLIBER KALOKO	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Tidak adanya air bersih di dusun ll simartugan julu l dan dusun lll simartugan julu ll	Simartugan julu l, simartugan julu ll, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simartugan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
179	ALLIBER KALOKO	Pembangunan Jalan	Kondisi jalan kabupaten di dusun IV Kuta gerat menuju dusun dusun V Tanggarube rusak parah sepanjang 5 KMD	Dusun IV Kuta gerat - dusun Tanggarube, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Simartugan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
180	WASDRIN LUMBAN GAOL	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Jalan Pertanian Juma Taruan Menuju Huta Kalapa	Dusun II Barisan Pak-pak , Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Pangaribuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
181	SAHALA BOINER SITUMORANG	Pembangunan Jalan	Badan jalan rusak akibat drinise/ paret semen tidak ada	Bakal Julu, 2.8522842223837594, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Bakal Julu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
182	MUCHTAR PURBA	Pembangunan Jalan	perbaikan/pembangunan jalan hutasoit menuju panagaran	desa Berampu jalan Hutasoit menuju Pangaran , Kab. Dairi	Berampu	Berampu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
183	LESNI PURBA	Pemeliharaan Jembatan	jembatan penghubung desa sigambir-gambir dengan desa bakal julu yang rusak parah	sigambir gambir, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Sigambir-gambir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
184	IUS S SIBURIAN	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak dari Uruk gadong-kuta rahu sepanjang 2 Km	Uruk Gadong-Kuta Rahu , Kab. Dairi	Berampu	Karing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
185	IUS S SIBURIAN	Pemeliharaan Jalan	Perbaikan Jalan Rusak parah dari dusun uruk gadong menuju kuta rahu	Uruk Gadong-Kuta Rahu, Kab. Dairi	Berampu	Karing	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
186	RUDOLF BASTIAN SITANGGANG	Pemeliharaan Jalan	KERUSAKAN JALAN JALAN SATU SATUNYA MENUJU KECAMATAN ATAU KOTA YANG MENGAKIBATKAN BANYAKNYA KENDARAAN ANAK SEKOLAH YANG RUSAK DAN MENGHAMBAT KELANCARAN AKSES PENDISTRIBUSIAN HASIL TANI KELUAR DESA	Kebun Sibabi, Desa Lingga Raja II, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Lingga Raja II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
187	RUDOLF BASTIAN SITANGGANG	Pembangunan Dam Parit	kerusakan jalan yang diakibatkan air hujan lansung kejalanan karena tidak adanya parit	dusun kebun sibabi III, Desa Lingga Raja II, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Lingga Raja II	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
188	SARLIDEN MARBUN	Pemeliharaan Jalan	Pembangunan bronjong/ tembok penahan tanah	Dusun IV, V, dan VI, 2.8166466895725977, 98.11768522655024, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Longkotan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
189	WASHINGTON NAPITUPULU	Pemeliharaan Jalan	Tembok penahan Tanah	Dusun I, 2.8447861926411284, 98.0873336718708, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Siboras	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
190	MARUASAS PURBA	Pemeliharaan Jalan	Pembangunan tembok/ pagar sekolah SD No. 034812	Dusun II, 2.857760243878977, 98.1092261063479, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Siratah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
191	BINTON PANJAITAN	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Lampu Tiang Listrik	Dusun I dan Dusun III, 2.846845693820097, 98.12827429351994, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Polling Anak-Anak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
192	JUNAIDI CIBRO	Rehab Puskesmas, Pustu dan Poskesdes	Rehap POSKESDES	Dusun II, 2.8320961894176997, 98.09987671486137, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Tungtung Batu	Dinas Kesehatan
193	ALBINE BUTAR BUTAR	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan	Dusun I, II dan III, 2.8847315856717324, 98.0222370502649, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Lae Pangaroan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
194	DORTAN BUTAR BUTAR	Pembangunan Jalan	Perbaikan Jalan Protokol Desa	Dusun III sampai dengan Dusun IV, 2.8969158749557717, 98.00846567982386, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Lae Ambat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
195	HUMITAR SIRORUS	Pembangunan Jalan	Pemeliharaan jalan ringroad	Dusun I dan Dusun IV, 2.8766698413828875, 98.0516333684159, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Bakal Gajah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
196	LIBER MANURUNG	Pembangunan Dam Parit	Pembuatan Paret Semen	Dusun I, 2.8506483098860156, 98.05262684066176, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Sumbari	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
197	SYMYON HAHAMPUN, SE	Pemeliharaan Jalan	Pembuatan Bronjong / Pembuatan Tembok Penahan Tanah	Lingkungan III, 2.8492574414566025, 98.10921141504323, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Parongil	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
198	ARION SIHALOHO	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan	Dusun III, 2.819681530125873,	Silima Pungga Pungga	Bongkaras	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
				98.10346901625007, Kab. Dairi			
199	RUDI SIANTURI	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak	Dusun II sampai Dusun III, 2.519205711297997, 98.78285132585489, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Palipi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
200	DOMU TUA MANALU	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak	Dusun I sampai dengan Dusun III, 2.836883376702344, 98.07398388889777, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Bonian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
201	SAFRIAMKO SITORUS	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Pembangunan irigasi (Bendungan Sinta Mardongan)	Dusun IV, 2.8820210605721632, 98.03287196793418, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Lae Panginuman	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
202	ANTO HUTA JULU	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Bedah rumah tidak layak huni	Dusun I, II dan III, 2.8592933735810613, 98.07656290251222, Kab. Dairi	Silima Pungga Pungga	Uruk Mblin	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
203	RUDOLF BASTIAN SITANGGANG	Pemeliharaan Jalan	LONGSORNYA JALAN PENGHUBUNG ANTAR DUSUN YANG DIAKIBATKAN BENCANA ALAM	Lae Manasan II, Desa Lingga Raja II, Kab. Dairi	Pegagan Hilir	Lingga Raja II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
204	EBEN GIRSANG	Pembangunan Jalan	Pengaspalan Jalan dari Desa menuju Desa Lingga Pasar Dengan Volume 3 X 800 M dikarenakan belum pengaspalan dan mengalami Becek pada saat keadaan Hujan	Desa Bertungen Julu, Kab. Dairi	Tigalingga	Bertungen Julu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
205	PONGAT J. PANDIANGAN	Pembangunan Jalan Pertanian	PENGASPALAN	BARISAN PANDIANGAN , Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan III	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
206	PONGAT J. PANDIANGAN	Pembangunan Jalan Pertanian	PERBAIKAN JALAN DARI BARISAN NAINGGOLAN MENUJU HUTA NAINGGOLAN	BARISAN NAINGGOLAN , Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan III	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
207	PARIHOTAN SINAGA	Pembangunan Jalan Pertanian	rusaknya jalan alternatif dari jalan protokol menuju samosir yang dimana akses jalan ini di dilalui banyak	Dusun IV, Desa Parbuluan I, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan I	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
			masyarakat untuk sektor pertanian masyarakat dan salah satu jalan tembusan menuju jalan ke kabupaten samosir				
208	GOMGOM SIMANULLANG	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak desa silumboyah menuju desa sigambir dan jalan ke SMAN1	Silumboyah 2.8322407081055694, 98.27931513917046, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
209	JAWINTO SINAGA	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak yang sulit dilalui kendaraan berlokasi di dusun Lau Kinapan sepanjang 1 km, usulannya diminta pengaspalan jalan	Dusun Lau Kinapan sepanjang 1 Km, 2.9086475472129605, 98.17599363758261, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Batu Gun Gun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
210	JAWINTO SINAGA	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak yang sulit dilalui kendaraan berlokasi sepanjang jalan menuju Kantor Camat Gunung Sitember di Desa Batu Gun Gun	Desa Batu Gun Gun, Kecamatan Gunung Sitember 2.9409384617506533, 98.17449465292397, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Batu Gun Gun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
211	PARIHOTAN SINAGA	Pembangunan Jembatan	Rusaknya Akses Jembatan Lae Renun, yang dimana jembatan tersebut adalah akses masyarakat untuk menuju lahan pertanian yang ada di Desa Parbuluan I,sehingga sangat sulit mengeluarkan hasil pertanian masyarakat karena jembatan tersebut sangat rusak parah.dan hanya jembatan tersebut satu-satunya akses masyarakat menuju lahan pertaniannya	Lumban Somaraek, Dusun II, Desa Parbuluan I, Kab. Dairi	Parbuluan	Parbuluan I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
212	JAWINTO SINAGA	Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan dikarenakan jalan berlobang dan digenangi air sepanjang 500 m di jalan protokol	Jalan Protokol Desa Batu Gun Gun, Kecamatan Gunung Sitember, 2.940970605866598, 98.17444100874748, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Batu Gun Gun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
213	GIBSON SIMARE MARE	Pembangunan Jalan	Jalan Rusak antara Dusun Gunung Tua Desa Gomit Menuju Desa Jumantuang, sehingga mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat	Desa Gomit Menuju Desa Jumantuang, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Gomit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
214	GIBSON SIMARE MARE	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak parah antara Dusun I Gunung Tua Desa Gomit menuju Desa Jumantuang sehingga menyebabkan terhambatnya aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat desa	Desa Gomit Menuju Desa Jumantuang, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Gomit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
215	MARTINA SEMBIRING	Pembangunan Jembatan	Akses Jalan menghubungkan Desa Rante Besi dan Lau Lebah terganggu yang diakibatkan jembatan lau langkas sudah rusak. Usulan :Pembangunan Jembatan Lau Langkas	Dusun Buluh Mengkal, Desa Rantai Besi, Kec. Gunung Sitember, 2.982654740268126, 98.14630827991238, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Rante Besi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
216	GIBSON SIMARE MARE	Rehabilitasi Saluran Drainase	Gorong-gorong yang rusak di jalan utama Dusun I menuju Dusun II Desa Gomit sehingga menyebabkan air tergenang dan dapat merusak jalan utama.	Desa Gomit, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Gomit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
217	HERLAN P PARDAMEAN NAINGGOLAN	Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan yang sudah rusak, banyak yang berlubang dan hancur sehingga mengganggu pengguna jalan	Desa Soban, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Soban	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
218	HERLAN P PARDAMEAN NAINGGOLAN	Pembangunan Jalan	kondisi Jalan yang rusak dan banyak yang hancur sehingga mengganggu pengguna jalan, terutama masyarakat Desa Soban yang mengakses jalan untuk mengangkut hasil Pertanian dari perladangan.	Soban-Maju, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Soban	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
219	BONTOR SIANTURI	Pembangunan Jalan	Jalan rusak,hancur,jalan berlubang-lubang kalau musim hujan tidak bisa dilewati, dan banyak genangan air.	Dusun V Sendidin menuju Desa Gomit, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Jumantuang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
220	BONTOR SIANTURI	Pembangunan Jalan	Jalan rusak,hancur,jalan berlubang-lubang kalau musim hujan tidak bisa dilewati, dan banyak genangan air.	Dusun VI Ke Dusun VII, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Jumantuang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
221	EDU OMPUSUNGGU	Pemeliharaan Jalan	Bahu jalan Longsor, dibutuhkan pembangunan TPT + Bronjong	Dusun III, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Juma Siulok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
222	EDU OMPUSUNGGU	Rehabilitasi Saluran Drainase	Saat musin hujan air akan mengalir ke jalan dan mengganggu warga dibutuhkan pembangunan paret semen	Dusun II, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Juma Siulok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
223	PARISMA MANIK	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan: Pengasapalan Jalan dari Dusun Jampalan menuju Dusun Gundaling Rusak Berat Usulan Pengaspalan Jalan Dusun Jampalan menuju Dusun Gundaling	Dusun Jampalan Desa Gundaling, Kec. Gunung Sitember 2.9702541297368157, 98.16199922169972, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Gundaling	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
224	TOMMI BERUTU	Pembangunan Dam Parit	Masalah: jalan penghubung ke dusun sepakat terganggu karena terdapat jalan longsor sepanjang 120 meter. Usulan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Sepakat Desa Lau Lebah 2.9816142682669007, 98.10913622916952, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Lau Lebah	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
225	JEPRIADI P SIMARE MARE	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan	Dusun VI Amborgang Sihombing Sepanjang 300 M, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Sosor Lontung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
226	JEPRIADI P SIMARE MARE	Pembangunan Jalan	Pengaspalan	Pengaspalan Jalan Dusun X Sibintuar Sepanjang 2000 M, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Sosor Lontung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
227	MIMBAR NELSON GINTING	Pembangunan Dam Parit	Masalah: Jalan Penghubung ke Desa Lau Cingkam sering tergenang air diakibatkan oleh tidak ada saluran pembuangan air Usulan: Pembangunan Gorong-Gorong Lau Cingkam	Lau Cingkam, Desa Gunung Sitember 2.9453327929868953, 98.16001469471675, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Gunung Sitember	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
228	MIMBAR NELSON GINTING	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan: Jalan Kabupaten dari batas desa batu gun gun sampai gunung sitember rusak berat Usulan: Pengaspalan Jalan batas Desa Batu Gungun dengan Desa Gunung Sitember	Jalan batas Desa Batu Gungun dengan Desa Gunung Sitember 2.957382610988471, 98.14233921504389, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Gunung Sitember	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
229	MIMBAR NELSON GINTING	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan: jalan dari simpang tower menuju kantor camat rusak berat	Desa Gunung Sitember 2.940992035287872,	Gunung Sitember	Gunung Sitember	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
			Usulan: Pemeliharaan Jalan dari Simpang Tower menuju Kantor Camat	98.1745053812253, Kab. Dairi			
230	MIMBAR NELSON GINTING	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan: Jalan menuju SMP 1 Gunung Sitember Rusak akibat longsor Usulan:Pembangunan TPT jalan menuju SMP N 1 GS	Jalan menuju SMP Negeri 1 Gunung Sitember, 2.9559254316332417, 98.16774509911865, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Gunung Sitember	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
231	RANDUS BANCIN	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan:Jalan batas Desa Gung Sitember menuju Desa Kendet Liang Rusak Berat Usulan: Pengaspalan jalan dari Batas Gung Sitember menuju Kendet Liang	Desa GS menuju Desa Kendit Liang , 2.916780337236375, 98.14599202224224, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Kendit Liang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
232	WAHYU DANIEL SAGALA	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak Pengaspalan Jalan protokol dari dusun 4 Liang borok menuju Desa Sosor Lontung	Dusu 4 Liang Borok, Kab. Dairi	Siempat Nempu Hulu	Lae Nuaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
233	MANGIRING SINURAT	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan: Jalan menuju dari Gapura sampai dengan Simpang Mesjid rusak berat Usulan: Pengaspalan Jalan dari Gapura Desa menuju Mesjid	Bukit Lau Kersik, Kec. Gunung Sitember 2.9138363602542787, 98.14412997986852, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Bukit Lau Kersik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
234	ULIHTA GINTING	Pembangunan Dam Parit	Masalah: Jalan Penghubung Dusun Barisan Mesin dan Dusun Pinang Baris Rusak yang diakibatkan oleh parit drainase tidak ada Usulan: Pembangunan Parit/Drainase	Dusun Barisan Mesin ke Dusun Pinang Baris Desa Tupak Raja 2.9714140131952176, 98.16149682169966, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Tupak Raja	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
235	ARLES PAKPAHAN	Pembangunan Jalan	Rusaknya akses jalan dari dusun II menuju Kecamatan Sitinjo, yang membuat masyarakat sulit untuk melakukan aktifitas terutama saat membawa hasil pertaniannya.	Desa Bangun I Dusun II, Kab. Dairi	Parbuluan	Bangun I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
236	ARLES PAKPAHAN	Pembangunan Jalan	Pengaspalann jalan dari Dusun III menuju Dusun I	Bangun I, Dusun III, Kab. Dairi	Parbuluan	Bangun I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
237	MIMBAR NELSON GINTING	Pemeliharaan Jalan	Permasalahan:tidak ada petunjuk jalan dan berpotensi mengakibatkan laka Usulan: Pengadaan Rambu2 Jalan pada Jembatan batas Desa GS dan Desa Lau Sireme	Batas Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Sireme 2.9553950512024687, 98.15468127395378, Kab. Dairi	Gunung Sitember	Gunung Sitember	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
238	TONNY SIHOMBING	Optimalisasi Saluran Drainase	Parit Sepanjang Dusun 1 dan 2 sudah rusak berat dan sangat diperlukan perbaikan	Dusun 1 dan dusun 2 Desa Bunturaja, Kab. Dairi	Siempat Nempu	Bunturaja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
239	SASTRA PINEM	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak Berat	Dusun Kutabuluh Bawah, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kuta Buluh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
240	SASTRA PINEM	Pemeliharaan Jalan	Jalan Rusak Berat	Dusun Lau Belin, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kuta Buluh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
241	ALPREDO PINEM	Pembangunan Jembatan	Karena Rawannya Akses Menuju Perladangan Masyarakat Jika Melewati Air Sungai	Dusun Butar, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Balandua	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
242	Lasner Sinurat	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias di Kawasan Lapangan UDKP Kantor Camat Sumbul	Lingkungan 4 , Kab. Dairi	Sumbul	Pagagan Julu I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
243	JUNEDI TARIGAN	Pembangunan Jalan	RUSAK BERAT	Dusun 3 , Kab. Dairi	Tanah Pinem	Harapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
244	JUNEDI TARIGAN	Pembangunan Jalan	rusak berat	Dusun 1, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Harapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
245	ARDAT GINTING	Pemeliharaan Jalan	Masyarakat Sangat Mengeluhkan Jalan Tersebut Sehingga Masyrakat Meminta Perkerasan Jalan Pertanian Tersebut Sepanjang 2 KM	Dusun Durian, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kempawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
246	ARDAT GINTING	Pemeliharaan Jalan	perlu penegrasan jalan karena masyarakat mengeluhkan jalan rusak tersebut	Dusun Kempawa, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kempawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
247	ARIANTO PINEM	Rehabilitasi Saluran Drainase	Saluran Air tidak sanggup menampung air jika hujan turun	Dusun Lau Primbon, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Lau Primbon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
248	ARIANTO PINEM	Pemasangan Lampu Jalan dan Lampu Hias	masyarakat memerlkan penerangan jalan supaya lebih aman	Dusun Lau Sungsang, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Lau Primbon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
249	BERES TARIGAN	Pembangunan Jembatan	JALAN MENUJU PERLADANGAN SUSAH DAN RAWAN KECELAKAAN	Dusun Lau Tawar, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Lau Tawar	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
250	BERES TARIGAN	Pembangunan Jalan Pertanian	rusak berat	Dusun Lau Tawar perladangan mbalmbal, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Lau Tawar	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
251	RASKAMI GINTING	Pembangunan Jalan	RUSAK PARAH	DUSUN MANGAN MOLIH, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Mangan Molih	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
252	ALEX DANER SITUNGKIR	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan jalan Rusak 1 km	silalahi 3 dusun I,II,III,IV, Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi III	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
253	ALEX DANER SITUNGKIR	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	jaringan irigasi rusak parah	silalahi 3 dusun I,II,III, Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi III	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
254	ALEX DANER SITUNGKIR	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak	siallahi 3, jalan kantor camat silahisabungan, Kab. Dairi	Silahisabungan	Silalahi III	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
255	SURAEDY SEMBIRING	Optimalisasi Saluran Drainase	disaat hujan lokasi rumah sekolah SD sering terjadi banjir dan dapat menyebabkan kerusakan pada jalan protokol	Dusun Rambingen, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pasir Mbelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
256	SURAEDY SEMBIRING	Optimalisasi Saluran Drainase	Disaat hujan Lokasi tersebut sering terjadi banjir dan menyebabkan kerusakan pada Badan Jalan Protokol	Dusun Pasir Mbelang, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pasir Mbelang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
257	SURAEDY SEMBIRING	Pengadaan Pupuk	Masyarakat sulit medapatkan Pupuk akibat nya hasil panen tidak maksimal	Dusun Pasir Mbelang, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pasir Mbelang	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
258	BENARDUS SINAGA	Pembangunan Jalan	BELUM PERKERASAN SEPANJANG JALAN DESA SINAR PAGI	Dusun Sinar Pagi, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Sinar Pagi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
259	BENARDUS SINAGA	Pemeliharaan Jalan	BELUM ADA PENGASPALAN SEPANJANG JALAN PROTOKOL DESA SINAR PAGI	Dusun Sinar Pagi, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Sinar Pagi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
260	NOVIANUS SEMBIRING	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak berat sepanjang 2 Km dengan biaya 1 M	Dusun Sigedang, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Sukadame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
261	FERDINAN SIMAMORA	Rehabilitasi Saluran Drainase	tertutup dan rusak parah	Jalan SM.Raja bawah Depan Gereja GBKP Tigalingga Desa Tigalingga ,Kec . Tigalingga Kab. Dairi, Kab. Dairi	Tigalingga	Tigalingga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
262	AGISTO PINEM	Pembangunan Jalan Pertanian	Jika akses jalan pertanian dibangun dan dapat digunakan dengan baik, maka perekonomian masyarakat semakin meningkat , Pengaspalan Jalan Pertanian Ladang Lau Deso	Dusun Liren, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kuta Gamber	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
263	AGISTO PINEM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Agar saluran air bersih menuju ke penampungan air bersih dapat berjalan dengan lancar	Dusun Kuta Gamber, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Kuta Gamber	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
264	SAHALA PINAYUNGAN	Pembangunan Jalan	Diperlukan Pembangunan Jalan Aspal Karna akses Jalan Keluar Masuk Menuju Desa Lau Njuhar 1 Sangat Rusak Karna Itu Hasil Dari Perekonomian Masyarakat Sangat Minim Di Mohonkan Untuk Sagera Di Analisir	Dusun Lau Njuhar 1, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Lau Njuhar I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
265	DEWI SARTIKA TUMANGGER	Pembangunan Dam Parit	tidak adanya pembuangan air /drainase sehingga air tergenang dibadan jalan sepanjang 1 Km dari Liang Jering menuju mbal-mbal	Dusun Liang Jering, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Liang Jering	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
266	MHD. AMIN PINEM	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak dari Desa Liang Jering menuju Desa Alur Subur sepanjang ± 12 Km	Desa Alur Subur menuju Desa Liang Jering, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Alur Subur	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
267	SAMUEL TARIGAN	Pemeliharaan Jalan	Jalan rusak dari Desa Tanah Pinem menuju Desa Kempawa sepanjang 7 Km	Desa Tanah Pinem menuju Desa Kempawa, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Tanah Pinem	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
268	DANIEL SAGALA	Pemeliharaan Jalan	jalan rusak dari Simpang Dusun Lau Petundal menuju dusun Lau Petundal sepanjang 1,5 Km	Dusun Lau Petundal, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pamah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
269	BUDI TARIGAN	Pemeliharaan Jalan	Badan jalan longsor uk.2 m x 7 m	Dusun Buluh Sema, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Gunung Tua	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
270	LOSTA SEMBIRING	Pemeliharaan Jalan	PERLU PENGASPALAN DAN TEMBOK PENAHAN TANAH SEPANJANG 3 KM PERMASALAHAN ,JALAN MENUJU DESA RENUN SANGAT RUSAK PARAH.	DESA RENUN, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Renun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
271	LOSTA SEMBIRING	Pemeliharaan Jalan	PENTINGNYA BRONJONG SUNGAI DI KAWASAN ALIRAN SUNGAI LAU RENUN SEPANJANG 100 METER. PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI,MENGAKIBATKAN BANJIR DI KAWASAN RUMAH WARGA.	DESA RENUN, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Renun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
272	NOVIANUS SEMBIRING	Pemeliharaan Jalan	penghubung jalan sudah rusak	DESA SUKA DAME, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Sukadame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
273	JASRI MAHA	Pemeliharaan Jalan	PENTINGNYA BRONJONG SUNGAI DI KAWASAN ALIRAN SUNGAI LAU RENUN SEPANJANG 500 METER. PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI,MENGAKIBATKAN BANJIR DI KAWASAN RUMAH WARGA.	DESA PASIR TENGAH, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pasir Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
274	JASRI MAHA	Rehabilitasi Saluran Drainase	Parit sudah rusak sehingga air meluap ke jalan terutama pada saat musim hujan. Rute dari Dusun Pasir Tengah ke Dusun Simpang Tiga (Desa Pasir Tengah - Desa Lau Peske)	DESA PASIR TENGAH, Kab. Dairi	Tanah Pinem	Pasir Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
275	SUNARDI	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Jalan dan Pembangunan Paret Beton di Desa Lau Bagot sepanjang 350 meter (Jalan Rusak berlubang, banyak tergenang air)	Desa Lau Bagot Dusun Tanjung Selamat , Kab. Dairi	Tigalingga	Lau Bagot	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
276	PASTI MATANARI	Pemeliharaan Jalan	Pengaspalan Jalan Kabupaten di Desa Ujung Teran sepanjang 7 Km (Jalan Rusak Berlubang)	dari Jembatan Lau Kersik Dusun Ujung Teran menuju Dusun Matanari , Kab. Dairi	Tigalingga	Ujung Teran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
277	IRWAN TARIGAN	Pemeliharaan Jalan	Jalan Kabupaten di Desa Sarintonu sepanjang 1 Km (Jalan Rusak berlubang)	Desa Sarintonu menuju lau pangguh , Kab. Dairi	Tigalingga	Sarintonu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
278	TUMPAK MARIHOT LUMBANTOBING	Pemeliharaan Jalan	Kerusakan Jalan yang menyebabkan Banyak Kecelakaan	Desa Buluduri, Kab. Dairi	Lae Parira	Buluduri	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
279	TUMPAK MARIHOT LUMBANTOBING	Pengadaan Bibit/Benih tanaman	Harga Bibit yang Mahal	Desa Buluduri , Kab. Dairi	Lae Parira	Buluduri	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
280	MANUSUN SIHOMBING	Pemeliharaan Jalan	akses jalan desa semua sudah tergenang air sepanjang 1500 m	Jalan dusun rumah ijuk sampai dusun kaban dollong, Kab. Dairi	Lae Parira	Kentara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
281	MANUSUN SIHOMBING	Pembangunan Jalan Pertanian	Tidak adanya akses jalan ke lahan pertanian dan sumber air minum masyarakat desa kentara, laeparira	Dusun kaban dollong, Kab. Dairi	Lae Parira	Kentara	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
282	MANUSUN SIHOMBING	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	Pendangkalan saluran irigasi dari desa botik horbo menuju desa kentara dusun kaban dollong	Dusun kaban dollong, Kab. Dairi	Lae Parira	Kentara	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
283	NURMASI SIHOMBING	Pemeliharaan Jalan	Kondisi jalan rusak berat perlu dilakukan rehab pengaspalan jalan parongil - sidikalang	Dusun Satu Desa Lumban Sihite , Kab. Dairi	Lae Parira	Lumban Sihite	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
284	NURMASI SIHOMBING	Rehabilitasi Saluran Drainase	Kondisi parit jalan protokol sudah rusak berat saluran air tidak dapat mengalir dengan optimal sehingga air mengalir ke badan jalan dan masuk ke pemukiman masyarakat dan berdampak ke kondisi kerusakan aspal	Dusun Satu Desa Lumban Sihite, Kab. Dairi	Lae Parira	Lumban Sihite	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
285	NURMASI SIHOMBING	Pemeliharaan Jalan	Jalan lintas antara Desa Lumban Sihite menuju Desa Pandiangan kondisi aspal jalan sudah rusak berat sangat berbahaya di lintasi masyarakat dikarenakan kondisi bentuk jalan landai sangat berdampak ke pengangkutan hasil bumi dan UMKM	Dusun Tiga Desa Lumban Sihite, Kab. Dairi	Lae Parira	Lumban Sihite	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL
286	FILISTAR SITANGGANG	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Sekolah SD 030316 Sukandebi memiliki perangkat komputer, namun belum memiliki akses internet berupa wifi, serta lokasi desa Sukandebi tergolong susah jaringan. Jadi membutuhkan jaringan internet, agar memudahkan dalam pembelajaran berbasis teknologi	Jalan pendidikan, dusun Sukandebi, desa Sukandebi, Kab. Dairi	Tigalingga	Sukandebi	Dinas Pendidikan
287	FILISTAR SITANGGANG	Optimalisasi Saluran Drainase	Panjang saluran drainase tidak memadai, sehingga tidak semua permukiman memiliki saluran drainase, hingga pada saat hujan menyebabkan aliran air pembuangan tergenang dihalaman dan membawa sampah ke jalan raya	Dusun barisan Sukandebi, Kab. Dairi	Tigalingga	Sukandebi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
288	FILISTAR SITANGGANG	Pemeliharaan Jembatan	Jembatan di Dusun Bertungan Jehe II dimana pijakan atau alas yg terbuat dari kayu sudah lapuk, jadi cukup membahayakan. Jembatan ini salah satu akses warga menuju ladang dan jalur menuju desa lainnya.	Dusun Bertungan Jehe II, Desa Sukandebi, Kab. Dairi	Tigalingga	Sukandebi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
289	FILISTAR SITANGGANG	Pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah	Kurangnya ketersediaan alat olahraga terutama bola yg layak seperti bola kaki, bola futsal, bola voli dalam pengajaran di SD 030316 Sukandebi	SD 030316 Sukandebi, jalan pendidikan, Dusun Sukandebi, Desa Sukandebi, Kab. Dairi	Tigalingga	Sukandebi	Dinas Pendidikan

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA